



# PERUBAHAN<sup>®</sup> RPJMD

2019 - 2024

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

2019 - 2024

Kabupaten Sumba Barat Daya





## BUPATI SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 1 TAHUN 2022

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019- 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SUMBA BARAT DAYA.

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, maka penyelenggaraan pembangunan perlu dilakukan secara terencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan nasional;
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalami perubahan yang mendasar sehingga berdampak pada ketidaksinkronan yang terjadi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024 sehingga perlu dilakukan perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024 agar sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya, maka berdasarkan hasil pengendalian atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024, perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024;

#### Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengenah daerah kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 001);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA dan

#### BUPATI SUMBA BARAT DAYA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019-2024.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 001) diubah sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 5 (lima) Tahun.
- Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi,
- Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
- Bupati adalah Bupati Sumba Barat Daya.
- 11.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintahan Daerah untuk mencapai tujuan.

- Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- 13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
- 14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
- 15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
- Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- 17. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Kepala Bapelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya..

### Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Perubahan RPJMD dimaksudkan untuk:
  - a. memberikan arah dan pedoman pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
  - b. mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
  - sebagai pedoman penyusunan RKPD selama tahun 2023 2024; dan
  - d. menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.

#### (2) Tujuan Perubahan RPJMD meliputi:

a. untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah; 😽

- sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan masa kepemimpinan kepala daerah;
- sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;
- d. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- 3. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

# BAB IV SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN RPJMD

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
  - e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
  - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - BAB IX Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) BAB V dihapus
- (4) BAB VII dihapus

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ditetapkan di Tambolaka

paga panggat, 23 Juni 2022

MPATI SUMBA BARAT DAYA,

CORNELUS KOOI METE 88

Diundangkan di Tambolaka

pada tanggal, 27 Juni 2022

PASERETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

FRANSISKUS MADILALO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA : NOREG 01/2022

#### PENJELASAN

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 1 TAHUN 2022

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019-2024

#### UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan instrumen perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini sangat penting guna terwujudnya pembangunan di daerah yang diselenggarakan secara terencana, sinergis dan berkelanjutan demi mewujudkan cita kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.445,32 km² meliputi 11 (Sebelas) wilayah kecamatan yang terdiri dari 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) desa dan 2 (Dua) kelturahan. Kecamatan - kecamatan dimaksud adalah Kodi, Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, Kodi Utara, Kota Tambolaka, Loura, Wewewa Barat, Wewewa Selatan, Wewewa Tengah, Wewewa Timur dan Wewewa Utara. Luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kecamatan Kodi Utara memiliki luas wilayah paling besar yakni 243,82 km² atau 16,87% dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya urutan kedua adalah Kecamatan Wewewa Selatan yakni 174,14 km² atau 12,05 % dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil yakni Kecamatan Wewewa Utara dengan luas wilayah 63,26 km² atau 4,38% dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam perjalanan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 – 2024 mengalami kondisi tidak sinergis dengan perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal tersebut dikarenakan terjadi perubahan yang mendasar pada perencanaan pembangunan nasional yang kemudian berdampak pada perubahan perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disisi lain, secara yuridis normatif terjadi perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan erat dengan substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 – 2024. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah mengakibatkan perlu adanya penyesuaian Rencang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 – 2024.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 001



#### KATA PENGANTAR

Amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mewajibkan daerah otonom kabupaten/kota maupun provinsi untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, melalui mekanisme dan prosedur yang diamanatkan dalam berbagai regulasi tersebut.

Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Perundangan tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) suatu kabupaten, secara substansif mencakup: Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Penutup.

RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya 2019 - 2024, merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya yang diselaraskan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan RPJMD (Musrenbang RPJMD). Komitmen tersebut, terutama terhadap Visi – Misi – Agenda – Strategi - Indikator Kinerja Daerah dan berbagai substansi lainnya dalam periode perencanaan tahun 2019 - 2024. Kesadaran kolektif dari seluruh pemangku kepentingan pambangunan daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya, tidak dapat diingkari merupakan modal dasar untuk mengimplementasikan Program Prioritas

i

yang dijabarkan dalam 7 (Tujuh) Jembatan Emas yang merupakan Agenda Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2019 - 2024, maka Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Sumba Barat Daya segera menindaklanjuti dengan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

Visi - Misi - Agenda - Program Prioritas dapat dijabarkan secara operasional sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kontrak kerja dan kinerja PD, akan lebih realistis dan terukur capaiannya bila dijabarkan secara runtun, obyektif, sinkron, sinergis dan sistematis, karena RPJMD merupakan *grand concept*, yang menuntut komitmen dan konsistensi dari perangkat daerah untuk dioperasionalkan secara teknis.

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2019 - 2024 dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak baik secara individu maupun kelembagaan. Atas semua dukungan dan partisipasi tersebut disampaikan terima kasih.

Semoga Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2019 - 2024 dapat berguna bagi semua pihak terutama masyarakat Sumba Barat Daya.

Tambolaka, 26 November 2021

A BUPATI SUMBA BARAT DAYA.

dr. KORNELINS KODI METE

#### **DAFTAR ISI**

KATA PE	NGANTARi
DAFTAR	ISIiii
DAFTAR	TABELvii
DAFTAR	GAMBARxvi
DAFTAR	SINGKATAN xvii
BAB I	1
PENDAH	ULUAN1
1.1	Latar Belakang1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan5
1.3	Hubungan Antar Dokumen9
1.4	Maksud dan Tujuan
1.5	Sistematika Penulisan
	14
GAMBAR	AN UMUM KONDISI DAERAH
2.1	Aspek Geografi dan Demografi
2.1.	1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2.1.	2 Rencana Struktur Ruang Wilayah
2.1.	Rencana Pola Ruang Wilayah32
2.1.	4 Wilayah Rawan Bencana
2.1.	5 Demografi
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat41
2.2.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi41
2.2.	2 Fokus Kesejahteraan Sosial
2.2.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga54
2.3	Aspek Pelayanan Umum55
2.3.	1 Urusan Wajib55
2.3.	2 Urusan Pilihan
2.3.	3 Penunjang Urusan Pemerintahan137
2.4	Aspek Daya Saing Daerah

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Semester II Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD
BAB III206
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu206
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD206
3.1.2 Neraca Daerah
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
3.2.2 Analisis Pembiayaan
3.3 Kerangka Pendanaan
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja217
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan
BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH227
4.1 Permasalahan Pembangunan
4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat227
4.1.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
4.1.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
4.1.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga229
4.1.2 Aspek Pelayanan Umum
4.1.2.1 Urusan Wajib229
4.1.2.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar229
4.1.2.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar232
4.1.2.1.3 Urusan Pilihan
4.1.2.1.4 Penunjang Urusan Pemerintahan
4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah244
4.2 Analisis Isu - Isu Strategis245
4.2.1 Analisis Lingkungan Strategis245
4.2.1.1 Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal245
4.2.1.1.1 Analisis Lingkungan Internal

	4.2.1.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal2	46
	4.2.1.1.2.1 Isu Internasional dan Regional, Sustainable  Development Goals (SDGs)	46
	4.2.1.1.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	48
	4.2.1.1.2.3 Kebijakan Pembangunan Nasional di Wilayah NTT2	56
	4.2.1.1.2.4 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Provinsi (P-RPJMD) 2018-20232	
	4.2.1.1.2.5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009-20252	66
4.3 Isı	u Strategis Pembangunan Daerah2	69
4.3 dan	.1 Membangun Masyarakat Sumba Barat Daya yang Cerdas, Seba Berdaya Saing Tinggi	
4.3	<ul><li>.2 Pengembangan Infrastruktur Mendukung Kehidupan yang Lay</li><li>271</li></ul>	ak
4.3	.3 Pemantapan Tata kelola Pemerintahan2	72
4.3	.4 Percepatan Pemulihan Perekonomian Daerah2	73
4.3	.5 Percepatan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin2	76
4.3	.6 Pemantapan Konektivitas dan Lingkungan Hidup2	77
4.3	.7 Pemantapan Sistem Perlindungan Sosial2	78
BAB V	2	81
VISI, MI	SI, TUJUAN, DAN SASARAN2	81
5.1	Visi	81
5.2	Misi2	82
5.3 RTRW	Keselarasan Visi Misi Perubahan RPJMD dengan RPJPD, V dan RPJMN2	84
5.3	.1 Keselarasan Visi Misi Perubahan RPJMD dengan RPJPD2	84
5.3	.2 Keselarasan Perubahan RPJMD dengan RTRW2	85
5.3		85
5.4	Tujuan dan Sasaran2	86

BAB VI .	291
STRATE	GI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .291
6.1	Strategi291
6.2	Arah Kebijakan
6.3	Program Pembangunan Daerah303
1.	Desa Bercahaya
2.	Desa Berair
3.	Desa Berkecukupan Pangan
4.	Desa Sehat
5.	Desa Cerdas
6.	Desa Tenteram308
7.	Desa Wisata
BAB VII	331
KERANG	KA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH	I331
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan
7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan
Penda	naan
	366
	A PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH366
8.1	Indikator Kinerja Utama
8.2	Indikator Kinerja Kunci
BAB IX .	
PENUTU	TP393
9.1	Kaidah Pelaksanaan393
9.2	Pedoman Transisi

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Pencapaian Kinerja Daerah Tahun 20204
Tabel 1. 2 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan
Tabel 2. 1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Sumba
Barat Daya
Tabel 2. 2 Gambaran Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) 17
Tabel 2. 3 Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Sumba Barat Daya
Menurut Kecamatan
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020
39
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 40
Tabel 2. 6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 42
Tabel 2. 7 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 43
Tabel 2. 8 Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sumba
Barat Daya44
Tabel 2. 9 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB ADHB dan ADHK
Tahun 2018 s.d 2020 Kabupaten Sumba Barat Daya45
Tabel 2. 10 Nilai Inflasi Rata - Rata Tahun 2020 Kabupaten/Kota
Waingapu
Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2016 s.d 2020
Tabel 2. 12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penduduk Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 202048
Tabel 2. 13 Persentase Angka Melek Huruf Kabupaten Sumba Barat
Daya Tahun 2019 s.d 2020
Tabel 2. 14 Rata - Rata Lama dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 202050
Tabel 2. 15 Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Sumba Barat
Daya Tahun 2016 s.d 2020 50
Tabel 2. 16 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2018 s.d 202050
Tabel 2. 17 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Berumur 15 Tahun
Keatas) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 202051

Tabel 2. 18 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumba
Barat Daya Tahun 2021
Tabel 2. 19 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 52
Tabel 2. 20 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2020 53
Tabel 2. 21 Produksi Perkebunan Kabupaten Sumba Barat DayaTahun
2018 s.d 2020
Tabel 2. 22 Populasi Peternakan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun
2018 s.d 2020
Tabel 2. 23 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 201754
Tabel 2. 24 Angka Partistipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar
(APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2019 s.d 2020
Tabel 2. 25 Rasio Murid dan Guru pada Tingkat Sekolah Dasar 56
Tabel 2. 26 Rasio Murid - Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 57
Tabel 2. 27 Data Rombel Kabupaten Sumba Barat Daya -
Dapodikdasmen
Tabel 2. 28 Data Peserta Didik Kabupaten Sumba Barat Daya -
Dapodikdasmen
Tabel 2. 29 Data Guru Kabupaten Sumba Barat Daya - Dapodikdasmen
60
Tabel 2. 30 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 63
Tabel 2. 31 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 64
Tabel 2. 32 Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM* Menurut Kecamatan
dan Puskesmas Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 66
Tabel 2. 33 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 s.d 2018 67
Tabel 2. 34 Rasio Rumah Sakit, Tenaga paramedis dan Tenaga
Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 35 Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Komplikasi Neonatal
yang Ditangani Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020

Tabel 2. 36 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 37 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 202073
Tabel 2. 38 Cakupan Balita Gizi Kurang dan Balita Kurus Mendapat
Perawatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 serta Cakupan
Balita Stunting Agustus 2021
Tabel 2. 39 Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib 3, Polio 4, Campak/Mr dan
Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Menurut Jenis Kelamin Kecamatan
dan Puskesmas di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 76
Tabel 2. 40 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 202078
Tabel 2. 41 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
TBC BTA Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 79
Tabel 2. 42 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
DBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 80
Tabel 2. 43 Cakupan Puskesmas Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun
2018 s.d 202081
Tabel 2. 44 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Sumba Barat
Daya Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 45 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 46 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Sumba Barat
Daya Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 47 Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat IMD Dan Pemberian ASI
Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Tahun 2020 88
Tabel 2. 48 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 89
Tabel 2. 49 Proporsi Jumlah Suspek Malaria yang teridentifikasi positif
Malaria Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 202091
Tabel 2. 50 Proporsi Jumlah Penderita HIV/AIDS berdasarkan kelompok
umur di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 92
Tabel 2. 51 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 202093
Tabel 2. 52 Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s d 2020

Tabel 2. 53 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 202094
Tabel 2. 54 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 202095
Tabel 2. 55 Jaringan Irigasi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018
s.d 202096
Tabel 2. 56 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 57 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 202098
Tabel 2. 58 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 202099
Tabel 2. 59 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung
dengan PSU Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 s.d 2019 101
Tabel 2. 60 Rasio Personil Satuan Polisi Pamong Praja terhadap
Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya 101
Tabel 2. 61 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial, PMKS
yang Tertangani, PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk
Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta PMKS yang Menerima Program
Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau
Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya di Kabupaten Sumba Barat
Daya Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 62 Persentase Panti Sosial dan Wahana Kesejahteraan Sosial
Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun
2018 s.d 2020
Tabel 2. 63 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial
Selama Masa Tanggap Darurat dan Korban Bencana yang Dievakuasi
dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 103
Tabel 2. 64 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut
Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 104
Tabel 2. 65 Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja per Tahun dan Besaran
Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020104
Tabel 2. 66 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Kabupaten Sumba Barat Dava Tahun 2018 s.d 2020 105

Tabel 2. 67 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Keselamatan dan
Perlindungan Kerja dan Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta
Program Jamsostek di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d
2020
Tabel 2. 68 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi Berbasis Masyarakat dan Pelatihan Kewirausahaan di
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 106
Tabel 2. 69 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumba
Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 70 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keberhasilan
Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 71 Ketersediaan Pangan Utama, Energi dan Protein per Kapita
serta Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Sumba
Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 109
Tabel 2. 72 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2018 110
Tabel 2. 73 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sumba
Barat Daya Tahun 2016 s.d 2017 110
Tabel 2. 74 Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2015 s.d 2017
Tabel 2. 75 Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2019111
Tabel 2. 76 Timbunan Sampah yang Ditangani, Persentase Cakupan
Area Pelayanan, Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 113
Tabel 2. 77 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 78 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa
yang Baik
Tabel 2. 79 Rata - Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK, Persentase PKK
Aktif, Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun
2017 s.d 2019
Tabel 2. 80 Persentase Peserta KB Aktif Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2016 s.d 2020

Tabel 2. 81 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan
Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun
2016 s.d 2020
Tabel 2. 82 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum, Jumlah Uji Kir
Angkutan Umum, Jumlah Pelabuhan Laut, Jumlah Orang/Barang yang
Terangkut Angkutan Umum, dan Jumlah Orang/Barang melalui
Dermaga per Tahun di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 s.d
2020
Tabel 2. 83 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Sumba Barat
Daya Tahun 2016 s.d 2020
Tabel 2. 84 Persentase Koperasi Aktif dan Persentase Usaha Mikro dan
Kecil aktif di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020 120
Tabel 2. 85 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) dan
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 86 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat
Daya Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 87 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 88 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif, dan Persentase
Wirausaha Muda
Tabel 2. 89 Cakupan Pembinaan Olahraga, Jumlah Atlet Berprestasi dan
Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018
s.d 2020
Tabel 2. 90 Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi,
Buku Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka dan Buku PDRB
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 s.d 2020 124
Tabel 2. 91 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Jumlah
Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi, dan Persentase
Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu di Kabupaten Sumba Barat
Daya Tahun 2016 s.d 2020
Tabel 2. 92 Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun dan Rasio
Perpustakaan per Satuan Penduduk serta Jumlah Koleksi Judul Buku
Perpustakaan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020 125
Tabel 2. 93 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara
Baku, Persentase Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan pada
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Dava Tahun 2017 s.d 2019 126

Tabel 2. 94 Capaian Kinerja Bidang Perikanan Kabupaten Sumba Barat
Daya Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 95 Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 96 Objek Wisata di Kabupaten Sumba Barat Daya 129
Tabel 2. 97 Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB dan Cakupan
Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d
2020
Tabel 2. 98 Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 99 Produksi Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun
2018 s.d 2020
Tabel 2. 100 Populasi Peternakan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun
2018 s.d 2020
Tabel 2. 101 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2017 s.d 2019
Tabel 2. 102 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 135
Tabel 2. 103 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Sumba
Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 104 Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD,
RKPD dan RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2019 s.d 2021
Tabel 2. 105 Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD,
Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD, Kesesuaian
Rencana Pembangunan dengan RTRW pada Pemerintah Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 106 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dan Ketepatan
Waktu Penetapan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d
2020
Tabel 2. 107 Persentase Program/Kegiatan APBD Kabupaten Sumba
Barat Daya yang Tidak Terlaksana Tahun 2018 s.d 2020 139
Tabel 2. 108 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Formal dan Pelatihan Struktural dan jumlah ASN berdasarkan pangkat
pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Tabel 2. 109 Persentase Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasi, serta Jabatan Fungsional Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 110 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, dan
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan pada Pemerintah Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 111 Persentase Tindak Lanjut Temuan oleh Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 142
Tabel 2. 112 Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat -
Alat Kelengkapan DPRD, Pengintegrasian Program - Program Kerja
DPRD dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD, dan
Pengintegrasian Program - Program Kerja DPRD dalam Dokumen
Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat
Daya Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 113 Pengeluaran Rumah Tangga per kapita Kabupaten Sumba
Barat Daya Tahun 2019 dan 2020
Tabel 2. 114 Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2021
Tabel 2. 115 Capaian Sanitasi dan Air Minum Tahun 2021 Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2021
Tabel 2. 116 Rasio Elektrifikasi PLN
Tabel 2. 117 Data Kamar dan Tempat Tidur Hotel di Kabupaten Sumba
Barat Daya Tahun 2021
Tabel 2. 118 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha di
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021
Tabel 2. 119 Data Fasilitas Sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 120 Data jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja
di Kabupaten Sumba Barat Daya149
Tabel 2. 121 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 2. 122 Rasio ketergantungan Penduduk Kabupaten Sumba Barat
Daya Tahun 2020
Tabel 2. 123 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai Semester II Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

Tabel 3. 1 Rata - Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020 208
Tabel 3. 2 Rata - Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sumba
Barat Daya Tahun 2015 s.d 2019
Tabel 3. 3 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020 213
Tabel 3. 4 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020
Tabel 3. 5 Perkembangan Defisit APBD Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2016 s.d 2020
Tabel 3. 6 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Sumba
Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020
Tabel 3. 7 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024219
Tabel 3. 8 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024
Tabel 3. 9 Proyeksi Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024 220
Tabel 3. 10 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2022 s.d 2024
Tabel 3. 11 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2022 s.d 2024
Tabel 3. 12 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024 224
Tabel 3. 13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun
2022 s.d 2024
Tabel 4. 1 Visi, Misi, Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan 2020
- 2024
Tabel 4. 2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJMN
untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024
Tabel 4. 3 Koridor Pertumbuhan Nusa Tenggara Timur
Tabel 4. 4 Indikator Makro Target RPJMD Provinsi NTT pada Tahun
2019-2023
Tabel 4. 5 Arah Kebijakan Provinsi NTT

Tabel 5. 1 Penjelasan Misi Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2019 - 2024
Tabel 5. 2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Indikator
dan Target Kinerja
Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Tahun 2019 – 2024
Tabel 6. 2 Arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019 – 2024
Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Tahun 2019 – 2024
Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Sumba Barat Daya
Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan
Pendanaan
Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumba Barat
Daya Tahun 2019 – 2024
Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah/Kunci terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat
Dava Tahun 2019 – 2024

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Bagan Alur Hubungan Perubahan RPJMD dengan
Dokumen Rencana Lainnya
Gambar 1. 2 Hubungan Perubahan RPJMD dengan Dokumen RTRW 9
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya
Gambar 2. 2 Posisi Geostrategis Kabupaten Sumba Barat Daya 16
Gambar 2. 3 Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Sumba Barat
Daya
Gambar 2. 4 Peta Pola Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya 38
Gambar 2. 5 Peta Risiko Ancaman Bencana Kabupaten Sumba Barat
Daya39
Gambar 2. 6 Rasio Murid dan Guru pada Tingkat Sekolah Dasar 56
Gambar 2. 7 Rasio Murid dan Guru pada Tingkat Sekolah Menegah
Pertama57
Gambar 2. 8 Wisata Alam Kabupaten Sumba Barat Daya
Gambar 2. 9 Pasola
Gambar 2. 10 Rumah Adat
Gambar 5. 1 Keselarasan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupater
Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 dengan RPJPD Kabupater
Sumba Barat Daya Tahun 2009 – 2025
Gambar 5. 2 Keselarasan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupater
Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 dengan RPJMN Tahun 2020 -
2024

#### **DAFTAR SINGKATAN**

2T Dua Kali Tidak Naik

3A Amenitas, Aksesibilitas dan Akomodasi

3R Reduce, Reuse, Recycle

ADHB Atas Dasar Harga Berlaku ADHK Atas Dasar Harga Konstan

AIDS Aquiared Immuno Devisiency Syndrome

AKB Angka Kematian Bayi AKI Angka Kematian Ibu

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBDes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

API Annual Parasite Incidence
APK Angka Partistipasi Kasar

APM Angka Partistipasi Murni

ASN Aparatur Sipil Negara

Balita Bawah Lima Tahun

Bapelitbangda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah

BB/TB Berat Badan dengan Tinggi Badan

BB/U Berat Badan dengan Umur

BGM Bawah Garis Merah
BKB Bina Keluarga Balita
BKL Bina Keluarga Lansia
BKR Bina Keluarga Remaja

BPK Badan Pemeriksa Keuangan

BTA Bakteri Tahan Asam

BTS Base Transceiver Station

CAT Cekungan Air Tanah
DAK Dana Alokasi Khsusus

DAS Daerah Aliran Sungai
DAU Dana Alokasi Umum

DBD Demam Berdarah Dengue

DBH Dana Bagi Hasil DI Daerah Irigasi

Diskominfo Dinas Komunikasi dan Informatika

Dispora Dinas Pemuda dan Olahraga

DJJ Denyut Jantung Janin

DOTS Directly, Observed, Treatment, Short Course

DP3AP2KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DPL Diatas Permukaan Laut

DPR Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

EBT Energi Baru Terbarukan

GGD Guru Garis Depan

GPBM Gerakan Penanaman Berbasis Masyarakat

Ha Hektar

HAM Hak Asasi Manusia

HB Harga Berlaku

HIV Human Immunodeficiency Virus

HK Harga Konstan

ICT Information and Communications Technology

IDG Indeks Pemberdayaan Gender

IDL Imunisasi Dasar Lengkap
IKK Indikator Kinerja Kunci
IKU Indikator Kinerja Utama

IPG Indeks Pembangunan Gender

IPLT Instalansi Pengelolaan Limbah Terpadu

IPM Indeks Pembangunan ManusiaJamsostek Jaminan Sosial Tenaga KerjaJKP Jaringan Jalan Kolektor PrimerJLP Jaringan Jalan Lokal Primer

K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

K4 Kunjungan Ke - 4

KB Keluarga Berencana

Kesbangpol Kesatuan Bangsa dan Politik

KIA Kesehatan Ibu Dan Anak

KK Kepala Keluarga

KKN Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

KM Kilometer

KMS Kartu Menuju Sehat

KPU Komisi Pemilihan Umum

KTP Kartu Tanda Penduduk

KtP/A Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

KUBE Kelompok Usaha Bersama

Lansia Lanjut Usia

LAPOR! Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

LILA Lingkar Lengan Atas

LKD Lembaga Kemasyarakatan Desa LPP Laju Pertumbuhan Penduduk

LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

M Meter

MA Madrasah Aliyah

MDGs Millennium Development Goals

MHA Masyarakat Hukum Adat

MI Madrasah Ibtidaiyah MTs Madrasah Tsanawiyah

Nakertrans Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NRI Network Readiness Indeks

NTT Nusa Tenggara Timur PAD Pendapatan Asli Daerah

PB Perjanjian Bersama
PD Perangkat Daerah

PDRB Produk Domestik Regional Bruto

Perda Peraturan Daerah

Perkada Peraturan Kepala Daerah

PKK Program Kesejahteraan Keluarga

PKL Pusat Kegiatan Lokal

PLTA Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air

PLTB Pengembangan Pembangkitan Listik Tenaga Bayu
PLTD Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Disel
PLTG Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas

PLTMH Pengembangan Penbangkitan Listrik Tenaga Mikro

Hidro

PLTS Pengembangan Pembangkitan Listrik Tenaga Surya

PMA Penanaman Modal Asing

PMDN Penanaman Modal Dalam Negeri

PMKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PMPTSP Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PNS Pegawai Negeri Sipil

Posyandu Pos Pelayanan Terpadu

PPG Pendidikan Profesi Guru

PPI Pusat Pendaratan Ikan

PPK Pusat Pelayanan Kawasan

PPKBD Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

PPL Pusat Pelayanan Lingkungan

PPLHD Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah

PSN Pemberantasan Sarang Nyamuk

PSU Prasarana Sarana Utilitas

PUPR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PUS Pasangan Usia Subur

Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat

Renja Rencana Kerja

Renstra Rencana Strategis

Riskesdas Riset Kesehatan Dasar

RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rp Rupiah

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPPLH Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

RTH Ruang Terbuka Hijau

RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah

SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SatPol PP Satuan Polisi Pamong Praja

SD Sekolah Dasar

SDGs Sustainable Development Goals

SDIDTK Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang

SKTM Surat Keterangan Tidak Mampu

SMP Sekolah Menengah Pertama SOP Standar Operasi Prosedur

SP4N Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional

SPAL Sistem Pengelolaan Air Limbah
SPAM Sistem Penyediaan Air Minum

SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPM Standar Pelayanan Minimal

SpOG Spesialis Kebidanan dan Kandungan STBP Survei Terpadu Biologis dan Perilaku

STO Satuan Telepon Otomat

SUTM Salura Udara Tegangan Menengah
SUTR Saluran Udara Tegangan Rendah
TBC BTA Tuberkolosis Bakteri Tahan Asam

TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi

TPA Tempat Pembuangan Akhir

TPAK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPI Tempat Pelelangan Ikan

TPST Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

TPT Tingkat Pengangguran Terbuka
UCI Universal Child Immunisation
Uji KIR Pengujian Kendaraan Bermotor
UMKM Usaha Mikro, Kecil, Menengah

UPPKS Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

UPT Unit Pelaksana Teknis

UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah

UU Undang - Undang

VCT Voluntary, Conselling, and Testing

WDP Wajar Dengan Pengecualian
WHO World Health Organization

WKSBM Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

WTP Wajar Tanpa Pengecualian



# BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. dan Pemerintah daerah harus menyusun menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (Dua Puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.

Pada tanggal 27 Juni 2018 Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2019 - 2024. Berdasarkan hasil penetapan pemenang pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka ditetapkan pasangan dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya 2019 - 2024 serta telah dilantik pada tanggal 8 September 2019.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (Enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2020 – 2024, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 dan RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 - 2025. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 7 dan 8, proses penyusunan dokumen RPJMD disusun melalui pendekatan sebagai berikut:

- 1. Teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- 2. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3. Politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih dan dibahas bersama dengan DPRD;
- 4. Atas bawah dan bawah atas (*top down* dan *bottom up*), merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 merupakan periode ketiga RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 - 2025 dengan arah kebijakan yaitu percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh sumber daya manusia berkualitas. Arah kebijakan tersebut

dilaksanakan dengan visi "TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA BARAT DAYA YANG MAJU, BERKUALITAS, BERDAYA SAING, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA", yang akan menjiwai RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024.

Akibat berbagai perkembangan kondisi faktual yang terjadi, maka sebelum memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, perlu dilakukan perubahan RPJMD yang disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:

- 1) hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja daerah khususnya untuk tahun 2020, sedangkan tahun 2021 belum bisa digunakan, karena tahun 2021 belum berakhir. Pencapaian kinerja daerah secara umum sebagai berikut:
  - Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 sebesar 0,10 persen, menurun dari tahun 2019 sebesar 5,06 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yang terkontraksi sebesar -0,83 persen pada tahun 2020.
  - Angka kemiskinan menurun dari 28,88 persen keadaan September 2019 menjadi 28,00 persen keadaan September 2020.
  - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan, dari 62,60 poin pada tahun 2019 menjadi 62,28 poin pada tahun 2020. Capaian komponen pembentuk IPM juga mengalami perubahan, yaitu usia harapan hidup dari 67,12 tahun pada 2019 meningkat menjadi 68,38 tahun pada tahun 2020. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 6,33 tahun pada 2019 menjadi 6,34 tahun pada 2020.
  - Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang menunjukkan kinerja kurang menggembirakan, dimana mengalami peningkatan dari 1,25 persen pada tahun 2019 menjadi 2,36 persen pada tahun 2020.
  - Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Sumba Barat Daya bergerak mendekati 0. Selain itu, Indeks Gini Kabupaten Sumba Barat Daya selalu lebih kecil dibandingkan Indeks Gini Provinsi NTT. Hal ini berarti bahwa pengeluaran penduduk Sumba Barat Daya semakin seragam dan lebih seragam dibandingkan daerah-daerah di NTT secara umum.

Rincian Data Pencapaian Kinerja Daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Pencapaian Kinerja Daerah Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2019		Capaian 2020	
	mumuco:		NTT	SBD	NTT	SBD
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,24	5,06	-0,83	0,10
2	Angka Kemiskinan	%	21,62	28,88	21,21	28,00
3	IPM	poin	65,23	62,60	65,19	62,28
4	Inflasi	%	0,67	0,34	0,78	0,61
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,35	1,25	4,28	2,36
6	Indeks Gini	Poin	0,356	0,32	0,354	0,311

Sumber: SBD Dalam Angka dan NTT Dalam Angka, 2020 dan 2021

- 2) terjadinya perubahan aturan dan kebijakan dari Pusat, antara lain : a) Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan selanjutnya dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, serta b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 dan Badai Seroja yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

RPJMN 2020-2024 mengamanatkan agar pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui 2 (Dua) pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi; dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Mempedomani hal ini, maka Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan

membuka ruang kerjasama dengan memanfaatkan posisi geostrategis NTT. Hal ini menyebabkan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024 akan diarahkan untuk mendekati indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya maupun arahan Nasional dan Provinsi.

Frasa mendekati yang digunakan adalah suatu bentuk penyesuaian pencapaian hasil yang disebabkan terjadinya berbagai pembatasan akibat mewabahnya Covid 19. Berbagai kebijakan yang diambil terkait Pandemi Covid 19 termasuk pembatasan yang dilakukan menyebabkan target-target pembangunan pada RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024 yang ditetapkan sebelumnya tidak sepenuhnya tercapai. Melalui perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024 ini, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki acuan yang sama dan dalam semangat kemitraan, masing-masing pihak dapat mengambil peran yang tepat untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan di Sumba Barat Daya.

# 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
- 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sudah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 2025;
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 2025;
- 26. Peraturan Derah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Derah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116)
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009-2025;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020-2040;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

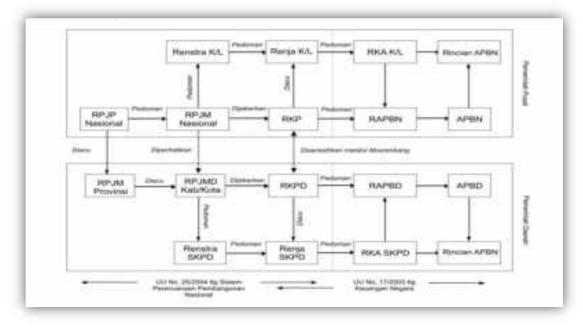
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumba Daya.

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

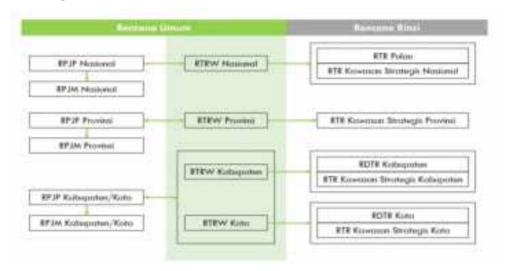
- Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 - 2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 - 2040;
- 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- 3. Menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sinergi dengan kabupaten/kota, investasi swasta, lembaga internasional dan partisipasi masyarakat.

Alur hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya berlaku mutatis mutandis sesuai Pasal 344 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Bagan Alur Hubungan Perubahan RPJMD dengan Dokumen Rencana Lainnya

Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Hubungan Perubahan RPJMD dengan Dokumen RTRW

Keterkaitan antar dokumen perencanaan terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

Misi RPJMN			Misi RPJMD Provinsi		Misi RPJMD	
		MISI RPJMD Provilisi		Kabupaten		
1.	Peningkatan kualitas manusia	1.	Mewujudkan	1.	Mewujudkan	
	Indonesia		masyarakat sejahtera,		kehidupan	
2.	Struktur ekonomi yang produktif,		mandiri dan adil		masyarakat Sumba	
	mandiri, dan berdaya saing	2.	Membangun NTT		Barat Daya yang	
3.	Pembangunan yang merata dan		sebagai salah satu		maju dan	
	berkeadilan		gerbang dan pusat		berkualitas,	
4.	Mencapai lingkungan hidup yang		pengembangan		didukung sarana	
	berkelanjutan		pariwisata nasional		dan prasarana	
5.	Kemajuan budaya yang		(Ring of Beauty)		kehidupan yang	
	mencerminkan kepribadian	3.	Meningkatkan		layak dan memadai	
	bangsa		ketersediaan dan	2.	Mewujudkan	
6.	Penegakan sistem hukum yang		kualitas infrastruktur		pemerintahan yang	
	bebas korupsi, bermartabat, dan		untuk mempercepat		demokratis,	
	terpercaya		pembangunan		akuntabel, bersih,	
7.	Perlindungan bagi segenap	4.	Meningkatkan kualitas		efektif dan	
	bangsa dan memberikan rasa		sumber daya manusia		terpercaya	
	aman pada seluruh warga	5.	Mewujudkan reformasi	3.	Mewujudkan	
			birokrasi		kehidupan	

Misi RPJMN		Misi RPJMD Provinsi	Misi RPJMD	
		MISI RPJMD Provilisi	Kabupaten	
8.	Pengelolaan pemerintahan yang	pemerintahan untuk	masyarakat Sumba	
	bersih, efektif, dan terpercaya	meningkatkan kualitas	Barat Daya yang	
9.	Sinergi pemerintahan daerah	pelayanan publik	sejahtera	
	dalam kerangka negara kesatuan			

### 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 adalah:

- 1. Memberikan arah dan pedoman pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
- 2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
- 3. Sebagai pedoman penyusunan RKPD selama tahun 2023 2024;
- 4. Menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut:

- 1. Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah;
- 2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan masa kepemimpinan Kepala Daerah;
- Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program Kepala Daerah;
- 4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 – 2024 terdiri dari 9 (Sembilan) bab, dimana setiap bab menguraikan hal – hal sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum penyusunan Perubahan RPJMD agar substansi pada bab - bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dokumen ini terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar - dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum daerah yang relevan dalam mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi, misi Kepala Daerah dan kebutuhan perumusan strategi.

## BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menggambarkan hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah mengenai kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan kebijakan masa lalu dan kerangka pendanaan.

#### BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan berbagai isu - isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (Lima) tahun mendatang yang meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu - isu strategis.

#### BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024, yang disertai dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.

# BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

# BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

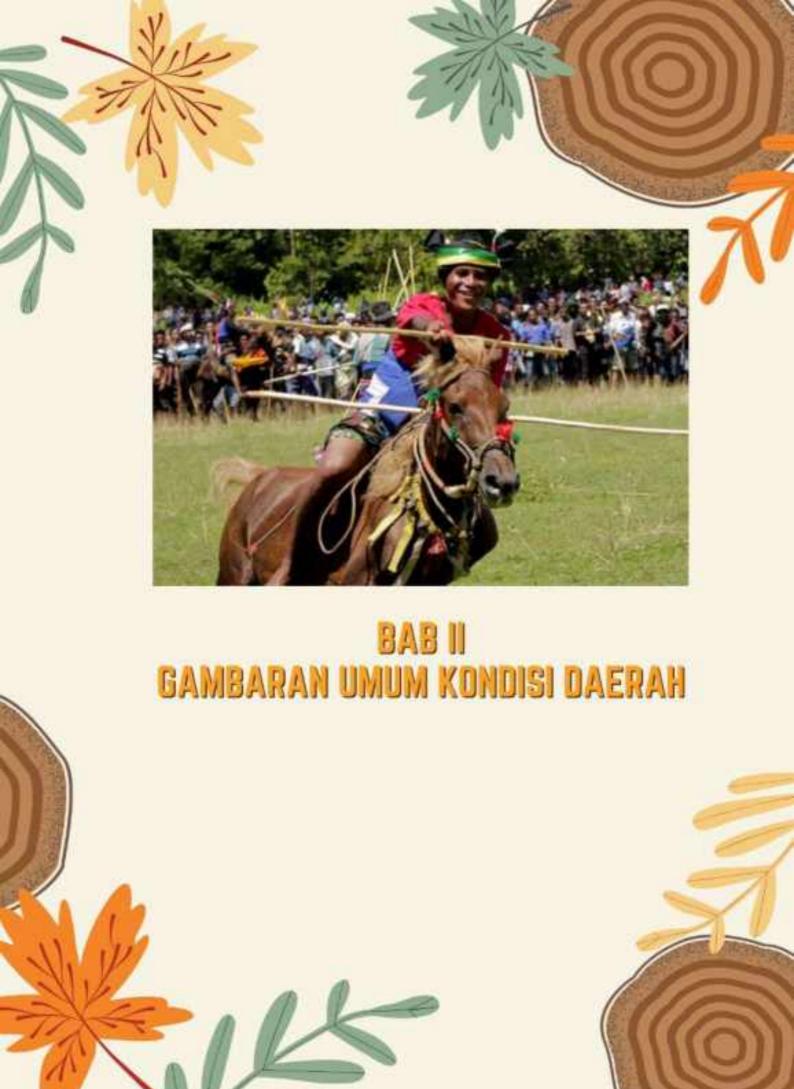
Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan yang akan dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah.

#### BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

#### BAB IX. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kaidah dan pedoman pelaksanaan.



## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

### 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.445,32 km² meliputi 11 (Sebelas) wilayah kecamatan yang terdiri dari 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) desa dan 2 (Dua) kelurahan. Kecamatan - kecamatan dimaksud adalah Kodi, Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, Kodi Utara, Kota Tambolaka, Loura, Wewewa Barat, Wewewa Selatan, Wewewa Tengah, Wewewa Timur dan Wewewa Utara. Luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Sumba Barat Daya

N	Kecamatan	II IZ 4	Jumlah		Luas Wilayah	Persentase Luas
No		Ibu Kota	Kelurahan	Desa	(km²)	(%)
1	Kodi	Bondo Kodi	-	19	111,86	7,74
2	Kodi Balaghar	Panenggo Ede	-	14	144,67	10,01
3	Kodi Bangedo	Walla Ndimu	-	15	73,22	5,07
4	Kodi Utara	Kori	-	21	243,82	16,87
5	Kota Tambolaka	Tambolaka	2	8	98,95	6,85
6	Loura	Karuni	-	11	138,51	9,58
7	Wewewa Barat	Waimangura	-	20	147,34	10,19
8	Wewewa Selatan	Manola	-	14	174,14	12,05
9	Wewewa Tengah	Ndapa Taka	-	20	109,67	7,59
10	Wewewa Timur	Elopada	-	19	139,88	9,68
11	Wewewa Utara	Palla	-	12	63,26	4,38
	Jumlah		2	173	1.445,32	100

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

Kecamatan Kodi Utara memiliki luas wilayah paling besar yakni 243,82 km² atau 16,87% dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya urutan kedua adalah Kecamatan Wewewa Selatan yakni 174,14 km² atau 12,05 % dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, sedangkan

kecamatan yang memiliki luas terkecil yakni Kecamatan Wewewa Utara dengan luas wilayah 63,26 km² atau 4,38% dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Peta administrasi wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya

Batas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya meliputi:

Sebelah Utara : Selat Sumba

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Timur : Kabupaten Sumba Barat

Sebelah Barat : Samudera Hindia

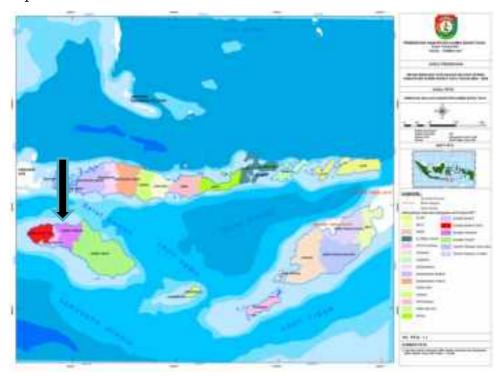
## 2. Letak dan Kondisi Geografis

#### a. Posisi Astronomis

Secara astronomis wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya terletak antara koordinat 9°,18'-10°, 20' LS (Lintang Selatan) dan 118°,55'-120°,23' BT (Bujur Timur). Secara geografis tepat berada diantara 9°18'01" Lintang Selatan dan 180° 55'-120° 23 Bujur Timur.

## b. Posisi Geostrategis

Kabupaten Sumba Barat Daya terletak di bagian ujung barat Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur, letak kedudukan Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 2 Posisi Geostrategis Kabupaten Sumba Barat Daya

## 3. Topografi

#### a. Kemiringan Lahan

Meizer dan Pfeiffer (1964) membagi dataran Sumba dalam 7 (Tujuh) jenis topografi, karena pembagiannya sangat sulit diamati maka untuk mempermudah pengamatan pembagian wilayah topografi dibuat dalam 5 (Lima) kelompok sebagai berikut:

- (1) Wilayah gunung ditandai dengan kemiringan yang tinggi, wilayah ini meliputi Gunung Tanadaro
- (2) Wilayah perbukitan ditandai dengan kemiringan yang lebih rendah dari wilayah gunung
- (3) Wilayah undukan dekat laut ditandai undukan dan jurang yang curam sepanjang pantai selatan
- (4) Wilayah datar yang cukup luas dan dikelilingi bukit seperti dataran Anakalang

(5) Wilayah dataran aluvial ditandai oleh dataran yang agak sempit sekitar sungai.

#### b. Ketinggian Lahan

Ketinggian wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya berkisar antara 0 - 850 meter di atas permukaan laut. Luasan wilayah dengan ketinggian 0 - 300 meter sebesar 842,66 km² atau 58,30%, yang tersebar pada Kecamatan Kodi Bangedo, Kodi Balaghar, Kodi, Kodi Utara, Loura dan Kota Tambolaka serta sebagian Kecamatan Wewewa Utara, sedangkan luasan wilayah dengan ketinggian 300 - 850 meter sebesar 602,66 km² atau 41,70%, yang tersebar pada Kecamatan Wewewa Selatan, Wewewa Barat, Wewewa Timur dan Wewewa Tengah serta sebagian Kecamatan Wewewa Utara. Gambaran tinggi wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) menurut kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya diuraikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Gambaran Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL)

No	Kecamatan	Ketinggian (meter)	Jarak Ke Ibukota
1	Kodi	0 - 300	32,1
2	Kodi Balaghar	0 - 300	50,2
3	Kodi Bangedo	0 - 300	40,8
4	Kodi Utara	0 - 300	28
5	Kota Tambolaka	0 - 300	-
6	Loura	0 - 300	14,1
7	Wewewa Barat	300 - 750	13,9
8	Wewewa Selatan	300 - 500	30,9
9	Wewewa Tengah	300 - 850	20,1
10	Wewewa Timur	300 - 850	31,6
11	Wewewa Utara	100 - 600	37,7

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

#### 4. Geologi

Karakteristik tanah di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya terbentuk dari batuan gamping koral yang relatif masih muda, hal ini terlihat dari kecenderungan tanah yang bervariasi yakni campuran antara batu gamping, batu gamping lempungan, sisipan napal pasiran dan napal tufan sehingga karakteristik tanah tersebut cenderung asam, netral, dan basa. Sementara pada kawasan pantai didominasi oleh farmasi kaliangga yang terbentuk struktur lapisan batu gamping terumbu. Kondisi hidrologi di Kabupaten Sumba Barat Daya sangat dipengaruhi oleh 2 (Dua) sumber air tanah, yaitu

air tanah bebas dan air permukaan tanah. Air tanah bebas yaitu sumber air tanah yang mengikuti kondisi morfologi tanah. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya menggunakan air permukaan. Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki 6 (Enam) buah sungai dengan panjang yang bervariasi, yang terletak di empat kecamatan yaitu Sungai Pola Pare dan Sungai Wai Ha dengan panjang 18 km dan 9 km di Kecamatan Kodi Balaghar, Sungai Wee Wagha dan Sungai Wee Lamboro dengan panjang masing-masing 10 km terletak di Kecamatan Wewewa Selatan, Sungai Wee Kalowo dengan panjang 7 km di Kecamatan Wewewa Timur dan Sungai Loko Kalada sepanjang 16 km yang terletak di Kecamatan Loura. Gambaran sungai dan panjang sungai di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Sumba Barat Daya Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1	Kodi Balaghar	Pola Pare Waiha	18 9
2	Loura	Loko Kalada	16
3	Wewewa Selatan	Wee Wagha Wee Lamboro	10 10
4	Wewewa Timur	Wee Kalowo	7

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya (Buku Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya 2014)

## 5. Klimatologi

Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dikenal 2 (Dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun, setelah melewati masa peralihan pada bulan April - Mei dan Oktober - November. Walaupun demikian, mengingat Kabupaten Sumba Barat Daya dan umumnya Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dekat dengan Australia, mengakibatkan arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik, sampai di wilayah Sumba Barat Daya kandungan uap airnya sudah berkurang, sehingga

mengakibatkan hari hujan di Kabupaten Sumba Barat Daya lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah lain yang lebih dekat dengan Asia. Temperatur rata - rata di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya berkisar antara 21°C-34°C. Temperatur udara rata - rata sekitar 30°C. Temperatur udara tertinggi 33,7°C terjadi pada bulan November, sedangkan terendah 21,5°C terjadi pada bulan Agustus.

## 6. Penggunaan Lahan

Tata guna lahan di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam 3 (Tiga) tahun terakhir didominasi oleh lahan irigasi, tadah hujan, kebun/tegalan, pekarangan, ladang/huma dan lahan tidur. Pada tahun 2018 potensi lahan sawah mencapai 6.716,76 Ha. Pada tahun 2018¹ potensi penggunaan lahan seluas 140.747 Ha atau 97,38% dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya yang penggunaannya dapat dirinci sebagai berikut:

- 1. Lahan kebun/tegalan seluas 50.936 Ha;
- 2. Lahan pekarangan seluas 11.824 Ha;
- 3. Lahan yang digunakan untuk ladang/huma seluas 5.061 Ha;
- 4. Lahan penggembalaan seluas 7.616 Ha;
- 5. Lahan sementara tidak ditanami seluas 8.141 Ha:
- 6. Kawasan hutan rakyat seluas 5.857 Ha;
- 7. Kawasan hutan negara seluas 5.730 Ha;
- 8. Lahan perkebunan seluas 32.372 Ha;
- 9. Lahan tidur seluas 13.210 Ha.

### 2.1.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah<sup>2</sup>

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi:

- 1. Sistem Perkotaan
- 2. Sistem Jaringan Prasarana

## 1. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Perkotaan Tambolaka
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), terdiri atas:
  - 1. Perkotaan Waimangura di Kecamatan Wewewa Barat

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 - 2040

- 2. Perkotaan Bondo Kodi di Kecamatan Kodi
- 3. Perkotaan Karuni di Kecamatan Loura
- 4. Perkotaan Palla di Kecamatan Wewewa Utara
- 5. Perkotaan Elopada di Kecamatan Wewewa Timur
- 6. Perkotaan Ndapataka di Kecamatan Wewewa Tengah
- 7. Perkotaan Kori di Kecamatan Kodi Utara
- 8. Perkotaan Walla Ndimu di Kecamatan Kodi Bangedo
- 9. Perkotaan Panenggo Ede di Kecamatan Kodi Balaghar
- 10. Perkotaan Manola di Kecamatan Wewewa Selatan
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terdiri atas:
  - 1. Lete Konda di Kecamatan Loura
  - 2. Wee Kombaka di Kecamatan Wewewa Barat
  - 3. Lombu di Kecamatan Wewewa Tengah
  - 4. Pada Eweta di Kecamatan Wewewa Timur
  - 5. Wee Wulla di Kecamatan Wewewa Selatan
  - 6. Kahale di Kecamatan Kodi Balaghar
  - 7. Waikadada di Kecamatan Kodi Bangedo
  - 8. Kawangohari di Kecamatan Kodi
  - 9. Bukambero di Kecamatan Kodi Utara
  - 10. Dangga Mango di Kecamatan Wewewa Barat
  - 11. Pero di Kecamatana Wewewa Barat
  - 12. Eka Pata di Kecamatan Wewewa Tengah
  - 13. Watu Wona di Kecamatan Kodi
  - 14. Moro Mandungo di Kecamatan Kodi Utara

#### 2. Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana terdiri atas:

- a. Sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
  - 1. Sistem jaringan transportasi darat, yaitu sistem jaringan jalan yang terdiri atas:
    - a) Jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten, berupa pengembangan jaringan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1), terdiri atas:
      - 1) Ruas jalan Waikelo Waitabula
      - 2) Ruas jalan Waitabula batas kota Waikabubak

- b) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, yaitu pengembangan jaringan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2), terdiri atas:
  - 1) Ruas jalan Waitabula Bondokodi
  - 2) Ruas jalan Radamata Katewel
  - 3) Batas Kabupaten Sumba Barat Gaura Bondokodi
- c) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, terdiri atas:
  - 1) Jalan Kolektor Primer -4 (JKP-4), terdiri atas:
    - (1) Ruas jalan Sp. Waimangura Leteloko
    - (2) Ruas jalan Waimangura Sp. Kahale
    - (3) Ruas jalan Elopada Ombakareke
    - (4) Ruas jalan Kalena Rongo Mandorak
    - (5) Ruas jalan Waikarara Panenggo Ede
    - (6) Ruas jalan Wanoroto Kori
    - (7) Ruas jalan Kori Mbukambani
    - (8) Ruas jalan Sp. Katewel Wangge
  - 2) Jaringan Jalan Lokal Primer (JLP), yang diusulkan menjadi jalan strategis nasional, terdiri atas:
    - (1) Ruas jalan Bondokodi Bukambani
    - (2) Ruas jalan Karoso Kahale
    - (3) Ruas jalan Weekelo Katewel
    - (4) Ruas jalan Weekelo Karoso
  - 3) Jaringan Jalan Lokal Primer (JLP), terdiri atas:
    - (1) Ruas jalan Tambolaka Weekelo
    - (2) Ruas jalan Radamata Katewel
    - (3) Ruas jalan Sp.Katewel Wangge
    - (4) Ruas jalan Weekelo Katewel
    - (5) Ruas jalan Weekelo Karoso
    - (6) Ruas jalan Keretana Weepangali
    - (7) Ruas jalan Sp. Gokata Managa Aba
    - (8) Ruas jalan Laradima Bondoboghila
    - (9) Ruas jalan Ramadana Ombaloko
    - (10) Ruas jalan Gokata Oro
    - (11) Ruas jalan dalam Kota Tambolaka

- (12) Ruas jalan Hombakaripit Matakapore
- (13) Ruas jalan Kori Bukambani
- (14) Ruas jalan Mangganipi Ikit
- (15) Ruas jalan Noha Waiholo
- (16) Ruas jalan Sp. Rokoraka Huma
- (17) Ruas jalan Hombakaripit Mali Iha
- (18) Ruas jalan Noha Werilolo
- (19) Ruas jalan Bondokodi Bukambani
- (20) Ruas jalan Wurahomba Tossi
- (21) Ruas jalan Patuku Karoso
- (22) Ruas jalan Waikarara Panenggo Ede
- (23) Ruas jalan Ate Dalo Karoso
- (24) Ruas jalan Hamonggo Lele Wurahomba
- (25) Ruas jalan Karoso Kahale
- (26) Ruas jalan Bondokodi Pero
- (27) Ruas jalan Kawangohari Kapakamandeta
- (28) Ruas jalan Waipadi Waikadada
- (29) Ruas jalan Wai Ha Wailangira
- (30) Ruas jalan Wai Ha Waikarara
- (31) Ruas jalan Watubembe Ratenggaro
- (32) Ruas jalan Wailangira Matakapore
- (33) Ruas jalan Waikarara Panenggo Ede
- (34) Ruas jalan Wai Ha Wainyapu
- (35) Ruas jalan Kahale Watumalado
- (36) Ruas jalan Walla Ndimu Ratenggaro
- (37) Ruas jalan Sp. Waimangura Taworara
- (38) Ruas jalan Loloramo Kabalidana
- (39) Ruas jalan Kabalidana Kalimbutillu
- (40) Ruas jalan Kareka Kaka Watulambara
- (41) Ruas jalan Laramate Weelonda
- (42) Ruas jalan Sp. Waimangura Leteloko
- (43) Ruas Jalan Waimangura Sp. Kahale
- (44) Ruas jalan Weemanada Palla
- (45) Ruas jalan Wanoroto Kori

- (46) Ruas jalan Wano Talla Todungaba
- (47) Ruas jalan Weekarendi Wano Talla
- (48) Ruas jalan Weelima Wano Talla
- (49) Ruas jalan Palla Weepatando
- (50) Ruas jalan Palla Bondoboghila
- (51) Ruas jalan Rara Denduka
- (52) Ruas jalan Tenateke Umbuwangu
- (53) Ruas jalan Weewulla Dikira
- (54) Ruas jalan Gollu Sapi Gokata
- (55) Ruas jalan Tanggaba Tanggo'o
- (56) Ruas jalan Bondonaga Kambuyawila
- (57) Ruas jalan Weerame Raba Ege
- (58) Ruas jalan Weekokora Kalingara
- (59) Ruas jalan Kanelu Watulambara
- (60) Ruas jalan Lombu Totok
- (61) Ruas jalan Tana Kombuka Mareda Kalada
- (62) Ruas jalan Golu Sapi Maredawuni
- (63) Ruas jalan Kanelu Maredawuni
- (64) Ruas jalan Weekapoda Dikira
- (65) Ruas jalan Elopada Omba Kareke
- (66) Ruas jalan Ello Wone
- (67) Ruas Jalan Weebole Mareda Kalada
- (68) Ruas jalan Sp. Pelli Weelima
- (69) Ruas jalan Denduka Dikira
- (70) Ruas jalan Matapyawu Karekanduku
- (71) Ruas jalan Matapyawu Puunaga
- (72) Ruas jalan Tenateke Jatilima
- (73) Ruas jalan Panenggo Ede Weemaringi
- (74) Ruas jalan Hamati Ghobo Kalembu Palolo
- (75) Ruas jalan Benak Onggol
- (76) Ruas jalan Watu Takula PUSPEM
- (77) Ruas jalan Keretana Kampung Belakang
- (78) Ruas jalan Ombacalo Kabonu Tana
- (79) Ruas jalan Taworara Weelonda

- (80) Ruas jalan Katura Kalembu Komi
- (81) Ruas jalan Gollu Utta Kadelu Kutura
- (82) Ruas jalan Wanno Bo'u Camme
- (83) Ruas jalan Watutakula Kantor Camat Kota Tambolaka
- (84) Ruas jalan Weekapoda Kiku Karambo
- (85) Ruas jalan Weelima Wanno Talla
- (86) Ruas jalan Komi Lendongara
- (87) Ruas jalan Weepatando SDM Lete Wungana
- (88) Ruas jalan Tanakapu Kanelu
- (89) Ruas jalan Hoha Wungo Watu Wona
- (90) Ruas jalan Pudda Kambuyawila
- (91) Ruas jalan Reda Bolo Weelabonga
- (92) Ruas jalan Sp. Karakata Pero
- (93) Ruas jalan Koki Pasola Bondo Kawango
- (94) Ruas jalan Binawatu Weekii
- (95) Ruas jalan Weewittu Puu Potto
- (96) Ruas jalan Panenggo Ede Wainyapu
- (97) Ruas jalan Wee Memala Wee Masa
- (98) Ruas jalan Gollu Utta Wanno Baru
- (99) Ruas jalan Waimangura Taworara
- (100) Ruas jalan Mata Loko Wanno Talla
- (101) Ruas jalan Umbu Wangu Kalito
- (102) Ruas jalan Mannu Bani Nagga Reggi
- (103) Ruas jalan Rita Danggamangu
- (104) Ruas jalan Kererobo Kalimbuguro
- (105) Ruas jalan Ombarade Tana Kaka
- (106) Ruas jalan Pero Rende
- (107) Ruas jalan Naga Dana Ndapa Taka
- (108) Ruas jalan Ombarade Weerame
- (109) Ruas jalan Sp. Camme SMP Masyarakat
- (110) Ruas jalan Sp. Weelimbu Wanno Kakara
- (111) Ruas jalan Kererobo Kalimbuguro
- (112) Ruas jalan Kapaki Hemba Waihodu
- (113) Ruas jalan KM 12 KM 10

- (114) Ruas jalan Ngundu Kandau Manugedhe
- (115) Ruas jalan Weewondo Panunu Wodo
- (116) Ruas jalan Tanggo'o Letekonda
- (117) Ruas jalan Kalembu Malou Wee Kapoda
- (118) Ruas jalan Kalembu Lugha Pasar Kori
- (119) Ruas jalan Ndapataka Watulambara
- 4) Jaringan Jalan Strategis Desa, terdiri atas:
  - (1) Ruas jalan Paretabondi Letekombo
  - (2) Ruas jalan Andeate Magholinyo
  - (3) Ruas jalan Sp. Lara Huma Pantai Huma
  - (4) Ruas jalan Kenduwela Weekambanga
  - (5) Ruas jalan Waiha Manutogi Waimakaha
  - (6) Ruas jalan Kalembundara Mane Karitas
  - (7) Ruas jalan Kampung Bondokodi Deludepa
  - (8) Ruas jalan Panenggo Ede Wainyapu
  - (9) Ruas jalan Puu Wasura Weemanggolo
  - (10) Ruas jalan Puu Mawo Manuwewe
  - (11) Ruas jalan Panenggo Ede Pantai Ana Meha
  - (12) Ruas jalan Kabundu Tana Pakandara
  - (13) Ruas jalan Sp. Pameruka Gollu Kapabala
  - (14) Ruas jalan Omba Batu Leito SDK Wolla Mata
  - (15) Ruas jalan Maobunga Golusimbi
  - (16) Ruas jalan Koki Hombarica Pasola Bondo Kawango
  - (17) Ruas jalan Walla Ndimu Kerehomba Waipaddi
  - (18) Ruas jalan Sp. Ghanggo Watupoyo
  - (19) Ruas jalan Gadilete Bondolenga
  - (20) Ruas jalan Weewega Binapatodi
  - (21) Ruas jalan Ramadana Mananga Aba
  - (22) Ruas jalan Redatana Weewini
  - (23) Ruas jalan Letenggarong Ledongara
  - (24) Ruas jalan Kalembukaha Kadekap
  - (25) Ruas jalan Situs Umbu Koba Malula
  - (26) Ruas jalan Waikelo Dermaga ASDP
  - (27) Ruas jalan Delo Air Terjun Pabeti Lakera
  - (28) Ruas jalan Watukaweda Weekambala
  - (29) Ruas jalan Kantor Desa Bondokodi Lolopeke

- (30) Ruas jalan Waimakaha Radamalando
- (31) Ruas jalan Merekehe Deludepa
- (32) Ruas jalan Karang Indah Pantai Rica
- (33) Ruas jalan Walakari Bondo Tamiyo
- (34) Ruas jalan Kalembu Danga Pantura
- d) Terminal penumpang, terdiri atas:
  - Rencana pengembangan terminal tipe B di Kecamatan Kota Tambolaka.
  - 2) Rencana pengembagan terminal tipe C tersebar di Kecamatan Loura, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balaghar, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Wewewa Utara, Kecamatan Wewewa Selatan.
- e) Terminal barang, yaitu berupa rencana pembangunan terminal kargo di Kecamatan Loura.
- f) Rute angkutan penumpang, terdiri atas:
  - 1) Rute angkutan penumpang, terdiri atas:
    - (1) Pengembangan rute dalam kota, terdiri atas:
      - a. Ruas jalan Tambolaka Waikelo
      - b. Ruas jalan Lara Mate Wee Londa
      - c. Ruas jalan Sp Watu Takula Payula Umbu
    - (2) Pengembangan rute angkutan perdesaan, terdiri atas:
      - a. Ruas jalan Ombarade Tana Tekke;
      - b. Ruas jalan Pakamandara-Loko Kalada;
      - c. Ruas jalan Sp. Waimangura Leteloko;
      - d. Ruas jalan Tena Teke Umbu Wango;
      - e. Ruas jalan Waimangura-Sp Kahale;
      - f. Ruas jalan Elopada-Ombakareke;
      - g. Ruas jalan Radamata Katewel;
      - h. Ruas jalan Waikarara Panenggo Ede;
      - i. Ruas jalan Pudda Kambu Yawila;
      - j. Ruas jalan Palla-Bondoboghila/Loko Kalada;
      - k. Ruas jalan Tena Teke Jati Lima; dan
      - 1. Ruas jalan Wanoroto Kori.

- (3) Pengembangan rute angkutan kota dalam propinsi terdapat pada ruas Bondo Kodi Gaura.
- 2) Rute angkutan barang, terdiri atas:
  - (1) Jalur utara meliputi Waikelo Waitabula, Waitabula Sp. Katewel Wangge.
  - (2) Jalur selatan meliputi Waikelo Waitabula, Waitabula- Gaura.
  - (3) Jalur tengah Waikelo Waitabula, Waitabula batas Kota Waikabubak.
- g) Sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan, berupa pengembangan pelabuhan angkutan penyeberangan Waikelo di Kecamatan Loura.
- 2. Sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
  - a) Pelabuhan laut, terdiri atas:
    - Pengembangan pelabuhan pengumpan regional Waikelo di Kecamatan Kota Tambolaka
    - 2) Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelabuhan Pero di Kecamatan Kodi
    - 3) Rencana pengembangan pelabuhan perikanan, meliputi:
      - (1) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Loura
      - (2) Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Kodi
  - b) Alur pelayaran diatur dalam perundang undangan yang berlaku.
- 3. Sistem jaringan transportasi udara, meliputi:
  - a) Bandar udara, berupa pengembangan bandar udara Tambolaka sebagai bandar udara pengumpan di Kecamatan Kota Tambolaka.
  - b) Ruang udara untuk penerbangan, terdiri atas:
    - 1) Ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara.
    - 2) Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.
- b. Sistem jaringan energi, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
  - 1. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:

- a) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pola Pare di Kecamatan Wewewa Selatan.
- b) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Waitabula di Kecamatan Loura.
- c) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pero Konda di Kecamatan Kodi dan Kecamatan Kota Tambolaka.
- d) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi:
  - PLTS Terpusat di Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Kodi Balaghar, Kecamatan Wewewa Barat dan Kecamatan Wewewa Tengah.
  - 2) PLTS Smart Grid di Kecamatan Kodi Utara dan Kecamatan Loura.
  - 3) PLTS tersebar di seluruh kecamatan.
  - 4) Pengembangan PLTS rencana (baru) tersebar di seluruh kecamatan.
- e) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kecamatan Loura.
- f) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), meliputi:
  - 1) PLTMH Waikelo Sawah, PLTMH Lokomboro dan PLTMH Dikira di Kecamatan Wewewa Timur.
  - 2) PLTMH Pabeti Lakera dan PLTMH Umbuwango di Kecamatan Wewewa Selatan.
- g) Pembangkit listrik lainnya, yang terdiri atas:
  - 1) Pengembangan Biogas di seluruh kecamatan.
  - 2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga BioMassa di Kecamatan Wewewa Selatan.
- 2. Infrastruktur penyalur tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
  - a) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem yaitu berupa dari Waingapu sampai PLTG di Desa Payola Umbu Kecamatan Loura ke PLTMH Lokomboro Desa Pada Eweta Kecamatan Wewewa Timur yang melewati Kecamatan Kota Tambolaka dan Kecamatan Loura.

- b) Jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
  - Pengembangan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya.
  - 2) Pengembangan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) keseluruh pemukiman.
- c. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
  - 1. Jaringan tetap, terdiri atas:
    - a) Satuan Telepon Otomat (STO) diarahkan di seluruh kecamatan.
    - b) Jaringan kabel telekomunikasi melayani seluruh kecamatan.
  - 2. Jaringan bergerak, berupa jaringan bergerak seluler, berupa rencana pengembangan *Base Transceiver Station* (BTS) bersama tersebar di seluruh kecamatan.
- d. Sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
  - Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten, yakni Sungai Polapare dan Sungai Loko Kalada yang melintasi Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Barat yang dikoordinasi oleh pemerintah provinsi.
  - 2. Sistem jaringan sumber daya air kabupaten, terdiri atas:
    - a) Sumber air yaitu berupa air permukaan dan air tanah, terdiri atas:
      - Sistem WS adalah WS Sumba meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Polapare melintasi Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Kodi Balaghar.
      - 2) Pembangunan bendungan Polapare di Kecamatan Kodi Balaghar dan Bendungan Mataliku di Kecamatan Loura.
      - 3) Pembangunan bendung dan embung baru yang tersebar di seluruh kecamatan.
      - 4) Cekungan Air Tanah (CAT) Waikabubak<sup>3</sup> di seluruh kecamatan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya 2019 - 2024

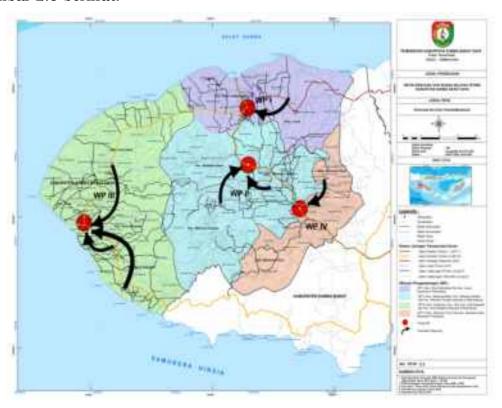
 $<sup>^3</sup>$  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia

- b) Prasarana sumber daya air, terdiri atas:
  - Sistem jaringan irigasi mencakup pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI), terdiri atas:
    - (1) DI yang ditetapkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi yaitu DI Mataliku dan DI Waikelo Sawah.
    - (2) DI yang ditetapkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten yang mencakup 45 (Empat Puluh Lima) DI.
  - 2) Sistem pengendalian banjir, terdiri atas:
    - (1) Normalisasi sungai Polapare dan Loko Kalada.
    - (2) Pembangunan sumur resapan pada kawasan permukiman perkotaan.
    - (3) Pengendalian kawasan lindung sempadan sungai di seluruh kecamatan.
- e. Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
  - 1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), terdiri atas:
    - a) Pengembangan jaringan perpipaan, terdiri atas:
      - Rencana pembangunan fisik SPAM yaitu di mata air Mata Loko di Kecamatan Wewewa Utara dan Kecamatan Kodi Utara dan mata air Wee Cambaka di Kecamatan Wewewa Selatan.
      - 2) Peningkatan kapasitas SPAM yang telah terbangun meliputi:
        - (1) Mata air Wee Amba Karuni, Wee Kapulot dan Wee Mataliku di Kecamatan Loura.
        - (2) Mata air Watulabara di Kecamatan Wewewa Barat.
      - 3) Rencana pemenuhan kapasitas dan pengembangan SPAM, terdiri atas:
        - (1) Mata air Mata Loko di Kecamatan Kodi Utara.
        - (2) Mata air Wee Mangura di Kecamatan Wewewa Barat.
        - (3) Mata air Weekelo Sawah dan mata air Wee Naba di Kecamatan Wewewa Timur.
        - (4) Mata air Wee Labonga di Kecamatan Wewewa Tengah.
        - (5) Mata air Wee Ombacalo di Kecamatan Loura.

- (6) Mata air Umbu Wango di Kecamatan Wewewa Selatan.
- (7) Mata air Wee Rende di Kecamatan Kodi Balaghar
- (8) Mata Air Wee Key di Kecamatan Kodi
- 4) Pemenuhan SPAM secara swadaya di seluruh kecamatan
- 5) Peningkatan dan perbaikan kualitas pemenuhan air minum Bukan Jaringan Perpipaan di seluruh kecamatan
- 6) Pelayanan SPAM di seluruh kecamatan
- b) Pengembangan jaringan non perpipaan, berupa bak penampung air hujan yang terdapat di seluruh kecamatan
- 2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), berupa Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT) di Kecamatan Kota Tambolaka
- 3. Sistem jaringan persampahan wilayah, meliputi:
  - a) Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) direncanakan di seluruh kecamatan
  - b) Pembangunan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Loura
- 4. Sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas:
  - a) Jalur evakuasi rawan tsunami dari titik lokasi tsunami menuju jalan utama ke ruang evakuasi bencana (jarak dari lokasi tsunami kurang lebih 3 (Tiga) kilometer
  - b) Jalur evakuasi gempa dari titik lokasi menuju jalan utama ke ruang evakuasi bencana
  - c) Jalur evakuasi banjir dari titik lokasi menuju jalan utama ke ruang evakuasi bencana
  - d) Jalur evakuasi rawan bencana longsor menuju jalan utama ke ruang evakuasi bencana
  - e) Ruang evakuasi bencana terdapat di Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamata Kodi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi, Kecamata Kodi Utara, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Timur dan Kecamatan Wewewa Selatan.
- 5. Sistem jaringan drainase, meliputi
  - a) Pengembangan jaringan drainase primer terdapat di sepanjang JKP-1 dan JKP-2.

- b) Pengembangan jaringan drainase sekunder terdapat di sepanjang JKP-1 dan JLP.
- c) Pengembangan jaringan drainase sekunder rencana (penambahan baru) terdapat di sepanjang JKP-1 dan JLP.

Peta wilayah pengembangan kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut:



Gambar 2. 3 Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Sumba Barat Daya

## 2.1.3 Rencana Pola Ruang Wilayah<sup>4</sup>

Rencana pola ruang kabupaten, meliputi:

- 1. Kawasan Peruntukan Lindung
- 2. Kawasan Peruntukan Budidaya

# 1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung, terdiri atas:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan hutan lindung yang terdapat di Kecamatan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 - 2040

Kota Tambolaka, Kecamatan Loura, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Wewewa Selatan dan Kecamatan Kodi Utara dengan luas kurang lebih 11.005 Ha

- b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
  - (1) Sempadan pantai, terdapat di Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Loura, Kecamatan Kodi Balaghar, Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi dan Kecamatan Kodi Utara dengan luas kurang lebih 748 Ha
  - (2) Sempadan sungai, terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 3.776 Ha
  - (3) Kawasan sekitar danau atau waduk, terdapat di Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Loura, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balaghar, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Utara dan Kecamatan Wewewa Tengah dengan luas kurang lebih 58 Ha
- c. Kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional Perairan Laut Sawu yang berada di Selat Sumba perairan sebelah utara Kabupaten Sumba Barat Daya
- d. Kawasan lindung geologi, yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 1.107 Ha.
- e. Kawasan lindung rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, berupa kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Wewewa Utara, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Timur dan Kecamatan Wewewa Tengah dengan luas kurang lebih 951 Ha
- f. Kawasan cagar budaya, terdiri atas:
  - (1) Situs kampung adat Manola dan Wanno Be'u di Kecamatan Wewewa Selatan
  - (2) Situs kampung adat Bondo Kapumbu dan Totok Kala'da di Kecamatan Loura
  - (3) Situs kampung adat Tossi, Bongu dan Toda di Kecamatan Kodi
  - (4) Situs kampung adat Wainyapu di Kecamatan Kodi Balaghar

- (5) Situs kampung adat Parona Baroro, Rate Nggaro dan Walla Ndimu di Kecamatan Kodi Bangedo
- g. Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan penyediaan minimal RTH 30% dari luas masing - masing kawasan perkotaan, meliputi 20% RTH publik dan 10% RTH privat

#### 2. Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan Peruntukan Budidaya, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi, yaitu berupa kawasan hutan produksi tetap terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 8.441 Ha
- b. Kawasan pertanian
  - (1) Kawasan tanaman pangan, terdapat di Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Loura, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan dan Kecamatan Wewewa Timur dengan luas kurang lebih 7.497 Ha dan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 7.476 Ha
  - (2) Kawasan hortikultura, terdapat di Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Loura, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Wewewa Timur dan Kecamatan Wewewa Utara dengan luas kurang lebih 978 Ha
  - (3) Kawasan perkebunan, terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 71.969 Ha
  - (4) Kawasan peternakan, terdiri atas:
    - a) Pengembangan peternakan dengan pola semi intensif di seluruh kecamatan
    - b) Pengembangan peternakan dengan pola intensif di seluruh kecamatan.

#### c. Kawasan perikanan

- (1) Kawasan perikanan tangkap, di perairan Selat Sumba dan Samudera Hindia
- (2) Kawasan perikanan budidaya, terdiri atas:
  - a) Pengembangan kawasan perikanan budidaya terdapat di seluruh kecamatan

- b) Pengembangan budidaya rumput laut terdapat di Kecamatan Loura, Kecamatan Kodi Balaghar dan Kecamatan Kodi Bangedo
- (3) Kawasan pengolahan ikan, sebagaimana diarahkan pada industri rumah tangga pada pusat - pusat pemukiman nelayan yaitu di Kecamatan Loura dan Kecamatan Kodi
- (4) Sarana penunjangan perikanan, sebagaimana dimaksud kawasan pelabuhan perikanan, terdapat di Kecamatan Kodi dengan luas kurang lebih 20 Ha
- d. Kawasan peruntukan industri, berupa sentra industri kecil dan menengah yang direncanakan dengan luas kurang lebih 608 Ha, terdiri atas:
  - (1) Sentra industri menengah yang dilengkapi dengan pergudangan tersebar di Kecamatan Kota Tambolaka dan Kecamatan Loura
  - (2) Sentra industri kecil dikembangkan di seluruh kecamatan
- e. Kawasan pariwisata
  - (1) Kawasan pariwisata alam, berupa pantai direncanakan seluas kurang lebih 1.267 Ha, terdiri atas:
    - a) Pantai Pero, pantai Bondo Kawango, pantai Tosi dan pantai Tanjung Karoso di Kecamatan Kodi
    - b) Pantai Mandorak dan pantai Huma di Kecamatan Kodi Utara
    - c) Pantai Rada Kapal dan pantai Ratenggaro di Kecamatan Kodi Bangedo
    - d) Pantai Marapu, pantai Wainyapu, pantai Bawanna, pantai Watu Maladong dan pantai Rica, pantai Tanjung Mareha, pantai Waikataku di Kecamatan Kodi Balaghar
    - e) Pantai Katewel, pantai Newa, pantai Oro, pantai Kawona dan pantai Mananga Aba dan pantai Kaghona di Kecamatan Loura
    - f) Pantai Waikelo di Kecamatan Kota Tambolaka

Kawasan pariwisata alam lainnya, terdiri atas:

- a) Laguna Wee Kuri, ramuk Waikahaka dan gua Rambe Manu, danau Wai Maneba di Kecamatan Kodi Utara
- b) Danau Wee Wini, danau Wee Wella, danau Wee Rabuka di Kecamatan Kodi Utara
- c) Air terjun Pabeti Lakera, air terjun Kalito di Desa Umbu Wango, mata air Wee Maretti, mata air Wee Ghumbul di Kecamatan Wewewa Selatan

- d) Air terjun Lokomboro dan gua Waikelo Sawah di Kecamatan Wewewa Timur
- e) Bukit Lendo Ngara di Kecamatan Loura
- f) Weekatura/Padeku Watu di Kecamatan Wewewa Timur
- g) Wahana wisata Border Park di Kecamatan Wewewa Timur
- h) Wahana wisata Watu Kanggoroka di Kecamatan Wewewa Barat
- i) Wisata air arung jeram di Kecamatan Wewewa Timur
- j) Tebing Kalingara di Kecamatan Wewewa Tengah
- (2) Kawasan pariwisata budaya, terdiri atas:
  - a) Kawasan kampung adat, terdiri atas:
    - 1. Kampung adat Tossi, kampung adat Mbuku Mbani, kampung adat Toda dan kampung adat Bongu di Kecamatan Kodi
    - 2. Kampung adat Walla Ndimu, kampung adat Parona Baroro dan kampung adat Ratenggaro di Kecamatan Kodi Bangedo
    - 3. Kampung adat Wainyapu di Kecamatan Kodi Balaghar
    - 4. Kampung adat Manola dan kampung adat Wano Maneka, kampung adat Umbu Koba kampung adat Rara, kampung adat Wanno Bo'u, kampung adat Umbu Wango, kampung adat Rato Weri dan Batu Megalitikum Watu Mette di Kecamatan Wewewa Selatan
    - 5. Kampung adat Wee Lewo di Kecamatan Wewewa Timur
    - 6. Kampung adat Totok Kalada dan kampung adat Bondo Kapumbu di Kecamatan Loura
  - b) Kawasan atraksi wisata budaya, terdiri atas:
    - Atraksi Pasola Homba Kalayo di Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi dan Kecamatan Kodi Balaghar
    - 2. Upacara Wula Poddu (upacara penyucian diri) di Kecamatan Kodi dan Kecamatan Wewewa Selatan
    - 3. Ritual Teda (permohonan berkat atas tanaman) di Kecamatan Kodi Bangedo
    - 4. Upacara tarik batu kubur di seluruh kecamatan
    - 5. Pacuan kuda di Kecamatan Kodi, Kecamatan Loura dan Kecamatan Wewewa Barat
    - 6. Parade 1001 kuda, festival tenun ikat dan festival festival tahunan lainnya di seluruh daratan Sumba

(3) Kawasan pariwisata buatan, terdapat di Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Balaghar dan Kecamatan Wewewa Selatan

## f. Kawasan permukiman, terdiri atas:

- (1) Kawasan permukiman perkotaan, terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 14.496 Ha
- (2) Kawasan permukiman perdesaan, dengan luas kurang lebih 15.977 Ha, terdiri atas:
  - a) Permukiman yang dikembangkan masyarakat terdapat di seluruh kecamatan
  - b) Permukiman transmigrasi yaitu kawasan transmigrasi Walla Ndimu (kimtrans Walla Ndimu) di Kecamatan Kodi Bangedo dan transmigrasi rencana (penambahan baru) kawasan transmigrasi Kodi Loura yang tersebar di Kecamatan Loura, Kecamatan Kodi Balaghar, Kecamatan Kodi Utara dan Kecamatan Wewewa Selatan

#### g. Kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:

- (1) Kodim 1629/Sumba Barat Daya, Polres dan Pos AU terdapat di Kecamatan Kota Tambolaka
- (2) Koramil dan polsek terdapat di seluruh kecamatan
- (3) Satuan radar TNI AU penunjang wilayah perbatasan perairan negara yang terdapat di Tanjung Mahera Bawana Kecamatan Kodi Balaghar dengan luas kurang lebih 59 Ha

## h. Kawasan transportasi, terdiri dari

- (1) Kawasan bandar udara, terdapat di Kecamatan Kota Tambolaka dengan luas kurang lebih 154 Ha
- (2) Kawasan pelabuhan, terdapat di Kecamatan Kota Tambolaka dan Kecamatan Loura dengan luas kurang lebih 42 Ha

Peta pola ruang Kabupaten Sumba Barat Daya terlihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2. 4 Peta Pola Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya

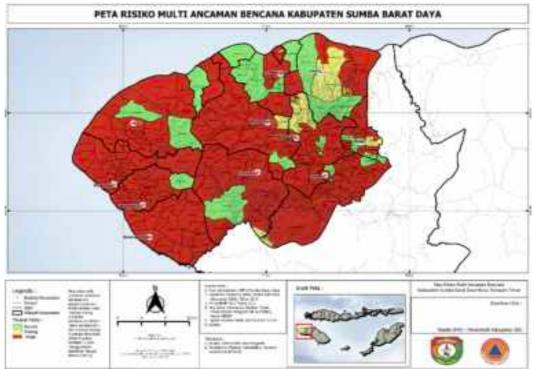
## 2.1.4 Wilayah Rawan Bencana<sup>5</sup>

Wilayah Rawan Bencana terdiri dari:

- a. Kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak rendah hingga sedang, terdiri atas:
  - Kawasan rawan tsunami terdapat di Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Loura, dan Kecamatan Wewewa Barat
  - 2. Kawasan rawan gempa terdapat di Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan dan Kecamatan Wewewa Timur
  - 3. Kawasan rawan banjir terdapat di seluruh kecamatan
  - 4. Kawasan rawan longsor/amblesan tanah terdapat di seluruh kecamatan
  - 5. Kawasan rawan kekeringan terdapat di seluruh kecamatan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 - 2040

- 6. Kawasan rawan angin puting beliung di seluruh kecamatan
- b. Kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak tinggi, berupa kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Wewewa Utara, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Timur dan Kecamatan Wewewa Tengah dengan luas kurang lebih 951 Ha



Gambar 2. 5 Peta Risiko Ancaman Bencana Kabupaten Sumba Barat Daya

## 2.1.5 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya hasil Sensus Penduduk 2020 adalah sebesar 303.650 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 155.716 jiwa dan perempuan sebanyak 147.935 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk 0,62. Gambaran jumlah penduduk Sumba Barat Daya tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020
---

Kecamatan	Ju	mlah Pendud	uk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun		
Recamatan	2018	2019	2020	2018 - 2019	2019 - 2020	
Kodi	35.301	30.686	30.010	1,35	-0,38	
Kodi Balaghar	22.141	11.815	17.980	1,16	0,37	
Kodi Bangedo	20.497	25.277	17.220	1,41	-0,82	

V	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun		
Kecamatan	2018	2019	2020	2018 - 2019	2019 - 2020	
Kodi Utara	56.489	50.753	48.860	1,65	0,52	
Kota Tambolaka	43.513	36.005	35.790	2,23	1,43	
Loura	17.603	17.797	18.540	2,16	3,03	
Wewewa Barat	43.748	44.352	42.270	1,68	0,64	
Wewewa Selatan	24.589	23.756	22.800	1,42	0,48	
Wewewa Tengah	31.809	32.499	31.160	1,60	0,48	
Wewewa Timur	29.528	27.373	26.410	1,29	0,82	
Wewewa Utara	13.209	12.814	12.640	1,02	0,80	
Jumlah	338.427	331.894	303.650	1,86	0,62	

Gambaran jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.5. Tabel ini menunjukkan kelompok umur 5 - 9 tahun memiliki jumlah paling banyak (41.913), sedangkan umur 75+ paling sedikit (2.357). Pada tabel ini juga terlihat bawah jumlah penduduk laki – laki (155.716) lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan (147.935).

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020

Golongan Umur	Jumla	Jumlah	
Gololigan Olliul	Laki-laki	Perempuan	Juman
0 – 4	21.371	20.003	41.374
5 – 9	21.425	20.488	41.913
10 – 14	18.537	17.788	35.325
15 – 19	14.313	13.391	27.704
20 – 24	14.321	13.735	28.056
25 – 29	11.489	11.268	22.757
30 – 34	10.676	10.474	21.150
35 – 39	9.102	8.870	17.972
40 – 44	8.387	8.357	16.744
45 – 49	7.460	7.076	14.536
50 – 54	5.754	5.572	11.326
55 – 59	4.492	4.131	8.623
60 – 64	3.223	3.092	6.315

Golongan Umur	Jumla	- Jumlah	
dolongan Omur	Laki-laki Perempuan		
65 – 69	2.365	2.209	4.574
70 – 75	1.492	1.435	2.924
75 +	1.309	1.048	2.357
Jumlah	173.594	164.833	303.650

#### 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

## 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan PDRB

Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 adalah dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan persentase sebesar 38,21. Berikutnya adalah dari Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan persentase sebesar 16,49; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberi sumbangan 13,72% terhadap PDRB ADHB. Laju pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2020 adalah 0,10 Mengalami penurunan sebesar 4,96 dibanding tahun 2019 sebesar 5,06%.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumba Barat Daya (juta rupiah), 2018–2020 disajikan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Sektor PDRB		2018		2019		2020	
		Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		1.345.821	38,69	1.411.448	37,59	1.440.161	38,21
(B) Pertambangan dan Penggalian		33.700	0,97	35.884	0,96	37.388	0,99
(C) Industri Pengolahan	44949	24.259	0,70	28.514	0,76	28.851	0,77
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	AUMON IN THE	1.227	0,04	1.237	0,03	1.452	0,04
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	//////////////////////////////////////	218	0,01	229	0,01	239	0,01
(F) Konstruksi		154.397	4,44	167.440	4,46	150.506	3,99
(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		477.282	13,72	531.303	14,15	517.278	13,72
(H) Transportasi dan Pergudangan		106.795	3,07	118.855	3,17	73.769	1,96
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	A-1	1.672	0,05	1.808	0,05	1.113	0,03
(J) Informasi dan Komunikasi	The same	288.076	8,28	310.163	8,26	335.093	8,89
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	200	69.853	2,01	73.231	1,95	80.401	2,13
(L) Real Estate		59.161	1,70	59.284	1,58	58.480	1,55
(M,N) Jasa Perusahaan		247	0,01	261	0,01	164	0,00
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2007	541.081	15,56	605.458	16,13	621.569	16,49
(P) Jasa Pendidikan	NOINS.	271.726	7,81	298.187	7,94	308.575	8,19
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		71.473	2,05	77.776	2,07	85.351	2,26
(R,S,T,U) Jasa lainnya		31.351	0,90	33.621	0,90	28.713	0,76
Produk Domestik Regional Bruto		3.478.338	100	3.754.698	100	3.769.102	100

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 sebesar Rp 2.307.212 Miliar meningkat 0,00087% dari PDRB ADHK tahun 2019 sebesar Rp 2.305.020 Miliar. Gambaran nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB ADHK di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 s.d 2020 disajikan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Sektor PDRB		2018	2018		2019		
		Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Milliament	888.701	40,51	912.225	39,58	924.515	40,07
(B) Pertambangan dan Penggalian		19.846	0,90	21.074	0,91	21.933	0,95
(C) Industri Pengolahan		13.388	0,61	15.096	0,65	14.942	0,65
(D) Pengadaan Listrik dan Gas		845	0,04	852	0,04	997	0,04
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	44	174	0,01	182	0,01	188	0,01
(F) Konstruksi		105.526	4,81	109.709	4,76	98.788	4,28
(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7/	262.775	11,98	282.854	12,27	265.723	11,52
(H) Transportasi dan Pergudangan		59.192	2,70	61.611	2,67	42.261	1,83
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2007	916	0,04	990	0,04	579	0,03
(J) Informasi dan Komunikasi	The CHICAGO	252.200	11,50	265.792	11,53	288.043	12,48
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi		44.571	2,03	45.782	1,99	50.731	2,20
(L) Real Estate		46.175	2,10	46.175	2,00	45.664	1,98
(M,N) Jasa Perusahaan		164	0,01	172	0,01	106	0,00
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		300.441	13,69	330.403	14,33	340.487	14,76
(P) Jasa Pendidikan		140.545	6,41	150.035	6,51	151.306	6,56

Sektor PDRB		2018		2019		
		%	Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40.867	1,86	43.448	1,88	45.275	1,96
(R,S,T,U) Jasa lainnya	17.577	0,80	18.621	0,81	15.673	0,68
Produk Domestik Regional Bruto	2.193.901	100	2.305.020	100	2.307.212	100

Gambaran pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 s.d 2020 disajikan pada Tabel 2.8, sedangkan gambaran pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 s.d 2020 disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2. 8 Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Uraian	Nila	i (Milyard Rp)
		НВ	НК
1	PDRB Tahun 2018	3.478.338	2.193.901
2	PDRB Tahun 2019	3.754.698	2.305.202
3	PDRB Tahun 2020	3.769.102	2.307.212
4	Pertumbuhan PDRB Tahun 2018 (%)	106384,19	104307,34
5	Pertumbuhan PDRB Tahun 2019 (%)	7,95	5,06
6	Pertumbuhan PDRB Tahun 2020 (%)	0,38	0,10

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

Tabel 2. 9 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2018 s.d 2020 Kabupaten Sumba Barat Daya

		Pertumbuhan						
No	Sektor	2018		20	2019		020	
INO	Sektoi	НВ	НК	НВ	НК	НВ	НК	
		%	%	%	%	%	%	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,59	2,2	37,51	2,65	38,21	1,35	
2	Pertambangan dan Penggalian	0,97	4,47	0,97	6,19	0,99	4,08	
3	Industri Pengolahan	0,7	1,13	0,76	12,71	0,77	-1,02	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	15,19	0,03	0,8	0,04	6,97	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ula <mark>ng</mark>	0,01	4,72	0,01	4,42	0,01	3,51	
6	Konstruksi	4,44	9,9	4,46	3,96	3,99	-9,95	
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Mo <mark>tor</mark>	13,72	7,74	14,15	7,64	13,72	-6,06	
8	Transportasi dan Pergudangan	3,07	11,75	3,17	4,09	1,96	-31,41	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,05	16,57	0,05	8,07	0,03	1,5	
10	Informasi dan Komunikasi	8,31	5,22	8,28	5,39	8,89	8,37	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,01	1,97	1,95	2,72	2,13	10,81	
12	Real Estat	1,7	4,53	1,58	0	1,55	-1,11	
13	Jasa Perusahaan	0,01	2,93	0,01	4,69	0	-38,42	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	15,59	8,98	16,14	9,97	16,49	3,05	
15	Jasa Pendidikan	7,84	4,75	7,97	6,75	8,19	0,85	
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,07	6,73	2,08	6,32	2,26	4,21	
17	Jasa lainnya	0,9	3,71	0,9	5,94	0,76	-15,83	
	PDRB	100	5,01	100	5,06	100	0,1	

## PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ribu rupiah)

Tahun	Kabupaten Sumba Barat Daya
2018	6.483.00
2019	6.687.00
2020	6.575.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2021

## 2. Laju Inflasi

Informasi perkembangan inflasi di Kabupaten Sumba Barat Daya masih mengacu pada nilai inflasi Kota Waingapu, Sumba Timur. Nilai inflasi rata - rata tahun Kota Waingapu tahun 2020 dan perbandingan nilai inflasi provinsi dan nasional disajikan dalam Tabel 2.10.

Tabel 2. 10 Nilai Inflasi Rata - Rata Tahun 2020 Kabupaten/Kota Waingapu

Kelompok Pengeluaran 2018=100	IHK Des 2020	Inflasi 2020 (%)
Makanan, Minuman dan Tembakau	111,28	2,92
Pakaian dan Alas Kaki	99,79	0,88
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	99,44	-0,46
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	107,51	1,21
Kesehatan	119,9	14,79
Transportasi	98,79	-2,21
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	97,95	-0,92
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	113,17	4,97
Pendidikan	102,82	0,65

Kelompok Pengeluaran 2018=100	IHK Des 2020	Inflasi 2020 (%)
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	97,02	5,96
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	112,53	-1,03
Waingapu	105,99	1,51
NTT	104,02	0,61
Nasional	105,68	1,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021



#### 3. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya yang hidup di bawah garis kemiskinan disajikan pada tahun 2020 mencapai 97,81 ribu jiwa atau 28% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya. Gambaran perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan dalam Tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin	ı
Tanun	Garis Remiskinan (Rp)	Jumlah (Jiwa)	%
2016	313.705	99.260	30,63
2017	338.742	99.540	30,13
2018	350.906	97.280	28,88
2019	355.252	96,30	28,06
2020	383.674	97,81	28

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

## 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 sebesar 62,28 yang cenderung menurun dari tahun 2019 sebesar 62,60. Gambaran IPM Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2. 12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Uraian	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup	68,02	68,43	68,53
Harapan Lama Sekolah ( tahun )	13,04	13,05	13,06
Rata-Rata Lamanya Sekolah ( tahun )	6,32	6,33	6,34
Pengeluaran Riil Per Kapita disesuaikan ( Juta Rp )	6.298,00	6.594,00	6.372,00
IPM	61,89	62,60	62,28
Peringkat	16	16	16

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata - rata lama sekolah, angka usia harapan hidup, Presentase Balita Gizi Buruk, Partisipasi Angkatan Kerja, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, Presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produksi Tanaman Pangan, Produksi Perkebunan dan Produksi Peternakan.

## 1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2020 mencapai 96,89 dari kelompok umur penduduk yang berusia 15 – 19 tahun. Gambaran perkembangan angka melek huruf penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan dalam Tabel 2.13.

Tabel 2. 13 Persentase Angka Melek Huruf Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 s.d 2020

Kelompok Umur	2019	2020
15-19	97,02	96,89
20-24	93,00	95,41
25-29	93,26	93,79
30-34	83,67	86,07
35-39	80,95	90,95
40-44	78,49	80,17
45-49	78,97	77,38
50+	N/A	70,91

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

#### 2. Angka Rata - Rata Lama Sekolah

Rata - rata lamanya sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2020 relatif rendah selama 6,34 tahun dan Harapan lama sekolah tahun 2020 adalah 13,06. Angka rata - rata lama sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2. 14 Rata - Rata Lama dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata – rata lamanya sekolah	6,30	6,31	6,32	6,33	6,34
Harapan lama sekolah	-	-	13,04	-	13,06

#### 3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata - rata tahun hidup yang dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 selama 68,53 tahun. Gambaran perkembangan angka usia harapan hidup di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.15.

Tabel 2. 15 Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup	67,71	67,76	68,02	-	68,53

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

#### 4. Persentase Balita Gizi Buruk

Bayi gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 sebanyak 1.016 jiwa dari bayi lahir sebanyak 5.681 jiwa. Gambaran persentase balita gizi buruk di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.16.

Tabel 2. 16 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Tahun	Bayi Lahir	Bayi Berat Badaı	Bayi Gizi Buruk	
		Jumlah Dirujuk		
2018	5893	99	24	67
2019	5444	103	36	734
2020	5681	105	24	1016

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

#### 5. Partisipasi Angkatan Kerja (Berumur 15 Tahun Keatas)

Partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 sebanyak 174.320 jiwa dari keseluruhan penduduk berumur 15 tahun

keatas. Gambaran partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.17.

Tabel 2. 17 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Berumur 15 Tahun Keatas) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Angkatan Kerja	97.926	76.394	174.320	
Bekerja	94.862	75.342	170.204	
Penganguran	3.064	1.052	4.116	
Bukan Angkatan Kerja	16.949	32.480	49.429	
Sekolah	9.623	10.991	20.614	
Mengurus Rumah Tangga	2.798	18.722	21.520	
Lainnya	4.528	2.767	7.295	
Jumlah	114.875	108.874	223.749	

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

## 6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Jumlah Rumah Tangga DTKS di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2021 sebesar 68.714 rumah tangga, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.18.

Tabel 2. 18 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga DTKS	Presentase (%)
1	Kodi Bangedo	17.220	5.966	34,65
2	Kodi Balaghar	17.980	2.721	15,13
3	Kodi	30.010	7.364	24,54
4	Kodi Utara	48.860	11.318	23,16
5	Wewewa Selatan	22.800	5.454	23,92
6	Wewewa Barat	42.270	9.025	21,35
7	Wewewa Timur	31.160	5.644	18,11
8	Wewewa Tengah	26.410	6.681	25,30
9	Wewewa Utara	12.640	3.280	25,95
10	Loura	18.540	4.235	22,84
11	Kota Tambolaka	35.790	7.026	19,63
	Total	303.680	68.714	22,63

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2021 dan Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2021

# 7. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2020 sebesar Rp 45.876.095.964,24 atau mencapai 4,53% dari total pendapatan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp 1.013.809.242.328,65 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.19.

Tabel 2. 19 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)	41.228.837.437,00	43.158.692.916,00	45.876.095.964,24
Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	936.719.929.825,00	1.071.630.942.608,00	1.013.809.242.328,65

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Buku Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sumba Barat Daya 2018-2020

#### 8. Produksi Tanaman Pangan

Produksi tanaman pangan terbesar di Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan tahun 2020 adalah jagung dengan hasil produksi mencapai 117.969,90 ton dari luas panen 36.594 ha, produksi kedelai mencapai 42,50 ton dengan luas panen 13,00 ha, produksi ubi kayu dengan hasil produksi mencapai 8.175 ton dari luas panen 908 ha dan produksi ubi jalar dengan hasil produksi mencapai 96,00 ton dari luas panen 21 Ha. Gambaran produksi dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2. 20 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020

Uraian	2020				
Oraian	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas( Ton/Ha )		
Jagung	36.594	117.969,90	33,50		
Kedelai	13,00	42,50	1,50		
Ubi Kayu	908	8.175	47,10		
Ubi Jalar	21	96,00	24,85		

#### 9. Produksi Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan terbesar di Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan tahun 2020 adalah jambu mete dengan hasil produksi mencapai 5.886 ton dari areal yang ditanam seluas 10.665 ha dan di ikuti dengan produksi kelapa mencapai 3.959 ton dengan areal penanaman seluas 8.282 ha. Gambaran produksi seluruh tanaman perkebunan di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 s.d 2020 disajikan pada Tabel 2.21.

Tabel 2. 21 Produksi Perkebunan Kabupaten Sumba Barat DayaTahun 2018 s.d 2020

	20	2018		2019		)20
Uraian	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)
Kelapa	8.307	3.962	8.307	3.973	8.282	3.959
Jambu Mete	10.891	6.018	10.891	6.012	10.665	5.886
Kopi	5.421	2.208,24	5.414	2.214	5.415	2.204
Kakao	3.200	1.090	3.220	1.090	3.220	1.121
Kemiri	2.536	1.291	2.536	1.291	2.530	1.291
Kapuk	142	28,98	142	28	141	29
Cengkeh	869	132	869	138	869	135
Pinang	9.226	1.690	9.226	1.690	9.226	1.706
Vanili	119	25	119	25,4	119	24
Jarak Pagar	182	50	182	50	182	48
Kapas	68	31	68	31	-	-
Tembakau	156	100	271	178	188	123
Sirih	817	157	817	157	817	156

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

## 10. Populasi Peternakan

Populasi ternak besar di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2020 dengan jumlah paling besar adalah kerbau yang mencapai 12.220 ekor,

kemudian diikuti kuda sejumlah 5.324 ekor dan sapi sejumlah 2.892 ekor, sedangkan populasi ternak kecil didominasi oleh babi sejumlah 49.880 ekor. Gambaran populasi peternakan di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2016 s.d 2018 disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2. 22 Populasi Peternakan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Tahun		Ternak Besar	(ekor)		Ternak Kecil	(ekor)		
	Sapi	Kerbau	Kuda	Babi	Kambing	Domba		
2018	3.009	14.811	5.498	97.893	19.195	-		
2019	3.249	15.022	5.617	102.790	36.787	-		
2020	2.892	12.220	5.324	49.880	22.660	-		

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

Tabel 2.22 menunjukan populasi ternak besar mengalami penurunan pada tahun 2020, hal ini disebabkan adanya pemotongan ternak besar dan ternak kecil yang merupakan hewan yang dipakai dalam acara adat maupun untuk konsumsi usaha rumah makan namun masih rendah dalam pengembangan populasi ternak besar dan ternak kecil. Sedangkan khusus pada ternak babi populasinya menurun di tahun 2020 karena adanya penyebaran virus African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak Babi.

#### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Keberhasilan atas fokus seni budaya dan olahraga diindikasi dalam indikator meliputi: rasio grup kesenian dan gedung kesenian serta rasio klub olahraga dan gedung olahraga, dengan gambaran sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.23.

Tabel 2. 23 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2017

No	Capaian Pembangunan	2016	2017
1	Jumlah Penduduk	285.005	331.894
2	Jumlah grup kesenian	5	7
	Rasio grup kesenian (per 10.000 penduduk)	0,18	0,21
3	Jumlah gedung kesenian	-	-
	Rasio gedung kesenian (per 10.000 penduduk)	-	-
4	Jumlah klub olahraga	11	11
	Rasio klub olahraga (per 10.000 penduduk)	0,39	0,33

No	Capaian Pembangunan	2016	2017
5	Jumlah gedung olahraga	-	-
	Rasio gedung olahraga (per 10.000 penduduk)	-	-

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Sumba Barat Daya 2016 - 2017

#### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.3.1 Urusan Wajib

## 2.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### 1. Pendidikan

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam beberapa indikator meliputi: Angka Partistipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah menengah pertama serta rasio Murid - Guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). APM SD di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 sebesar 94,85%, hal ini mengindikasikan bahwa masih 5,15% penduduk usia sekolah setingkat SD belum mengenyam pendidikan. Disamping itu, siswa yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD masih banyak yang tidak sesuai usianya. Sedangkan APM SMP di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 sebesar 59,63%. Kondisi tersebut masih sangat memprihatinkan karena tingkat partisipasi masyarakat usia sekolah pada jenjang SMP masih tergolong rendah. Angka Partistipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2019 s.d 2020 disajikan dalam Tabel 2.24.

Tabel 2. 24 Angka Partistipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 s.d 2020

	2019		2	020
Jenjang Sekolah	APM	APK	APM	APK
SD/MI	94,95	N/A	94,85	116,83
SMP/MTs	59,47	N/A	59,63	84,22
SMA/SMK/MA	43,11	N/A	43,86	79,03

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) (Tabel 2.25) di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2018 sebesar 27.07, namun pada tahun 2019 menjadi 32.55 karena penyesuaian permendikbud bahwa yang dianggap layak menjadi guru adalah yang memiliki kriteria pendidikan D4/S1, sehingga terjadi penurunan jumlah guru. Tahun 2020 rasio menjadi 21.20 karena keterlambatan sinkron dapodik sehingga ada sejumlah siswa yang tidak terbaca oleh sistem dan peningkatan jumlah guru yang lulus S1. Tahun 2021 rasio murid-guru menjadi 23.90, karena berkurangnya jumlah guru kontrak daerah.

Tabel 2. 25 Rasio Murid dan Guru pada Tingkat Sekolah Dasar

n.T	777'1 1		2018			2019			2020			2021	
No	Wilayah	Murid	Guru	Rasio									
1	Kodi	9.360	295	31,73	8.425	188	44,81	6.849	241	28,42	7.532	236	31,92
2	Kodi Balaghar	1.529	44	34,75	5.644	108	52,26	4.637	134	34,60	4.618	121	38,17
3	Kodi Bangedo	8.173	265	30,84	4.377	102	42,91	3.430	136	25,22	3.381	127	26,62
4	Kodi Utara	14.863	476	31,22	14.098	317	44,47	11.305	404	27,98	11.591	369	31,41
5	Kota Tambolaka 3.580		164	21,83	4.436	195	22,75	3.986	240	16,61	4.453	231	19,28
6	Loura	4.302	255	16,87	3.849	211	18,24	2.930	256	11,45	3.383	252	13,42
7	Wewewa Barat	9.727	373	26,08	8.801	318	27,68	6.662	370	18,01	6.640	335	19,82
8	Wewewa Selatan	4.719	163	28,95	4.750	149	31,88	3.794	188	20,18	3.567	164	21,75
9	Wewewa Tengah	5.825	242	24,07	5.306	219	24,23	4.209	257	16,38	4.396	232	18,95
10	Wewewa Timur	5.099	206	24,75	4.828	179	26,97	3.840	221	17,38	4.197	195	21,52
11	Wewewa Utara	2.870	105	27,33	2.757	81	34,04	2.046	86	23,79	2.086	75	27,81
	Total	70.047	2.588	27,07	67.271	2.067	32,55	53.688	2.533	21,20	55.844	2.337	23,90

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

# 2018 = 2018 = 2021 = 2021 = 2021

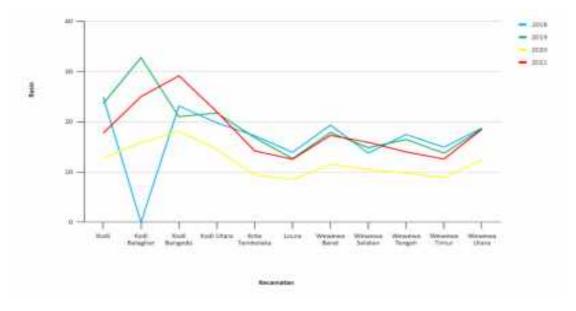
Gambar 2. 6 Rasio Murid dan Guru pada Tingkat Sekolah Dasar

Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Tabel 2.26) di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2018 sebesar 17,90 dan pada tahun 2019 menjadi 17.98. Tahun 2020 rasio menjadi 11.41 karena keterlambatan sinkron dapodik sehingga ada sejumlah siswa yang tidak terbaca oleh sistem. Tahun 2021 rasio murid-guru menjadi 16,95, karena sudah ada peningkatan dalam sinkron dapodik.

Tabel 2. 26 Rasio Murid - Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Wilosob		2018			2019			2020			2021	
NO	Wilayah	Murid	Guru	Rasio									
1	Kodi	2.467	99	24,92	2.596	110	23,60	1.949	153	12,74	2.675	151	17,72
2	Kodi Balaghar	-	6	0,00	1.604	49	32,73	1.189	75	15,85	1.850	74	25,00
3	Kodi Bangedo	2.431	105	23,15	1.029	49	21,00	942	52	18,12	1.457	50	29,14
4	Kodi Utara	3.678	186	19,77	4.328	199	21,75	3.427	235	14,58	4.747	216	21,98
5	Kota Tambolaka	2.583	150	17,22	3.086	183	16,86	2.130	226	9,42	2.984	210	14,21
6	Loura	2.239	161	13,91	1.836	145	12,66	1.217	143	8,51	1.680	134	12,54
7	Wewewa Barat	3.497	181	19,32	3.589	201	17,86	2.568	223	11,52	3.544	205	17,29
8	Wewewa Selatan	1.841	134	13,74	1.973	133	14,83	1.642	157	10,46	2.305	145	15,90
9	Wewewa Tengah	2.479	142	17,46	2.488	151	16,48	1.621	166	9,77	2.322	166	13,99
10	Wewewa Timur	2.136	143	14,94	2.031	148	13,72	1.513	170	8,90	2.190	174	12,59
11	Wewewa Utara	1.031	55	18,75	1.060	57	18,60	733	59	12,42	1.110	60	18,50
	Total	24.382	1.362	17,90	25.620	1.425	17,98	18.931	1.659	11,41	26.864	1.585	16,95

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021



Gambar 2. 7 Rasio Murid dan Guru pada Tingkat Sekolah Menegah Pertama

## Data rombel dan data peserta didik terlihat pada Tabel 2.27 dan 2.28 berikut:

Tabel 2. 27 Data Rombel Kabupaten Sumba Barat Daya - Dapodikdasmen

No	Wilayah	Total	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Tahun	2018						
1	Kodi Utara	612	448	109	32	23	
2	Wewewa Barat	513	337	109	14	53	
3	Kodi	429	294	78	36	21	
4	Loura	414	203	78	66	67	
5	Kodi Bangedo	369	271	70	11	17	
6	Wewewa Tengah	335	215	85	32	3	
7	Kota Tambolaka	321	120	78	56	67	
8	Wewewa Timur	306	181	80	6	39	
9	Wewewa Selatan	254	157	65	25	7	
10	Wewewa Utara	154	101	31	19	3	
11	Kodi Balaghar	69	48		10	11	
	Total 2018	3776	2375	783	307	311	0
Tahun	2019			L		L	
1	Kodi Utara	634	437	131	39	27	
2	Wewewa Barat	514	323	119	15	57	
3	Kodi	414	277	83	36	18	
4	Kota Tambolaka	383	156	100	52	75	
5	Loura	372	186	70	67	48	1
6	Wewewa Tengah	339	209	86	38	6	
7	Wewewa Timur	308	182	74	10	42	
8	Wewewa Selatan	260	157	69	26	8	
9	Kodi Balaghar	258	187	45	14	12	
10	Kodi Bangedo	209	151	31	11	16	
11	Wewewa utara	158	100	35	20	3	
	Total 2019	3849	2365	843	328	312	1
Tahun	2020	•		l			
1	Kodi Utara	655	443	142	39	31	
2	Wewewa Barat	521	322	122	15	62	
3	Kota Tambolaka	425	180	104	55	86	
4	Kodi	417	270	91	36	20	
5	Loura	367	188	65	67	46	1
6	Wewewa Tengah	343	209	85	41	8	
7	Wewewa Timur	326	194	79	11	42	
8	Wewewa Selatan	280	167	76	27	10	
9	Kodi Balaghar	253	176	47	16	14	
10	Kodi Bangedo	209	141	39	14	15	
11	Wewewa Utara	154	95	36	20	3	
	Total 2020	3950	2385	886	341	337	1

No	Wilayah	Total	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Tahun	2021						
1	Kodi Utara	593	382	138	39	34	
2	Wewewa Barat	472	277	112	17	66	
3	Kota Tambolaka	418	170	94	62	92	
4	Kodi	402	258	82	40	22	
5	Loura	347	182	61	69	34	1
6	Wewewa Tengah	314	186	79	41	8	
7	Wewewa Timur	300	178	78	11	33	
8	Wewewa Selatan	240	131	71	27	11	
9	Kodi Balaghar	234	158	48	17	11	
10	Kodi Bangedo	194	120	45	14	15	
11	Wewewa Utara	144	86	37	18	3	
	Total 2021	3658	2128	845	355	329	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Tabel 2. 28 Data Peserta Didik Kabupaten Sumba Barat Daya – Dapodikdasmen

N.	Will1-		Total			SD			SMP			SMA			SMK		SL	В	
No	Wilayah	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P
Tah	un 2018																		
1	Kodi Utara	20.555	10.561	9.994	14.863	8.065	6.798	3.678	1.638	2.040	1.241	567	674	773	291	482	0		
2	Wewewa Barat	15.233	8.228	7.005	9.727	5.303	4.424	3.497	1.712	1.785	383	191	192	1.626	1.022	604	0		
3	Kodi	13.652	6.835	6.817	9.360	4.999	4.361	2.467	1.093	1.374	1.291	515	776	534	228	306	0		
4	Kodi Bangedo	11.394	5.985	5.409	8.173	4.406	3.767	2.431	1.200	1.231	302	174	128	488	205	283	0		
5	Loura	10.148	4.925	5.223	4.302	2.291	2.011	2.239	1.059	1.180	2.248	976	1.272	1.359	599	760	0		
6	Kota Tambolaka	9.535	4.979	4.556	3.580	1.932	1.648	2.583	1.361	1.222	1.332	662	670	2.040	1.024	1.016	0		
7	Wewewa Tengah	9.474	4.913	4.561	5.825	3.202	2.623	2.479	1.244	1.235	1.091	411	680	79	56	23	0		
8	Wewewa Timur	8.405	4.348	4.057	5.099	2.791	2.308	2.136	1.019	1.117	126	56	70	1.044	482	562	0		
9	Wewewa Selatan	7.596	3.893	3.703	4.719	2.516	2.203	1.841	903	938	829	362	467	207	112	95	0		
10	Wewewa Utara	4.546	2.340	2.206	2.870	1.572	1.298	1.031	476	555	573	260	313	72	32	40	0		
11	Kodi Balaghar	2.101	1.119	982	1.529	850	679	0			287	135	152	285	134	151	0		
	Total 2018	112.639	58.126	54.513	70.047	37.927	32.120	24.382	11.705	12.677	9.703	4.309	5.394	8.507	4.185	4.322	0	0	0
Tah	un 2019																		
1	Kodi Utara	20641	10700	9941	14098	7761	6337	4328	1999	2329	1399	623	776	816	317	499	0		
2	Wewewa Barat	14572	7908	6664	8801	4834	3967	3589	1754	1835	438	222	216	1744	1098	646	0		
3	Kodi	12725	6357	6368	8425	4517	3908	2596	1147	1449	1268	510	758	436	183	253	0		
4	Kota Tambolaka	11037	5712	5325	4436	2420	2016	3086	1636	1450	1355	650	705	2160	1006	1154	0		
5	Wewewa Tengah	9119	4733	4386	5306	2921	2385	2488	1236	1252	1171	471	700	154	105	49	0		
6	Loura	9106	4470	4636	3849	2078	1771	1836	878	958	2087	890	1197	1318	614	704	16	10	6
7	Wewewa Timur	8202	4233	3969	4828	2639	2189	2031	990	1041	293	126	167	1050	478	572	0		
8	Kodi Balaghar	7927	4141	3786	5644	3066	2578	1604	756	848	382	177	205	297	142	155	0		
9	Wewewa Selatan	7768	4006	3762	4750	2553	2197	1973	974	999	819	352	467	226	127	99	0		
10	Kodi Bangedo	6178	3255	2923	4377	2393	1984	1029	510	519	313	171	142	459	181	278	0		

N-	W/!!1-		Total		SD SD Jumlah I. P Ju			SMP			SMA				SI	ЪВ			
No	Wilayah	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	Р	Jumlah	L	P
11	Wewewa Utara	4502	2309	2193	2757	1528	1229	1060	480	580	616	269	347	69	32	37	0		
	Total 2019	111777	57824	53953	67271	36710	30561	25620	12360	13260	10141	4461	5680	8729	4283	4446	16	10	6
Tal	un 2020																		
1	Kodi Utara	16414	8747	7667	11305	6312	4993	3427	1692	1735	965	412	553	717	331	386	0		
2	Wewewa Barat	10931	6044	4887	6662	3711	2951	2568	1268	1300	325	192	133	1376	873	503	0		
3	Kota Tambolaka	8796	4579	4217	3986	2206	1780	2130	1133	997	1059	516	543	1621	724	897	0		
4	Kodi	9991	5176	4815	6849	3795	3054	1949	865	1084	820	341	479	373	175	198	0		
5	Wewewa Tengah	6945	3626	3319	4209	2353	1856	1621	817	804	933	340	593	182	116	66	0		
6	Wewewa Timur	6651	3520	3131	3840	2123	1717	1513	772	741	259	109	150	1039	516	523	0		
7	Loura	6479	3293	3186	2930	1587	1343	1217	589	628	1419	617	802	913	500	413	0		
8	Wewewa Selatan	6223	3276	2947	3794	2049	1745	1642	875	767	613	256	357	174	96	78	0		
9	Kodi Balaghar	6426	3432	2994	4637	2534	2103	1189	592	597	351	169	182	249	137	112	0		
10	Kodi Bangedo	4998	2700	2298	3430	1925	1505	942	479	463	318	174	144	308	122	186	0		
11	Wewewa Utara	3241	1697	1544	2046	1166	880	733	326	407	404	171	233	58	34	24	0		
	Total 2020	87095	46090	41005	53688	29761	23927	18931	9408	9523	7466	3297	4169	7010	3624	3386	0	0	0
Tah	un 2021																		
1	Kodi Utara	18857	9850	9007	11591	6406	5185	4747	2356	2391	1474	625	849	1045	463	582	0		
2	Wewewa Barat	12863	7101	5762	6640	3665	2975	3544	1801	1743	490	276	214	2189	1359	830	0		
3	Kota Tambolaka	11667	6017	5650	4453	2447	2006	2984	1584	1400	1802	873	929	2428	1113	1315	0		
4	Kodi	12043	6086	5957	7532	4148	3384	2675	1166	1509	1281	529	752	555	243	312	0		
5	Loura	8602	4357	4245	3383	1833	1550	1680	825	855	2103	928	1175	1392	743	649	44	28	16
6	Wewewa Tengah	8306	4280	4026	4396	2439	1957	2322	1183	1139	1336	506	830	252	152	100	0		
7	Wewewa Timur	7962	4129	3833	4197	2279	1918	2190	1117	1073	364	147	217	1211	586	625	0		
8	Kodi Balaghar	7404	3924	3480	4618	2522	2096	1850	951	899	599	272	327	337	179	158	0		
9	Wewewa Selatan	7009	3615	3394	3567	1912	1655	2305	1195	1110	860	366	494	277	142	135	0		
10	Kodi Bangedo	5718	3007	2711	3381	1876	1505	1457	713	744	432	236	196	448	182	266	0		
11	Wewewa Utara	3862	1964	1898	2086	1162	924	1110	518	592	590	243	347	76	41	35	0		
	Total 2021	104293	54330	49963	55844	30689	25155	26864	13409	13455	11331	5001	6330	10210	5203	5007	44	28	16
_	mhor: Dinos	Dondi		don	Kohud	0770.01	Vob	inoton			rot Do		0001					•	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

## Data guru di kabupaten Sumba Barat Daya terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 29 Data Guru Kabupaten Sumba Barat Daya - Dapodikdasmen

No	Wilayah		Total		SD			SMP			S	MA		S	MK		SLE	3	
INO	wiiayan	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	Р	Jumlah	L	Р	Jumlah	L	Р
Tahı	ın 2018																		
1	Kodi Utara	732	322	410	420	164	256	226	110	116	44	22	22	42	26	16	0	0	0
2	Wewewa Barat	754	324	430	393	140	253	213	106	107	34	9	25	114	69	45	0	0	0
3	Kodi	608	225	383	265	80	185	156	56	100	116	55	61	67	32	35	4	2	2
4	Kodi Bangedo	687	240	447	221	44	177	232	90	142	102	43	59	132	63	69	0	0	0

		Total SD						SMP				SMA		SMK			SLE	2	
No	Wilayah	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah		P
5	Loura	490	206	284	255	109	146	138	52	86	58	25	33	39	20	19	0	0	0
6	Kota Tambolaka	524	211	313	254	95	159	177	76	101	89	39	50	4	1	3	0	0	0
7	Wewewa Tengah	220	105	115	125	51	74	54	29	25	21	12	9	20	13	7	0	0	0
8	Wewewa Timur	458	146	312	219	60	159	170	61	109	11	3	8	58	22	36	0	0	0
9	Wewewa Selatan	389	180	209	183	69	114	144	74	70	48	27	21	14	10	4	0	0	0
10	Wewewa Utara	188	87	101	84	29	55	57	30	27	39	24	15	8	4	4	0	0	0
11	Kodi Balaghar	251	125	126	136	62	74	71	43	28	17	6	11	27	14	13	0	0	0
	Total 2018	5301	2171	3130	2555	903	1652	1638	727	911	579	265	314	525	274	251	4	2	2
Tahu	n 2019																		
1	Kodi Utara	749	318	431	476	177	299	186	93	93	50	24	26	37	24	13	0	0	0
2	Wewewa Barat	675	276	399	373	117	256	181	88	93	22	12	10	99	59	40	0	0	0
3	Kodi	613	222	391	255	65	190	161	59	102	114	59	55	83	39	44	0	0	0
4	Kota Tambolaka	529	212	317	164	32	132	150	72	78	105	51	54	110	57	53	0	0	0
5	Wewewa Tengah	501	197	304	295	103	192	99	42	57	64	29	35	43	23	20	0	0	0
6	Loura	463	181	282	242	83	159	142	64	78	69	29	40	10	5	5	0	0	0
7	Wewewa Timur	412	172	240	265	87	178	105	61	44	20	11	9	22	13	9	0	0	0
8	Kodi Balaghar	409	119	290	206	49	157	143	50	93	3	0	3	57	20	37	0	0	0
9	Wewewa Selatan	349	166	183	163	64	99	134	70	64	45	26	19	7	6	1	0	0	0
10	Kodi Bangedo	206	99	107	105	40	65	55	32	23	38	23	15	8	4	4	0	0	0
11	Wewewa Utara	86	37	49	44	16	28	6	3	3	8	4	4	28	14	14	0	0	0
	Total 2019	4992	1999	2993	2588	833	1755	1362	634	728	538	268	270	504	264	240	0	0	0
Tah	un 2020																		
1	Kodi Utara	754	324	430	393	140	253	213	106	107	34	9	25	114	69	45	0	0	0
2	Wewewa Barat	732	322	410	420	164	256	226	110	116	44	22	22	42	26	16	0	0	0
3	Kota Tambolaka	687	240	447	221	44	177	232	90	142	102	43	59	132	63	69	0	0	0
4	Kodi	608	225	383	265	80	185	156	56	100	116	55	61	67	32	35	4	2	2
5	Wewewa Tengah	524	211	313	254	95	159	177	76	101	89	39	50	4	1	3	0	0	0
6	Wewewa Timur	490	206	284	255	109	146	138	52	86	58	25	33	39	20	19	0	0	0
7	Loura	458	146	312	219	60	159	170	61	109	11	3	8	58	22	36	0	0	0
8	Wewewa Selatan	389	180	209	183	69	114	144	74	70	48	27	21	14	10	4	0	0	0
9	Kodi Balaghar	251	125	126	136	62	74	71	43	28	17	6	11	27	14	13	0	0	0
10	Kodi Bangedo	220	105	115	125	51	74	54	29	25	21	12	9	20	13	7	0	0	0
11	Wewewa Utara	188	87	101	84	29	55	57	30	27	39	24	15	8	4	4	0	0	0
	Total 2020	5301	2171	3130	2555	903	1652	1638	727	911	579	265	314	525	274	251	4	2	2
Tah	un 2021																		
1	Kodi Utara	775	337	438	410	156	254	246	119	127	72	33	39	47	29	18	0	0	0
2	Wewewa Barat	775	325	450	381	132	249	225	107	118	35	9	26	134	77	57	0	0	0
3	Kota Tambolaka	612	237	375	255	76	179	150	59	91	122	58	64	79	39	40	6	5	1
4	Kodi	743	266	477	237	51	186	223	83	140	126	56	70	157	76	81	0	0	0
5	Loura	495	202	293	243	97	146	152	60	92	58	24	34	42	21	21	0	0	0
6	Wewewa Tengah	524	208	316	260	95	165	166	72	94	88	39	49	10	2	8	0	0	0
L	cwcwa rengan	324	200	310	200	93	103	100	14	9+	00	39	ΤĴ	10		U	U	Ľ	J

No	Wilayah		Total			SD		S	MP		S	MA		S	MK		SLE	3	
NO	wiiayan	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	Р
7	Wewewa Timur	263	118	145	149	60	89	71	32	39	18	10	8	25	16	9	0	0	0
8	Kodi Balaghar	472	151	321	221	60	161	178	66	112	11	3	8	62	22	40	0	0	0
9	Wewewa Selatan	398	186	212	178	67	111	155	79	76	48	27	21	17	13	4	0	0	0
10	Kodi Bangedo	189	87	102	84	30	54	61	31	30	38	22	16	6	4	2	0	0	0
11	Wewewa Utara	249	126	123	130	60	70	79	48	31	15	5	10	25	13	12	0	0	0
	Total 2021	5495	2243	3252	2548	884	1664	1706	756	950	631	286	345	604	312	292	6	5	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

#### 2. Kesehatan

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam beberapa indikator antara lain: angka kematian bayi dan ibu, rasio posyandu, puskesmas, poliklinik, pustu, rumah sakit, dokter dan tenaga medis, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan, cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, persentase anak usia 1 (Satu) tahun yang diimunisasi campak, cakupan balita pneumonia yang ditangani, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program Directly, Observed, Treatment, Short Course (DOTS) dan proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan kunjungan Ibu hamil K4, cakupan pelayanan nifas, cakupan pelayanan anak balita, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin dan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat.

## Angka Kematian Bayi (AKB)

Tabel 2.30 menunjukkan AKB di Kabupaten Sumba Barat Daya yang cenderung fluktuatif. AKB tahun 2018 sebanyak 1 lalu meningkat sebesar 10 pada tahun 2019, dan selanjutnya menurun di tahun 2020 menjadi 1 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2. 30 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

		2018			2019			2020	
Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi (< 1 tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB	Jumlah Kematian Bayi (< 1 tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB	Jumlah Kematian Bayi (< 1 tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB
Kodi	-	624	-	3	571	5	-	674	-
Kodi Balaghar	-	409	-	11	459	24	3	476	6
Kodi Bangedo	3	401	7	8	389	21	1	341	3
Kodi Utara	-	889	-	2	962	2	-	958	-
Kota Tambolaka	1	578	2	2	438	5	-	423	-
Loura	-	545	-	1	411	2	-	453	-
Wewewa Barat	-	376	3	-	681	-	-	642	-
Wewewa Selatan	-	346	-	13	333	39	1	441	2
Wewewa Tengah	-	590	-	7	513	14	-	616	-
Wewewa Timur	-	547	-	2	426	5	-	415	-
Wewewa Utara	1	259	4	5	265	19	1	242	4
Jumlah	5	5.564	1	54	5448	10	6	5681	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

## Angka Kematian Ibu (AKI)

Tabel 2.31 menunjukkan bahwa kematian ibu masih menjadi masalah di Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga perlu upaya koordinasi yang baik dan kerjasama lintas sektor/program termasuk upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Sektor kesehatan berupaya melakukan persalinan pada fasilitas kesehatan yang memadai, siap memberikan pelayanan kesehatan 24 jam serta memenuhi standar dari setiap aspek: sumber daya manusia kesehatan, bangunan, peralatan, obat, bahan dan perbekalan kesehatan, sistem (SOP, Protap dan Sistem Rujukan), penganggaran dan pembiayaan. AKI di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2020 mencapai 158 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut adalah angka kematian dengan faktor pengali 100.000 sedangkan angka absolut kematian ibu adalah 9 orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.31.

Tabel 2. 31 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

		2018			2019			2020	
Kecamatan	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI
Kodi	1	624	160	0	571	0	2	674	297
Kodi Balaghar	1	409	244	1	459	218	-	476	-
Kodi Bangedo	-	401	-	1	389	257	2	341	587
Kodi Utara	1	889	112	2	962	208	-	958	-
Kota Tambolaka	-	578	-	1	438	228	2	423	473
Loura	-	545	-	1	411	243	-	453	-

		2018			2019			2020	
Kecamatan	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI
Wewewa Barat	1	376	266	2	681	294	-	642	-
Wewewa Selatan	1	346	289	1	333	300	1	441	227
Wewewa Tengah		-	590	0	513	0	1	616	162
Wewewa Timur	-	547	-	1	426	235	-	415	-
Wewewa Utara	-	259	-	0	265	0	1	242	413
Jumlah	5	5.564	90	10	5448	184	9	5681	158

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

## Posyandu

Posyandu, Posbindu PTM\* dan Puskesmas sebagai wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat pada Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan layanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan KB. Posyandu, Posbindu PTM\* dan Puskesmas mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Jumlah Posbindu PTM\* dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 545 dengan rasio posyandu per 100 balita 1,3, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.32.

Tabel 2. 32 Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM\* Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020

						Str	ata Posyandu					Posyandu	Λ1-+if*	Jumlah
No	Kecamatan	Puskesmas	Prata	ama	Ma	dya	Purr	nama	Mand	iri		Posyandi	l AKIII"	Posbindu
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah	%	Ptm**
1	Loura	Radamata	2	4,7	7	16,3	34	79,1	0	0,0	43	34	79,1	4
2	Kodi Utara	Kori	0	0,0	47	94,0	2	4,0	1	2,0	50	3	6,0	2
∠	Kodi Otara	Bilacenge	0	0,0	28	87,5	4	12,5	0	0,0	32	4	12,5	
	17 1:	Bondo Kodi	6	15,0	27	67,5	6	15,0	1	2,5	40	7	17,5	
3	Kodi	Kawonga Hari	7	29,2	15	62,5	2	8,3	0	0,0	24	2	8,3	2
	K I'D I	Wallandimu	0	0,0	15	65,2	8	34,8	0	0,0	23	8	34,8	
4	Kodi Bangedo	Delu Depa	1	4,8	13	61,9	7	33,3	0	0,0	21	7	33,3	
5	Kodi Balaghar	Panenggo Ede	32	94,1	2	5,9	0	0,0	0	0,0	34	0	0,0	
	W	Waimangura	1	3,3	24	80,0	3	10,0	2	6,7	30	5	16,7	1
6	Wewewa Barat	Weekombaka	2	9,1	18	81,8	2	9,1	0	0,0	22	2	9,1	7
7	Wewewa Timur	Elopada	17	36,2	22	46,8	4	8,5	4	8,5	47	8	17,0	3
0	Wewewa	Tenateke	2	3,8	46	86,8	5	9,4	0	0,0	53	5	9,4	2
8	Selatan	Werilolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Wewewa Utara	Palla	8	22,9	9	25,7	13	37,1	5	14,3	35	18	51,4	4
10	Wewewa Tengah	Tanggaba	0	0,0	39	72,2	10	18,5	5	9,3	54	15	27,8	1
11	Kota Tambolaka	Watukawula	28	75,7	5	13,5	2	5,4	2	5,4	37	4	10,8	3
Jumla	h (Kab/Kota)		106	19,4	317	58,2	102	18,7	20	3,7	545	122	22,4	30
Rasio	Posyandu per 100	Balita									1,3			

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

#### Rasio Sarana Kesehatan

Rasio sarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik kesehatan terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing - masing kecamatan memberikan informasi tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selayaknya 1 fasilitas kesehatan melayani 1.000 penduduk, namun di kabupaten Sumba Barat Daya, 1 fasilitas kesehatan melayani hampir 5.000 jiwa. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.33.

Tabel 2. 33 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 s.d 2018

T.	2	2017		20	18	
Kecamatan	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jumlah Penduduk	Rasio	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jumlah Penduduk	Rasio
Kodi	4	34.645	1:8.661	5	35.301	1:7.060
Kodi Balaghar	5	21.945	1:4.389	5	22.141	1:4.428
Kodi Bangedo	7	20.019	1:2.859	7	20.497	1:2.928
Kodi Utara	8	55.402	1:6.925	8	56.489	1:7.061
Kota Tambolaka	6	42.262	1:7.043	7	43.513	1:6.216
Loura	6	16.819	1:2.803	6	17.603	1:2.933
Wewewa Barat	6	43.056	1:7.176	6	43.748	1:7.291
Wewewa Selatan	7	24.231	1:3.461	8	24.589	1:3.073
Wewewa Tengah	5	31.433	1:6.286	5	31.809	1:6.361
Wewewa Timur	10	29.096	1:2.909	11	29.528	1:2.684
Wewewa Utara	3	12.986	1:4.328	3	13.209	1:4.403

Kecamatan	2	2017		20:	18	
Kecamatan	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jumlah Penduduk	Rasio	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jumlah Penduduk	Rasio
Jumlah	67	331.894	1:4.953	71	338427	1:4.766

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2019 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2019

#### Rasio Tenaga Kesehatan

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025, target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk diantaranya rasio dokter umum 45 per 100.000 penduduk dan rasio perawat 180 per 100.000 penduduk. Tabel 2.34 menunjukkan rasio dokter di Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami penurunan dan masih jauh dari jumlah yang seharusnya 45/100.000, yaitu pada tahun 2019 11/100.000 sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 10/100.000, berbeda dengan rasio tenaga paramedis sebenarnya masih dibawah standar namun terjadi peningkatan yaitu di tahun 2020 tersedia 151 paramedis per 100.000 penduduk, dimana seharusnya tersedia 180 paramedis per 100.000 penduduk. Gambaran rumah sakit, dokter dan tenaga paramedis serta rasio per satuan penduduk, disajikan pada Tabel 2.34.

Tabel 2. 34 Rasio Rumah Sakit, Tenaga paramedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	1	2	2
2	Jumlah Dokter	40	38	24

No	Uraian	2018	2019	2020
3	Jumlah Tenaga Paramedis	509	496	579
4	Jumlah Penduduk	338.427	338.427	303.650
	Rasio Rumah Sakit	0,003	0,006	0,007
	Rasio Dokter	11/100.000	11/100.000	10/100.000
	Rasio Tenaga Paramedis	150/100.000	149,4/100.000	151/100.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

#### Komplikasi Kebidanan dan Komplikasi Neonatal

Penanganan komplikasi kebidanan dan komplikasi neonatal adalah pelayanan kepada ibu untuk mendapatkan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Diperkirakan 20% ibu hamil akan mengalami komplikasi kebidanan dan komplikasi neonatal. Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak selalu dapat diduga sebelumnya, oleh karenanya semua persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan agar dapat segera ditangani. Tabel 2.35 menunjukkan cakupan penanganan komplikasi kebidanan hanya 9,8% dan cakupan penanganan sebesar 12%. Hal ini masih jauh dari target, dimana cakupan pelayanan penanganannya harus mencapai 80%.

Tabel 2. 35 Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Komplikasi Neonatal yang Ditangani Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020

				Perkiraan Bumil	Penan	ıganan	T1	. 1. T . 1. t. TT	J	Perk	ciraan Neon	atal		Penang	ganan Koi	nplikasi N	eonatal	
No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil	dengan Komplikasi	Komplikasi	Kebidanan	Jumia	ah Lahir Hi	aup		Komplikasi		]	Ĺ		P	L +	P
				Kebidanan	S	%	L	P	L + P	L	P	L + P	S	%	S	%	S	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Loura	Radamata	486	97	14	14,4	253	200	453	38	30	68	12	31,6	6	20	18	26,5
2	Kodi Utara	Kori	761	152	6	3,9	324	269	593	49	40	89	1	2,1		0	1	1,1
2	Kodi Utara	Bilacenge	624	125	12	9,6	172	193	365	26	29	55	12	46,5	16	55,3	28	51,1
3	Kodi	Bondo Kodi	535	107		0	194	177	371	29	27	56		0		0	0	0
<b>'</b>	Kodi	Kawonga Hari	365	73	6	8,2	148	155	303	22	23	45		0	1	4,3	1	2,2
4	Kodi Bangedo	Wallandimu	294	59	53	90,1	98	93	191	15	14	29	2	13,6	6	43	8	27,9
Ť	Koui Bangeuo	Delu Depa	260	52		0	76	74	150	11	11	23	6	52,6	5	45	11	48,9
5	Kodi Balaghar	Panenggo Ede	704	141	17	12,1	247	229	476	37	34	71	2	5,4	6	17,5	8	11,2
6	Wewewa Barat	Waimangura	524	105	3	2,9	169	154	323	25	23	48		0		0	0	0
b	wewewa Barat	Weekombaka	480	96	11	11,5	156	163	319	23	24	48	3	12,8	2	8,2	5	10,4
7	Wewewa Timur	Elopada	720	144	15	10,4	220	195	415	33	29	62		0		0	0	0
8	Wewewa Selatan	Tenateke	554	111	10	9	164	145	309	25	22	46	2	8,1	6	27,6	8	17,3
0	wewewa Selatan	Werilolo	217	43	1	2,3	76	56	132	11	8	20		0		0	0	0
9	Wewewa Utara	Palla	407	81		0	130	112	242	20	17	36	1	5,1		0	1	2,8
10	Wewewa Tengah	Tenggaba	826	165	5	3	341	275	616	51	41	92	7	13,7	3	7,3	10	10,8
11	Kota Tambolaka	Watukawula	542	108	10	9,2	228	195	423	34	29	63	2	5,8	1	3,4	3	4,7
Juml	lah (Kab/Kota)		8.299	1.660	163	9,8	2.996	2.685	5.681	449	403	852	50	11,1	52	12,9	102	12

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

#### Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan; serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (cakupan PF). Tabel 2.36 menunjukkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 34,58% dan 37%. Ada peningkatan cakupan pada tahun 2020 sebesar 59%. Angka ini masih jauh dari target kabupaten dimana seharusnya cakupannya mencapai 80% sehingga perlu dilakukan upaya - upaya strategis dan komprehensif agar cakupan dapat ditingkatkan.

Tabel 2. 36 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

		2018			2019			2020	
Kecamatan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh ibu bersalin	%	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh ibu bersalin	%	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh ibu bersalin	%
Kodi	527	1.271	41	440	1.217	36	554	859	64
Kodi Balaghar	248	831	30	302	771	39	341	672	51
Kodi Bangedo	326	1.035	31	314	703	45	308	529	58
Kodi Utara	726	1.930	38	773	1.946	40	798	1321	60
Kota Tambolaka	474	1.300	36	401	1.485	27	39	517	75
Loura	456	592	77	331	591	56	343	464	51

		2018			2019		I wang ditalang aleh	2020	
Kecamatan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh ibu bersalin	%	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh ibu bersalin	%	yang ditolong oleh	Jumlah seluruh ibu bersalin	%
Wewewa Barat	510	1.548	33	488	1.513	32	489	958	51
Wewewa Selatan	204	880	23	225	851	26	276	737	37
Wewewa Tengah	557	1.183	47	471	1.104	43	578	788	73
Wewewa Timur	433	1.037	42	376	1.022	37	374	54	687
Wewewa Utara	220	1.930	11	211	456	46	208	389	53
Jumlah	4.681	13.537	34,58	4.332	11.660	37	4660	7922	59

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

### Cakupan Universal Child Immunization (UCI)

Salah satu indikator keberhasilan program imunisasi adalah pencapaian tinggi dan merata *Universal Child Immunization* (UCI) yang berdasarkan indikator cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) yang meliputi HB0 1 kali, BCG 1 kali, DPT – HB – Hib 3 kali, Polio 4 kali dan campak 1 kali pada bayi usia 1 tahun dengan cakupan minimal 85% dari jumlah sasaran bayi di desa. Pencapaian UCI desa di Kabupaten Sumba Barat Daya dari tahun 2018 sebesar 1,14% naik signifikan menjadi 98,30% di tahun 2019. Pada tahun 2020 semua desa sudah melayani imunisasi dasar lengkap bagi semua bayi di desa, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.37.

Tabel 2. 37 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Kecamatan	2018			2019			2020		
	Desa/ Kel UCI	Desa/ Kel	%	Desa/ Kel UCI	Desa/ Kel	%	Desa/ Kel UCI	Desa/ Kel	%
Kodi	-	19		19	19	100	19	19	100
Kodi Balaghar	1	14	7,14	12	12	100	14	14	100
Kodi Bangedo	-	15		15	15	100	15	15	100
Kodi Utara	1	21	4,76	21	21	100	21	21	100
Kota Tambolaka	-	10		10	10	100	10	10	100
Loura	-	11		12	12	100	12	12	100
Wewewa Barat	-	20		17	17	100	17	17	100
Wewewa Selatan	-	14		13	16	40	16	16	100
Wewewa Tengah	1	20		20	20	100	20	20	100
Wewewa Timur	2	19		19	19	100	19	19	100
Wewewa Utara	6	12		12	12	100	12	12	100
Jumlah	11	175	1,14	170	175	98,30	175	175	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

## Angka Balita Gizi Buruk

Kejadian gizi buruk perlu dideteksi secara dini melalui intensifikasi pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, dilanjutkan dengan penentuan status gizi oleh bidan di desa atau petugas kesehatan lainnya. Penemuan kasus gizi buruk harus segera ditindaklanjuti dengan

rencana tindak yang jelas, sehingga penanggulangan gizi buruk memberikan hasil yang optimal. Pendataan gizi buruk di Kabupaten Sumba Barat Daya didasarkan pada 3 (Tiga) kategori yaitu dengan indikator membandingkan berat badan dengan umur (BB/U), kategori kedua adalah membandingkan tinggi badan dengan umur (TB/U) dan kategori ketiga adalah membandingkan berat badan dengan tinggi badan (BB/TB). Screening pertama dilakukan di posyandu dengan membandingkan BB/U melalui kegiatan penimbangan, jika ditemukan balita yang berada di Bawah Garis Merah (BGM) atau dua kali tidak naik (2T), maka dilakukan konfirmasi status gizi dengan menggunakan indikator BB/TB. Jika ternyata balita tersebut merupakan kasus buruk, maka segera dilakukan perawatan gizi buruk sesuai pedoman di posyandu dan puskesmas. Jika ternyata terdapat penyakit penyerta yang berat dan tidak dapat ditangani di puskesmas maka segera dirujuk ke rumah sakit. Seluruh kasus gizi buruk yang ditemukan dilakukan perawatan, hal ini sudah merupakan konsensus bahwa setiap kasus gizi buruk di Kabupaten Sumba Barat Daya harus mendapatkan perawatan melalui biaya APBD kabupaten. Balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 mencapai 100%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.38.

Tabel 2. 38 Cakupan Balita Gizi Kurang dan Balita Kurus Mendapat Perawatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 serta Cakupan Balita Stunting Agustus 2021

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang	Balita Gizi Kı	urang (BB/U)	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang	Balita Pend (Stun		Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang	Balita Ku	rus (BB/TB)
No.	Kecamatan	Tuskesiilas	Ditimbang	Jumlah %		Diukur Tinggi Badan	Jumlah	%	Diukur	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Loura	Radamata	1.462	25	1,7	1.822	311	17,2	1.462	50	3,4
2	Kodi Utara	Kori	1.334	399	29,9	1.963	502	24,6	1.334	798	59,8
3		Bilacenge	1.061	44	4,1	2.036	496	23,9	1.061	88	8,3
4	Kodi	Bondo Kodi	1.080	124	11,5	2.012	257	25,7	1.080	248	23,0
5		Kawonga Hari	810	44	5,4	777	401	34,6	810	88	10,9
6	Kodi Bangedo	Wallandimu	810	48	5,9	1.113	476	34,9	810	96	11,9
7		Delu Depa	513	10	1,9	1.036	410	38,9	513	20	3,9

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang	Balita Gizi Ku	ırang (BB/U)	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang	Balita Pend (Stunt	` ' '	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang	Balita Kur	rus (BB/TB)
110.	Kecamatan	Tuskesiilas	Ditimbang	Jumlah	%	Diukur Tinggi Badan	Jumlah	%	Diukur	Jumlah	%
8	Kodi Balaghar	Panenggo Ede	930	52	5,6	1.483	304	43,7	930	104	11,2
9	Wewewa Barat	Waimangura	996	15	1,5	2.078	253	37,9	996	30	3,0
10		Weekombaka	828	97	11,7	1.011	897	44,1	828	194	23,4
11	Wewewa Timur	Elopada	941	8	0,9	1.534	416	40,2	941	16	1,7
12	Wewewa Selatan	Tenateke	944	67	7,1	964	769	38,2	944	134	14,2
13		Werilolo	299	12	4,0	668	95	19,3	299	24	8,0
14	Wewewa Utara	Palla	831	15	1,8	1.054	161	17,2	831	30	3,6
15	Wewewa Tengah	Tanggaba	1.350	33	2,4	1.536	344	39,0	1.350	66	4,9
16	Kota Tambolaka	Watukawula	1.309	23	1,8	2.037	199	30,3	1.309	46	3,5
	JMLAH (KAB/KOTA)		15.498	1.016	6,6	23.114	6.291	31,9	15.498	2.032	13,1

# Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib 3, Polio 4, Campak/Mr, dan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Menurut Jenis Kelamin

Proses perjalanan penyakit diawali ketika virus/bakteri/protozoa/jamur masuk ke dalam tubuh. Setiap makhluk hidup yang masuk ke dalam tubuh manusia akan dianggap benda asing oleh tubuh atau yang disebut dengan antigen. Secara alamiah sistem kekebalan tubuh akan membentuk zat anti yang disebut antibodi untuk melumpuhkan antigen. Pada saat pertama kali antibodi berinteraksi dengan antigen, respon yang diberikan tidak terlalu kuat. Hal ini disebabkan antibodi belum mengenali antigen. Pada interaksi antibodi-antigen yang kedua dan seterusnya, sistem kekebalan tubuh sudah mengenali antigen yang masuk ke dalam tubuh, sehingga antibodi yang terbentuk lebih banyak dan dalam waktu yang lebih cepat. Proses pembentukan antibodi untuk melawan antigen secara alamiah disebut imunisasi alamiah. Sedangkan program imunisasi melalui pemberian vaksin merupakan upaya menstimulasi sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam upaya melawan penyakit tertentu dengan melumpuhkan antigen yang telah dilemahkan yang berasal dari vaksin. Program

imunisasi merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada penduduk terhadap penyakit tertentu. Program imunisasi diberikan kepada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, balita, anak - anak, wanita usia subur, dan ibu hamil. Campak adalah penyakit yang sangat menular yang dapat disebabkan oleh sebuah virus yang bernama virus campak. Penularan melalui udara ataupun kontak langsung dengan penderita. Gejala - gejalanya adalah demam, batuk, pilek, dan bercak - bercak merah pada permukaan kulit 3 – 5 hari setelah anak menderita demam. Bercak mula - mula timbul di pipi bawah telinga yang kemudian menjalar ke muka, tubuh dan anggota tubuh lainnya. Komplikasi dari penyakit campak ini adalah radang paru - paru, infeksi pada telinga, radang pada saraf, radang pada sendi, dan radang pada otak yang dapat menyebabkan kerusakan otak yang permanen (menetap). Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib 3, Polio 4, campak/Mr dan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.39.

Tabel 2. 39 Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib 3, Polio 4, Campak/Mr dan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Menurut Jenis Kelamin Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020.

														Bayi Diimu	ınisasi								
			T1-	1. T. d. t	TT! 4						HB0									DO	,		
No	Kecamatan	Puskesmas	Jumia	h Lahir	наир			< 24 J	am					1 - 7 H	ari					BCC	J		
						L		P		L +	P	L		P		L + P	•	L		P		L +	P
			L	P	L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Loura	Radamata	253	200	453	205	81,0	241	120,5	446	98,5		0,0		0,0	0	0,0	250	98,8	283	141,5	533	117,7
2	Kodi Utara	Kori	324	269	593	402	124,1	413	153,5	815	137,4		0,0		0,0	0	0,0	537	165,7	515	191,4	1.052	177,4
3		Bilacenge	172	193	365	315	183,1	306	158,5	621	170,1		0,0		0,0	0	0,0	432	251,2	417	216,1	849	232,6
4	Kodi	Bondo Kodi	194	177	371	238	122,7	252	142,4	490	132,1		0,0		0,0	0	0,0	369	190,2	352	198,9	721	194,3
5		Kawonga Hari	148	155	303	201	135,8	183	118,1	384	126,7		0,0		0,0	0	0,0	221	149,3	205	132,3	426	140,6
6	Kodi Bangedo	Wallandimu	98	93	191	152	155,1	154	165,6	306	160,2		0,0		0,0	0	0,0	172	175,5	174	187,1	346	181,2

														Bayi Diimu	nisasi	i							
			Transla	h Lahir	TT: daam						HB0									BC	<u> </u>		
No	Kecamatan	Puskesmas	Juille	ın Lanır	піцир			< 24 3	am					1 - 7 H	ari					ВС	J		
						L		P		L +	P	L		P		L + P	•	L		P		L +	P
			L	P	L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
7		Delu Depa	76	74	150	146	192,1	123	166,2	269	179,3		0,0		0,0	0	0,0	159	209,2	176	237,8	335	223,3
8	Kodi Balaghar	Panenggo Ede	247	229	476	325	131,6	334	145,9	659	138,4		0,0		0,0	0	0,0	381	154,3	329	143,7	710	149,2
9	Wewewa Barat	Waimangura	169	154	323	270	159,8	261	169,5	531	164,4		0,0		0,0	0	0,0	272	160,9	289	187,7	561	173,7
10		Weekombaka	156	163	319	248	159,0	251	154,0	499	156,4		0,0		0,0	0	0,0	243	155,8	244	149,7	487	152,7
11	Wewewa Timur	Elopada	220	195	415	397	180,5	345	176,9	742	178,8		0,0		0,0	0	0,0	398	180,9	363	186,2	761	183,4
12	Wewewa Selatan	Tenateke	164	145	309	291	177,4	298	205,5	589	190,6		0,0		0,0	0	0,0	320	195,1	245	169,0	565	182,8
13		Werilolo	76	56	132	112	147,4	110	196,4	222	168,2		0,0		0,0	0	0,0	121	159,2	125	223,2	246	186,4
14	Wewewa Utara	Palla	130	112	242	214	164,6	181	161,6	395	163,2		0,0		0,0	0	0,0	207	159,2	201	179,5	408	168,6
15	Wewewa Tengah	Tanggaba	341	275	616	502	147,2	442	160,7	944	153,2		0,0		0,0	0	0,0	487	142,8	447	162,5	934	151,6
16	Kota Tambolaka	Watukawula	228	195	423	324	142,1	330	169,2	654	154,6		0,0		0,0	0	0,0	354	155,3	347	177,9	701	165,7
	JUMLAH (KAB,	/KOTA)	2.996	2.685	5.681	4.342	144,9	4.224	157,3	8.566	150,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4.923	164,3	4.712	175,5	9.635	169,6

## Angka Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru (*alveoli*). Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Pneumonia juga dapat terjadi akibat kecelakaan karena menghirup cairan atau bahan kimia. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak anak usia kurang dari 2 (Dua) tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun, atau orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imunologi). Penemuan dan penanganan penderita pneumonia pada balita di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 mencapai 50%. Gambaran penemuan dan penanganan penderita pneumonia pada balita dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2. 40 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

		2018			2019			2020	
Kecamatan	Jumlah B	Jumlah Perkiraan penderita	%	Jumlah Ditangani	Jumlah Perkiraan penderita	%	Jumlah Ditangani	Jumlah Perkiraan penderita	%
Kodi	1.549	1.549	100	68	64	106,3	152	152	100
Kodi Balaghar	642	642	100	-	-	-	-	-	-
Kodi Bangedo	1.119	1.119	100	1	48	2,1	-	-	-
Kodi Utara	3.763	3.763	100	3	97	3,1	14	14	100
Kota Tambolaka	1.092	1.092	100	9	97	9,3	5	5	100
Loura	1.092	1.092	100	1	97	1	-	-	-
Wewewa Barat	1.693	1.693	100	-	-	-	-	-	-
Wewewa Selatan	1.020	1.020	100	-	-	-	8	8	100
Wewewa Tengah	1.202	1.202	100	51	76	67,1	-	-	-
Wewewa Timur	1.333	1.333	100	12	119	10	3	3	100
Wewewa Utara	972	972	100	-	-	-	-	-	-
Jumlah	15.477	15.477	100	145	598	24	182	182	100

## **Angka Tuberkulosis**

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, WHO menargetkan untuk menurunkan kematian akibat tuberkulosis sebesar 90% dan menurunkan insiden sebesar 80% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2014. Tuberkulosis (TBC) disebabkan oleh infeksi bakteri *mycobacterium tuberculosis*. Sumber penularan adalah

pasien tuberkulosis Basil Tahan Asam positif (BTA positif) melalui percik renik dahak yang dikeluarkannya. Tuberkulosis (TBC) dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TB meskipun dengan tingkat penularan yang kecil. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2020 mencapai 98%, sebagaimana disajikan padapada Tabel 2.41.

Tabel 2. 41 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

		2018			2019			2020	
Kecamatan	Jumlah Diobati	Jumlah Perkiraan penderita	%	Jumlah Diobati	Jumlah Perkiraan penderita	%	Jumlah Diobati	Jumlah Perkiraan penderita	%
Kodi	62	62	100	66	66	100	89	89	100
Kodi Balaghar	12	12	100	11	11	100	11	11	100
Kodi Bangedo	14	14	100	31	31	100	40	40	100
Kodi Utara	49	49	100	77	77	100	53	53	100
Kota Tambolaka	140	140	100	113	113	100	41	46	89
Loura	32	32	100	30	30	100	31	31	100
Wewewa Barat	29	29	100	30	30	100	48	48	100
Wewewa Selatan	4	4	100	20	20	100	25	25	100
Wewewa Tengah	27	27	100	54	54	100	41	43	95
Wewewa Timur	43	43	100	54	54	100	65	65	100
Wewewa Utara	16	16	100	24	24	100	18	19	94
Jumlah	436	436	100	510	510	100	462	470	98

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

### Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)

DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk *aedes aegypti*. Penyakit ini sebagian besar menyerang anak berumur <15 tahun, namun dapat juga menyerang orang dewasa. Setiap penderita DBD yang dilaporkan dilakukan tindakan perawatan penderita, penyelidikan epidemiologi di lapangan serta upaya pengendalian. Tingginya angka kesakitan DBD disebabkan karena adanya iklim tidak stabil dan curah hujan cukup tinggi pada musim penghujan yang merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk *aedes aegypti* yang cukup potensial. Selain itu juga didukung dengan tidak maksimalnya kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di lingkungan masyarakat. Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 mencapai 100%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.42.

Tabel 2. 42 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

		2018			2019			2020	
Kecamatan	Jumlah ditangani sesuai SOP	Jumlah penderita ditemukan	%	Jumlah ditangani sesuai SOP	Jumlah penderita ditemukan	%	Jumlah ditangani sesuai SOP	Jumlah penderita ditemukan	%
Kodi	-	-	-	-	-	-	16	16	100
Kodi Balaghar	-	-	-	-	-	-	1	1	100
Kodi Bangedo	-	-	-	-	-	-	6	6	100
Kodi Utara	-	-	-	2	2	100	13	13	100
Kota Tambolaka	23	23	100	4	4	100	46	46	100
Loura	11	11	100	-	-	-	23	23	100
Wewewa Barat	2	2	100	2	2	100	28	28	100
Wewewa Selatan	-	-	-	25	25	100	7	7	100

		2018			2019			2020	
Kecamatan	Jumlah ditangani sesuai SOP	Jumlah penderita ditemukan	%	Jumlah ditangani sesuai SOP	Jumlah penderita ditemukan	%	Jumlah ditangani sesuai SOP	Jumlah penderita ditemukan	%
Wewewa Tengah	3	3	100	1	1	100	12	12	100
Wewewa Timur	7	7	100	11	11	100	19	19	100
Wewewa Utara	1	1	100	5	5	100	3	3	100
Jumlah	47	47	100	50	50	100	201	201	100

Puskesmas di Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan tahun 2020 mencakup keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan gambaran sebagaimana disajikan pada Tabel 2.43.

Tabel 2. 43 Cakupan Puskesmas Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian / Kecamatan	2018	2019	2020
<u>1</u>	Jumlah puskesmas	15	16	16
1.1	Kodi	2	2	2
1.2	Kodi Balaghar	1	1	1
1.3	Kodi Bangedo	2	2	2
1.4	Kodi Utara	2	2	2
1.5	Kota Tambolaka	1	1	1
1.6	Loura	1	1	1

No	Uraian / Kecamatan	2018	2019	2020
1.7	Wewewa Barat	2	2	2
1.8	Wewewa Selatan	1	2	2
1.9	Wewewa Tengah	1	1	1
1.10	Wewewa Timur	1	1	1
1.11	Wewewa Utara	1	1	1
2	Jumlah seluruh kecamatan	11	11	11
	Cakupan Puskesmas	136,36	145,45	145,45

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

### Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil diupayakan agar memenuhi standar kualitas, yaitu:

- a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA)
- d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- e. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toxoid sesuai status imunisasi
- f. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan

- g. Penentuan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ)
- h. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk Keluarga Berencana)
- i. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya)
- j. Tata laksana kasus

Selain elemen tindakan yang harus dipenuhi, penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (Satu) tahun, sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 (Empat) kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (Satu) tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 mencapai 4.664 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.44.

Tabel 2. 44 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

		2018			2019			2020	
Kecamatan	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil	%	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil	%	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil	%
Kodi	713	1.324	53,85	353	472	75	530	900	59
Kodi Balaghar	317	847	37,43	274	616	45	295	704	42

Kodi Bangedo	263	707	37,20	369	562	66	333	554	60
Kodi Utara	398	1.185	33,59	770	1.554	50	686	1384	50
Kota Tambolaka	270	1.355	19,93	304	1.185	26	210	542	39
Loura	339	616	55,03	353	472	75	303	486	62
Wewewa Barat	319	1.613	19,78	564	1.208	47	503	1004	50
Wewewa Selatan	211	917	23,01	132	680	19	261	772	34
Wewewa Tengah	506	1.233	41,04	636	882	72	681	826	82
Wewewa Timur	695	1.080	64,35	459	816	56	667	720	93
Wewewa Utara	162	573	28,27	204	364	56	195	407	48
Jumlah	4.193	11.450	36,62	4.566	9.310	49	4.664	8.299	59

## Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang - kurangnya 3 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan, pada hari ke 4 sampai dengan hari ke 28 pasca persalinan, dan pada hari ke 29 sampai dengan hari ke 42 pasca persalinan. Masa nifas dimulai dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:

- a. Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu)
- b. Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- c. Pemeriksaan lokhia dan cairan per vagina lain

- d. Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran asi eksklusif
- e. Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana
- f. Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan

Cakupan ibu nifas peroleh 3 (Tiga) kali pelayanan di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 - 2020 disajikan pada Tabel 2.45.

Tabel 2. 45 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

		2018			2019			2020	
Kecamatan	Jumlah ibu nifas peroleh 3x pelayanan	Jumlah ibu nifas	%	Jumlah ibu nifas peroleh 3x pelayanan	Jumlah ibu nifas	%	Jumlah ibu nifas peroleh 3x pelayanan	Jumlah ibu nifas	%
Kodi	510	1.271	40,12	521	1.217	43	554	859	63
Kodi Balaghar	408	813	50,18	446	771	58	461	672	69
Kodi Bangedo	345	1.035	33,33	367	703	52	335	529	63
Kodi Utara	978	1.930	50,67	1.046	1.946	54	933	1321	71
Kota Tambolaka	466	1.300	35,84	467	1.485	31	391	517	76
Loura	563	592	95,10	436	591	74	420	464	91
Wewewa Barat	707	1.548	45,67	676	1.179	57	634	955	66
Wewewa Selatan	297	880	33,75	295	851	35	374	737	51
Wewewa Tengah	562	1.183	47,51	613	1.104	56	622	788	79
Wewewa Timur	476	1.037	45,90	496	1.022	49	420	54	61
Wewewa Utara	247	550	44,91	247	456	54	231	389	59
Jumlah	5.559	12.139	45,79	5.610	11.325	50	5365	7922	68

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

## Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Anak balita adalah anak berumur 12 – 59 bulan. Setiap anak umur 12 – 59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per tinggi/panjang badan (BB/TB). Di tingkat masyarakat pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per umur (BB/U) setiap bulan di Posyandu. Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut - turut atau berat badan anak balita di bawah garis merah harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan untuk menentukan status gizinya dan upaya tindak lanjut. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak usia 12 - 59 bulan dilaksanakan melalui pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan) dan tercatat pada Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah atau pencatatan pelaporan lainnya. Pelayanan SDIDTK dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Suplementasi Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) diberikan pada anak umur 12 – 59 bulan 2 kali per tahun (bulan Februari dan Agustus). Jumlah balita peroleh pelayanan minimal 8 kali di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2020 sebesar 21.082 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.46.

Tabel 2. 46 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

		2018			2019			2020	
Kecamatan	Jumlah Balita Peroleh Pelayanan Minimal 8 Kali	Jumlah Balita	%	Jumlah Balita Peroleh Pelayanan Minimal 8 Kali	Jumlah Balita	%	Jumlah Balita Peroleh Pelayanan Minimal 8 Kali	Jumlah Balita	%
Kodi	2659	43.751	5,87	2.845	3.873	73,50	2.923	3.876	75,41
Kodi Balaghar	1006	23.320	4,31	926	1.841	50,30	1.389	1.966	70,65

		2018			2019			2020	
Kecamatan	Jumlah Balita Peroleh Pelayanan Minimal 8 Kali	Jumlah Balita	%	Jumlah Balita Peroleh Pelayanan Minimal 8 Kali	Jumlah Balita	%	Jumlah Balita Peroleh Pelayanan Minimal 8 Kali	Jumlah Balita	%
Kodi Bangedo	1394	21.450	6,45	1.472	2.170	67,80	1.306	2.029	64,36
Kodi Utara	2594	64.422	4,03	3.257	5.090	64,00	3.465	5.342	64,86
Kota Tambolaka	1156	28.111	4,11	1.230	2.390	51,50	2.198	2.607	84,31
Loura	1372	22.354	6,14	1.931	2.384	81,00	2.009	2.410	83,36
Wewewa Barat	1086	40.179	2,70	2.236	3.580	62,50	2.393	3.844	62,25
Wewewa Selatan	1002	37.362	2,68	1.308	3.281	39,90	1.663	2.966	56,06
Wewewa Tengah	1359	43.762	3,10	1.630	3.378	48,30	1.573	3.373	46,63
Wewewa Timur	151	24.288	0,62	1.359	2.195	61,90	1.217	1.904	63,91
Wewewa Utara	782	12.135	6,44	925	1.126	82,10	946	1.040	90,96
Jumlah	17.553	30.095	58,32	19.119	31.308	61,00	21.082	31.357	67,23

Cakupan bayi baru lahir mendapat IMD dan pemberian ASI eksklusif pada bayi <6 bulan menurut kecamatan dan puskesmas kabupaten/kota Sumba Barat Daya tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.47.

Tabel 2. 47 Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat IMD Dan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Tahun 2020

				Bayi Baru Lahir			Bayi Usia < 6 Bular	n
No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah	Mend	apat IMD	Jumlah	Diberi A	si Eksklusif
			Jumian	Jumlah	%	Jumian	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Loura	Radamata	382	240	62,8	382	380	99,4
2	Kodi Utara	Kori	537	399	74,3	537	692	128,8
3		Bilacenge	361	253	70,1	361	161	44,6
4	Kodi	Bondo Kodi	401	347	86,5	401	289	72,1
5		Kawonga Hari	165	210	127,3	165	166	100,7
6	Kodi Bangedo	Wallandimu	172	153	89,0	172	161	93,7
7		Delu Depa	131	125	95,4	131	101	77,0
8	Kodi Balaghar	Panenggo Ede	423	328	77,5	423	477	112,8
9	Wewewa Barat	Waimangura	319	257	80,6	319	256	80,3
10		Weekombaka	312	201	64,4	312	244	78,3
11	Wewewa Timur	Elopada	434	266	61,3	434	344	79,1
12	Wewewa Selatan	Tenateke	276	137	49,6	276	103	37,1
13		Werilolo	123	74	60,2	123	97	78,9
14	Wewewa Utara	Palla	228	185	81,1	228	147	64,6
15	Wewewa Tengah	Tanggaba	601	470	78,2	601	464	77,1
16	Kota Tambolaka	Watukawula	413	325	78,7	413	482	116,6
Jumlah (	Kab/Kota)		5.278	3.970	75,2	5.278	4.562	86,4

## Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD, SMP, SMA dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD, SMP, SMA dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksaan ketajaman mata, ketajaman pendengaran, kesehatan gigi, kelainan mental emosional dan kebugaran jasmani. Pelaksanaan penjaringan kesehatan dikoordinir oleh puskesmas bersama dengan guru sekolah dan kader kesehatan/konselor kesehatan. Setiap puskesmas mempunyai tugas melakukan penjaringan kesehatan siswa di wilayah kerjanya dan dilakukan 1 kali pada setiap awal tahun ajaran baru sekolah. Siswa ditargetkan 100% mendapatkan pemantauan kesehatan melalui penjaringan kesehatan. Melalui penjaringan kesehatan siswa diharapkan dapat menapis atau menjaring anak yang sakit dan melakukan tindakan intervensi secara dini, sehingga anak yang sakit menjadi sembuh dan anak yang sehat tidak tertular menjadi sakit.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2. 48 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020

					Peserta Didik Sekolah  Usia Pendidikan Dasar*				Sekolah														
No	Kecamatan	Puskesmas		Kelas 1 SD/MI		K	lelas 7 SMP/MTS		I	Zelas 10 SMA/MA		USI	i rendidikan basa	1		SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA	
			Jumlah Peserta Didik	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah Peserta Didik	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah Peserta Didik	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Loura	Radamata	2.160	1.150	53,2	3.050	2.100	68,9	1.081	1.025	94,8	2.160	1.150	53,2	27	27	100,0	15	15	100,0	10	10	100,0
2	Kodi Utara	Kori	1.226	1.150	93,8	670	564	84,2	580	345	59,5	1.226	1.150	93,8	28	28	100,0	8	8	100,0	3	3	100,0
3	Kodi	Bondo Kodi	897	765	85,3	456	376	82,5	480	376	78,3	897	765	85,3	13	13	100,0	5	5	100,0	4	4	100,0
4		Kawonga Hari	1.544	1.063	68,8	438	280	63,9	270	223	82,6	1.544	1.063	68,8	10	10	100,0	3	3	100,0	2	2	100,0
5	Kodi Bangedo	Wallandimu	893	790	88,5	378	276	73,0	345	234	67,8	893	790	88,5	6	6	100,0	2	2	100,0	2	2	100,0

						Pes	serta Didik Sekolah	ı					a Pendidikan Dasa						Sekolah				
No	Kecamatan	Puskesmas		Kelas 1 SD/MI		К	Zelas 7 SMP/MTS		I	Kelas 10 SMA/MA		Usi	Usia Pendidikan Dasai		SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA		
			Jumlah Peserta Didik	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah Peserta Didik	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah Peserta Didik	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6		Delu Depa	484	320	66,1	368	245	66,6	325	268	82,5	484	320	66,1	8	8	100,0	2	2	100,0	2	2	100,0
7	Kodi Balaghar	Panenggo Ede	526	348	66,2	468	208	44,4	230	101	43,9	526	348	66,2	16	16	100,0	5	5	100,0	3	3	100,0
8	Wewewa Barat	Waimangura	754	503	66,7	790	680	86,1	650	545	83,8	754	503	66,7	14	14	100,0	6	6	100,0	6	6	100,0
9		Weekombaka	522	470	90,0	967	854	88,3	231	120	51,9	522	470	90,0	18	18	100,0	7	7	100,0	1	1	100,0
10	Wewewa Timur	Elopada	821	821	100,0	1.133	1.133	100,0	562	562	100,0	821	821	100,0	23	23	100,0	10	10	100,0	7	7	100,0
11	Wewewa Selatan	Tenateke	612	560	91,5	1.020	890	87,3	865	754	87,2	612	560	91,5	16	16	100,0	9	9	100,0	5	5	100,0
12		Werilolo	639	590	92,3	658	450	68,4	258	230	89,1	639	590	92,3	7	7	100,0	5	5	100,0	2	2	100,0
13	Wewewa Utara	Palla	671	543	80,9	680	450	66,2	278	198	71,2	671	543	80,9	14	14	100,0	5	5	100,0	2	2	100,0
14	Wewewa Tengah	Tanggaba	1.065	987	92,7	1.459	1.180	80,9	460	380	82,6	1.065	987	92,7	26	26	100,0	8	8	100,0	4	4	100,0
15	Kota Tambolaka	Watukawula	1.965	1.756	89,4	1.960	1.568	80,0	1.780	1.458	81,9	1.965	1.756	89,4	16	16	100,0	9	9	100,0	10	10	100,0
	lah (Kab/Kota)		14.779	11.816	80,0	14.495	11.254	77,6	8.395	6.819	81,2	14.779	11.816	80,0	242	242	100,0	99	99	100,0	63	63	100,0

## Angka Kesakitan Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Malaria jarang sekali menular secara langsung dari satu orang ke orang lainnya, penularannya melalui gigitan nyamuk atau bisa melalui transfusi darah. Angka kesakitan malaria (*Annual Parasite Incidence/API*) di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2018 tercatat 21 per 1.000 penduduk, turun pada angka 10 per 1.000 penduduk pada tahun 2019 dan 18 per 1.000 penduduk pada tahun 2020. Jumlah suspek malaria yang teridentifikasi positif malaria di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 s.d 2020 disajikan pada Tabel 2.49.

Tabel 2. 49 Proporsi Jumlah Suspek Malaria yang teridentifikasi positif Malaria Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

		20	)18	20	19	2	020
No	Puskesmas	Jumlah Suspek Malaria	Positif	Jumlah Suspek Malaria	Positif	Jumlah Suspek Malaria	Positif
1	Kodi	6.412	672	1.512	712	3.586	1.148
2	Kodi Balaghar	3.530	708	797	496	785	237
3	Kodi Bangedo	6.849	361	1.825	224	2.913	729
4	Kodi Utara	13.203	1.119	2.134	759	6.563	1.588
5	Kota Tambolaka	36.213	3.431	4.721	1.036	990	85
6	Loura	7.035	496	638	133	1.226	214
7	Wewewa Barat	7.907	155	311	12	1.012	23
8	Wewewa Selatan	6.407	464	1.080	202	2.166	458
9	Wewewa Tengah	4.621	203	481	28	658	35
10	Wewewa Timur	5.501	413	796	116	1.053	114
11	Wewewa Utara	3.040	28	259	33	130	10
	Proporsi	100.718	8.050	14.554	3.751	28.045	5.560
	API	21/	1000	10/1	1000	18/	1000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

### Angka Kesakitan HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam

penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan *Voluntary, Conselling, and Testing (VCT)*, zero survey dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

#### a. Jumlah Kasus HIV

Jumlah kasus HIV tahun 2018 sebanyak 15 kasus, naik menjadi 38 kasus di tahun 2019 dan turun menjadi 12 kasus di tahun 2020.

### b. Jumlah Kasus AIDS

Kasus Acquired Immuno Defisiency Syndrome (AIDS) tahun 2018 sebanyak 15 kasus, tahun 2019 dan 2020 yaitu berturut-turut 3 dan 16 kasus. Kasus tersebut didapatkan dari laporan VCT rumah sakit, laporan rutin AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat daya. Peningkatan kasus AIDS ini dikarenakan upaya penemuan atau pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di rumah sakit dan upaya penjangkauan oleh LSM peduli AIDS di kelompok risiko tinggi. Kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, artinya kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil yang ada di masyarakat. Jumlah kematian akibat AIDS terus terjadi dari tahun 2018 sampai 2020 masing masing sebanyak 6, 0 dan 3 kasus. Angka kematian akibat AIDS selama 3 tahun sejumlah 9 kematian. Proporsi jumlah penderita HIV/AIDS berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 s.d 2020 disajikan pada Tabel 2.50.

Tabel 2. 50 Proporsi Jumlah Penderita HIV/AIDS berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Umur		201	8		201	9	2020			
INO	Omur	HIV	AIDS	Kematian	HIV	AIDS	Kematian	HIV	AIDS	Kematian	
1	≤ 4	1	1								
2	5 - 14										
3	15 - 19										
4	20 - 24	4	4	3	3				9	2	
5	25 - 49	10	10	3	35	3		12	6	1	
6	≥ 50								1		
	Jumlah	15	15	6	38	3		12	16	3	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

## 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam beberapa indikator meliputi: proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, persentase jembatan dalam kondisi baik, persentase penduduk berakses air minum, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan rasio jaringan irigasi. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.51.

Tabel 2. 51 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Jalan Kondisi Baik	661,14	693,14	717,14
1.1	Kodi	53,63	56,63	60,13
1.2	Kodi Balaghar	24,90	25,90	27,9
1.3	Kodi Bangedo	34,95	37,95	41,95
1.4	Kodi Utara	60,97	66,47	67,47
1.5	Kota Tambolaka	125,69	130,87	138,87
1.6	Loura	53,19	60,79	-
1.7	Wewewa Barat	89,27	92,32	-
1.8	Wewewa Selatan	51,91	56,16	59,66
1.9	Wewewa Tengah	32,17	69,38	-
1.10	Wewewa Timur	34,44	57,03	59,03
1.11	Wewewa Utara	19,91	20,12	-
2	Jalan secara keseluruhan	1.136,30	1.136,30	1.136,30
	Proporsi	0,47	0,58	0,63

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Tabel 2.51 menunjukkan proporsi panjang jalan pada tahun 2020 baru mencapai 0,63 atau 717,14 km jalan dalam kondisi baik dari total panjang jalan kabupaten (1.136,30 km) sesuai SK Bupati Sumba Barat Daya Nomor 563/KEP/HK/2015, dikarenakan:

 Selain jalan berstatus terdapat juga ruas jalan non status yang dikerjakan lewat dana APBD setiap tahunnya sehingga target ruas jalan berstatus yang harus dikerjakan tahun berjalan tidak tercapai

# 2. Kemampuan keuangan daerah masih terbatas

Gambaran persentase jembatan kabupaten kondisi baik Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.52. Tabel ini menunjukkan persentase panjang jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2018 baru mencapai 60,85% atau 359 m dari total panjang jembatan kabupaten (590 m) sesuai SK Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 563/KEP/HK/2015 karena alokasi anggaran untuk penanganan jembatan masih sangat minim.

Tabel 2. 52 Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Jembatan kondisi baik (m)	359	359	-
2	Jembatan secara keseluruhan (m)	590	590	-
	Persentase	60,85	60,85	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.53.

Tabel 2. 53 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Kecamatan	2018	2019	2020
1	Penduduk berakses air minum	130.021	135.521	139.946
1.1	Kodi	13.814	13.814	14.309
1.2	Kodi Balaghar	9.477	10.627	10.702
1.3	Kodi Bangedo	6.764	7.539	7.654
1.4	Kodi Utara	23.358	23.358	23.678
1.5	Kota Tambolaka	8.508	8.508	8.693
1.6	Loura	6.024	7.024	7.859
1.7	Wewewa Barat	20.712	20.712	21.002
1.8	Wewewa Selatan	8.983	8.983	9.298
1.9	Wewewa Tengah	15.651	16.936	18.451
1.10	Wewewa Timur	10.423	11.173	11.453
1.11	Wewewa Utara	6.127	6.127	6.127
2	Jumlah penduduk seluruhnya	338.427	338.427	303.650
3	Persentase	38,42	40,04	46,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Tabel 2.53 menunjukkan penduduk berakses air minum pada tahun 2020 sejumlah 139.946 atau 46,00%, berarti masih terdapat 54,00% jumlah penduduk yang belum berakses air minum, hal ini disebabkan:

- 1. Program/kegiatan yang memihak pada penyediaan akses air minum masih minim
- 2. Masih adanya sarana fisik yang mengalami kerusakan dan tidak ditangani secara optimal
- 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana yang sudah terbangun
- 4. Belum tersedianya kelembagaan ditingkat kabupaten yang mengelola air minum

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Sumba Barat disajikan pada Tabel 2.54.

Tabel 2. 54 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	1.471	1.554	1.554
1.1	Kodi	-	-	-
1.2	Kodi Balaghar	88	93	93
1.3	Kodi Bangedo	48	46	46
1.4	Kodi Utara	138	135	135
1.5	Kota Tambolaka	18	16	16
1.6	Loura	69	78	78
1.7	Wewewa Barat	321	315	315
1.8	Wewewa Selatan	429	490	490
1.9	Wewewa Tengah	211	223	223
1.10	Wewewa Timur	127	138	138
1.11	Wewewa Utara	22	20	20
2	Luas irigasi kabupaten	2.512,52	2.512,52	2.512,52
3	Persentase VI. L. C. L. D. L. D. L. D. L. D. L. D. C. C. L. D. L. D. L. D. L. D. L. D. C. C. L. D. L.	58,55	61,85	61,85

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

Tabel 2.54 menunjukkan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik tahun 2020 baru mencapai 61,85% dari kondisi ideal 100%, hal ini disebabkan:

- 1. Program/kegiatan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi serta biaya pemeliharaan daerah irigasi masih minim
- 2. Belum semua Daerah Irigasi (DI) terbentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang tugasnya antara lain mengelola dan mengatur serta memelihara jaringan irigasi

Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Sumba Barat Daya terus meningkat dari tahun ke tahun. Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.55.

Tabel 2. 55 Jaringan Irigasi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Panjang saluran irigasi (m)	100.719,59	106.642,49	106.642,49
1.1	Kodi	-	1	-
1.2	Kodi Balaghar	4.372,88	4.952,88	4.952,88
1.3	Kodi Bangedo	6.284,17		
1.4	Kodi Utara	3.813,19		
1.5	Kota Tambolaka	2.924,92		
1.6	Loura	6.020	6.466,83	
1.7	Wewewa Barat	9.964	10.158,6	
1.8	Wewewa Selatan	37.472	39.114,02	42.504,92
1.9	Wewewa Tengah	9.824	9.824,34	10.673,34
1.10	Wewewa Timur	14.750	15.642,4	16.869,4
1.11	Wewewa Utara	2.118,24	2.118,24	
2	Luas lahan budidaya pertanian (Ha)	3.069	2.512,52	2.512,52

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

## 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja pelayanan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam beberapa indikator meliputi: rasio dan cakupan rumah layak huni, persentase lingkungan pemukiman kumuh serta cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU). Rasio rumah layak huni di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.56.

Tabel 2. 56 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah layak huni	49.101	56.279	56.650
1.1	Kodi	4.967	5.063	5.178
1.2	Kodi Balaghar	2.520	2.357	2.582
1.3	Kodi Bangedo	4.178	4.339	4.348
1.4	Kodi Utara	8.441	8.472	8.559
1.5	Kota Tambolaka	6.541	6.958	6.754
1.6	Loura	3.465	3.471	3.552
1.7	Wewewa Barat	6.669	6.865	6.867
1.8	Wewewa Selatan	5.036	5.132	5.123
1.9	Wewewa Tengah	5,613	5.904	5.903
1.10	Wewewa Timur	4.559	4.941	4.990
1.11	Wewewa Utara	2.719	2.777	2.794
2	Jumlah penduduk kabupaten	338.427	338.427	303.650
3	Rasio	0,14	0,16	0,18

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Tabel 2.57 menunjukkan rasio rumah layak huni Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2020 baru mencapai angka 0,18 dari kondisi ideal 0,2 dimana asumsinya 1 (Satu) rumah dihuni rata – rata 5 (Lima) orang, sehingga masih terdapat selisih 0,04 dari jumlah penduduk yang belum memiliki rumah layak huni.

Tabel 2. 57 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

		2018		2019			2020		
Kecamatan	Jumlah seluruh rumah layak huni	Jumlah seluruh rumah layak huni	%	Jumlah seluruh rumah layak huni	Jumlah rumah	%	Jumlah seluruh rumah layak huni	Jumlah rumah	%
Kodi	4.967	5.063	72,80	5.063	6.823	74,20	5.178	6.818	75,94
Kodi Balaghar	2.520	2.357	80,61	2.357	3.126	75,40	2.582	3.126	82,25
Kodi Bangedo	4.178	4.339	71,84	4.339	5.816	74,60	4.348	5.816	74,75
Kodi Utara	8.441	8.472	83,23	8.472	10.142	83,53	8.559	10.142	84,39
Kota Tambolaka	6.541	6.958	78,69	6.958	8.312	83,71	6.754	8.309	81,28
Loura	3.465	3.471	82,09	3.471	4.221	82,23	3.552	4.221	84,15
Wewewa Barat	6.669	6.865	75,72	6.865	8.807	77,79	6.867	8.816	77,89
Wewewa Selatan	5.036	5.132	77,67	5.132	6.484	79,01	5.123	6.479	79,07
Wewewa Tengah	5,613	5.904	74,35	5.904	7,549	78,21	5.903	7.558	78,10
Wewewa Timur	4.559	4.941	77,59	4.941	5.876	84,09	4.990	5.871	84,99
Wewewa Utara	2.719	2.777	74,82	2.777	3.634	76,42	2.794	3.634	76,88
Jumlah	49,101	56,279	77,63	56,279	63.249	79,47	56.650	70.790	80,02

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Tabel 2.57 menunjukkan kondisi cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sumba Barat Daya baru mencapai 80,02% pada tahun 2020, sehingga masih terdapat 19,88% cakupan rumah layak huni yang belum tersedia, hal ini disebabkan:

- 1. Keterbatasan anggaran untuk program rumah layak huni
- 2. Bertambahnya jumlah rumah tidak layak huni di suatu wilayah sebagai akibat meningkatnya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah penduduk
- 3. Penerima bantuan rumah layak huni belum tepat sasaran

Persentase lingkungan pemukiman kumuh di kabupaten Sumba Barat Daya dari tahun 2018 – 2020 yang berlokasi di kecamatan Kota Tambolaka seluas 69 ha atau 0,70%. Persentase lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.58.

Tabel 2. 58 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

	2018			2019			2020			
Kecamatan	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)	Luas wilayah (ha)	%	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)	Luas wilayah (ha)	%	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)	Luas wilayah (ha)	%	
Kodi		11.186			11.186			11.186		
Kodi Balaghar		14.467			14.467			14.467		
Kodi Bangedo		7.322			7.322			7.322		
Kodi Utara		24.382			24.382			24.382		
Kota Tambolaka	69	9.895	0, 70	69	9.895	0,70	69	9.895	0,70	

	2018			2019			2020		
Kecamatan	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)	Luas wilayah (ha)	%	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)	Luas wilayah (ha)	%	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)	Luas wilayah (ha)	%
Loura		13.851			13.851			13.851	
Wewewa Barat		14.734			14.734			14.734	
Wewewa Selatan		17.414			17.414			17.414	
Wewewa Tengah		10.967			10.967			10.967	
Wewewa Timur		13.988			13.988			13.988	
Wewewa Utara		6.326			6.326			6.326	
Jumlah	69	144.532	0,05	69	144.532	0,70	69	144.532	0,70

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan tahun 2019 yang mencapai 85,14%. Jumlah ini perlu dioptimalkan di masa mendatang sehinga mencapai 100%. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.59.

Tabel 2. 59 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 s.d 2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah lingkungan yang didukung PSU	32.507	32.558	32.517
1.1	Kodi	2.603	2.610	2.603
1.2	Kodi Balaghar	1.998	2.003	1.998
1.3	Kodi Bangedo	1.546	1.550	1.546
1.4	Kodi Utara	3.797	3.803	3.797
1.5	Kota Tambolaka	3.995	3.998	4.005
1.6	Loura	4.976	4.980	4.976
1.7	Wewewa Barat	3.705	3.708	3.705
1.8	Wewewa Selatan	2.299	2.304	2.299
1.9	Wewewa Tengah	3.599	3.605	3.599
1.10	Wewewa Timur	2.947	2.951	2.947
1.11	Wewewa Utara	1.042	1.046	1.042
2	Jumlah lingkungan perumahan seluruh Kabupaten	38.193	38.210	38.193
	Persentase	85,11	85,21	85,14

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020

## 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja pelayanan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam indikator rasio petugas polisi pamong praja, yang disajikan pada Tabel 2.60 menunjukkan bahwa rasio petugas polisi pamong praja per 1000 penduduk masih rendah yaitu sebesar 0,0010 per 1000 penduduk.

Tabel 2. 60 Rasio Personil Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja ASN	23	23	20
Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Tenaga Kontrak	311	375	273
Jumlah Penduduk	338.427	313.127	303.650
Rasio	0,0010	0,0013	0,0010

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

#### 6. Sosial

Kinerja pelayanan urusan sosial di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam beberapa indikator meliputi: persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial, tertangani, memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, persentase panti sosial dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, serta persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Gambaran PMKS yang memperoleh bantuan sosial, tertangani, memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 s.d tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.61.

Tabel 2. 61 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial, PMKS yang Tertangani, PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	65.867	58.571	67.642
2	Jumlah PMKS yang tertangani	65.867	58.571	67.642
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	160	30.509	34.430
4	PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	50	-	-
5	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	63.112	76.861	87.422
	Persentase PMKS yang diberikan bantuan (%)	0,003	76,20	77,17
	Persentase PMKS yang tertangani (%)	0,003	76,11	77,17
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	0,003	39,69	39,38
	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	0,00076	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Persentase panti sosial dan WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.62.

Tabel 2. 62 Persentase Panti Sosial dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Uraian	2018	20196	20207
Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-	0	0
Jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	9	0	0
Persentase (%)		-	-
Jumlah WKSBM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	-	0	0
Jumlah WKSBM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	2.163	0	0
Persentase (%)	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.63.

Tabel 2. 63 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat dan Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	599	1.515	1200
2	Jumlah korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	6	-	-
3	Jumlah korban bencana	3200	1.515	1.200
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial (%)	18.72	100	100
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	0,19	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya 2019 – 2024

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Sumba Barat Daya, disajikan pada Tabel 2.64.

Tabel 2. 64 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	160	200	-
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	4584	19.777	19.777
Persentase (%)	4,36	1,01	0

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

## 2.3.1.2 Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

### 1. Tenaga kerja

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang tenaga kerja digambarkan dengan beberapa indikator meliputi: angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun, besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), besaran pencari kerja yang ditempatkan dan terdaftar, jumlah perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan kerja, dan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan, serta jumlah partisipasi angkatan kerja yang bekerja. Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun dan besaran kasus yang diselesaikan dengan PB di Kabupaten Sumba Barat Daya, disajikan pada Tabel 2.65.

Tabel 2. 65 Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja per Tahun dan Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	Capaian				
NO		2018	2019	2020		
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun					
1.1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	2	4	1		
1.2	Jumlah perusahaan	219	224	283		
	Rasio	9,13	17,86	28,30		

No	Uraian		Capaian	
NO	Uraian		2019	2020
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)			
2.1	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	2	4	1
2.2	Jumlah kasus yang dicatatkan	2	4	1
	Persentase	100	100	100

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Sumba Barat Daya, disajikan pada Tabel 2.66.

Tabel 2. 66 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	644	3.676	256
Jumlah pencari kerja yang terdaftar	850	4.059	256
Persentase (%)	75,76	90,56	100

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Jumlah perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan kerja dan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) di Kabupaten Sumba Barat Daya, disajikan pada Tabel 2.67.

Tabel 2. 67 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Keselamatan dan Perlindungan Kerja dan Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Keselamatan dan perlindungan			
1.1	Jumlah perusahaan yang menerapkan Keselamtan dan Kesehatan Kerja (K3)	170	171	185
1.2	Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten	219	224	283
	Persentase (%)	29	31	53
2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek			
2.1	Jumlah pekerja/buruh Jamsostek	368	1.281	1.270
2.2	Jumlah pekerja/buruh	832	3.226	3.393
	Persentase (%)	56	60	63

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Sumba Barat Daya, disajikan pada Tabel 2.68.

Tabel 2. 68 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Berbasis Masyarakat dan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			
1.1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	-	35	0
1.2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	1	45	0
	Persentase(%)	1	77,78	0
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat			
2.1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	96	35	0
2.2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	178	35	0
	Persentase(%)	53,93	100	0
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			
3.1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	16	10	220
3.2	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	36	15	315
	Persentase(%)	44,44	66,67	66,67

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Gambaran partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.69.

Tabel 2. 69 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja	157.538	158.848	174.320
1.1	Bekerja	155.953	156.869	170.204
1.2	Pengangguran Terbuka	1.585	1.979	4.116
2	Bukan Angkatan Kerja	40.187	43.934	49.429
2.1	Sekolah	17.182	24.731	20.614
2.2	Mengurus Rumah Tangga	18.798	13.906	21.520
2.3	Lainnya	4.207	5.297	7.295
	Jumlah	197.725	202.782	223.749

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak digambarkan dengan beberapa indikator meliputi: partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta, proporsi perempuan di DPRD, partisipasi angkatan kerja perempuan, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas, cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Gambaran kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.70.

Tabel 2. 70 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah			
	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	1.863	1.863	1.863
	Jumlah pekerja perempuan	69.704	69.704	69.704
	Persentase (%)	2,67	2,67	2,67
2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta			
	Jumlah pekerja perempuan di lembaga Swasta	-	-	-
	Jumlah pekerja perempuan	69.704		
	Persentase (%)	-		
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR			
	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	-	4	4
	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	35	35	35
	Persentase (%)	-	11,43	11,43
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan			
	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	69.704	69.704	69.704
	Jumlah angkatan kerja perempuan	70.101	70.101	70.101

No	Uraian	2018	2019	2020
	Persentase (%)	99,43	99,43	99,43
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			
	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti	15	23	12
	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk	23	32	12
	Cakupan	65,21	71,87	100
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit			
	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan	2	1	-
	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas	3	1	-
	Cakupan	16,66	100	0
7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu			
	Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan	9	23	-
	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan	23	32	-
	Cakupan	39,13	71,87	0
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			
	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang- undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	2	2	-
	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	2	2	-
	Cakupan	100	100	0
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum			
	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	4	2	2
	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	9	2	10
	Cakupan	44,44	100	20
10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan			
	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulungan	3	3	-
	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	23	32	12
	Cakupan	13,04	9,37	0
11	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan			
	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	3	1	12
	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	15	32	-
	Cakupan	20,00	3,12	3,12

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

## 3. Pangan

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang pangan digambarkan dengan beberapa indikator meliputi: ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita serta pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, yang disajikan dalam Tabel 2.71.

Tabel 2. 71 Ketersediaan Pangan Utama, Energi dan Protein per Kapita serta Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama			
1.1	Rata - rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)	129.955.000	154.920.188	216.463.400
1.2	Jumlah penduduk (jiwa)	338.427	313.127	420.861
	Ketersediaan pangan per penduduk per tahun (kg)	384	495	514
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita			
2.1	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)	2.421	2.514	2.325
2.2	Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	62,01	59,53	50,23

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Ketersediaan pangan utama (padi, jagung dan ubi kayu) rata - rata sebesar 514 kg per penduduk/tahun, diperoleh dari pangan utama tahun 2020 sejumlah 216.463.400 kg/tahun. Standar konsumsi pangan masyarakat NTT 134,50 kg/orang/tahun (0,37 kg/kapita/hari atau 368 gram/kapita/hari). Sementara ketersediaan energi tahun 2020 berjumlah 2.325 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein perkapita mencapai 50,23 gram/kapita/hari. Ketersediaan energi dan protein berasal dari 11 (Sebelas) sumber pangan (padi - padian, makanan berpati, gula, buah/biji berminyak, buah - buahan, sayuran, daging, telur, susu, ikan, dan minyak/lemak (nabati dan hewani). Standar energi dan protein untuk tingkat nasional adalah 2.400 kkal/kapita/hari dan protein 63 gram/kapita/hari.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 dilakukan sebanyak 120 sampel dengan gambaran disajikan pada Tabel 2.72.

Tabel 2. 72 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	90	90	120
Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	90	90	120
Persentase (%)	100	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019

#### 4. Pertanahan

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang pertanahan digambarkan dengan indikator cakupan luas lahan bersertifikat, cakupan penyelesaian kasus tanah negara dan persentase penyelesaian izin lokasi. Lahan bersertifikat di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 mencapai 10,27% dari keseluruhan lahan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.73. Penyelesaian izin lokasi disajikan pada Tabel 2.74.

Tabel 2. 73 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2017

Uraian	2016	2017
Lahan bersertifikat	5,1	10,27

Sumber: LPPD Kabupaten Sumba Barat Daya 2017 - 2018

Tabel 2. 74 Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2015 s.d 2017

Uraian	2015	2016	2017
Jumlah ijin lokasi	-	457	457
Jumlah permohonan	-	457	457
Persentase	-	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Sumba Barat Daya 2014 - 2018

#### 5. Lingkungan Hidup

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup digambarkan dalam beberapa indikator meliputi: cakupan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan ketersediaan dokumen bidang lingkungan hidup yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2019, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.75 dan 2.76.

Tabel 2. 75 Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019

No	Uraian	Capaian	Keterangan
1	Tersusunnya RPPLH	tidak ada	refocusing
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	tidak ada	refocusing
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	ada	KLHS terhadap RTRW, RPJMD, RDTR
4	Hasil pengukuruan indeks kualitas air	3,17	Cemar ringan: dengan jumlah 4 sampel air di 4 lokasi (berdasarkan dokumen IKLH tahun 2019)
5	Hasil pengukuruan indeks kualitas udara	79,91	Baik (range 74 – 82)
6	Hasil pengukuruan indeks kualitas tutupan lahan	38,37	Waspada (range 0 - 50)
7	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	80%	Pelaku usaha yang menaati izin lingkungan, PPLH, PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (dari 30 pelaku usaha yang diawasi dan dibina, 24 pelaku usaha yang taat terhadap izin lingkungan, PPLH, PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
8	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di kabupaten	tidak ada	
9	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	tidak ada	
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	tidak ada	
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	tidak ada	
12	Penetapan hak MHA	tidak ada	
13	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	tidak ada	
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	tidak ada	
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	tidak ada	
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	Kalpataru
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	100 %	Hanya 1 pengaduan masyarakat di tahun 2019 yang teregistrasi dan ditangani
18	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	0	
19	Persentasi cakupan areal pelayanan	0,07%	
20	Persentasi jumlah sampah yang ditangani	60%	
21	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	0	Memiliki TPA namun tidak beroperasi
22	Persentase ijin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan.	0	
23	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020

Tabel 2.75 menunjukkan capaian kinerja bidang lingkungan hidup kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan tahun 2019 dengan keterangan sebagai berikut:

- Diharapkan akan ada dokumen RPPLH sehingga dokumen tersebut dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2. Hasil pengukuran indeks kualitas air diperoleh nilai 3,17 (cemar ringan) sehingga perlu dibuat program/kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan melalui gerakan gerakan peduli lingkungan khususnya pada sumber sumber mata air di kabupaten Sumba Barat Daya
- 3. Hasil pengukuran indeks tutupan lahan diperoleh nilai 38,37 (kategori waspada) sehingga pemerintah perlu segera merealisasikan Perda RTRW, RDTR dan RDTRK sebagai produk tata ruang yang mampu mengendalikan aktivitas pembangunan yang secara tidak langsung berimplikasi bagi keberadaan tutupan lahan dan menggerakkan kembali Gerakan Penanaman Berbasis Masyarakat (GPBM)
- 4. Diharapkan akan ada pelatihan dan pembinaan bagi PPLHD serta penyediaan sarana dan prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum
- 5. Diharapkan akan dilakukan kegiatan pendataan MHA dan disahkan secara hukum untuk mendapatkan pengakuan serta dilakukan pembinaan, pendampingan dan pelatihan
- 6. Perlu dilakukan pengaktifan kembali operasional TPA Ramadana sekaligus pembentukan UPTD TPA Ramadana dan pemenuhan serta peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pembentukan bank sampah dan edukasi 3R untuk mengurangi potensi timbunan sampah
- 7. Mendorong dan mendukung berdirinya usaha pengelolaan sampah yang diprakarsai oleh swasta dengan pemberian insentif dari pemerintah
- 8. Penindakan akan lebih optimal bila Dinas Lingkungan Hidup kabupaten memiliki pejabat pengawas lingkungan

 Perlunya sosialisasi tentang SOP pengaduan dampak lingkungan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami tata cara pengaduan dampak lingkungan

Tabel 2. 76 Timbunan Sampah yang Ditangani, Persentase Cakupan Area Pelayanan, Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Timbunan sampah yang ditangani			
1.1	Volume timbulan sampah yang di tangani	-	-	-
1.2	Total timbunan sampah (ton)	41.598	42.428	43.276
	Persentase (%)	-		
2	Persentase cakupan area pelayanan			
2.1	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km²/ha)	98,95	98,85	98,85
2.2	Luas area kabupaten/kota (km²/ha)	1.445	1.445	1.445
	Persentase (%)	6,85	6,85	6,85
3	Persentase jumlah sampah yang tertangani			
3.1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	-	8.262	25.956
3.2	Total jumlah timbunan sampah di kabupaten/kota (ton)	41.598	42.428	43.276
	Persentase (%)	-		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

# 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil digambarkan dengan indikator cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran. Sampai dengan tahun 2020 cakupan kepemilikan KTP mencapai 90,15% dan kepemilikan akte kelahiran mencapai 22,91%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.77.

Tabel 2. 77 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
I	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	130.519	150.902	170.637
1.1	Kodi	12.833	13.808	15.977
1.2	Kodi Balaghar	3.833	4.006	4.649
1.3	Kodi Bangedo	10.507	12.264	13.485

No	Uraian	2018	2019	2020
1.4	Kodi Utara	19.762	22.235	25.758
1.5	Kota Tambolaka	14.550	15.818	18.544
1.6	Loura	8.252	11.843	12.802
1.7	Wewewa Barat	20.273	22.820	25.721
1.8	Wewewa Selatan	10.697	11.508	12.970
1.9	Wewewa Tengah	10.529	12.401	14.571
1.10	Wewewa Timur	13.486	17.750	19.078
1.11	Wewewa Utara	5.797	6.449	7.082
2	Jumlah penduduk wajib KTP seluruh Kabupaten	194.692	191.4468	189.273 <sup>9</sup>
	Persentase (%)	67,03	78,82	90,15
II	Cakupan penerbitan akta kelahiran			
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	647	751	485
1.1	Kodi	31	32	25
1.2	Kodi Balaghar	9	5	2
1.3	Kodi Bangedo	22	16	9
1.4	Kodi Utara	31	36	29
1.5	Kota Tambolaka	164	188	116
1.6	Loura	64	87	41
1.7	Wewewa Barat	91	131	89
1.8	Wewewa Selatan	29	33	35
1.9	Wewewa Tengah	103	95	62
1.10	Wewewa Timur	79	95	54
1.11	Wewewa Utara	24	33	3341
2	Jumlah kelahiran seluruh kabupaten	2.706	1.592	2.117
	Persentase (%)	23,90	47,17	22,91

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

# 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam beberapa indikator meliputi: cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, rata - rata jumlah kelompok binaan PKK, persentase PKK aktif dan persentase posyandu aktif, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.78 dan 2.79.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya 2019 – 2024

Tabel 2. 78 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

No	No Kecamatan		Desa dengan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik (2017)	% (2017)	Desa dengan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik (2018)	% (2018)	Desa dengan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik (2019)	% (2019)
1.1	Kodi	19	14	73,68	19	100,00	19	100,00
1.2	Kodi Utara	21	18	85,71	18	85,71		
1.3	Kodi Balaghar	14	11	78,57	13	92,86		
1.4	Kodi Bangedo	15	12	80,00	14	93,33		
1.5	.5 Kota 8 Tambolaka		8	100,00	8	100,00	8	100,00
1.6	Loura	11	10	83,33	10	90,91		
1.7	Wewewa Barat	20	17	85,00	20	100,00	20	100,00
1.8	Wewewa Selatan	14	12	85,71	12	85,71		
1.9	Wewewa Tengah	20	10	50,00	20	100,00	20	100,00
1.10	10 Wewewa 19 Timur 19		10	52,63	17	89,47		_
1.11	Wewewa 12 Utara		6	50,00	11	91,67		
	Jumlah	173	128	73,98	164	94,79		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020

Tabel 2.78 menunjukkan bahwa cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sebesar 73,98% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 94,79% pada tahun 2018 karena kesadaran aparat desa untuk memiliki sarana prasarana perkantoran desa yang baik.

Tabel 2. 79 Rata - Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK, Persentase PKK Aktif, Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 s.d 2019

No	Uraian	2017	2018	2019
I	Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK			
1	Jumlah kelompok binaan PKK	33	22	175
1.1	Kodi	3	2	19
1.2	Kodi Balaghar	3	2	14
1.3	Kodi Bangedo	3	2	15
1.4	Kodi Utara	3	2	21
1.5	Kota Tambolaka	3	2	10

No	Uraian	2017	2018	2019
1.6	Loura	3	2	11
1.7	Wewewa Barat	3	2	20
1.8	Wewewa Selatan	3	2	14
1.9	Wewewa Tengah	3	2	20
1.10	Wewewa Timur	3	2	19
1.11	Wewewa Utara	3	2	12
2	Jumlah PKK seluruh Kabupaten	175	175	175
	Persentase	18,85	12,57	100,00
II	Persentase PKK aktif			
1	Jumlah PKK aktif	124	80	
2.1	Kodi	13	5	
2.2	Kodi Bangedo	12	13	
2.3	Kodi Balaghar	10	4	
2.4	Kodi Utara	15	6	
2.5	Kota Tambolaka	9	7	
2.6	Loura	9	8	
2.7	Wewewa Barat	13	9	
2.8	Wewewa Selatan	7	3	
2.9	Wewewa Tengah	10	7	
2.10	Wewewa Timur	18	9	
2.11	Wewewa Utara	8	9	
2	Jumlah PKK seluruh Kabupaten	173	173	
	Persentase	71,68	46,24	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya, 2019

Tabel 2.79 menunjukkan rata - rata jumlah kelompok binaan PKK di tahun 2017 sebesar 18,85% menurun menjadi 12,57% di tahun 2018. Persentase PKK aktif sebesar di tahun 2017 sebesar 71,68% menurun menjadi 46,24% di tahun 2018.

# 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam capaian indikator persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif dan jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.80 dan 2.81.

Tabel 2. 80 Persentase Peserta KB Aktif Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020

			2016			2017			2018			2019			2020	
No	Kecamatan	PUS	Peserta KB Aktif	%												
1	Kodi	6.024	2.493	41,38	6.024	727	12,07	6.024	1.592	26,43	5.773	2.582	44,73	5.770	3.251	56,34
2	Kodi Balaghar	3.140	1.081	34,43	3.140	295	9,39	3.142	1.342	42,71	3.869	1.431	36,99	3.869	1.662	42,96
3	Kodi Bangedo	2.543	1.500	58,99	2.542	140	5,51	2.543	1.592	62,60	2.543	1.893	74,44	2.543	2.017	79,32
4	Kodi Utara	7.420	3.799	51,20	7.623	1.897	24,89	7.613	3.999	52,53	6.412	2.266	35,34	6.619	4.526	68,38
5	Kota Tambolaka	3.661	2.492	68,07	4.185	569	13,60	4.185	2.451	58,57	4.209	2.416	57,40	4.209	3.068	72,89
6	Loura	2.208	1.181	53,49	2.208	417	18,89	2.208	1.425	64,54	2.208	1.466	66,39	2.207	1.691	76,62
7	Wewewa Barat	3.858	2.952	76,52	3.858	581	15,06	3.858	1.941	50,31	4.857	1.666	34,30	4.857	2.653	54,62
8	Wewewa Selatan	2.940	1.704	57,96	2.940	333	11,33	2.940	2.103	71,53	2.940	2.128	72,38	2.940	2.359	80,24
9	Wewewa Tengah	3.482	2.327	66,83	3.842	518	13,48	3.482	3.013	86,53	3.740	2.010	53,74	3.740	2.561	68,48
10	Wewewa Timur	3.406	1.694	49,74	3.406	450	13,21	3.406	2.082	61,13	3.368	1.901	56,44	3.368	2.249	66,78
11	Wewewa Utara	1.765	1.286	72,86	1.765	342	19,38	1.765	1.588	89,97	1.765	1.617	91,61	1.808	1.467	81,14
	Jumlah	40.447	22.509	55,65	41.533	6.269	15,09	41.166	23.128	56,18	41.684	21.376	51,28	41.930	27.504	65.60

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2017 - 2021

Tabel 2. 81 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020

N	Kecamatan	2	2016	2	2017	2	2018	2	2019	2020	
No	Kecamatan	Jumlah KKB	Jumlah PPKBD								
1	Kodi	1	14	1	=	1	64	1	64	2	28
2	Kodi Balaghar	1	12	1	27	1	34	1	34	1	28
3	Kodi Bangedo	1	12	1	-	1	44	1	44	2	30
4	Kodi Utara	2	18	2	-	2	84	2	84	2	42
5	Kota Tambolaka	2	10	1	38	1	39	1	39	2	20
6	Loura	1	10	1	-	1	43	1	43	1	22
7	Wewewa Barat	1	17	2	-	2	54	2	54	2	40
8	Wewewa Selatan	1	12	1	43	1	38	1	38	2	28
9	Wewewa Tengah	1	10	1	53	1	55	1	55	1	20
10	Wewewa Timur	2	10	1	46	1	47	1	47	1	40
11	Wewewa Utara	1	6	1	35	1	35	1	35	1	12
	Jumlah	14	131	13	242	13	537	13	537	17	310

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2017 – 2021

# 9. Perhubungan

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang perhubungan di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam beberapa indikator meliputi: jumlah arus penumpang angkutan umum, jumlah uji kir angkutan umum, jumlah pelabuhan laut, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, dan jumlah orang/barang melalui dermaga per tahun, sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.82.

Tabel 2. 82 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum, Jumlah Uji Kir Angkutan Umum, Jumlah Pelabuhan Laut, Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum, dan Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga per Tahun di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 s.d 2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	1.516.022	454.222	498.197	408.197
2	Jumlah uji KIR angkutan umum	673	690	757	807
3	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis (unit)	4	3	3	3
4	Persentase layanan angkutan darat (%)	9,13	0	0	0
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	7,13	6,81	7,40	7,40
6	Pemasangan rambu - rambu (%)	32,1	36,5	41,5	0
7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan(%)	1,69	1,65	1,50	1,50
8	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang)	1.516.022	454.222	498.197	0
9	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (orang)	1.516.022	454.222	498.197	498.197

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

### Dari Tabel 2.82 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Data jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan signifikan ditahun 2018, sedikit mengalami kenaikan di tahun 2019 dan terjadi penurunan Kembali di tahun 2020 karena keterbatasan jumlah angkutan umum ataupun angkutan pedesaan yang melayani masyarakat dalam kota maupun desa sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi maupun sewa kendaraan seperti motor dan pick up
- 2. Jumlah uji KIR angkutan umum terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga tren ini perlu ditingkatkan
- 3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (Unit) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak mengalami penambahan

### 10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.83.

Tabel 2. 83 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah KIM	-	-	2	4	6
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	9,09	27,27	18,18	36,36	54,54

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

# 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam beberapa indikator meliputi: Persentase Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil aktif, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.84.

Tabel 2. 84 Persentase Koperasi Aktif dan Persentase Usaha Mikro dan Kecil aktif di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
I	Persentase koperasi aktif					
1	Jumlah koperasi aktif	142	160		175	65
1.1	Kodi	8	13		14	3
1.2	Kodi Balaghar	3	7		8	0
1.3	Kodi Bangedo	13	13		15	4
1.4	Kodi Utara	18	19		24	8
1.5	Kota Tambolaka	28	27		38	20
1.6	Loura	13	15		18	6
1.7	Wewewa Barat	21	23		27	3
1.8	Wewewa Selatan	10	11		13	0
1.9	Wewewa Tengah	14	15		20	13
1.10	Wewewa Timur	11	14		22	8
1.11	Wewewa Utara	3	3		4	0

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah koperasi seluruh Kabupaten	166	188		203	203
	Persentase	85,54	85,11		86,21	32,02
II	Persentase Usaha Mikro dan Kecil					
1	Jumlah usaha mikro dan kecil	1.162	1.311	1.311	1.257	13.378
1.1	Kodi	16	28	28	16	1.752
1.2	Kodi Balaghar	2	13	13	2	947
1.3	Kodi Bangedo	5	15	15	5	494
1.4	Kodi Utara	24	31	31	24	1.040
1.5	Kota Tambolaka	332	363	363	427	2.799
1.6	Loura	14	21	21	14	1.038
1.7	Wewewa Barat	123	150	150	123	1.895
1.8	Wewewa Selatan	62	66	66	62	805
1.9	Wewewa Tengah	232	249	249	232	1.453
1.10	Wewewa Timur	338	354	354	338	908
1.11	Wewewa Utara	14	21	21	14	247
2	Jumlah UKM seluruh Kabupaten	1.162	1.311	1.311	1.257	13.378
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Tabel 2.84 menunjukkan persentase koperasi aktif menurun di tahun 2020, ada beberapa kendala yang harus dibenahi yakni masih rendahnya sumber daya manusia pengelola koperasi, kurangnya pengetahuan tentang administrasi keuangan, adanya ketidakjujuran pengelola koperasi sehingga tidak adanya transparansi serta tidak tertibnya anggota pada saat pengembalian pinjaman. untuk usaha mikro kecil dan menengah mengalami peningkatan dari tahun 2016 s.d 2020 disebabkan meningkatnya jiwa kewirausahaan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya.

### 12. Penanaman Modal

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam beberapa indikator meliputi: jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), rasio daya serap tenaga kerja dan kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN. Gambaran jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.85.

Tabel 2. 85 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	20	20	25
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	586.000.000.000	173.936.454.856	380.122.482.750

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Gambaran rasio daya serap tenaga kerja yang dihasilkan dari investasi berskala nasional di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020 disajikan pada Tabel 2.86.

Tabel 2. 86 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan	1.200	1.276	
Jumlah seluruh PMA/PMDN	20	20	25
Rasio	60	63,8	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Perkembangan nilai PMDN di Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan tahun 2019, disajikan pada Tabel 2.87.

Tabel 2. 87 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun  $2018 \ \mathrm{s.d}\ 2020$ 

No	Uraian	Nilai (Milyard Rp)
1	Realisasi PMDN tahun 2018	586.000.000.000
2	Realisasi PMDN tahun 2019	173.936.454.856
3	Realisasi PMDN tahun 2020	173.529.538.373

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

### 13. Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam beberapa indikator meliputi: cakupan organisasi pemuda yang aktif, cakupan wirausaha muda, cakupan pembinaan olahraga dan pelatih yang bersertifikasi serta jumlah atlet dan olahraga berprestasi. Organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten

Sumba Barat Daya sampai dengan tahun 2018 mencapai 395 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.88.

Tabel 2. 88 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif, dan Persentase Wirausaha Muda

		Jumlah
I	Persentase organisasi pemuda yang aktif	
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	293
1.1	Kodi	23
1.2	Kodi Balaghar	19
1.3	Kodi Bangedo	21
1.4	Kodi Utara	26
1.5	Kota Tambolaka	40
1.6	Loura	26
1.7	Wewewa Barat	44
1.8	Wewewa Selatan	31
1.9	Wewewa Tengah	14
1.10	Wewewa Timur	30
1.11	Wewewa Utara	19
2	Jumlah organisasi pemuda seluruh Kabupaten	293
	Persentase	100
II	Persentase wirausaha muda	
1	Jumlah wirausaha muda	395
1.1	Kodi	10
1.2	Kodi Balaghar	10
1.3	Kodi Bangedo	12
1.4	Kodi Utara	12
1.5	Kota Tambolaka	229
1.6	Loura	18
1.7	Wewewa Barat	30
1.8	Wewewa Selatan	10
1.9	Wewewa Tengah	46
1.10	Wewewa Timur	33
1.11	Wewewa Utara	18
2	Jumlah wirausaha seluruh Kabupaten	395
	Persentase	100

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Gambaran cakupan pembinaan olahraga, jumlah atlet berprestasi dan jumlah prestasi olahraga di Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan tahun 2020, disajikan pada Tabel 2.89.

Tabel 2. 89 Cakupan Pembinaan Olahraga, Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Cakupan pembinaan olahraga			
1.1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	13	6	0
1.2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	13	13	0
1.3	Cakupan	100%	46,15%	0%
2	Jumlah atlet berprestasi	21	30	0
3	Jumlah prestasi olahraga	30	30	0

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

#### 14. Statistik

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang statistik di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam indikator ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi, buku Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka dan buku PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.90.

Tabel 2. 90 Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi, Buku Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 s.d 2020

No	Uraian	Ketersediaan				
		2017	2018	2019	2020	
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

#### 15. Persandian

Hingga saat ini seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya belum menerapkan sistem penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

# 16. Kebudayaan

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang kebudayaan di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam indikator meliputi: jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, dan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu serta benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Gambaran jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dan presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Sumba Barat Daya, disajikan pada Tabel 2.91.

Tabel 2. 91 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi, dan Persentase Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	4	4	4	0
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	1	4	4	0
Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	100	100	100	100	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

# 17. Perpustakaan

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang perpustakaan di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam indikator: persentase pengunjung perpustakaan per tahun dan rasio perpustakaan per satuan penduduk serta jumlah koleksi judul buku perpustakaan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.92.

Tabel 2. 92 Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun dan Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk serta Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun					
1.1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	250	300	200	250	300
2.2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	264.210	269.492	269.492	269.492	269.492
	Persentase	0,09	0,11	0,07	0,09	0,11
2	Rasio perpustakaan per satuan penduduk					

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2.1	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1
2.2	Jumlah penduduk	325.699	331.894	338.427	313.127	303.650
	Persentase	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	2.000	2.000	1.860	5.000	5.000

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Tabel 2.92 menunjukkan persentase jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2019 sebesar 0,09% meningkat menjadi 0,11% pada tahun 2020. Persentase rasio perpustakaan per satuan penduduk pada tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 0,0003%.

# 18. Kearsipan

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang kearsipan di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam indikator cakupan perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dan cakupan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.93.

Tabel 2. 93 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku, Persentase Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 s.d 2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelolaarsip secara baku			
1.1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baku	1	1	1
1.2	Jumlah Perangkat Daerah	54	54	53
	Persentase	1,85	1,85	1,89
2	Persentase Kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan			
2.1	Jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang dilaksanakan	1	2	1
2.2	Jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang direncanakan	1	2	1
	Persentase	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020

Tabel 2.93 menunjukkan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 1,85% dan tahun 2019

sebesar 1,89%, sedangkan persentase kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dari tahun 2017 - 2019 sebesar 100%.

# 2.3.2 Urusan Pilihan

### 1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam indikator meliputi: produksi perikanan laut, cakupan bina kelompok nelayan, produksi perikanan kelompok nelayan, konsumsi ikan per kapita, yang disajikan pada Tabel 2.94.

Tabel 2. 94 Capaian Kinerja Bidang Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan			
1.1	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	930,62	884,55	1.062,105
	- Perikanan Tangkap	707,05	552,55	783
	- Perikanan Budidaya	7,05	12,00	17,8
	- Rumput Laut	216,52	320,00	261,305
1.2	Target Daerah (Ton)	6.328,78	6.404,82	6.740,16
	- Perikanan Tangkap	234,08	250,80	573,16
	- Perikanan Budidaya	11,64	12,47	17
	- Rumput Laut	6.083,06	6.141,55	6.150
	Persentase	122,06	107,25	17
	- Perikanan Tangkap	302,05	220,31	312
	- Perikanan Budidaya	60,57	96,23	143
	- Rumput Laut	3,56	5,21	4
2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan			
2.1	Jumlah Kelompok Nelayan Yang Mendapat Bantuan Pemda	39,00	57,00	57
2.2	Jumlah Kelompok Nelayan	415	479	626
	Cakupan	6,83	9,08	9,08
3	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan			
3.1	Jumlah Produksi Ikan (Ton) Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	622,27	575	509
3.2	Jumlah Produksi Ikan di Daerah (Ton)	707,53	552,55	783
	Persentase	87,95	104,06	65,01
4	Konsumsi Ikan	2,35	2,54	2,54
	Persentase	77,05	50,80	50,80

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020

### 2. Pariwisata

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dengan indikator kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.95.

Tabel 2. 95 Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata	8.214	8.679	3.587
Jumlah Kunjungan Wisata direncanakan	5.868	6.445	9.734
Rata – rata lama kunjungan (hari)	2	2	2
Persentase	139,98	134,66	36,85

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Tabel 2.95 menunjukkan jumlah capaian kinerja kunjungan wisata dan jumlah kunjungan wisata direncanakan pada tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jumlah capaian kinerja kunjungan wisata sebesar 8.679 orang dan menurun di tahun 2020 sebesar 3.587 orang atau berkurang sebanyak 5.092 orang. Hal ini dapat disebabkan karena efek dari Pandemi. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang bagi pendapatan daerah. Namun semenjak adanya Covid-19, anggaran pendapatan dari sektor pariwisata turun tajam. Sejak pandemi melanda dunia jumlah wisatawan mengalami penurunan. Berbagai upaya sudah dilakukan agar wisatawan tetap dapat berwisata tetapi sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Upaya tersebut antara lain : pengecekan suhu tubuh, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan vaksinasi.

# Potensi Wisata Kabupaten Sumba Barat Daya

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki potensi wisata yang sangat indah sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung di daerah ini. Berikut ini adalah obyek-obyek wisata yang dapat dikembangkan secara lebih baik lagi sehingga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup bagi warganya, sebagaimana di sajikan pada tabel 2.96

Tabel 2. 96 Objek Wisata di Kabupaten Sumba Barat Daya

				Jarak dari Pusat
No	Kecamatan	Objek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Ibukota
110	Kccamatan	Objek Wisata	ocins objek wisata	Kecamatan
				(KM)
1	2	3	4	5
1	Kodi	Pantai Bondo Kawango	Alam/Pantai	40
		Pantai Pero	Alam/Pantai	39
		Pantai Tanjung Karoso	Alam/Pantai	34
		Pantai Tossi	Alam/Pantai	42
2	Kodi Balaghar	Pantai Bana	Alam/Pantai	54
		Pantai Karaba	Alam/Pantai	52
		Pantai Watu Maladong	Alam/Pantai	56
3	Kodi Bangedo	Pantai Marapu	Alam/Pantai	54
		Pantai Ratenggaro	Alam/Pantai	48
		Pantai Wainyapu	Alam/Pantai	53
4	Kodi Utara	Danau/Laguna Weekuri	Alam/Danau/Laguna Air Asin	36
		Pantai Halete	Alam/Pantai	30
		Pantai Huma	Alam/Pantai	29
		Pantai Mandorak	Alam/Pantai	35
		Pantai Rada Kapal	Alam/Pantai	43
5	Kota Tambolaka	Pantai Kawona	Alam/Pantai	16
		Pantai Newa	Alam/Pantai	7
		Pantai Weekelo	Alam/Pantai	6
		Rumah Budaya	Budaya/Seni	3
6	Loura	Bukit Lendongara	Alam/Bukit	5
		Danau Wee Wini	Alam/Danau	18
		Pantai Kaghona	Alam/Pantai	21
		Pantai Katewel	Alam/Pantai	14
		Pantai Mananga Aba	Alam/Pantai	11
		Pantai Oro	Alam/Pantai	12
7	Wewewa Selatan	Air Terjun Pabeti Lakera	Alam/Air Terjun	52
		Air Terjun Weekebani	Alam/Air Terjun	42
8	Wewewa Timur	Air Terjun Lokomboro	Alam/Air Terjun	26
		Gua Waikelo Sawah	Alam/Gua	28
01	om Dinos Domizzios	o Vahimatan Cumba Danat	D 0000	

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020



Danau/Laguna Weekuri





Pantai Watu Maladong

Gua Waikelo Sawah

Gambar 2. 8 Wisata Alam Kabupaten Sumba Barat Daya

Selain itu Kabupaten Sumba Barat Daya juga memiliki kekayaan budaya yang sangat tinggi nilai historisnya seperti Pasola, Situs Kampung Adat, Kubur Megalitik, dan ritual-ritual adat lainnya.

# **Pasola**

Pasola berasal dari kata "sola" atau "hola", yang berarti sejenis lembing kayu yang untuk dipakai saling melempar dari atas kuda yang sedang dipacu kencang oleh dua kelompok yang berlawanan.



Gambar 2. 9 Pasola

Setelah mendapat imbuhan 'pa' (pa-sola, pa-hola), artinya menjadi permainan. Jadi pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli yang disebut Marapu (agama lokal masyarakat sumba). Pelaksanaan pasola dilakukan secara bergiliran, yaitu antara bulan Februari hingga Maret setiap tahunnya.

Pasola tidak sekadar menjadi bentuk keramaian, tetapi menjadi salah satu bentuk pengabdian dan aklamasi ketaatan kepada sang leluhur. Pasola merupakan kultur religius yang mengungkapkan inti religiositas agama Marapu. Pasola menjadi perekat jalinan persaudaraan antara dua kelompok yang turut dalam pasola dan bagi masyarakat umum. Pasola menggambarkan rasa syukur dan ekspresi kegembiraan masyarakat setempat, karena hasil panen yang melimpah. Pasola dapat dijadikan tonggak kemajuan pariwisata Sumba, karena atraksi budaya ini sudah diketahui banyak wisatawan mancanegara. Hal ini terlihat dalam setiap acara pasola selalu ada turis asing yang datang. Warisan budaya ini merupakan aset untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

### Situs Kampung Adat



Gambar 2. 10 Rumah Adat

Situs Kampung Adat merupakan kumpulan rumah-rumah adat dengan tradisi yang masih kental dan identik dengan kepercayaan Marapu yang sampai saat ini masih terpelihara. Pada umumnya rumah adat terbuat dari bahan-bahan lokal atau bahan yang tersedia di alam.

Atapnya masih menggunakan alang, lantainya dari bambu dengan empat tiang utama yang besar sebagai penopang rumah. Ciri khas rumah adat di kabupaten Sumba Barat Daya adalah dibangun dengan arsitektur vernacular pencakar langit. Rumah adat terdiri atas tiga bagian utama, pertama, bagian atap rumah, berbentuk kerucut seperti menara, biasanya digunakan untuk tempat menyimpan benda-benda pusaka atau hasil-hasil panen. Kedua, ruang hunian (tidak menyentuh tanah), merupakan ruang tempat akses/beraktifitas, terdapat kamar, tungku tempat untuk memasak dll. Ruang hunian ini biasanya berlantaikan bambu. Ketiga, bagian bawah rumah, biasanya dijadikan kandang ternak seperti kambing, babi. Beberapa contoh rumah adat dari beberapa kampung yang terdapat di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Oleh karena itu, sangat diharapkan agar pemerintah daerah dan semua stakeholder bisa bekerja sama membangun pariwisata yang berkelanjutan dan menjamin keamanan wisatawan selama berkunjung di obyek wisata.

#### 3. Pertanian

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam indikator: kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB, cakupan bina kelompok petani serta produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan. Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 mencapai 95,65% dengan cakupan kelompok tani yang dibina sebanyak 8,19% dari keseluruhan kelompok tani di Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.97.

Tabel 2. 97 Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB dan Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019
1	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB		
1.1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton)	104.588	115.047
1.2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)	104.588	120.276
	Persentase	100	95,65
2	Cakupan bina kelompok petani		
2.1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda	169	185
2.2	Jumlah kelompok petani	2.229	2.257
	Cakupan	7,58	8,19

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020

Produktivitas padi sawah di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2020 mencapai 4,2 ton/ha, sedangkan produktivitas padi ladang mencapai 2,9 ton/ha. Gambaran produksi dan produktivitas padi dan palawija di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 s.d 2020 disajikan pada Tabel 2.98.

Tabel 2. 98 Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Uraian	2018			2019				2020				
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas	Panen (Ha)	Produksi (Ton)		Produkt (Ton/		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Padi Sawah	8.769	34.199,1	3,9	w	9.768	38.095,2			3,9	6.664	27.989	4,2
Padi Ladang	18.268	34.709,2	1,9	ď.	21.437	40.730,3			1,9	17.422	50.524	2,9
Jagung	34.178	105.951,8	3,1		38.255	118.690,5			3,1	37.061	140.832	3,8
Kedelai	60	48	0,8	-7	27	21,6			0,8	89	46	0,5
Kacang tanah	395	316	0,8		161	128,8			0,8	97	209	2,2
Kacang hijau	226	135,6	0,6	1	311	186,6		J	0,6	20	342	17,1
Ubi Kayu	2.407	19.978,1	8,3	V	2.266	18.807,8		1	8,3	2.459	33.640	13,7
Ubi Jalar	119	654,5	5,5	- 1	125	587,5	9		5,5	1.015	1.000	1,0

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

Produksi tanaman perkebunan terbesar di Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan tahun 2020 adalah jambu mete dengan hasil produksi mencapai 5.886 ton dari areal yang ditanam seluas 10.665 ha dan di ikuti dengan produksi kelapa mencapai 3.959 ton dengan

areal penanaman seluas 8.282 ha. Gambaran produksi perkebunan di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 s.d 2020 disajikan pada Tabel 2.99.

Tabel 2. 99 Produksi Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

	2018		20	19	2020		
Uraian	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	
Kelapa	8.307	3.962	8.307	3.973	8.282	3.959	
Jambu Mete	10.891	6.018	10.891	6.012	10.665	5.886	
Kopi	5.421	2.208,24	5.414	2.214	5.415	2.204	
Kakao	3.200	1.090	3.220	1.090	3.220	1.121	
Kemiri	2.536	1.291	2.536	1.291	2.530	1.291	
Kapuk	142	28,98	142	28	141	29	
Cengkeh	869	132	869	138	869	135	
Pinang	9.226	1.690	9.226	1.690	9.226	1.706	
Vanili	119	25	119	25,40	119	24	
Jarak Pagar	182	50	182	50	182	48	
Kapas	68	31	68	31	-	-	
Tembakau	156	100	271	178	188	123	
Sirih	817	157	817	157	817	156	

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

Populasi ternak besar di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2020 dengan jumlah paling banyak adalah kerbau yang mencapai 12.220 ekor, kemudian diikuti kuda sejumlah 5.324 ekor dan sapi sejumlah 2.892 ekor, sedangkan populasi ternak kecil didominasi oleh babi sejumlah 49.880 ekor. Populasi peternakan di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 s.d 2020 disajikan pada Tabel 2.100.

Tabel 2. 100 Populasi Peternakan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Tahun	Ternak Besar (ekor)			Ternak Kecil (ekor)		
	Sapi	Kerbau	Kuda	Babi	Kambing	Domba
2018	3.170	14.932	5.491	98.422	35.035	-
2019	3.249	15.022	5.617	102.790	36.787	-
2020	2.892	12.220	5.324	49.880	22.660	-

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

### 4. Perdagangan

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam indikator meliputi: nilai ekspor bersih perdagangan dan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.101 dan 2.102.

Tabel 2. 101 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 s.d 2019

Uraian	2017	2018	2019
Nilai ekspor (Milyar Rp)	7.874.573	13.124.085	13.124.085
Nilai impor (Milyar Rp)	1.059.000	10.462,44	10.562,44
Nilai ekspor bersih (Milyar Rp)	6.815.573	13.134.547,44	13.134.647.44

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020

Tabel 2. 102 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	8	17	11
1.1	Kodi	-	2	-
1.2	Kodi Balaghar	-	-	-
1.3	Kodi Bangedo	-	1	-
1.4	Kodi Utara	-	2	2
1.5	Kota Tambolaka	1	4	2

No	Uraian	2018	2019	2020
1.6	Loura	1	2	2
1.7	Wewewa Barat	-	2	1
1.8	Wewewa Selatan	1	-	2
1.9	Wewewa Tengah	3	3	2
1.10	Wewewa Timur	1	1	-
1.11	Wewewa Utara	1	-	-
2	Jumlah kelompok pengrajin	49	17	11
	Persentase	16,32	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

# 5. Perindustrian

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang perindustrian di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam indikator cakupan bina kelompok pengrajin, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.103.

Tabel 2. 103 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	8	17	11
1.1	Kodi	-	2	-
1.2	Kodi Balaghar	-	-	-
1.3	Kodi Bangedo	-	1	-
1.4	Kodi Utara	-	2	2
1.5	Kota Tambolaka	1	4	2
1.6	Loura	1	2	2
1.7	Wewewa Barat	-	2	1
1.8	Wewewa Selatan	1	-	2
1.9	Wewewa Tengah	3	3	2
1.10	Wewewa Timur	1	1	=
1.11	Wewewa Utara	1	-	-
2	Jumlah kelompok pengrajin	49	17	11
	Persentase	16,32	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

# 6. Transmigrasi

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang transmigrasi di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan dalam indikator cakupan transmigran swakarsa. Namun, sampai dengan tahun 2018 belum ada pembinaan terhadap transmigran swakarsa sementara jumlah transmigran lokal di Kabupaten Sumba Barat Daya sejak tahun 2013 sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK)<sup>10</sup> yang berlokasi di Desa Waipadi Kecamatan Kodi Bangedo. Jumlah transmigran lokal tersebut di tahun 2019 menjadi 87 KK karena 13 KK lainnya telah keluar dari lokasi transmigrasi akibat rumah mereka yang rusak sehingga mereka mendiami area sekitar Desa Waipadi.

# 2.3.3 Penunjang Urusan Pemerintahan

### 1. Perencanaan Pembangunan

Kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan digambarkan dalam indikator ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW, konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD, konsistensi program RKPD ke dalam APBD dan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.104.

Tabel 2. 104 Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2019 s.d 2021

No	Uraian	Nomor dan Tanggal Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah
1	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 – 2025
2	Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 – 2024
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah	Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020
3	ditetapkan dengan PERKADA	Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021

 $<sup>^{\</sup>rm 10}$  Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021

No	Uraian	Nomor dan Tanggal Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah
		Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 – 2029

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, konsistensi penjabaran program RKPD ke dalam APBD dan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW pada pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 s.d 2020, disajikan pada Tabel 2.105.

Tabel 2. 105 Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD, Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD, Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Uraian	2018	2019	2020
Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD			
Jumlah program RKPD tahun berkenaan	429	429	234
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	374	429	154
Persentase	114,71	100	151,94
Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD			
Jumlah program APBD tahun berkenaan	429	429	269
Jumlah program RKPD tahun berkenaan	429	429	269
	100	100	100
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW			
Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	1	1	1
Dokumen RTRW	1	1	1
Persentase	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

### 2. Keuangan

Kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan digambarkan dalam beberapa indikator meliputi: opini BPK terhadap laporan keuangan dan ketepatan waktu penetapan APBD serta persentase program/kegiatan APBD yang tidak terlaksana, yang disajikan pada Tabel 2.106 dan 2.107.

Tabel 2. 106 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dan Ketepatan Waktu Penetapan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Uraian	2018	2019	2020	
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	
Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Tabel 2. 107 Persentase Program/Kegiatan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya yang Tidak Terlaksana Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Persentase Program APBD yang tidak terlaksana			
1.1	Jumlah program APBD yang tidak dilaksanakan	-	-	-
1.2	Jumlah program dalam APBD	429	269	273
	Persentase	-	-	-
2	Persentase Kegiatan APBD yang tidak terlaksana			
2.1	Jumlah kegiatan APBD yang tidak dilaksanakan	-	-	-
2.2	Jumlah kegiatan dalam APBD	750	1197	1262
	Persentase	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

### 3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan digambarkan dalam indikator: cakupan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan pelatihan struktural, cakupan pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional serta jumlah ASN berdasarkan pendidikan dan pangkat. Cakupan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, pelatihan struktural dan jumlah ASN berdasarkan pendidikan dan pangkat, disajikan pada Tabel 2.108.

Tabel 2. 108 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Pelatihan Struktural dan jumlah ASN berdasarkan pangkat pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			
1.1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	347	593	0

No	Uraian	2018	2019	2020
1.2	Jumlah total ASN	3.327	3.449	3.432
	Persentase	10,45	17,19	0
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			
2.1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	245	268	0
2.2	Jumlah total jabatan	695	695	695
	Persentase	35,25	38,56	0
3	Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan			
3.1	Sampai dengan SD	17	14	9
3.2	SLTP/Sederajat	37	32	27
3.3	SMA/Sederajat	816	745	615
3.4	Diploma I, II / Akta I, II	358	290	223
3.5	Diploma III / Akta III / Sarjana Muda	456	529	622
3.6	Tingkat Sarjana / Doktor / PhD	1.643	1.839	1.936
3.7	Jumlah total ASN	3.327	3.449	3.432
4	Jumlah ASN berdasarkan Pangkat			
4.1	I/A (Juru Muda)	-	-	-
4.2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	6	5	5
4.3	I/C (Juru)	8	8	6
4.4	I/D (Juru Tingkat I)	12	11	8
4.5	II/A (Pengatur Muda)	61	51	45
4.6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	98	94	74
4.7	II/C (Pengatur)	295	272	229
4.8	II/D (Pengatur Tingkat I)	319	300	246
4.9	III/A (Penata Muda)	854	962	942
4.10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	383	458	573
4.11	III/C (Penata)	507	522	416
4.12	III/D (Penata Tingkat I)	305	321	451
4.13	IV/A (Pembina)	318	280	281
4.14	IV/B (Pembina Tingkat I)	134	141	133
4.15	IV/C (Pembina Utama Muda)	26	23	23
4.16	IV/D (Pembina Utama Madya)	1	1	-
4.17	IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
4.18	Jumlah total ASN	3.327	3.449	3.432
Cumbo	ı r: Badan Kenegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sum	he Doret Dorre	001 dan Dadan D	naat Statiatile

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021 dan Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel 2.108 menunjukkan tidak ada ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal serta diklat struktural di tahun 2020. Jumlah ASN di tahun 2020 sebanyak 3.432 ASN dengan pendidikan tingkat sarjana/doktor/PhD terus meningkat dan berdasarkan pangkat, ASN didominasi oleh pangkat III/A (Penata Muda). Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan ASN dengan minimal pendidikan tingkat sarjana dan program tugas/ijin belajar.

Persentase pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, serta jabatan fungsional pada pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, disajikan pada Tabel 2.109.

Tabel 2. 109 Persentase Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, serta Jabatan Fungsional Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Persentase pengisian jabatan pimpinan tinggi			
1.1	Jumlah pengisian jabatan pimpinan tinggi	-	-	11
1.2	Jumlah jabatan pimpinan tinggi yang tersedia	37	37	35
	Persentase	1	1	31
2	Persentase pengisian jabatan pimpinan administrasi			
2.1	Jumlah pengisian jabatan administrasi	482	482	125
2.2	Jumlah jabatan administrasi yang tersedia	637	637	154
	Persentase	75,67	75,67	81
3	Persentase pengangkatan ke dalam jabatan fungsional			
3.1	Jumlah ASN diangkat dalam jabatan fungsional	2.598	2.929	305
3.2	Jumlah jabatan fungsional yang dibutuhkan sesuai analisa jabatan	3.098	3.098	3.098
	Persentase	83,86	94,54	10

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Tabel 2.109 menunjukkan persentase pengisian jabatan pimpinan tinggi tahun 2020 sebesar 31%. Persentase pengisian jabatan pimpinan administrasi tahun 2020 sebesar 81%. Persentase pengangkatan ke dalam jabatan fungsional tahun 2020 sebesar 10%.

### 4. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan digambarkan dalam indikator: implementasi rencana Kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan, yang disajikan pada Tabel 2.110.

Tabel 2. 110 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, dan Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan			
1.1	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	1	1	1
1.2	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	1	1	1
	Persentase	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			
2.1	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti		1	1
2.2	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	1	1	1
	Persentase	-	100	100

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Tabel 2.110 menunjukkan persentase implementasi rencana kelitbangan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%.

# 5. Pengawasan

Kinerja pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan digambarkan dalam indikator: persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, yang disajikan pada Tabel 2.111.

Tabel 2. 111 Persentase Tindak Lanjut Temuan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Umaiam	Uraian 2018		2019			2020			
NO	Uraian	Rekomendasi	Selesai	%	Rekomendasi	Selesai	%	Rekomendasi	Selesai	%
1	Temuan hasil pemeriksaan (Rekomendasi)									
1.1	BPK	34	11	32,35	12	6	50	24	2	8
1.2	BPKP									
1.3	Inspektorat Jenderal K/L									
1.4	Inspektorat Provinsi	21	19	90,50	28	-	-	21	-	-
1.5	Inspektorat Kabupaten	55	8	14,50	94	5	5,32	64	2	3

No	Tinata a	2018		2019			2020			
	Uraian	Rekomendasi	Selesai	%	Rekomendasi	Selesai	%	Rekomendasi	Selesai	%
	Total Tindak Lanjut	110	38	137	134	11	55	109	4	4

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Tabel 2.111 menunjukkan perkembangan temuan hasil pemeriksaan (rekomendasi) dan tindak lanjut selama tahun 2018 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- o Tahun 2018: sebanyak 110 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 38 atau sebesar 137%
- Tahun 2019: sebanyak 134 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 11 rekomendasi atau sebesar 55%
- o Tahun 2020: sebanyak 109 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi atau sebesar 4%

### 6. Sekretariat DPRD

Kinerja pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sekretariat DPRD digambarkan dalam indikator: ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat - alat kelengkapan DPRD, pengintegrasian program - program kerja DPRD dalam dokumen RPJMD maupun dokumen RKPD dan pengintegrasian program - program kerja DPRD dalam dokumen perencanaan dan anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, yang disajikan pada Tabel 2.112.

Tabel 2. 112 Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat - Alat Kelengkapan DPRD, Pengintegrasian Program - Program Kerja DPRD dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD, dan Pengintegrasian Program - Program Kerja DPRD dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD			
1.1	Jumlah Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	7	7	7
1.2	Jumlah Alat-alat Kelengkapan DPRD	7	7	7
	Persentase	100	100	100
2	Pengintegrasian Program-Program Kerja DPRD dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD			
2.1	Jumlah Program-Program Kerja DPRD yang tersusun	4	4	4

No	Uraian	2018	2019	2020
2.2	Jumlah Program-Program Kerja DPRD yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD, dan	4	4	4
	Persentase	100	100	100
3	Pengintegrasian Program-Program Kerja DPRD dalam Dokumen perencanaan dan anggaran Sekretariat DPRD			
3.1	Jumlah Program-Program Kerja DPRD yang tersusun	4	4	4
3.2	Jumlah Program-Program Kerja DPRD yang ditetapkan dalam Renja dan DPA Sekretariat DPRD	4	4	4
	Persentase	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Tabel 2.112 menunjukkan persentase ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat - alat kelengkapan DPRD sebesar 100% dan persentase pengintegrasian program - program kerja DPRD dalam dokumen RPJMD maupun dokumen RKPD sebesar 100%.

# 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Adapun rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukan tren yang meningkat.

Pengeluaran rumah tangga per kapita menurut kelompok makanan dan bukan makanan di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.113.

Tabel 2. 113 Pengeluaran Rumah Tangga per kapita Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 dan 2020

Uraian	2019 (Rupiah)	2020 (Rupiah)
Makanan	371,684	387,703
Bukan Makanan	169,356	187,492
Jumlah	541,040	575,195

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

# b. Fokus Wilayah Infrastruktur

#### Data Dasar Prasarana Jalan

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah dan mobilisasi masyarakat yang makin meningkat, membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan terhadap akses jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari tahun ke tahun total panjang jalan dalam kondisi baik makin meningkat, meskipun masih ada jalan yang masih tanah/belum tembus. Data dasar prasarana jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada tabel 2.114

Tabel 2. 114 Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021

Total Panjang (Km)					1.136,30
Kondisi Baik (Km)	732,14	64%	Aspal (AC, HRS, ATB)	802,54	70,63%
Kondisi Sedang (Km)	53,78	5%	Telford/Kerikil/Urpil	248,30	21,85%
Kondisi Rusak Ringan (Km)	57,38	5%	Tanah/Belum Tembus	85,46	7,52%
Kondisi Rusak Berat (Km)	293,00	26%			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

### Presentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan air bersih di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari tahun ke tahun rasio rumah tangga yang terlayani kebutuhan air bersih semakin bertambah, meskipun belum 100% terlayani. Data terakhir tahun 2020 presentase Rumah Tangga (RT) pengguna air bersih sebesar 12,36%. Data selengkapnya di sajikan pada tabel 2.115

Tabel 2. 115 Capaian Sanitasi dan Air Minum Tahun 2021 Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021

No	Kecamatan	Sanitasi	Air M	linum			
INO	Kecamatan	(Septic Tank, MCK, IPAL)	SPAM	Pamsimas			
1	Kodi	2.225	3.180	3.699			
2	Kodi Balaghar	3.725	2.088	1.724			
3	Kodi Bangedo	2.438	2.388	1.299			
4	Kodi Utara	3.916	15.750	2.705			
5	Kota Tambolaka	3.615	3.216	1.155			
6	Loura	2.670	3.324	2.405			
7	Wewewa Barat	2.305	3.492	1.800			
8	Wewewa Selatan	2.345	2.118	1.823			
9	Wewewa Tengah	2.111	1.956	1.525			
10	Wewewa Timur	1.690	762	2.212			
11	Wewewa Utara	1.821	420	-			
	Jumlah keseluruhan jiwa di setiap desa terlayani	342.060					
	Jumlah KK desa terlayani		57.010				
	Jumlah KK se SBD		70.963				
	Jumlah total jiwa se SBD		425.779				
	Jumlah jiwa bersanitasi	28.657					
	Persentase	8,08%					
	Jumlah jiwa sudah akses SPAM		38.694				
	Persentase		9,09%				
J	umlah jiwa sudah akses Pamsimas			20.167			
	Persentase			5,68%			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

#### Rasio Elektrifikasi PLN

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan Listrik di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari tahun ke tahun rasio rumah tangga yang terlayani Listrik semakin bertambah, meskipun belum 100% terlayani. Data terakhir bulan Juli Tahun 2020 Rasio Elektrifikasi PLN sebesar 24,08% Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.116.

Tabel 2. 116 Rasio Elektrifikasi PLN

No	Kabupaten	Jumlah Total Rumah	Ruma	h Tangga Berlis	trik	RE	RE
No		Tangga Juli	Pelayanan PLN SILM Juli	KK Berlistrik Non PLN	Total KK Berlistrik	PLN	Total
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8 = (6/3)
1	Sumba Timur	62.204	28.532	27.990	56.522	45,87	90,8
2	Sumba Tengah	17.555	7.238	7.238	12.768	31,5	72,7
3	Sumba Barat	29.675	10.497	11.597	22.094	35,37	74,4
4	Sumba Barat Daya 89.670		21.594 34.657		56.251	24,08	62,7
	Total Sumba	199.104	67.861	81.482	147.635	32,23	74,15%

Sumber: PLN Sumba Jaya, 2021

#### Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah hotel di Kabupaten Sumba Barat Daya saat ini cukup memadai. Tersedianya berbagai pilihan hotel maka berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Data kamar dan tempat tidur hotel di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2021 disajikan Tabel 2.117.

Tabel 2. 117 Data Kamar dan Tempat Tidur Hotel di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021

						F	asilitas	
No	Nama Hotel	Alamat	Class	Jumlah Kamar	Fan	AC	Tempat T	idur
				11011101	rali	AC	Double	Twin
1	I1-	XX7-:4-11-	Standart	3	√		6	2
1	Losmen Anggrek	Waitabula	Standart	5	√		O	2
2	Losmen Melati	Comunito	Standart	4	√		6	18
2	Losinen meian	Sapurata	Standart	12	<b>V</b>		O	10
3	Newa Sumba Resort	Waikelo		14	<b>√</b>		8	12
			Deluxe	24		$\checkmark$	16	42
4	Hotel Sinar Tambolaka	Tambolaka	Superior	34			34	
			Standart	22	√			22
			Standar		√			
5	Oro Beach House And Restaurant	Loura, Weepangali	2 Kamar Dengan Connecting Door	4	√		2	12
			Bisnis	2	√		2	1
6	Wisma Kolping	Waitabula	Standar	6	√			24
7	Home Stay Story	Kodi, Pero	Standar	10	<b>√</b>		10	
8	Hotel Mario Restaurant And Café	Mananga Aba		12	√		4	12
			Ekonomi	12	_		6	6
			Standart.1	9	ı	√	6	8
9	Hotel Sumba Sejahtera	Waitabula	Standart.2	16	_		8	12
9	Hotel Sulliba Sejantera	wanabula	Deluxe	16	ı	√		32
			Vip A	6	_	$\checkmark$	6	
			Vip B	2	1	$\checkmark$	2	
10	Home Stay Merzy	Kec. Kodi, Pero	Standart	9	<b>√</b>		4	7
			Ekonomi					
			Standar	4		<b>√</b>	4	4
11	Hotel Ella	Kec. Kota Tmc	Staffdal	8	√		4	4
			Deluxe	20		√	8	20
			Vip	2			2	
	Total S	eluruhnya		213			110	201

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

## Fokus Iklim Investasi

#### Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Usaha

Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi/usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 28 Perda yang mendukung penciptaan iklim

usaha kondusif di Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.118.

Tabel 2. 118 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021

No	Nomor PERDA	Tahun	Tentang
1	12	2008	Pajak Penerangan Jalan
2	13	2008	Pajak Reklame
3	14	2008	Pajak Hiburan
4	15	2008	Pajak Hotel
5	16	2008	Pajak Restoran
6	17	2008	Pajak Galian C
7	18	2008	Retribusi Pelayanan Pasar
8	19	2008	Retribusi Izin Gangguan
9	21	2008	Retribusi Izin Tempat Penjualan Alkohol
10	22	2008	Retribusi Rumah Potong Hewan
11	5	2010	Bangunan Gedung
12	7	2010	Izin Usaha Konstruksi
13	8	2010	Tanda Daftar Gudang
14	9	2010	Wajib Daftar Perusahaan
15	10	2010	Surat Izin Perdagangan
16	12	2010	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
17	13	2010	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
18	14	2010	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
19	15	2010	Retribusi Izin Trayek
20	16	2010	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
21	20	2010	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
22	5	2012	Retribusi Terminal
23	7	2012	Pajak Daerah
24	8	2012	Retribusi Jasa Usaha
25	9	2012	Retribusi Jasa Umum
26	10	2012	Retribusi Perizinan tertentu
27	16	2012	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
28	4	2016	Pendaftaran Usaha Pariwisata

Sumber: Bagian Hukum Kab. Sumba Barat Daya, 2021

#### Fokus Sumber Daya Manusia

### Data Fasilitas SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi

Data fasilitas sekolah dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumba Barat Daya saat ini cukup memadai, berdasarkan data BPS Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021 semua kecamatan yang ada di kabupaten Sumba Barat Daya sudah memiliki fasilitas sekolah dari jenjang Pendidikan dasar,

Menengah Pertama, Menengah Atas, Menengah Kejuruan hanya penyebaran yang belum merata, Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.119.

Tabel 2. 119 Data Fasilitas Sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Fasilitasi	2018	2019	2020
Sekolah Dasar	170	170	170
Sekolah Menengah Pertama	102	106	105
Sekolah Menengah Atas	22	29	31
Sekolah Menengah Kejuruan	30	28	34
Perguruan Tinggi	2	2	3

Sumber: BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Data jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 di sajikan pada Tabel 2.120.

Tabel 2. 120 Data jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Sumba Barat Daya

Status Pekerjaan Utama	yang Bekerja	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin					
	Laki-laki	Perempuan	Total				
Berusaha sendiri	4.823	2.914	7.737				
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	47.229	25.552	72.781				
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	881	-	881				
Buruh/Karyawan/Pegawai	14.991	7.852	22.843				
Pekerja bebas	2.794	119	2.913				
Pekerja keluarga/tak dibayar	24.144	38.905	63.049				
Jumlah	94.862	75.342	170.204				

Sumber: BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

#### Angka kriminalitas yang tertangani

Persentase penyelesaian tindak pidana di Kabupaten Sumba Barat Daya, disajikan pada Tabel 2.121.

Tabel 2. 121 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 s.d 2020

Polsek	2016	2017	2018	2019	2020
Kodi Bangedo	58,14	58,14	50	81,5	50
Kodi	52,38	52,38	58,33	72,2	60

Polsek	2016	2017	2018	2019	2020
Kodi Utara	50	50	83,33	80,57	75,65
Wewewa Selatan	31,25	31,25	63,63	76,1	71,4
Wewewa Barat	65,12	65,12	42,3	81,63	69,44
Wewewa Timur	55,81	55,81	42,1	67,64	68,42
Loura	60	60	29,11	81,63	69,44
Sumba Barat Daya	55,71	55,71	42,75	77,41	67,05

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

#### Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya di sajikan pada Tabel 2.122

Tabel 2. 122 Rasio ketergantungan Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020

Kelompok Umur	0-14	15-64	65+	Total	Rasio Ketergantungan
Persentase Penduduk	41,75	54,84	3,42	100	82,36

Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

Meningkatnya penduduk usia muda juga akan meningkatkan Rasio ketergantungan di Sumba Barat Daya. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun), yang dapat diartikan sebagai tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif. Berdasarkan tabel 2.122, Rasio ketergantungan penduduk di Sumba Barat Daya adalah sebesar 82,36, yang artinya setiap 100 penduduk usia kerja mempunyai tanggungan 82-83 orang yang tidak produktif. Menyikapi hal ini, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan kesenjangan pada aspek ekonomi dan sosial di masa yang akan datang, seperti dengan mempersiapkan lapangan kerja, pembangunan sarana prasarana, analisis program KB, dll.

# 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Semester II Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

Hasil analisis capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan atas gambaran umum kondisi daerah aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umun dan aspek daya saing daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 2.123.

Tabel 2. 123 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Semester II Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

#### 1. Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanan	Target RPJMD Kabupaten pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun ke-		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
			Perencanaan	(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	, ,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	55,56	77,93	59,45	63,61	17,00	0	28,60	0,00	0	0
2	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	95	98,37	95,67	96,33	94,00	0	98,25	0,00	0	0
3	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	63,85	68,78	64,81	65,78	64,00	0	98,75	0,00	0	0
4	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	95	98,37	64,75	96,33	90,00	0	139,00	0,00	0	0
5	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	63,85	68,78	58,31	65,78	55,00	0	94,32	0,00	0	0
6	Nilai Rata-rata hasil Ujian Akhir Nasional SD/MI		61,67	78,71	61,67	67,99	61,00	0	98,91	0,00	0	0
7	Nilai Rata-rata hasil Ujian Akhir Nasional SMP /MTs		55,53	70,78	58,31	61,22	70,00	0	120,05	0,00	0	0
8	Angka putus sekolah (APtS) SD/MI	%	1,73	0,77	1,47	1,25	1,10	0	74,83	0,00	0	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Target RPJMD Kabupaten pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kabupaten melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun ke-		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				, ,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Angka putus sekolah (APtS) SMP/MTs	%	3,74	1,66	3,18	2,7	1,10	0	34,59	0,00	0	0
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	93,79	98,57	94,73	95,68	90,00	0	95,01	0,00	0	0
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA	%	93,80	99,56	94,93	96,06	93,00	0	97,97	0,00	0	0
12	Cakupan Bangunan SD/MI kondisi baik	%	65,00	98,91	68,81	75,69	30,00	0	43,60	0,00	0	0
13	Cakupan Bangunan SMP/MTs kondisi baik	%	52,00	97,25	55,6	63,94	30,00	0	53,96	0,00	0	0
14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD/MI+SMP/MTs)		45	37	44	38	35,00	0	79,55	0,00	0	0
15	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI +SMP/MTs) / 10.000 Penduduk		429	306	393	393	250,00	0	63,61	0,00	0	0
16	Persentase Sekolah berakreditasi A	%	2,77	9,51	2,77	5,51	1,00	0	36,10	0,00	0	0
17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	64,17	100	67,38	71	50,00	0	74,21	0,00	0	0
18	Jumlah warga usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		0	100	100	100	97,00	0	97,00	0,00	0	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupat	RPJMD ten pada abupaten n Ke- 2021	Capaian RPJMD Ka melalui Pel RKPD Tai	abupaten aksanaan	RPJMD Kab Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Jumlah warga usia 7-18 tahun yang belum selesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		0	100	100	100	98,00	0	98,00	0,00	0	0
20	Jumlah warga usia 5-6 tahun yang partisipasi dalam pendidikan dasar		0	100	100	100	98,00	0	98,00	0,00	0	0
21	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%		75	15	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22	Cakupan dokumen Lokal Pendidikan Dasar Kompetensi Dasar Muatan	%		75	15	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23	Cakupan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal pendidikan dasar	%		75	15	30	0,10	0,00	0,67	0,00	0	0
24	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	%		75	15	30	0,10	0,00	0,67	0,00	0	0
25	Cakupan dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD dan PNF	%		75	15	30	15,00	0,00	100,00	0,00	0	0
26	Cakupan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal PAUD dan PNF	%		75	15	30	15,00	0,00	100,00	0,00	0	0
27	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	65,84	84,03	69,13	72,59	30,00	0,00	43,40	0,00	0	0
28	Cakupan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang memiliki izin	%	95	100	96	97	5,00	0,00	5,21	0,00	0	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupa RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten in Ke-	Capaian RPJMD Ka melalui Pel RKPD Tai	abupaten aksanaan			Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Cakupan PAUD dan PNF yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang memiliki izin	%	95	100	96	97	96,00	0,00	100,00	0,00	0	0
30	Cakupan Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah	%	0	75	15	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31	Cakupan Pendistribusian Buku Cerita rakyat	%	0	75	15	30	15,00	0,00	100,00	0,00	0	0
32	Cakupan distribusi Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah	%	0	75	15	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
33	Cakupan Kampung adat yang direvitalisasi	%	0	100	100	100	0,00	5,00	0,00	5,00	5	5
34	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		1	100	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%		100	11	20	11,00	15,00	100,00	75,00	15	15
36	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%			0	15	0,00	2,00	0,00	13,33	2	0
37	Cakupan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	%		100	0	0			0,00	0,00	0,00	0
			inerja (%)	58,76	58,76	58,76	58,76					
	Disco Verdeter		at Kinerja	rendah	rendah	rendah	rendah					

2. Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun (2024)	Target : Kabupat RKPD Ka Tah	en Pada bupaten	Kabu Mel Pelaks	get MD paten alui	Tingkat Cap RPJMD Kab Pelaksana Kabupaten 1	upaten Hasil aan RKPD	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
1				2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cakupan kunjungan ibu hamil k4 (%)	70	100	100	100	56	53	56,00	53,00	53,00	53,00
2	Cakupan Pelayanan nifas (%)	70	100	100	100	68	75	68,00	75,00	75,00	75,00
3	Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang ditangani (%)	70	100	100	100	59	60	59,00	60,00	60,00	60,00
4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	70	100	100	100	10	12	10,00	12,00	12,00	12,00
5	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (%)	48	100	100	100	158	235	158,00	235,00	235,00	235,00
6	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (%)	6	100	100	0	4,8	6	4,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Cakupan pelayanan anak balita (%)	70	100	100	0	67,2	41	67,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	70	100	100	100	56	53	56,00	53,00	53,00	53,00
9	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin (%)	70	100	100	100	68	75	68,00	75,00	75,00	75,00
10	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	70	100	100	100	97,8	100	97,80	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun (2024)	Target l Kabupat RKPD Ka Tah	en Pada bupaten	Cap Tar RPJ Kabu Mel Pelaks RKPD	get MD paten alui anaan	RPJMD Kab Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD 'ahun Ke-(%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
1	2			2020	2021	2020	2021	2020	2021		10
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)	50	100	100	100	80	3,2	80,00	3,20	3,20	3,20
12	Cakupan penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	50	100	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cakupan Penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	80	100	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Cakupan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (%)	50	100	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	cakupan pengembangakan lingkungan sehat (%)	50	100	100	100	66	60	66,00	60,00	60,00	60,00
16	Pelayanan kesehatan tradisional akupuntur asuhan mandiri dan tradisional lainnya (%)	0	100	100	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Cakupan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (%)	80	100	100	100	59,4	56	59,40	56,00	56,00	56,00
18	Operasional pelayanan puskesmas (%)	80	100	100	100	90	90	90,00	90,00	90,00	90,00
19	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah (%)	65	100	100	100	90	90	90,00	90,00	90,00	90,00

No	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun (2024)	Target : Kabupat RKPD Ka Tah	en Pada bupaten	RPJ Kabu Mel	rget IMD paten alui anaan	Tingkat Cap RPJMD Kab Pelaksana Kabupaten 1	upaten Hasil aan RKPD	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
				2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Cakupan pelaksanaan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	60	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten atau kota (%)	80	100	100	100	90	100	90,00	100,00	100,00	100,00
22	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Cakupan desa/kelurahan/universalChild immunazation UCI (%)	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan (%)	100	100	100	100	98	100	98,00	100,00	100,00	100,00
25	Presentase penanganan kasus stunting (%)	70	100	100	100	53	20	53,00	20,00	20,00	20,00
26	Presentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak (%)	100	100	100	100	132	95	132,00	95,00	95,00	95,00
27	cakupan balita pneunomia yang ditanganin (%)	80	100	100	100	0,6	0,1	0,60	0,10	0,10	0,10
28	cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	50	100	100	100	80	0	80,00	0,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun (2024)	RKPD Ka Tal	ten Pada abupaten aun	RPJ Kabu Mel Pelaks RKPD	rget IMD paten alui anaan Tahun	RPJMD Kab Pelaksana Kabupaten T	paian Target upaten Hasil aan RKPD Cahun Ke-(%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
1	2	3	4	2020 5	2021 6	2020	2021	2020	2021	11	12
29	Cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	100	98	120	98,00	120,00	120,00	120,00
30	Cakupan penduduk usia produkti yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	50	100	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Cakupan penduduk usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan (%)	80	100	100	100	0	100	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Cakupan penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	50	100	100	100	0	13,4	0,00	13,40	13,40	13,40
33	Cakupan penduduk penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	50	100	100	100	0	53	0,00	53,00	53,00	53,00
34	Cakupan penduduk penderita gangguan jiwa berat yang terlayanin kesehatan (%)	50	100	100	100	0	45	0,00	45,00	45,00	45,00
35	Cakupan penduduk terduga tuberculosis yang mendapat layanan kesehatan (%)	85	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun (2024)	Kabupat	RPJMD ten Pada abupaten nun	RPJ Kabu Mel Pelaks	rget IMD	RPJMD Kab Pelaksan	paian Target upaten Hasil aan RKPD 'ahun Ke-(%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Cakupan penduduk yang resiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunondeficiency virus) yang mendapatakan pelayanan (%)	60	100	100	100	100	98	100,00	98,00	98,00	98,00
37	Rasio posyandu per satuan balita (%)	17	18	20	22	12,8	1,4	64,00	6,36	6,36	35,35
38	Rasio Puskesmas, poli klinik, pustu per satuan penduduk (%)	0,1	0,07	0,08	0,09	100	100	125000,00	111111,11	111111,11	158730158,73
39	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,006	0,0065	0,0072	0,0079	100	100	1388888,89	1265822,78	1265822,78	19474196689,39
40	Cakupan tenaga kesehatan bersertifikat kompetensi (%)	90	100	100	100	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
41	Rasio dokter per satuan penduduk (%)	0,068	0,110	0,075	0,082	0,08	0,1	106,40	103,78	103,78	94345,90
42	Rasio Tenaga medis per satuan penduduk (%)	0,098	0,157	0,107	0,815	212	212	198417,76	26009,82	26009,82	16566761,75
43	cakupan apotek, toko obat,toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) berizin (%)	80	100	100	100	75	75	75,00	75,00	75,00	75,00

No	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun (2024)	Target i Kabupat RKPD Ka Tal	en Pada bupaten	RPJ Kabu Mel Pelaks	get MD	RPJMD Kab Pelaksan	paian Target upaten Hasil aan RKPD 'ahun Ke-(%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
1	2	_		2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Cakupan produksi pangaan industri rumah tangga dan nomer P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di prosuksi oleh industri rumah tangga di wilayah kab. Yang bersertifikat.(%)	80	100	100	100	75	75	75,00	75,00	75,00	75,00
45	Cakupan tempat pengelolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga,rumah makan / restoran dan depot air minum (DAM) yang bersertifikat (%)	50	100	100	100	41	34	41,00	34,00	34,00	34,00
46	Cakupan makanan jajanan dan sentra makanan yang memiliki stiker pembinaan (%)	50	100	100	100	41	25	41,00	25,00	25,00	25,00
47	Cakupan advokasi,pemberdayaan,kemitraan,peningkatan peran serta msyarakat dan lintas sektor tingkat daerah (%)	50	100	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Cakupan promosi kesehatan,advokasi,kemitraan dan pemberdayaan masyarakat (%)	50	100	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Cakupan pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif tingkat daerah (%)	50	100	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Cakupan promosi dan gerakan hidup bersih dan sehat (%)	50	100	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun (2024)	Kabupat RKPD Ka	RPJMD en Pada abupaten aun	Tar RPJ Kabu Mel Pelaks	aian get MD paten alui anaan Tahun	RPJMD Kab Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD 'ahun Ke-(%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
				2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Cakupan pengembangandan pelaksanaan upaya kesehatan dan bersumber daya masyakat (UKBM) tingkat daerah (%)	50	100	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan suku pengembangan dan pelaksaanan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) (%)	50	100	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		erja (%)	32980	27026	27026	377876737					
		Kinerja	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi					

### 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupa RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten in Ke-	RPJMD K mel Pelaks	n Target Zabupaten Jalui Sanaan Jahun Ke-	RPJMD K Hasil Pel RKPD Ka	paian Target abupaten aksanaan abupaten n ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				, ,	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penduduk berakses Air Minum	Orang	40,04	100,00	100,00	100,00	14,35	19,66	14,35	19,66	19,66	19,66

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupat RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaks	n Target Labupaten Lalui Sanaan Lahun Ke-	Tingkat Cap RPJMD K Hasil Pela RKPD Ka Tahu	aksanaan abupaten	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	Km	0,61	1,00	1,00	1,00	0,69	0,69	69,16	69,16	0,69	69,16
3	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	60,85	100,00	61,00	71,00	79,50	79,50	130,33	111,97	79,50	79,50
4	Cakupan daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	61,85	79,85	64,85	68,85	48,38	49,42	74,60	71,78	49,42	61,89
5	Rasio Jaringan Irigasi		40,45	55,08	43,30	48,40	33,29	36,14	76,88	74,67	36,14	65,61
6	Cakupan pengurangan sampah di perkotaan	%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	Unit	0	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	%	60	85,00	65,00	70,00	66,03	70,10	101,58	100,14	70,10	82,47
9	Cakupan drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan aliran air tidak tersumbat	%			0,00	20,25	20,25	20,25	0,00	100,00	20,25	0,00
10	Cakupan Infrastruktur Permukiman kondisi baik	%	30	50,00	32,00	35,00	10,00	12,00	31,25	34,29	12,00	24,00
11	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan		0,043	0,233	0,073	0,103	0,018	0,015	24,66	14,56	0,02	6,44

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Target pada pada Awal Akhir Tahun Tahun Perencanaan Perencanaan (2024)		Kabupa RKPD Ka Tahu	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaks RKPD Ta	n Target abupaten alui anaan ahun Ke-	RPJMD K Hasil Pela RKPD Ka Tahu		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Cakupan Bangunan dan Lingkungan tertata	%	0	40,00	5,00	20,00	1,00	1,00	20,00	5,00	1,00	2,50
13	Cakupan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikat	%	20	70,00	30,00	40,00	20,00	20,00	66,67	50,00	20,00	28,57
14	Cakupan Ketaatan Terhadap RTRW	%	40	90,00	50,00	60,00	52,10	52,10	104,20	86,83	52,10	57,89
			inerja (%)	50,98	52,72	25,78	35,55					
			at Kinerja	rendah	rendah	sangat rendah	sangat rendah					

### 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Kabupat RKPD Ka	RPJMD en pada ibupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaksana	n Target Cabupaten Lalui Lan RKPD Lan Ke-	RPJMD Kab Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
			Perencanaan	(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	Akiii (70)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		0	100	100	100	0	25	0,00	25,00	0,25	0,25

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			RPJMD K mel Pelaksana	n Target Kabupaten Ialui Aan RKPD In Ke-	RPJMD Kab Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD 1 Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)						
			Perencanaan	(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	7111111 (70)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
2	Jumlah warga yang terkena relokasi akibat Program PEMDA yang mendapat fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		0	100	100	100	0	0	0,00	0,00	1,25	1,25						
3	Cakupan Rumah Layak Huni	%	79,1	100	100	100	100	3,86	100,00	3,86	2,25	2,25						
4	Persentase Rumah Tangga pengguna Listrik	%	62,16	76	62	65	0	21,3	0,00	32,77	3,25	4,28						
5	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU		85,14	85,24	85,16	85,18	0	0	0,00	0,00	4,25	4,99						
6	Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan	%	0	10	0	2	0	0	0,00	0,00	5,25	52,50						
7	Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	%	0	100	0	50	0	0	0,00	0,00	6,25	6,25						
8	Tersedianya pemetaan zona nilai tanah	%	0	100	20	0	0	0	0,00	0,00	7,25	7,25						
			(%)	12,50	7,70	3,75	9,88											
						Predikat Kinerja san												

## 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Kabupa RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaksana	n Target Kabupaten Ialui Ban RKPD In Ke-	RPJMD Kab Pelaksan	paian Target upaten Hasil aan RKPD 1 Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
			Perencanaan	(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	Akiii (70)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan	%	100	100	100	100	50	46	50	46	46	46
2	Cakupan Penegakan Perda	%	100	100	100	100	50	31	50	31	31	31
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50
4	Jumlah Warga Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada		100	100	100	100	50	46	50	46	46	46
5	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	51,67	100	20	40	15	20	75	50	20	20
6	Tingkat Waktu Tanggap (Rensponse Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Wmk)	Menit	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jumlah Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran		0	100	100	100	15	14	15	14	14	14

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Kabupa RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaksana	n Target abupaten alui an RKPD n Ke-	RPJMD Kab Pelaksan	paian Target upaten Hasil aan RKPD I Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
			Perencanaan	(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	Akilli (70)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Rata-rat	a Capaian K	(%) inerja	41,43	33,86	34,50	29,57
							Predik	at Kinerja	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah

#### 6. Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja	Perencanaan		Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupat RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	Capaian ' RPJMD Ka' melalui Pela RKPD Tah	bupaten iksanaan	Tingkat Capa RPJMD Kabu Pelaksanaa Kabupaten '	paten Hasil an RKPD	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	%	16,67	33,33	16,67	16,67	0,01	76,29	0,05	457,64	76,29	228,89
2	Cakupan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	7,74	27,07	12,9	16,13	1256,92	0,00	9743,59	0,00	0,00	0,00
3	Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang tertangani	%	1,01	1,77	1,01	1,26	0,00	17,39	0,00	1380,26	17,39	982,56

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	RKPD Ka Tahu	ten pada abupaten n Ke-	Capaian / RPJMD Kai melalui Pela RKPD Tah	bupaten aksanaan aun Ke-	Tingkat Capa RPJMD Kabu Pelaksanaa Kabupaten 7	paten Hasil an RKPD Fahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				_	2020	2021	2020	2021	2020	2021		1.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Persentase warga penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	0	100	100	100	0,00	5,33	0,00	5,33	5,33	5,33
5	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	0	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Persentase warga lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	0	100	100	100	0,00	2,42	0,00	2,42	2,42	2,42
7	Persentase warga gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna di luar panti	%	0	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PMKS yang tertangani	%	76,39	83	77,12	77,12	0,00	60,43	0,00	78,36	60,43	72,81
9	KK miskin yang terdata dan terverifikasi	%	0	15,97	0	38,32	0,07	46,86	0,00	122,28	46,86	293,40
10	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100	24,00	25,06	24,00	25,06	25,06	25,06

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupat RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	Capaian ' RPJMD Kal melalui Pela RKPD Tah	bupaten iksanaan	Tingkat Capa RPJMD Kabu Pelaksanaa Kabupaten '	paten Hasil an RKPD	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				,	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Jumlah warga korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial	Orang	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 887,97 188,30										188,30	21,25	146,41
			sangat rendah									

## 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Target RPJMD Kabup pada RKPD Kabupaten Ke-		Tar RPJ Kabu mel Pelaks RKPD	aian rget MD paten alui anaan Tahun e-	Target i Kabupat Pelaksana	Capaian RPJMD en Hasil aan RKPD en Tahun	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	%	5	100	23	42	1,5	1,5	6,52	3,57	1,50	1,50
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	3,19	4,05	3,36	3,53	0,8	0,6	23,81	17,00	0,60	14,81

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Target RPJMD Kabu pada RKPD Kabupater Ke-	paten ı Tahun	Tar RPJ Kabu mel Pelaks	alui anaan Tahun	Target Kabupa Pelaksana Kabupat	Capaian RPJMD ten Hasil aan RKPD en Tahun e-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	11,43	11,43	11,43	11,43	2,5	2,2	21,87	19,25	2,20	19,25
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	99,43	99,43	99,43	99,43	27,5	0,2	27,66	0,20	0,20	0,20
5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan	%	0,78	6,17	2,35	3,86	0,8	0,12	34,04	3,11	0,12	1,94
6	Cakupan Advokasi Kabijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	%	4,77	9,54	5,72	6,68	0	0,22	0,00	3,29	0,22	2,31
7	Cakupan dokumen Data Gender dan Anak	%	0	100	0	70	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	0,65	1,8	0,68	0,96		0,25	0,00	26,04	0,25	13,89
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap anak	%	100	100	100	0	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
10	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,24	1,58	1,8	1,74		0,13	0,00	7,47	0,13	8,23
11	Ratio Akseptor KB		51,28	100	71	81	65	0,6	91,55	0,74	0,60	0,60
12	Angka pemakaian Kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	60,71	100	70	75	60	0,57	85,71	0,76	0,57	0,57

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Target RPJMD Kabuj pada RKPD Kabupaten Ke- 2020		Tai RP. Kabu mel Pelaks RKPD	aian rget IMD paten alui anaan Tahun e-	Target Kabupa Pelaksana Kabupat	Capaian RPJMD ten Hasil aan RKPD en Tahun e-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				-							10	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	25,06	25,06 10 20 17 10 0,12							0,12	1,20
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	5,5	50	25	30	11	0,28	44,00	0,93	0,28	0,56
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	%	51	100	71	81	52	0,65	73,24	0,80	0,65	0,65
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	%	25	100	50	60	41	0,4	82,00	0,67	0,40	0,40
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	%	25	100	50	60	0,23	46,00	0,38	0,23	0,23	
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	%	25	100	50	60	35	0,15	70,00	0,25	0,15	0,15
Cakupan Desa yang membentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat  19 Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)								0,65	0,00	0,93	0,65	0,65
		erja (%)	34,97	4,53	0,47	3,53						
						P	redikat 1	Kinerja	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah

## 8. Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupat RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJ Kabupate Pelaks	n Target IMD n melalui anaan ahun Ke-	Target Kabupat Pelaksana Kabupat	Capaian RPJMD en Hasil aan RKPD en Tahun e-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir
			Ferencanaan	(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD dan RPJMD	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTR	Dokumen	1	0	0	0	0	1	0,00	100,00	1	100,00
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		54,5	55,65	54,6	54,7	0	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	На	0	24	0	24	0	0	0,00	0,00	0	0,00
6	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Lokasi	0	70	10	15	10	10	100,00	66,67	10	14,29
7	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	2	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupat RKPD Ka Tahu	RPJMD ten pada abupaten in Ke-	RPJ Kabupate Pelaks RKPD Ta		Target Kabupat Pelaksana Kabupate k	en Hasil aan RKPD en Tahun e-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	0	85	50	60	0	0	0,00	0,00	0	0,00
9	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	0	85	50	60	50	30	100,00	50,00	30	35,29
10	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis Penyimpanan sementara Limba B3	Ijin	1	5	1	2	0	1	0,00	50,00	1	20,00
11	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	Ijin	0	4	0	1	0	0	0,00	0,00	0	0,00
12	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dokumen	129	230	150	170	132	53	88,00	31,18	53	23,04
13	Pengawasan Usaha dan Kegiatan dan atau kegiatan yang izin lingkungan Hidup, izin (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Ijin	129	329	159	194	30	21	18,87	10,82	21	6,38

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	RKPD Ka Tahu	ten pada abupaten n Ke-	RPJ Kabupate Pelaks RKPD Ta	n Target MD n melalui anaan ahun Ke-	Target Kabupat Pelaksana Kabupat k	Capaian RPJMD ten Hasil aan RKPD en Tahun e-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Koordinasi, Sikronisasi, Penyediaan data dan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait PPLH MHA		0	1	0	1	0	0	0,00	0,00	0	0,00
15	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisioanal, dan Hak MHA terkait dengan PPLH (MHA)		0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
16	Cakupan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkugan Hidup	Pelatihan	0	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga masyarakat dunia usaha/duania Pendidikan/Filan Trofi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Orang	5	25	5	5	5	3	100,00	60,00	3	12,00
18	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap (PPLH) Kabupaten Kota	%	2	100	0	100	0	100	0,00	100,00	100	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJ Kabupate Pelaks	n Target MD n melalui anaan ahun Ke-	Target Kabupat Pelaksana	en Hasil aan RKPD en Tahun	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
			retellcanaan	(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021		(70)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Penyusunan kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan sampah kabupaten/Kota	Dokumen	1 Perbubjakstra dan pengelolaan sampah	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kelompok	0	4	0	1	0	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan	TPS 3R	1	1	0	1	0	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Perusahaan	0	1	0	1	0	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Pengurangan sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan kembali	Ton	0	13.116	9.520	10.594	4.767	4.767	50,07	45,00	4.767	36,34
24	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	0	33.259	32.457	32.665	27.765	27.765	85,54	85,00	27.765	83,48

									sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	
							Rata-rata	Capaian Ki	nerja (%)	23,04	25,85	10,05	18,68
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Terencanaan	(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021		(70)
N	lo l	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupat RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJ Kabupate Pelaks	n Target MD n melalui anaan ıhun Ke-	Target Kabupat Pelaksana	aan RKPD en Tahun	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)

# 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Kabupat RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	Kabupat Pelaksan	arget RPJMD en melalui aan RKPD un Ke-	RPJMD Kab Pelaksan	paian Target upaten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian
			Perencanaan	(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	Akhir (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	99,54	100,00	99,54	100,00	100	100,00
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	87,71	97,74	89,68	91,69	90,17	90,46	100,55	98,66	90,46	92,55
3	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	%	0	20,68	4,14	8,27	0,40	21,43	9,71	259,15	21,43	103,63

No	Indikator Kinerja Satuar	Data Capaian pada Awal Tahun		Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Kabupat RKPD Ka	RPJMD en pada abupaten n Ke-	Kabupat Pelaksan	arget RPJMD en melalui aan RKPD un Ke-	RPJMD Kab Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian
			Perencanaan	(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	Akhir (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	14,42	22,43	16,02	17,63	22,91	29,45	143,01	167,06	29,45	131,31
5	Rasio pasangan berakte nikah	%	34,89	48,33	38	40,95	3,89	4,44	10,25	10,83	4,44	9,18
6	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	51,85	61,27	53,71	55,87	10,82	24,63	20,15	44,09	24,63	40,21
7	Database kependudukan skala Kabupaten	%	Ada / tidak ada	Ada / tidak ada	Ada / tidak ada	Ada / tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Jumlah Lembaga Pengguna Data Kependudukan		34	109	49	64	49	107	100,00	167,19	107	98,17
9	Persentase Pertumbuhan Jumlah Penduduk	%	0,20	0,50	0,30	0,35	0,52	0,78	173,62	223,66	0,78	156,56
						Rata-1	ata Capaian	Kinerja (%)	82,10	133,83	47,27	91,45
				Keterangan	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat rendah	sangat tinggi				

## 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupaten	RPJMD pada RKPD Tahun Ke-	Capaian RPJMD K mela Pelaksana Tahu	abupaten alui an RKPD	RPJMD Kab Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran Pemerintahan desa yg baik		87	100	90	92	95	95	105,56	103,26	95,00	95,00
2	Jumlah kerja sama desa dengan pihak ketiga		91	22	10	20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cakupan Desa yang menetapkan Produk Hukum Desa	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Cakupan Desa yang memiliki Pofil desa dan Evaluasi Perkembangan Desa		100	100	100	100	22,28	0	22,28	0,00	0,00	0,00
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan Program pemberdayaan masyarakat	%	35	36	35	35	0	11	0,00	31,43	11,00	30,56
6	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	30	75	40	50	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pemeliharaan pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	30	75	40	50	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupaten	RPJMD pada RKPD Tahun Ke-	Capaian RPJMD Ka mela Pelaksana Tahu	abupaten alui an RKPD	RPJMD Kab Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Cakupan penduduk di atas Garis Kemiskinan		28,88	23,26	27,26	26,38	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga sejahtera I		84,13	63,07	79,42	74,97	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pengeluaran Konsumsi rumah tangga Perkapita		447,598	586,504	478,196	505,288	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cakupan peningkatan jumlah industri rumah tangga perdesaan yang menggunakan Teknologi Tepat Guna		30	20	10	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cakupan Desa yang memiliki kelompok usaha ekonomi yang produktif	100	100 48 67 0			0	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rata -Rata Ca		18,99	19,56	17,17	18,80				
			Predik		sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah				

## 11. Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabup RKPD I	t RPJMD aten pada Kabupaten un Ke-	RP. Kabu mei Pelaks	n Target JMD paten lalui sanaan ahun Ke-	Tingkat Capaiar Kabupaten Hasil F Kabupaten	n Target RPJMD Pelaksanaan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan (%)	%	45	100	55	65	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah terminal Penumpang Tipe C yang dibangun	unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	0	591454	0	583454	0	0	0	0	0	0
4	Rasio ijin trayek		73	120	80	90	0	0	0	0	0	0
5	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	543	814	593	653	0	290	48,90	7,49	290,00	35,63
6	Jumlah angkutan darat yang melaksanakan aktivitas bongkar muat di pelabuhan (unit)	unit	0	10800	6000	7200	0	0	0	0	0	0
7	Cakupan kepemilikan KIR angkutan umum (%)	%	0,3	0	50	50	99,8	16,36	32,72	65,44	16,36	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	RKPD Kabupaten Tahun Ke-		RP. Kabu mei Pelaks	n Target JMD paten lalui sanaan ahun Ke-	Kabupaten Hasil F	n Target RPJMD Pelaksanaan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
							2020	2021	2020 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Cakupan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan (%)	%	0	95	0	95		0	0	0	0	0
						Rata-rata C	apaian Ki	nerja (%)	10,20	9,12	38,30	4,45
				t Kinerja	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah				

## 12. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupa RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaksana	alui	RPJMD Kab Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				, ,	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya website Pemda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Penerapan e-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan penerbitan Buku "Kabupaten Dalam Angka"	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupa RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaksana	n Target abupaten alui an RKPD n Ke-	RPJMD Kab Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				` ,	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan penerbitan Buku "PDRB"	%	100	100	100	100	99	0	99	0	0	0
4	Tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
						Rata-rata	a Capaian K	inerja (%)	79,8	60	60	60
	Predikat Kiner									sedang	sedang	sedang

# 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupa RKPD K	RPJMD ten pada abupaten ın Ke-	RPJMD K melalui Pe	n Target Labupaten Elaksanaan Ahun Ke-	Tingkat Capa RPJMD Kabup Pelaksanaa Kabupaten T	oaten Hasil n RKPD	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				, ,	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki ijin	%	60	100	0	69	0	69	0,00	100,00	69	69,00
2	Cakupan Koperasi yang mendapat pembinaan	%	15	100	30	100	30	100	100,00	100,00	100	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupa RKPD K	RPJMD ten pada abupaten in Ke-	RPJMD K melalui Pe	n Target Kabupaten Elaksanaan ahun Ke-	Tingkat Capa RPJMD Kabup Pelaksanaa Kabupaten T	oaten Hasil n RKPD	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Cakupan koperasi aktif	%	46	66	0	51			0,00	0,00	0	0,00
4	Cakupan Pengurus Koperasi yang mendapat pelatihan	%	8	65	29	65		65	0,00	100,00	65	100,00
5	Cakupan Koperasi yang mendapat akses pembiayaan	%	0	60	0	35		35	0,00	100,00	35	58,33
6	Cakupan Usaha Mikro dan Kecil	%	27	52	27	33	27	33	100,00	100,00	33	63,46
7	Cakupan Usaha Mikro dan Kecil yang diberdayakan	%	28	63	28	37		37	0,00	100,00	37	58,73
8	Cakupan Fasilitasi Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	%	38	100	40	45			0,00	0,00	0	0,00
9	Cakupan revitalisasi pasar	%	0	100	6,25	18,75	1		16,00	0,00	0	0,00
10	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		90	80	90	20	30	20	33,33	100,00	20	25,00
11	Cakupan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	100	100	100	60	100	60,00	100,00	100	100,00
12	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Usaha		0	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupa RKPD K	RPJMD ten pada abupaten in Ke-	RPJMD K melalui Pe	n Target Kabupaten Elaksanaan ahun Ke-	Tingkat Capa RPJMD Kabup Pelaksanaa Kabupaten T	oaten Hasil n RKPD	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Produk Ekspor Unggulan Kabupaten											
13	Cakupan pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	%	52,3	75	55	60		60	0,00	100,00	60	80,00
14	Persentase kegiatan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	3	7	3	4			0,00	0,00	0	0,00
15	Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri	%	0	100	0	100		100	0,00	100,00	100	100,00
16	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	30	90	50	60			0,00	0,00	0	0,00
17	Jumlah Kegiatan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten		0	100	0	100			0,00	0,00	0	0,00
						Rata-rat	a Capaian I	Kinerja (%)	24,08	64,71	42,29	50,27
							Predik	at Kinerja	sangat rendah	rendah	sangat rendah	rendah

# 14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Target Rl Kabupate RKPD Kab Tahun	n pada upaten	RPJMD K melalui Pe	n Target abupaten daksanaan ahun Ke-	Target Kabupat Pelaksana		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
			Perencanaan		2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		13	93	14	15	55	84	392,86	560,00	84,00	90,32
2	Cakupan Promosi Penanaman Modal	%	40	80	50	60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cakupan perijinan yang dilimpahkan ke PTSP	%	80	100	85	90	43	43	50,59	47,78	43,00	43,00
4	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	%	40	90	50	60	71,4	100,0	142,86	166,67	100,00	111,11
5	Cakupan Perizinan dan Non perizinan yang dilakukan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	%	60	100	80	90	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	%	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00	100,00	100,00
7	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	10	50	15	20	0	0,17	0,00	0,01	0,17	0,35

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Target R Kabupate RKPD Kab Tahun	n pada upaten Ke-	RPJMD K melalui Pe RKPD Ta	n Target Kabupaten Elaksanaan ahun Ke-	Target Kabupa Pelaksan Kabupaten	Capaian RPJMD ten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		76,69	82,5	80	80,2	46,9	57,41	58,63	71,58	57,41	69,59
9	Tingkat Pengangguran Terbuka		1,01	0,8	1	0,95	1,7	2,36	170,00	-48,54	2,36	295,15
10	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	20	45	25	30	0	0,68	0,00	2,27	0,68	1,52
11	Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	20	45	25	30	0,01	0,02	0,04	0,08	0,02	0,05
12	Jumlah lahan yang dicadangkan untuk pengembangan kawasan Transmigrasi	На	250	970	370	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jumlah KK Penduduk Setempat dan Transmigran yang diikutsertakan dalam Program Transmigrasi		100	400	100	100	0	84	0,00	84,00	84,00	21,00
14	Jumlah peserta program transmigrasi yang mendapat pembinaan Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		100	500	100	100	0	84	0,00	84,00	84,00	16,80

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Target RI Kabupater RKPD Kab Tahun	n pada upaten	RPJMD K melalui Pe	n Target abupaten daksanaan ahun Ke-	Target Kabupat Pelaksana		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
			Perencanaan	(= )	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN & PMA)	Rp	18.000.000.0 00	121.000.000. 000	20.000.000	22.000. 000.00 0	371.869. 082.750	153.613. 098.471	1859,35	698,24	153.613.098.47 1	126,95
16	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	milyar rupiah	139.000.000. 000	1.220.000.00 0.000	170.000.00 0.000	200.00 0.000.0 00	173.529. 538.373	153.613. 098.471	102,08	76,81	153.613.098.47 1	12,59
	Rata-rata Capaian Kinerja									76,27	39,69	53,49
				kat Kinerja	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat rendah	rendah				

# 15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Kabupat RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaksana	n Target Labupaten alui nan RKPD n Ke-	RPJMD Kab Pelaksan	paian Target upaten Hasil aan RKPD 1 Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
			Perencanaan	(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	4	21	7	11	4	7,2	57,14	65,45	7,20	34,29
2	Cakupan wirausaha muda	%	0	8	10	13	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	50	75	58	58	0	50	0,00	86,21	50,00	66,67

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Kabupa RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaksana	n Target Labupaten Lalui Lan RKPD Lin Ke-	RPJMD Kab Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
			Perencanaan	(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	, ,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	7	47	7	20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	8	60	8	30	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	30	15	30	15	0	2	0,00	13,33	2,00	13,33
7	Jumlah prestasi olahraga	Cabang Olahraga	30	15	30	15	0	12	0,00	80,00	12,00	80,00
8	Jumlah Cabang Olahraga pelajar yang dilaksanakan	Cabang Olahraga	30	68	30	56	0	3	0,00	5,36	3,00	4,41
9	Cakupan Perangkat Daerah/sekolah yang membentuk organisasi kepramukaaan	%	0	25	10	15	0	5	0,00	33,33	5,00	20,00
				Kinerja (%)	6,35	31,52	8,80	24,30				
				at Kinerja	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah				

#### 16. Dinas Perikanan dan Kelautan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Kabupa RKPD K	RPJMD aten pada Cabupaten un Ke-	RPJMD melalui	ian Target Kabupaten Pelaksanaan Tahun Ke-	Tingkat Capaian Kabupaten Has RKPD Kabupat	il Pelaksanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
			Perencanaan	(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	7111111 (70)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Produksi perikanan tangkap	Ton	556,47	696,68	573,16	601,82	783	871	136,61	144,73	871,00	125,02
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0	60	0	15	0	15	0,00	100,00	15,00	25,00
3	Produksi perikanan budidaya	Ton	12	37	17	22	17,8	21.750	104,71	98863,64	21750,00	58783,78
4	Cakupan bina kelompok budidaya Perikanan	%	0	60	0	15	0	15	0,00	100,00	15,00	25,00
5	Cakupan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	%	0	60	0	15	0	15	0,00	100,00	15,00	25,00
6	Konsumsi ikan	Kg	1,3	4,5	2,50	3,00	2,61	3,68	104,40	122,67	3,68	81,78
7	Nilai tukar nelayan	Rp	0	1159000	0	1060900	0	1170000	0	110,2837214	1170000	100,95
						Rata-rat	a Capaiar	ı Kinerja (%)	49,39	14220,19	170381,38	8452,36
					likat Kinerja	sangat rendah	sangat tinggi		rendah			

#### 17. Dinas Pariwisata

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupa RKPD K Tahi	RPJMD aten pada abupaten an Ke-	RPJMD K melalui Pe RKPD Ta	n Target Kabupaten elaksanaan ahun Ke-	RPJMD Kab Pelaksana Kabupaten	paian Target upaten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
			Teremeanaan	(2021)	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Lokasi wisata yang dikembangkan	%	25	58	33	36	33	33	100	91,67	33	56,90
2	Cakupan Prasarana Kota Kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi	%	18	100	34	56	0	0	0	0,00	0	0,00
3	Cakupan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diberikan pelatihan Pengembangan Kompetensi	%	11	75	24	35	17	22,3	70,83	63,71	22,30	29,73
4	Jumlah Kunjungan wisatawan	Orang	8.679	16.037	9.734	10.281	3.569	4.942	36,67	48,07	4.942	30,82
						Rata-rat	a Capaian I	Kinerja (%)	51,87	50,86	18,43	29,36
			rendah	rendah	sangat rendah	sangat rendah						

#### 18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupaten	RPJMD pada RKPD Tahun Ke-	Kabupate Pelaksana	rget RPJMD en melalui aan RKPD n Ke-	RPJMD K Hasil Pel RKPD Ka	paian Target Kabupaten aksanaan abupaten in ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah kelompok ternak penerima bantuan sarana prasarana peternakan dan ternak	Kelompok	16	22	16	22	16	64	100,00	290,91	64,00	2,91
2	Produktivitas produksi ternak	%	2,5	3	2,5	3,00	2,40	2,70	96,00	90,00	2,70	0,90
3	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	%	79,01	80,00	66,41	80	60,35	99,72	90,87	124,65	99,72	1,25
4	Jumlah populasi ternak		399.069	500.868	417.522	436.888	389.106	208.150	93,19	47,64	208.150	41,56
				Kinerja (%)	95,62	168,52	55,47	1,69				
				Keterangan	sangat tinggi	sangat tinggi	rendah	sangat tinggi				

#### 19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Target Kabupaten Kabupaten	RPJMD pada RKPD Tahun Ke-	Kabupat Pelaksan	arget RPJMD en melalui aan RKPD ın Ke-	Tingkat Capaian Kabupaten Has RKPD Kabupat	il Pelaksanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				,	2020	2021	2020	2021	2020	2021		, ,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Luasan Daerah Pertanian	На	51012	52600	51300	51750	41040	49680	80,00	96,00	49680,00	94,45
2	Luasan Daerah Perkebunan	На	16359	16868	16868	16868	5060,4	16193,28	30,00	96,00	16193,28	96,00
3	Cakupan kelompok tani penerima sarana pendukung pertanian	%	43,05	100	54	66	13,5	66	25,00	100,00	66,00	66,00
4	Cakupan kelompok usaha peternakan yang dibina	%	100	100	100	100	25	100	25,00	100,00	100,00	100,00
5	Jumlah bantuan benih yang diberikan kepada kelompok tani	Kg	31500	87500	37500	50000	9375	50000	25,00	100,00	50000,00	57,14
6	Jumlah kelompok ternak penerima bantuan sarana prasarana peternakan dan ternak	Kelompok	16	22	16	22	4	22	25,00	100,00	22,00	100,00
7	produktivitas padi per hektar	%	2,84	4	3	3,2	0,75	3,2	25,00	100,00	3,20	80,00
8	produktivitas jagung per hektar	%	3,1	4	3,2	3,5	0,8	3,5	25,00	100,00	3,50	87,50
9	Produksi Tanaman Perkebunan		16359	16868	16868	16868	4217	16868	25,00	100,00	16868,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)		RPJMD pada RKPD Tahun Ke-	Kabupate Pelaksan	arget RPJMD en melalui aan RKPD in Ke-	Tingkat Capaian Kabupaten Has RKPD Kabupat	il Pelaksanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Pertumbuhan PDRB		5,05	6,62	5,05	5,7	1,2625	5,7	25,00	100,00	5,70	86,10
11	PDRB per Kapita		10294463	13490600	10998200	11621300	2749550	11621300	25,00	100,00	11621300,00	86,14
12	Nilai Tukar Petani		51012	52600	51300	51750	12825	51750	25,00	100,00	51750,00	98,38
13	cakupan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	%	60	100	70	70	27,3	70	39,00	100,00	70,00	70,00
14	Jumlah penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah	Ijin	100	100	100	100			0,00	0,00	0,00	0,00
15	Cakupan kelompok tani yang mendapat penyuluhan pertanian	%	100	100	100	100	50	100	50,00	100,00	100,00	100,00
						Rata-r	ata Capaian	Kinerja (%)	29,93	92,80	787.077,45	81,45
							Pred	ikat Kinerja	sangat rendah	sangat tinggi		sedang

# 20. Bagian Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupa RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K melalui Pe	n Target Tabupaten Elaksanaan ahun Ke-	Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SETDA	%	95	100	100	100	75	87	75	87	87	87
		•		Kinerja (%)	75	87	87	87				
					kat Kinerja	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi			

#### 21. Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabu pada Kabu	RPJMD paten RKPD paten in Ke-	RPC Kabu mel Pelaks RKPD	n Target IMD paten alui anaan Tahun e-	Target Kabupat Pelaksana Kabupate	Capaian RPJMD en Hasil aan RKPD en Tahun e-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah		93	99	93	95	85	21	22,58	23,77	21,00	21,21

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabu pada Kabu Tahu	RPJMD paten RKPD paten n Ke-	RPJ Kabu mel Pelaks RKPD K	n Target IMD paten alui anaan Tahun e-	Target Kabupat Pelaksana Kabupate ka	-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Cakupan Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi KebijakanPertanian,Kehutanan,Kelautan dan Perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup serta energi dan air		0	100		85		86	0,00	0,00	86,00	86,00
		erja (%)	11,29	11,88	53,50	53,61						
Predikat Kinerja sangat sangat rendah rendah												

# 22. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Hubungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupa RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaks	n Target Cabupaten Lalui Sanaan Lahun Ke-	RPJMD k Pelaksanaar	Capaian Target Kabupaten Hasil n RKPD Kabupaten ahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				,	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Pelaksanaan Tugas Komunikasi Pimpinan	%	30	95	35	40	35	40	114,29	285,71	40,00	42,11
2	Cakupan Pelaksanan Keprotokoleran	%	30	95	35	40	0	40	114,29	285,71	40,00	42,11

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupat RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaks	n Target Labupaten Lalui Sanaan Lahun Ke-	RPJMD K Pelaksanaar	Capaian Target Kabupaten Hasil In RKPD Kabupaten Inhun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				,	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6 7		8	9	10	11	12	13
3	Cakupan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	%	30	95	35	40	35	40	114,29	285,71	40,00	42,11
					1	Rata-rata	Capaian K	inerja (%)	114,29	285,7142857	40	42,10526316
					at Kinerja	sangat tinggi	sangat tinggi	rendah	rendah			

#### 23. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	_		RPJMD K melalui Pe	n Target abupaten laksanaan ahun Ke-	RPJMD Kab Pelaksan	paian Target oupaten Hasil aan RKPD n Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
			Perencanaan	(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan melalui LPSE	%	20	100	50	70	43	40	86	57,14	40	40
						Rata-rat	a Capaian I	Kinerja (%)	86,00	57,14	40,00	40,00
			tinggi	rendah	sangat rendah	sangat rendah						

#### 24. Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaksana	n Target abupaten alui an RKPD n Ke-	RPJMD Kab Pelaksan	paian Target oupaten Hasil aan RKPD n Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan DPRD	%	98,31	100	100	100	90	94	94,00	94,00	94,00	94,00
2	Adanya dokumen Propemperda	Dokumen	80	100	100	100	75	90	90,00	90,00	90,00	90,00
3	Jumlah Perda yang dibahas dan ditetapkan	Dokumen	32	6	6	6	6	6	100,00	1666,67	6,00	100,00
4	Cakupan Anggota DPRD yang mendapat Bimbingan Teknis	%	100	100	100	100	75	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Cakupan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diintegrasikan dalam RKPD	%	65	65	65	65	65	85	130,77	201,18	85,00	130,77
6	Cakupan Kunjungan Kerja dalam Daerah	%	100	100	100	100	75	90	90,00	90,00	90,00	90
				inerja (%)	100,79	373,64	77,50	100,79				
							Predik	at Kinerja	sangat tinggi	sangat tinggi	tinggi	sangat tinggi

#### 25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupat RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaksana	n Target Cabupaten Lalui Lan RKPD Lan Ke-	RPJMD Kab Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				,	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Kegiatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	Dokumen	2	100	3	3	3	3	100	100	3	3
3	Cakupan program usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	%	60	100	65	70	65	70	100	100	70	70
4	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan	%	100	100	100	100	79	81	79	81	81	81
5	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80
6	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	%	100	100	100	100	85	85	85	85	85	85
7	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Perekonomian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Target I Kabupat RKPD Ka Tahu	en pada bupaten	RPJMD K mel Pelaksana	n Target Labupaten alui aan RKPD n Ke-	RPJMD Kab Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				, ,	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Kinerja (%)	95,33	95,50	84,92	84,92				
							Predik	at Kinerja	sangat tinggi	sangat tinggi	tinggi	tinggi

#### 26. Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupat RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD k melalui Pe	n Target Kabupaten elaksanaan ahun Ke-	RPJMD Kab Pelaksana	paian Target upaten Hasil aan RKPD Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang ditetapkan	Dokumen	4	6	4	6	4	6	100	100	6	100
2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	9,55	7,01	8,98	8,44	-8,24	46,02	-91,76	545,26	46,02	656,4907275
3	Cakupan Aset yang tercatat dalam KIB		100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100
4	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemda yang bersertifikat		489	274	50	50	5	2	10,00	4,00	2	0,73
5	Opini BPK atas Audit LKPD	Opini	WDP	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
				Kinerja (%)	29,56	187,32	38,51	214,31				
					at Kinerja	sangat rendah	sangat tinggi	sangat rendah	sangat tinggi			

#### 27. Badan Pendapatan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupat RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	-		RPJMD Kab Pelaksan	paian Target upaten Hasil aan RKPD 1 Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				(2024)	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PAD terhadap pendapatan	%		5,4	4,5	5,15	4,36	4,91	96,89	95,34	4,91	90,93
						Rata-ra	ta Capaian	Kinerja (%)	96,89	95,34	4,91	90,93
					tat Kinerja	sangat tinggi	sangat tinggi	tinggi	sangat tinggi			

# 28. Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupat RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaks	n Target Abupaten alui sanaan ahun Ke-	RPJMD Ka Pelaksaı	apaian Target bupaten Hasil naan RKPD n Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
	1 2		r or orrowradi	(202.)	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan PD yang diaudit	%	30	78	15	30	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cakupan pemenuhan Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT		87	100	100	100	88	100	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah Dokumen Laporan Yang Direviu	Dokumen	100	100	100	100	8	22	22,00	22,00	22,00	22,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupat RKPD Ka	RPJMD ten pada abupaten n Ke-	RPJMD K mel Pelaks	n Target abupaten alui anaan ahun Ke-	RPJMD Kal Pelaksar	apaian Target bupaten Hasil naan RKPD n Tahun ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
				,	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Yang Dievaluasi	Dokumen	100	100	100	100	10	10	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Cakupan APBDes yang Diaudit		20	100	40	60	38	100	250,00	416,67	100,00	100,00
6	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang ditangani		100	100	100	100		22	22,00	22,00	22,00	22,00
						Rata-rata	Capaian K	inerja (%)	67,33	95,11	42,33	42,33
							Predika	at Kinerja	sedang	sangat tinggi	sangat rendah	sangat rendah

#### 29. Kecamatan Loura

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupat RK Kabu Tahu	RPJMD ten pada PD paten n Ke-	RP. Kabu mel Pelaks RKPD Ta	n Target IMD paten alui sanaan ahun Ke-	RPJMD K Hasil Pela RKPD Ka Tahu	aksanaan abupaten n ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50
2	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	%	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50
3	Jumlah kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	%	42,75	100	60	65	0	0	0	0	0	0
4	Cakupan Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa	%	100	100	100	100	50	55	50	55	55	55
					R	ata-rata C	Capaian Ki	nerja (%)	37,5	38,75	38,75	38,75
							Predika	t Kinerja	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah

#### 30. Kecamatan Wewewa Timur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupa RK Kabu	RPJMD ten pada PD paten n Ke-	RP. Kabu mel Pelaks	n Target JMD paten alui sanaan ahun Ke-	RPJMD K Hasil Pela RKPD Ka	paian Target abupaten aksanaan abupaten n ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					R	ata-rata (	Capaian Ki	inerja (%)	100	100	100	100
							Predika	t Kinerja	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi

#### 31. Kecamatan Wewewa Utara

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupa RK Kabu Tahu	RPJMD ten pada PD paten n Ke-	RP. Kabupate Pelake RKPD T	n Target JMD en melalui sanaan ahun Ke-	RPJMD K Hasil Pel RKPD Ka Tahu	paian Target Kabupaten aksanaan abupaten in ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
1	2	3	4	5	2020 6	2021 7	2020 8	2021 9	2020	2021	12	13
1	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	%	100	100	100	100	80	85	80	85	85	85
3	Jumlah kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa	%	100	100	100	100	83	91,66	83	91,66	91,66	91,66
					I	Rata-rata	Capaian K	inerja (%)	90,75	94,165	94,165	94,165
							Predika	at Kinerja	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi

#### 32. Kecamatan Wewewa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2024)	Kabupa RK Kabu	RPJMD ten pada IPD paten in Ke-	RPJ Kabu mel Pelaks	n Target JMD paten alui sanaan ahun Ke-	RPJMD K Hasil Pel RKPD Ka	paian Target Labupaten aksanaan abupaten In ke-	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 2021	Rasio Capaian Akhir (%)
					2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	95	100,00	95,00	95,00	95,00
2	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	%	42.75	100	60	65	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cakupan Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa	%	100	100	100	100	100	85	100,00	85,00	85,00	85,00
					R	ata-rata C	Capaian Ki	nerja (%)	75,00	70,00	70,00	70,00
							Predika	t Kinerja	sedang	sedang	sedang	sedang

# **BAB III**



**GAMBARAN KEUANGAN DAERAH** 

# BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

#### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Paparan keuangan daerah disajikan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun sebelumnya untuk menggambarkan kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terkait kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah serta analisis tentang kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan, belanja dan penghitungan kerangka pendanaan.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan melalui pencapaian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2016 s.d 2021. Pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan tahun 2020 mencapai Rp. 45.796.257.267,-. Penerimaan Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp. 11.332.720.825,- dengan pertumbuhan rata-rata 5,86% per tahun, sedangkan rata-rata peningkatan retribusi daerah sebesar 8,29% per tahun.

Dana perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp. 652.193.177.931,- yang terdiri dari: Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 7.214.165.308,-, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 459.832.302.000,- dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 179.146.710.623,- serta penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 6.000.000,-.

Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 315.627.559.145,- yang terdiri dari Hibah sebesar Rp. 53.334.588.812,-, Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 22.700.732.333,- dan Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp. 239.592.238.000,-.

Belanja daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp. 1.016.040.811.988,-. yang didistribusi dalam Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 590.866.785.558,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 425.174.026.430,-.

Untuk menutup defisit anggaran, maka pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 111.928.533.343,-, disamping adanya pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 17.692.508.084,-. Gambaran Rata - Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Rata - Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020

	Ko	1-	77			Realisasi APBD (Rp)			Perubahan APBD	Rata-Rata
	Ko	de	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	2021	Pertumbuhan
1			PENDAPATAN DAERAH	837.653.147.107	912.154.028.641	936.719.929.825	1.071.859.142.608	1.013.616.994.344	1.031.791.309.863	4,47%
1	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.510.608.957	95.920.806.100	41.228.837.437	48.774.747.447	45.796.257.267	50.931.453.521	17,37%
1	1	1	Hasil Pajak Daerah	11.511.702.617	13.395.658.504	10.988.889.387	16.115.325.500	11.332.720.825	14.103.443.753	7,96%
1	1	2	Hasil Retribusi Daerah	2.283.737.020	2.756.808.344	1.447.796.288	1.322.080.532	1.590.336.004	2.688.191.812	10,77%
1	1	3	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.296.507.091	6.237.571.907	5.860.462.444	5.502.702.267	5.085.016.170	7.502.702.267	2,66%
1	1	4	Lain-lain PAD yang sah	22.418.662.229	73.530.767.345	22.931.689.318	25.834.639.148	27.788.184.269	26.637.115.689	35,05%
1	2		DANA PERIMBANGAN	665.556.523.219	653.264.751.122	643.349.956.626	714.932.253.432	652.193.177.931	903.324.173.000	7,50%
1	2	1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.941.068.219	9.839.496.354	9.174.923.458	7.366.424.999	7.214.165.308	-	-13,12%
1	2	2	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	-	-	-	-	-	-	
1	2	3	Dana Alokasi Umum	465.910.509.000	462.958.457.000	467.693.510.000	489.729.129.000	459.832.302.000	-	-0,25%
1	2	4	Dana Alokasi Khusus	186.704.946.000	180.466.797.768	166.481.523.168	217.836.699.433	179.146.710.623	-	0,50%
1	2	5	Dana Insentif Daerah	1	-	-	-	6.000.000.000	-	
1	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	128.586.014.931	162.968.471.419	252.141.135.762	308.152.141.729	315.627.559.145	77.535.683.342	6,13%
1	3	1	Pendapatan Hibah	1.359.716.767	1.453.499.775	47.559.045.148	54.387.480.000	53.334.588.812	53.074.200.000	638,17%
1	3	2	Dana Darurat						-	
1	3	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.836.043.164	20.884.003.644	17.945.639.614	24.202.721.552	22.700.732.333	24.461.483.342	10,84%
1	3	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	110.292.255.000	140.630.968.000	186.636.451.000	229.561.940.177	239.592.238.000	-	21,90%
1	3	5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.098.000.000	-	-	-	-	-	
2			BELANJA DAERAH	835.803.928.842	940.218.256.464	922.151.086.595	1.041.472.803.944	1.016.040.811.988	1.113.603.517.477	6,13%
2	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	405.045.157.892	436.852.439.670	502.079.513.041	555.293.046.854	590.866.785.558	-	9,95%
2	1	1	Belanja Pegawai	237.629.290.342	218.221.337.020	245.049.148.020	264.814.242.242	258.328.731.138	-	2,44%
2	1	2	Belanja Bung	-	-	-	-	-	-	
2	1	3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	
2	1	4	Belanja Hibah	7.296.000.000	27.751.000.000	22.374.061.909	4.649.300.000	7.130.422.268	-	58,78%
2	1	5	Belanja Bantuan Sosial	581.000.000	-	-	2.450.000.000	2.903.100.000	-	18,49%

						Realisasi APBD (Rp)			Perubahan APBD	Rata-Rata
	Kod		Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	2021	Pertumbuhan
2	1	6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	1.536.315.658	1.495.216.540	1.579.746.040	-	1,49%
2	1	7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	159.538.867.550	190.880.102.650	233.119.987.454	281.884.288.072	312.487.518.931	-	18,39%
2	1	8	Belanja Tidak Terduga	-	-	=	=	8.437.267.181	=	
2	2		BELANJA LANGSUNG	430.758.770.950	503.365.816.794	420.071.573.554	486.179.757.090	425.174.026.430	ı	0,87%
2	2	1	Belanja Pegawai	75.728.478.231	86.806.002.959	78.190.815.664	90.495.987.254	75.807.380.650	ı	1,05%
2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	185.840.332.223	185.858.720.504	208.420.155.777	241.219.989.849	204.765.478.770	ı	3,19%
2	2	3	Belanja Modal	169.189.960.496	230.701.093.331	133.460.602.113	154.463.779.987	144.601.167.010	ı	0,89%
			SURPLUS / DEFISIT	1.849.218.265	-28.064.227.823	14.568.843.230	30.386.338.664	-2.423.817.645	-81.812.207.614	301,28%
3			PEMBIAYAAN DAERAH							
3	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.083.816.188	109.937.434.453	81.873.206.630	96.443.528.360	111.928.533.343	91.812.207.614	-1,59%
3	1	1	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya	108.077.146.188	99.933.034.453	81.873.206.630	96.442.049.860	111.928.533.343	91.812.207.614	-1,95%
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-	10.000.000.000		-	-	-	
3	1	3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	ı	ı	
3	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	=	1	-	The state of the s	ı	ı	
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/Penerimaan Kembali Modal Usaha Kelompok Masyarakat	6.670.000	4.400.000	-	1.478.500	-	-	-34,03%
3	1	6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	ı	Ī	
			JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.083.816.188	109.937.434.453	81.873.206.630	96.443.528.360	111.928.533.343	91.812.207.614	-1,59%
3	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	-	-	15.000.000.000	17.692.508.084	10.000.000.000	-12,76%
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	-	-	-	-	-	
3	2	2	Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah	-	=	-	15.000.000.000	17.692.508.084	10.000.000.000	-12,76%
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	
3	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	
			JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	-	-	15.000.000.000	17.692.508.084	10.000.000.000	-12,76%
			PEMBIAYAAN NETTO	98.083.816.188	109.937.434.453	81.873.206.630	81.443.528.360	94.236.025.259	81.812.207.614	-2,29%

Kode	Uraian			Realisasi APBD (Rp)			Perubahan APBD	Rata-Rata
Koue	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	2021	Pertumbuhan
3 3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN ( SILPA )	99.933.034.453	81.873.206.630	96.442.049.860	111.829.867.024	91.812.207.614	-	-0,56%

#### 3.1.2 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah dalam lima tahun untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rata - Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2015 s.d 2019 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Rata - Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2015 s.d 2019

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Rata-Rata Pertumbuhan
110	Oldidii	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ASET	1.028.455.760.007,54	1.162.449.391.467,60	1.352.771.477.693,62	1.402.722.512.516,48	1.402.722.512.516,48	8,27%
01.01	Aset Lancar	120.078.333.908,43	115.415.775.074,53	96.811.146.098,87	119.162.287.870,55	119.162.287.870,55	0,77%
01.01.01	Kas di Kas Daerah	98.911.024.478,93	89.791.296.212,23	68.662.060.209,33	86.183.684.761,33	90.850,798,526,18	-2,41%
01.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	10.867.000,00	374.025.000,00			52.480.000,00	1620,92%
01.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	452.975.467,00	104.946.851,00	73.600.059,00		65.842.780,00	-68,90%
01.01.04	Kas di BLUD						
01.01.05	Kas di Bendahara FKTP			8.822.859.343,00	7.306.571.136,00	6.846.149.640,00	-11,74%
01.01.06	Kas di Bendahara BOS			4.338.007.427,60	2.950.996.269,60	14.558.012.548,60	180,68%
01.01.07	Kas Lainnya	8.832.045.247,00	13.181.851.442,00				-25,37%
01.01.08	Setara Kas						
01.01.09	Investasi Jangka Pendek						

No	Urajan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Rata-Rata Pertumbuhan
No	Uraian	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.10	Piutang Pendapatan	5.846.997.956,00	6.553.231.946,00	7.326.859.908,00	12.211.036.762,00	12.025.733.762,00	22,26%
01.01.11	Piutang Lainnya	7.247.292.839,00	4.961.213.460,00	6.762.771.622,00	4.976.519.177,00	7.206.215.132,00	5,79%
01.01.12	Penyisihan Piutang	-5.755.459.313,50	-7.346.335.716,00	-8.534.947.217,00	-9.072.698.297,00	-9.072.698.297,00	12,53%
01.01.13	Beban Dibayar Dimuka	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00%
01.01.14	Persediaan	4.525.090.234,00	7.788.045.879,30	9.352.434.746,94	14.598.678.061,62	14.908.882.881,99	37,60%
01.02	Investasi Jangka Panjang	35.314.233.539,00	35.314.233.539,00	34.775.048.409,00	34.603.981.275,00	34.425.671.375,00	-0,63%
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya						
	Investasi dalam Obligasi						
01.02.01	Investasi dalam Proyek Pembangunan						
01.02.01	Dana Bergulir	4.941.561.303,00	4.941.561.303,00	4.409.480.200,00	4.307.614.500,00	4.201.598.400,00	-3,88%
	Deposito Jangka Panjang						
	Investasi Non Permanen Lainnya						
	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	-2.627.327.764,00	-2.627.327.764,00	-2.634.431.791,00	-2.703.633.225,00	-2.775.927.025,00	1,39%
	Investasi Jangka Panjang Permanen						
01.02.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	0,00%
	Investasi Permanen Lainnya						
01.03	Aset Tetap	858.678.350.305,11	967.029.296.089,71	1.187.531.108.299,91	1.241.349.150.954,60	1.399.488.654.757,60	13,17%
01.03.01	Tanah	32.692.254.701,00	53.580.475.697,00	162.974.461.026,00	165.798.718.926,00	165.798.718.926,00	67,45%
01.03.02	Peralatan dan Mesin	161.566.376.048,26	162.676.958.510,25	186.561.578.840,12	203.209.285.473,12	225.867.909.831,12	8,86%
01.03.03	Gedung dan Bangunan	344.183.930.227,90	367.564.423.192,90	372.341.806.127,76	404.242.533.270,76	450.771.246.839,76	7,04%
01.03.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	661.228.959.419,76	728.162.758.284,91	859.257.003.510,91	961.148.968.181,91	1.039.944.495.061,91	12,05%
01.03.05	Aset Tetap Lainnya	12.414.493.857,54	14.140.566.077,54	21.036.900.410,54	29.982.558.918,14	39.317.532.511,14	34,08%

							2.2.
No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.360.102.410,00	72.009.191.058,00	101.415.094.040,00	85.131.922.849,00	85.953.588.252,00	52,42%
01.03.07	Akumulasi Penyusutan	-378.767.766.359,35	-431.105.076.730,89	-516.055.735.655,42	-608.164.836.664,33	-608.164.836.664,33	12,84%
01.04	Dana Cadangan	-	10.000.000.000,00				-100,00%
01.04.01	Dana Cadangan	-	10.000.000.000,00				-100,00%
01.05	Aset Lainnya	14.384.842.255,00	34.690.086.764,36	33.654.174.885,84	7.607.092.416,33	7.531.103.095,33	14,94%
01.05.01	Tagihan Jangka Panjang	88.552.900,00	88.552.900,00	675.437.512,00	1.174.864.870,04	1.098.875.549,04	182,56%
01.05.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
01.05.03	Aset Tidak Berwujud	1.373.929.000,00	1.710.609.000,00	1.710.609.000,00	1.710.609.000,00	1.710.609.000,00	6,13%
01.05.04	Aset Lain-lain	12.922.360.355,00	60.011.261.889,90	65.012.607.741,55	29.109.570.636,78	29.109.570.636,78	79,38%
01.05.05	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-26.285.201.415,54	-32.738.282.857,71	-23.068.387.748,49	-23.068.387.748,49	-1,66%
01.05.06	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-835.135.610,00	-1.006.196.510,00	-1.319.564.342,00	-1.319.564.342,00	17,21%
2	KEWAJIBAN	834.867.233,43	6.082.525.163,43	18.632.335.098,00	17.508.392.987,40	13.553.373.004,40	201,57%
02.01	Kewajiban Jangka Pendek	834.867.233,43	6.082.525.163,43	18.632.335.098,00	17.508.392.987,40	13.553.373.004,40	201,57%
02.01.02	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	118.899.005,00	34.940.827,00	4.412.385,00	-	349.546.890,00	-78,99%
02.01.03	Utang Bunga						
02.01.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
02.01.05	Pendapatan Diterima Dimuka						
02.01.06	Utang Beban					-49.466.462,00	
02.01.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	715.968.228,43	6.047.584.336,43	18.627.922.713,00	17.508.392.987,40	17.508.392.987,40	236,67%
02.02	Kewajiban Jangka Panjang						
02.02.01	Utang Dalam Negeri						
02.02.02	Utang Jangka Panjang Lainnya						
3	EKUITAS	1.027.620.892.774,11	1.156.366.866.304,17	1.334.139.142.595,62	1.385.214.119.529,08	1.379.714.880.211.01	10,58%

No	Urajan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Rata-Rata Pertumbuhan
NO	Ulalali	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.01	Ekuitas	1.027.620.892.774,11	1.156.366.866.304,17	1.334.139.142.595,62	1.385.214.119.529,08	1.379.714.880.211.01	10,58%
JUMLAH KE	WAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.028.455.760.007,54	1.162.449.391.467,60	1.352.771.477.693,62	402.722.512.516,48	1.393.268.253.215,41	51,28%

#### 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan dalam APBD Kabupaten Sumba Barat Daya.

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

# 1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2016 s.d 2020, disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020

	Kode			Uraian	Proporsi (%)				
	Kode			Uraiaii	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
2	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	48,46	46,46	54,45	53,32	58,15
2	1	1		Belanja Pegawai	28,43	23,21	26,57	25,43	25,43
2	1	2		Belanja Bunga	-	-	-	-	-

	Kode			Uraian	Proporsi (%)					
	Kode			Uralan		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
2	1	3		Belanja Subsidi		-	-	-	-	
2	1	4		Belanja Hibah	0,87	2,95	2,43	0,45	0,70	
2	1	5		Belanja Bantuan Sosial	0,07	-	-	0,24	0,29	
2	1	6		Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	0,17	0,14	0,16	
2	1	7		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	19,09	20,30	25,28	27,07	30,76	
2	1	8		Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	0,83	
2	2			BELANJA LANGSUNG	51,54	53,54	45,55	46,68	41,85	
2	2	1		Belanja Pegawai	9,06	9,23	8,48	8,69	7,46	
2	2	2		Belanja Barang dan Jasa	22,23	19,77	22,60	23,16	20,15	
2	2	3		Belanja Modal	20,24 24,54 14,47 14,83 14		14,23			

# 2. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumba Barat Daya selama tahun 2016 s.d 2020 disajikan pada Tabel 3.4

Tabel 3. 4 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020

Tahun	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	%
Tahun Anggaran 2016	845.803.928.842,00	237.629.290.342,00	28,10
Tahun Anggaran 2017	940.218.256.464,00	218.221.337.020,00	23,21

Tahun	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	%
Tahun Anggaran 2018	922.151.086.595,00	245.049.148.020,00	26,57
Tahun Anggaran 2019	1.056.472.803.944,00	264.814.242.242,00	25,07
Tahun Anggaran 2020	1.033.733.320.072,39	258.328.731.138,00	24,99

#### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Pada tahun - tahun sebelumnya APBD Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami defisit dan pembiayaan daerah dialokasikan untuk menutupi defisit. Perkembangan defisit APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2019 disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Perkembangan Defisit APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	837.653.147.107	912.154.028.641	936.719.929.825	1.071.859.142.608	1.013.616.994.344
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	835.803.928.842	940.218.256.464	922.151.086.595	1.041.472.803.944	1.016.040.811.988
3	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	-	-	15.000.000.000	17.692.508.084

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	Defisit riil	(8.150.781.735)	(28.064.227.823)	14.568.843.230	15.386.338.664	(20.116.325.729)

Dalam rangka menutupi defisit anggaran sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.5 di atas, maka pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mengalokasikan penerimaan pembiayaan daerah dengan komposisi penutup deficit riil anggaran tahun 2016 s.d 2020, yang disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	99.933.034.453	81.873.206.630	96.442.049.860	111.829.867.024	91.812.207.614
2	Pencairan Dana Cadangan	-	10.000.000.000	-	1	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	1	-
4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	6.670.000	4.400.000	-	1.478.500	-
6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH	99.939.704.453	91.877.606.630	96.442.049.860	111.831.345.524	91.812.207.614

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

#### 3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (Lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan.

## 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan analisis kinerja keuangan masa lalu yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat di proyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun ke depan

## 1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah digunakan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Fokus pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui langkah-langkah meliputi:

- a. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah
- c. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah
- d. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi pendapatan daerah
- e. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah disusun dengan mempertimbangkan kinerja pendapatan daerah beberapa tahun yang lalu dan potensi yang ada. Proyeksi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024 sebesar 16,02 % yang meliputi: Pajak Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 3,70%, pertumbuhan Retribusi Daerah sebesar 2,00%, pendapatan daerah dari Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan diproyeksikan meningkat 1,50% serta dan Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan meningkat 1,50%, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Pajak daerah	14.625.271.172	15.166.406.205	15.727.563.235	3,70%
Retribusi daerah	2.741.955.648	2.796.794.761	2.852.730.656	2,00%
Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.615.242.801	7.729.471.443	7.845.413.515	1,50%
Lain-lain PAD yang sah	27.036.672.424	27.442.222.511	27.853.855.848	1,50%
JUMLAH	64.439.905.096	74.691.634.518	86.732.958.783	16,02%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program - program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024 ditetapkan meliputi: pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 1,50% dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 1,50%, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024

N/o	Was in a		Persentase			
No.	Uraian	2022	2023	2024	rersentase	
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	932.424.584.624	946.410.953.393	960.607.117.694	1,50%	
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	907.840.793.865	921.458.405.773	935.280.281.860	1,50%	
01.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.583.790.759	24.952.547.620	25.326.835.834	1,50%	

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021 (Data di Olah)

Penerimaan Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024 ditetapkan meliputi: hibah diproyeksikan tetap sebagaimana disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Proyeksi Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024

No. Uraiai	Herica		Downsantons		
	oraian	2022	2023	2024	Persentase
01.03	LAIN-PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53.127.274.200	53.924.183.313	54.733.046.063	1,50%
01.03.01	Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan	53.127.274.200	53.924.183.313	54.733.046.063	1,50%

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021 (Data di Olah)

#### 2. Proyeksi Belanja Daerah

Sebagaimana diamanatkan Pasal 49 Ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mempercepat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 3 (Tiga) tahun ke depan dan digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses pertanggungjawaban perencanaan, pelaksanaan hingga memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dan diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Anggaran belanja dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk membiayai penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Penetapan proyeksi belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Proyeksi belanja daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d Tahun 2024 ditetapkan meliputi:

- Pertumbuhan Belanja Operasi sebesar 0,1%
- Pertumbuhan Belanja Modal sebesar 35%
- Belanja Tidak Terduga tidak dialokasikan
- Pertumbuhan Belanja Transfer sebesar 0,02%

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022-2024 disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024

No.	Uraian		B			
No.	Uraian	2022	2023	2024	Persentase	
02.01	BELANJA OPERASI	611.296.632.360	583.183.096.892	556.372.616.782	-4,60%	
02.01.01	Belanja Pegawai	299.316.513.262	299.765.488.032	300.065.253.520	0,13%	
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	270.528.861.855	243.475.975.670	219.128.378.103	-10,00%	
02.01.03	Belanja Hibah	19.382.538.932	18.219.586.596	17.126.411.400	-6,00%	
02.01.04	Belanja Bantuan Sosial	22.068.718.310	21.722.046.594	20.052.573.759	-4,63%	
02.02	BELANJA MODAL	112.057.870.687	151.278.125.428	204.225.469.327	35,00%	
02.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	•	-	-		
02.03.01	Belanja Tidak Terduga	-	-	-		
02.04	BELANJA TRANSFER	298.993.022.567	303.627.917.905	308.332.336.674	1,55%	
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.801.800.000	1.828.827.000	1.856.259.405	1,50%	
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	297.191.222.567	301.799.090.905	306.476.077.269	1,55%	
	TOTAL BELANJA DAERAH	1.022.347.525.613	1.038.089.140.224	1.068.930.422.783	2,26%	

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021 (Data di Olah)

## 3. Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024

No.	Uraian		D		
No.		2022	2023	2024	Persentase
03.01	Penerimaan Pembiayaan			15.000.000.000	
03.01.01	SILPA Tahun sebelumnya	-	-	-	
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan			15.000.000.000	100,00%
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	15.223.475.256	15.380.891.402	15.689.304.228	1,49%
03.02.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1	-	-	
03.02.02	Penyertaan Modal daerah	10.223.475.256	10.380.891.402	10.689.304.228	2,20%
03.02.03	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00%
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1	-	-	
03.02.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainya	-	-	-	
	Pembiayaan Netto	-15.223.475.256	-15.380.891.402	-689.304.228	-1065,17%

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021 (Data di Olah)

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di atas, maka diproyeksikan Indikasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024, sebagaimana pada Tabel 3.12.

Tabel 3. 12 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024

N.	Urajan	ADDD 2001	Proyeksi (Rp)			
No	Uraian	APBD 2021	2022	2023	2024	Persentase
1	PENDAPATAN DAERAH	1.031.791.309.863	1.037.571.000.869	1.053.470.031.626	1.069.619.727.011	1,21%
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.931.453.521	52.019.142.045	53.134.894.920	54.279.563.254	2,14%
01.01.01	Pajak Daerah	14.103.443.753	14.625.271.172	15.166.406.205	15.727.563.235	3,70%
01.01.02	Retribusi Daerah	2.688.191.812	2.741.955.648	2.796.794.761	2.852.730.656	2,00%
01.01.03	Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	7.502.702.267	7.615.242.801	7.729.471.443	7.845.413.515	1,50%
01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	26.637.115.689	27.036.672.424	27.442.222.511	27.853.855.848	1,50%
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	927.785.656.342	932.424.584.624	946.410.953.393	960.607.117.694	1,17%
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	903.324.173.000	907.840.793.865	921.458.405.773	935.280.281.860	1,17%
01.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.461.483.342	24.583.790.759	24.952.547.620	25.326.835.834	1,17%
01.03	LAIN-PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53.074.200.000	53.127.274.200	53.924.183.313	54.733.046.063	1,03%
01.03.01	Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan	53.074.200.000	53.127.274.200	53.924.183.313	54.733.046.063	1,03%
2	BELANJA DAERAH	1.113.603.517.477	1.022.347.525.613	1.038.089.140.224	1.068.930.422.783	-1,23%
02.01	BELANJA OPERASI	643.434.763.670	611.296.632.360	583.183.096.892	556.372.616.782	-4,73%
02.01.01	Belanja Pegawai	298.997.187.318	299.316.513.262	299.765.488.032	300.065.253.520	0,12%
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	300.587.624.284	270.528.861.855	243.475.975.670	219.128.378.103	-10,00%
02.01.03	Belanja Hibah	20.619.722.268	19.382.538.932	18.219.586.596	17.126.411.400	-6,00%
02.01.04	Belanja Bantuan Sosial	23.230.229.800	22.068.718.310	21.722.046.594	20.052.573.759	-4,75%
02.02	BELANJA MODAL	152.120.995.159	112.057.870.687	151.278.125.428	204.225.469.327	14,55%
02.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.453.489.373	-	-	-	
02.03.01	Belanja Tidak Terduga	6.453.489.373	-	-	-	
02.04	BELANJA TRANSFER	311.594.269.276	298.993.022.567	303.627.917.905	308.332.336.674	-0,31%

No	Uraian	APBD 2021	Proyeksi (Rp)			
No			2022	2023	2024	Persentase
1	PENDAPATAN DAERAH	1.031.791.309.863	1.037.571.000.869	1.053.470.031.626	1.069.619.727.011	1,21%
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.800.000.000	1.801.800.000	1.828.827.000	1.856.259.405	1,03%
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	309.794.269.276	297.191.222.567	301.799.090.905	306.476.077.269	-0,32%
	SURPLUS/DEFISIT	-81.812.207.614	15.223.475.256	15.380.891.402	689.304.228	-71,03%
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
03.01	Penerimaan Pembiayaan	91.812.207.614		-	15.000.000.000	
03.01.01	SILPA Tahun sebelumnya	91.812.207.614	-	-	-	
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan				15.000.000.000	
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	15.223.475.256	15.380.891.402	15.689.304.228	18,42%
03.02.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	1	-	-	
03.02.02	Penyertaan Modal daerah	10.000.000.000	10.223.475.256	10.380.891.402	10.689.304.228	2,25%
03.02.03	Pembentukan Dana Cadangan	=	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00%
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	=	=	-	-	
03.02.05	PengeluaranPembiayaan Lainya	-	-	-	-	
	Pembiayaan Netto	81.812.207.614	-15.223.475.256	-15.380.891.402	-689.304.228	-71,03%
	SILPA Tahun Berkenan			-		

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021 (Data di Olah)

# 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan Kerangka Pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama

3 (Tiga) tahun kedepan. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024, disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 s.d 2024

	<u></u> .	Proyeksi (Rp)				
No	Uraian	2022	2023	2024		
1	PENDAPATAN DAERAH	1.037.571.000.869	1.053.470.031.626	1.069.619.727.011		
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-		
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-		
	Total Penerimaan:	1.037.571.000.869	1.053.470.031.626	1.069.619.727.011		
	Dikurangi					
4	Belanja Pegawai	299.316.513.262	299.765.488.032	300.065.253.520		
5	Belanja Transfer	298.993.022.567	303.627.917.905	308.332.336.674		
6	Pengeluaran Pembiayaan	15.223.475.256	15.380.891.402	15.689.304.228		
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	424.037.989.784	434.695.734.287	445.532.832.589		

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021 (Data di Olah)

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, maka dapat ditetapkan kebijakan penggunaan kapasitas kemampuan keuangan daerah agar untuk mengalokasikan belanja berdasarkan 2 (Dua) kelompok prioritas, meliputi:

- Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung pemenuhan pelayanan dasar dan pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah
- Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya



PERMASALAHAN

DAN

ISU STRATEGIES DAERAH

## **BAB IV**

# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

## 4.1 Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan data pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah perkembangan pembangunan Provinsi NTT dan Nasional serta perkembangan global, serta sesuai hasil reviu RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis Kabupaten Sumba Barat Daya.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun terakhir yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan (2019-2024). Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan, pengaruh faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan, serta faktor internal yang langsung berkaitan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya, yang akan sangat mempengaruhi aktivitas penduduk.

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang telah diungkapkan dalam gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah meliputi:

#### 4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 4.1.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Kesejahteraan masyarakat secara agregat belum memadai. IPM tahun 2020 sebesar 62,28 poin, lebih rendah dari IPM NTT (65,19 poin), dan IPM Nasional (71,94 poin). Besaran IPM tersebut tampaknya belum optimal untuk membentuk basis produktivitas masyarakat yang diperlukan untuk menurunkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

- 2. Pemerataan ekonomi diukur berdasarkan indeks gini dalam 3 (Tiga) tahun terakhir (2018-2020) menunjukkan gejala membaik. Permasalahan yang dihadapi adalah pemerataan yang semakin baik tersebut terjadi dalam kondisi stasioner atau tingkat ekonomi yang rendah. Hal ini ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDRB harga konstan dan PDRB per kapita yang relatif rendah.
- 3. Kondisi stasioner atau tingkat ekonomi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang kurang menciptakan nilai tambah. Sektor ekonomi sekunder (industri pengolahan) sebagai sektor pencipta nilai tambah memiliki kontribusi yang sangat kecil; pada sisi lain sektor ekonomi primer (pertanian) sektor ekonomi tersier (perdagangan) cukup menonjol. Nilai tambah yang dihasilkan dari struktur ekonomi seperti ini relatif rendah, karena yang diperdagangkan adalah komoditas pertanian nir olahan (bahan mentah).

## 4.1.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

- 1. Kesejahteraan sosial terkait dengan pemenuhan kebutuhan sosial, material dan spiritual. Kondisi kesejahteraan sosial yang semakin membaik ditandai dengan tingkat pemenuhan kebutuhan sosial, material dan spiritual yang semakin tinggi, dan hasilnya tampak pada semakin mengecilnya proporsi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Data menunjukkan bahwa proporsi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sangat dominan, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan sosial masih relatif rendah.
- 2. Dari aspek pemenuhan kebutuhan sosial terkait kesehatan cukup baik, ditandai dengan Usia Harapan Hidup (UHH) yang lebih tinggi dari rata-rata NTT dan persentase balita gizi buruk yang rendah; demikian harapan lama sekolah yang relatif panjang yaitu 13 tahun atau setara tingkat pendidikan Diploma I, akan tetapi persentase penduduk buta huruf relatif besar. Hal ini menunjukkan bahwa Usia Harapan Hidup (UHH) yang semakin panjang, balita gizi buruk yang sedikit dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang semakin panjang tidak berkonvergensi dengan meningkatnya kesejahteraan sosial.
- 3. Dari aspek pemenuhan kebutuhan sosial terkait materi, didapatkan melalui banyaknya penduduk kategori angkatan kerja yang bekerja. Dari sisi ini, besaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang digunakan sebagai ukuran cukup

baik, karena persentasenya lebih tinggi dibanding rata-rata NTT, tetapi persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi tersebut tidak diikuti dengan perolehan pendapatan yang memadai. Hal ini disebabkan sektor pertanian (tanaman pangan), perkebunan, peternakan dan perikanan yang menjadi basis mata pencaharian sebagian besar penduduk memperlihatkan kecenderungan menurun. Kondisi demikian menyebabkan kemampuan membayar masyarakat rendah, yang berimplikasi pada rendahnya PAD yang justru sangat mengandalkan pajak dan retribusi daerah yang terkait langsung dengan kemampuan membayar masyarakat.

## 4.1.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Dari aspek pemenuhan kebutuhan sosial terkait spiritual (seni budaya dan olahraga), tampaknya belum mendapat perhatian, karena keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang perluasan aktivitas seni budaya dan olahraga di dalam masyarakat.

## 4.1.2 Aspek Pelayanan Umum

#### 4.1.2.1 Urusan Wajib

#### 4.1.2.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### 1. Pendidikan

- a. Tingkat partisipasi penduduk sebagaimana diterangkan melalui besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) relatif tinggi pada jenjang pendidikan SD/MI, tetapi semakin menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi, yakni SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Kondisi demikian menggambarkan rendahnya kesadaran penduduk untuk berpartisipasi pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Implikasinya adalah dalam jangka menengah dan panjang, pasar tenaga kerja akan didominasi angkatan kerja berpendidikan rendah.
- b. Akses terhadap kesempatan belajar pada setiap jenjang pendidikan digambarkan melalui besarnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang juga memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan tingkat partisipasi penduduk. Pada jenjang pendidikan SD/MI, akses penduduk usia sekolah pada jenjang ini relatif tinggi, tetapi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kecenderungannya semakin menurun, sedangkan pada jenjang PAUD (kelompok 5-6 tahun), walaupun

- besaran APS lebih besar dari rata-rata NTT, akan tetapi baru mencapai 53%; artinya masih terdapat proporsi anak usia 5-6 tahun sebanyak 47% yang belum bisa mengakses jenjang Pendidikan PAUD.
- c. Kemampuan masyarakat (orang tua) menyekolahkan anak tepat waktu sesuai kelompok usia sebagaimana diterangkan melalui besaran Angka Partisipasi Murni (APM) dan jenjang pendidikan SD/MI relatif tinggi, tetapi pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi, kemampuan masyarakat (orang tua) menyekolahkan anak tepat waktu semakin menurun. Kondisi demikian menyebabkan struktur penduduk pada usia produktif yang semakin membesar (bonus demografi) tidak berkonvergensi dengan perbaikan atau peningkatan tingkat pendidikan.
- d. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2018 mencapai 70,40%; berarti masih terdapat 29,60% guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV. Percepatan pemenuhan kualifikasi guru perlu dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam kualitas proses pembelajaran antar satuan pendidikan.

#### 2. Kesehatan

- a. Angka Kematian Bayi (AKB) relatif rendah, tetapi Angka Kematian Ibu (AKI) masih relatif tinggi. Hal ini berkorelasi dengan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai 34,58 %, cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 36,53% dan cakupan pelayanan komplikasi kebidanan hanya mencapai 6,31% dari target 80%. Gejala ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan belum optimal.
- b. Penanganan terhadap anak balita belum optimal. Hal ini ditandai dengan cakupan pelayanan anak balita 58,23%, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin sebesar 4,31% dan rasio posyandu hanya mencapai 93,94 per satuan balita.
- c. Layanan imunisasi bagi bayi usia 1 (Satu) tahun sangat rendah. Cakupan imunisasi terhadap bayi usia 1 (Satu) tahun hanya 1,14%, jauh dari cakupan minimal 85% yang disyaratkan *Universal Child Immunization* (UCI).

- d. Ketersediaan prasarana kesehatan belum memadai. Hal ini ditandai dengan rasio puskesmas, poliklinik, pustu mencapai 1:4.766 (idealnya 1:1.000), dan rasio rumah sakit mencapai 0,003 per satuan penduduk.
- e. Ketersediaan tenaga kesehatan (dokter dan tenaga medis) belum memadai, ditandai dengan rasio dokter dan tenaga kesehatan per 100.000 penduduk yang belum mencapai standar. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya layanan kesehatan bagi masyarakat.

#### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Konektivitas antar wilayah di dalam daerah sudah memadai, tetapi tingkat kemantapannya belum memadai. Panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik masing-masing sebesar 64% dan 60,85%. Kondisi demikian menyebabkan waktu tempuh relatif lama dan berkonsekuensi pada biaya transportasi yang relatif mahal.
- b. Ketersediaan sarana air untuk kepentingan konsumsi rumah tangga belum memadai. Hanya 40,04% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air bersih. Kondisi demikian menyebabkan rumah tangga harus menyediakan waktu dan biaya tambahan untuk mendapatkan air bersih.
- c. Jaringan irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 61,85%. Hal ini menyebabkan dukungan terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian tidak optimal.

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni, walaupun mengalami peningkatan dalam 3 (Tiga) tahun terakhir, tetapi belum menjangkau semua rumah tangga. Masih terdapat 20,53% rumah tangga dengan kondisi rumah yang tidak layak huni.
- b. Persentase lingkungan permukiman kumuh relatif kecil (0,70%); sementara itu cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU belum optimal. Masih terdapat 14,86% lingkungan permukiman yang belum didukung dengan PSU yang memadai.

#### 5. Sosial

- a. Penanganan terhadap PMKS belum optimal, bahkan pada beberapa aspek mengalami penurunan tajam seperti jumlah PMKS yang diberikan bantuan dan tertangani, jumlah PMKS yang menerima bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dan jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi lain yang sejenis.
- b. Penanganan terhadap Panti Sosial dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal.
- c. Penanganan terhadap korban bencana belum optimal; hanya sebagian kecil korban bencana yang menerima bantuan sosial dan dievakuasi dengan menggunakan saran dan prasarana tanggap darurat lengkap.
- d. Penanganan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia belum memadai. Hanya 4,36% dari mereka yang menerima jaminan sosial.

## 6. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat relatif baik, akan tetapi ketersediaan petugas polisi pamong praja sangat terbatas. Rasio petugas polisi pamong praja terhadap jumlah penduduk hanya sebesar 1 : 14.714.

#### 4.1.2.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 1. Tenaga Kerja

- a. Sebagian besar angkatan kerja yang berada pada usia produktif, hanya memiliki tingkat pendidikan setara SD (62,58%). Dengan demikian keuntungan bonus demografi tidak didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai mengakibatkan peningkatan produktivitas menjadi terhambat.
- b. Tingkat pengangguran terbuka relatif rendah yaitu 2,36%, akan tetapi pengangguran terselubung yang diukur berdasarkan jumlah angkatan kerja tanpa upah sangat tinggi yaitu 38,75%. Kondisi seperti ini mengakibatkan persentase penduduk miskin relatif tinggi dan sulit berkurang. Dalam 3 (Tiga) tahun terakhir persentase penduduk miskin hanya berkurang dari 28,88% menjadi 28,00%.

- c. Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan meningkat dalam 3 (Tiga) tahun terakhir, sehingga pada tahun 2019 mencapai 75,76%, akan tetapi cakupan angkatan kerja yang terdaftar dari total angkatan kerja sangat kecil yaitu 1,39%. Dengan demikian pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dilihat dari total angkatan kerja sangat kecil sekali. Persoalan yang dihadapi dalam kaitan ini adalah sistem dalam administrasi ketenagakerjaan pada tingkat pemerintahan kurang efektif menjaring pencari kerja dan kesempatan kerja yang sangat terbatas.
- d. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja belum memadai. Jumlah perusahaan yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja cenderung berkurang; sementara jumlah pekerja yang menjadi peserta Jamsostek masih relatif kecil dan cenderung berkurang dalam 3 (Tiga) tahun terakhir.

#### 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Akses perempuan terhadap kesempatan kerja di bidang pemerintahan dan politik sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sangat rendah sebesar 2,67% dari jumlah total pekerja perempuan sebesar 69.704 jiwa. Demikian pula pada Lembaga legislatif.
- b. TPAK perempuan (perkotaan dan perdesaan) 99,43% lebih besar dibanding TPAK laki-laki (85,25%). Demikian juga dari LPU, angkatan kerja perempuan yang bekerja pada sektor pencipta nilai tambah (industri pengolahan (15,07%) lebih besar dari angkatan kerja laki-laki (5,90%), akan tetapi dari segi status pekerjaan utama, angkatan kerja perempuan yang bekerja sebagai pekerja tanpa upahan (51,80%), lebih besar dari angkatan kerja laki-laki (28,40%). Permasalahan pokok yang dihadapi adalah akses angkatan kerja perempuan pada jenis pekerjaan yang memiliki upah tetap sangat terbatas.
- c. Data sejumlah indikator terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak kurang memadai. Data yang dimaksud seperti cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pendampingan, layanan pemulangan, layanan bantuan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

#### 3. Pangan

- a. Ketersediaan energi sudah memenuhi standar nasional dan ketersediaan protein per kapita hampir mencapai standar nasional yaitu ketersediaan energi 2.421 kkal/kapita/hari (standar = 2.400 kkal/kapita/hari) dan ketersediaan protein per kapita mencapai 62,01 gram/kapita/hari (standar nasional = 63 gram/kapita/hari).
- b. Ketersediaan energi dan protein sangat ditentukan oleh 11 (Sebelas) sumber pangan (padi-padian, makanan berpati, gula, buah/biji berminyak, buah buahan, sayuran, daging, telur, susu, ikan, dan minyak/lemak (nabati dan hewani). Permasalahan yang dihadapi adalah produksi 11 sumber pangan tersebut masih berfluktuasi, bahkan menurun karena faktor iklim maupun keterbatasan dukungan sejumlah sarana dan prasarana.

#### 4. Pertanahan

- a. Kepastian hukum kepemilikan lahan yang dibuktikan melalui cakupan luas lahan bersertifikat belum memadai. Persentase lahan bersertifikat baru mencapai 10,27% dari luas lahan yang bersertifikat dari 3.919.903,70 luas lahan yang seharusnya bersertifikat.
- b. Tingkat penggunaan lahan belum optimal berdasarkan potensi lahan yang digunakan. Masih terdapat sekitar 15,17% lahan yang tidak ditanami/lahan tidur.

#### 5. Lingkungan Hidup

- a. Penanganan sampah belum optimal. Timbulan sampah sebanyak 41.598 ton per tahun hanya didukung dengan cakupan area pelayanan pengolahan sampah sebesar 6,84%, sehingga sampah yang tertangani hanya sebesar 0,27%. Demikian juga pengelolaan sampah 3R (reuse, reduce, recycle) belum dilakukan. Kondisi demikian menjadikan kenyamanan lingkungan kurang kondusif bagi terbentuknya lingkungan yang sehat.
- b. Hasil pengukuran indeks kualitas air diperoleh nilai 3,17 (cemar ringan); sementara hasil pengukuran indeks tutupan lahan diperoleh nilai 38,37 (kategori waspada). Jika penanganan tidak optimal, di waktu mendatang dapat mengakibatkan indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan semakin memburuk.

c. Persoalan utama yang dihadapi berkaitan dengan penanganan sampah yang tidak optimal adalah belum tersedianya infrastruktur penanganan sampah secara memadai. Infrastruktur yang dimaksud keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, belum terbentuknya kelembagaan (UPTD) yang mengoperasionalisasi TPA Ramadana, dan ketersediaan SDM terlatih.

## 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan administrasi kependudukan belum memadai, mengakibatkan tidak semua penduduk memiliki dokumen kependudukan yang diperlukan. cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 90,15% dan cakupan penerbitan akta kelahiran sebesar 22,19%. Masih terdapat dokumen administrasi kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Aka Pengesahan Anak dan sebagainya yang perlu mendapat penanganan yang lebih baik.

## 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Penanganan urusan pemberdayaan masyarakat belum optimal, mengakibatkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat belum dimanfaatkan dengan baik. Permasalahan pada aspek pendayagunaan potensi masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan kelembagaan ekonomi, terutama BUMDES dan keberlanjutan penanganan kegiatan pemberdayaan perlu mendapat perhatian.
- b. Pemerintahan pada tingkat desa telah dilengkapi dengan prasarana perkantoran yang memadai. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik telah mencapai 94,79%, akan tetapi kinerja yang dihasilkan berupa tingkat keaktifan PKK dan jumlah kelompok binaan PKK relatif rendah. Demikian juga perangkat hukum yang ditetapkan pada tingkat desa, kelengkapan profil desa dan evaluasi perkembangannya, penanganan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I, jumlah kelompok binaan LKD dan persentase penduduk di atas garis kemiskinan masih rendah.

## 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) relatif tinggi (1,74%) dibanding rata-rata pertumbuhan penduduk NTT (1,59%). Dibanding luas wilayah, jumlah dan laju pertumbuhan penduduk saat ini belum menciptakan tekanan terhadap kepadatan penduduk, akan tetapi di masa mendatang perlu rencana pengendalian yang memadai. Untuk itu perlu disusun Grand Design kependudukan, agar pengendalian jumlah dan sebaran penduduk dapat dilakukan secara optimal.
- b. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tersebut disebabkan masih rendahnya PUS yang mengikuti program KB. Cakupan peserta aktif KB dari PUS baru mencapai 65,60%. Hal ini disebabkan masih terbatasnya Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD).

## 9. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan diharapkan mampu menciptakan keamanan, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas (darat, laut dan udara), serta diharapkan pula mendukung perkembangan ekonomi dan sosial. Dalam kaitan ini terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi seperti :

- a. Layanan angkutan umum belum memadai. Data menunjukkan penurunan arus penumpang angkutan umum yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan belum tersedianya rencana jaringan transportasi angkutan umum dan pengaturan angkutan umum perdesaan dan antar kota yang belum memadai.
- b. Penanganan aspek keamanan moda transportasi darat belum memadai. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan jalan lainnya masih terbatas. Dalam kaitan ini diperlukan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi yang jelas dan terukur.
- c. Penanganan aspek kelancaran dan kenyamanan transportasi juga belum memadai. Penyebab utamanya adalah penyelenggaraan manajemen transportasi yang belum optimal, sehingga banyak menimbulkan ketidaktertiban lalu lintas. Selain itu ketersediaan terminal angkutan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan perlu ditingkatkan.

#### 10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika berkaitan dengan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan menyediakan layanan publik komunikasi dan informatika. Berkaitan dengan hal ini, permasalahan pokok yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Ketersediaan sistem, sarana dan prasarana serta SDM untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (penerapan *e-government*) belum memadai.
- b. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik belum optimal, karena belum didukung dengan perumusan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang teknologi informasi dan komunikasi.

#### 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a. Koperasi aktif mencapai 85,11%, akan tetapi informasi lebih lanjut tentang perkembangan koperasi menurut jenisnya, kelembagaannya, kepengurusan, anggota, akses terhadap sumber pembiayaan dan kinerja usahanya tidak diketahui. Hal ini akan menyulitkan pembinaan dan pengembangan koperasi untuk mendukung perekonomian daerah di waktu mendatang.
- b. Jumlah unit UMKM tercatat sebanyak 1.311 unit, tetapi informasi lebih lanjut tentang perkembangan dan kinerja usahanya tidak diketahui. Penyebab utamanya adalah pendataan tentang keberadaan dan perkembangan unit UMKM belum memadai. Hal ini berimplikasi pada kesulitan dalam pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan peranannya dalam perekonomian daerah.

#### 12. Penanaman Modal

- a. Realisasi investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) mengalami penurunan dari Rp. 586 milyar tahun 2018 menjadi Rp. 174,29 milyar. Di luar faktor pandemi Covid 19, beberapa faktor terkait perlu mendapat perhatian, yaitu: ketersediaan data potensi yang akurat, promosi dan perijinan.
- b. Cakupan perizinan dan non perizinan yang dilakukan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik belum optimal. Penguatan

terkait SOP, infrastruktur dan SDM perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

#### 13. Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Data menunjukkan bahwa cakupan organisasi pemuda aktif dan wirausaha muda mencapai 100%. Akan tetapi kinerja kepemudaan melalui organisasi kepemudaan dan peranannya sebagai wirausaha muda belum tergambarkan. Untuk itu perhatian dalam pembinaan dan pengembangan kepemudaan dari sosial, politik dan ekonomi perlu diperhatikan, mengingat proporsinya merupakan bagian yang cukup besar dari struktur kependudukan menurut usia.
- b. Prestasi dibidang olahraga belum optimal. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk kepentingan pembinaan, ketersediaan pelatih bersertifikat dan pelaksanaan sistem penjaringan bakat perlu dimantapkan untuk mendapatkan atlit yang berpotensi.

## 14. Perpustakaan

Penyelenggaraan perpustakaan berbasis layanan fisik tidak memadai. Di waktu mendatang, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, penyelenggaraan perpustakaan harus diberi perhatian pada perpustakaan yang berbasis virtual. Untuk itu, infrastruktur, sistem dan SDM perlu ditingkatkan.

#### 15. Kearsipan

Tata kelola arsip secara baku dan tertutup belum optimal, karena belum didukung oleh ketersediaan SDM, sistem dan infrastruktur penunjang yang memadai.

#### 16. Statistik

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang statistik digambarkan dalam indikator ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi. Dalam kaitan ini, penerbitan buku data Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka dan PDRB telah dilakukan secara rutin, akan tetapi informasi/data yang disajikan belum sepenuhnya menunjang kebutuhan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

#### 17. Persandian

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi perlu didukung dengan sistem persandian yang kuat untuk menjaga keamanan data/informasi. pengamanan informasi pada tingkat daerah belum berjalan maksimal, karena belum didukung dengan ketersediaan infrastruktur, sistem dan SDM yang memadai.

#### 18. Kebudayaan

Perlindungan terhadap berbagai unsur budaya seperti kampung adat, cagar budaya, artefak, situs dan ritus telah memadai. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan keberlanjutan upaya perlindungannya agar keseluruhan ikon budaya tersebut dapat menjadi sarana belajar dan obyek budaya yang menarik.

#### 4.1.2.1.3 Urusan Pilihan

#### 1. Pariwisata

Daerah ini telah menjadi salah satu destinasi pariwisata yang menarik, karena memiliki ragam obyek wisata yang unik dan khas. Sejak pandemi Covid 19 meluas, arus kunjungan wisatawan menurun, namun demikian sejalan dengan pandemi Covid 19 yang semakin terkendali, diharapkan arus kunjungan wisatawan akan meningkat. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

- a. Lama tinggal wisatawan rata-rata 2 (Dua) hari dan tidak mengalami perubahan selama 5 (Lima) tahun terakhir. Lama tinggal wisatawan yang pendek menyebabkan belanja wisatawan terbatas, sehingga *multiplier effect* yang diciptakan terbatas pula.
- b. Industri pariwisata berbasis ekonomi kreatif belum berkembang secara optimal. Demikian pula penyediaan amenitas dan atraksi belum terintegrasi dengan baik. Pengembangan kedua hal ini di waktu mendatang diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan.
- c. Kemampuan masyarakat menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan pada lokasi wisata masih terbatas. Dibutuhkan tindakan pemberdayaan yang tepat agar kemampuan produksi masyarakat pada lokasi wisata dapat ditingkatkan.
- d. Pengorganisasian dan penyelenggaraan layanan pada lokasi wisata yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat perlu diimbangi dengan penguatan

hospitality (keramahtamahan), sehingga menimbulkan suasana yang kondusif bagi wisatawan.

#### 2. Pertanian

- a. Secara keseluruhan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah masih dominan, walaupun peranannya dalam pembentukan nilai PDRB mengalami penurunan dari 42,54% (2016) menjadi 40,07% (2020).
- b. Penurunan kontribusi sektor pertanian terutama disebabkan menurunnya produksi dan produktivitas sejumlah komoditas utama tanaman pangan (padi sawah, padi ladang, jagung dan ubi kayu) dan tanaman perkebunan utama (jambu mete dan kelapa).
- c. Salah satu faktor penyebab menurunnya produksi dan produktivitas tanaman pangan adalah ketersediaan irigasi yang belum optimal. Jaringan irigasi yang tersedia hanya mencakup 42,78% dari luasan sawah 8.469 ha (2020).
- d. Kelompok petani yang dibina hanya mencakup 48,13% karena masih kurangnya jumlah tenaga penyuluh dan lokasi kelompok tani terpencar pencar. Idealnya 1 orang tenaga penyuluh membina 16 kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 2.300 dengan jumlah tenaga penyuluh 74 orang (1 orang penyuluh mendampingi kurang lebih 31 kelompok tani).
- e. Populasi ternak besar (sapi, kerbau, kuda) dan ternak kecil, terutama babi mengalami penurunan, yang di sebabkan adanya virus ASF penyakit pada babi yang sangat menular dan dapat menyebabkan kematian pada babi hingga 100% sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar.

#### 3. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan, terutama pada 2 (Dua) kecamatan penghasil utama yaitu Kecamatan Kodi dan Loura, akan tetapi produktivitasnya masih relatif rendah, sehingga konsumsi ikan per kapita per tahun hanya mencapai 19,31 kg dari target 31 kg. Hal ini disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana tangkap di kalangan nelayan serta cakupan kelompok nelayan yang dibina masih kurang.

## 4. Perdagangan

- a. Pengaturan aktivitas usaha perdagangan belum optimal, disebabkan belum optimalnya cakupan fasilitasi perijinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Kondisi demikian dapat menciptakan iklim usaha perdagangan yang tidak terkendali.
- b. Peningkatan sarana distribusi perdagangan untuk menjamin kelancaran tata niaga barang kebutuhan pokok dan barang penting belum optimal, disebabkan masih terbatasnya cakupan revitalisasi pasar.
- c. Cakupan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting sudah optimal, tetapi fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sering terjadi. Hal ini disebabkan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagian besar berasal dari luar daerah, dan belum lancarnya distribusi pada setiap wilayah.
- d. Standarisasi dan perlindungan konsumen belum optimal, disebabkan cakupan pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera dan tera ulang belum optimal.
- e. Pengembangan ekspor komoditas unggulan dan promosi penggunaan produk dalam negeri belum optimal, disebabkan cakupan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten dan kegiatan promosi penggunaan produk dalam negeri masih terbatas.

#### 5. Perindustrian

- a. Peranan sektor industri terhadap perekonomian daerah sangat kecil dan tidak mengalami perubahan. Kontribusi sektor industri terhadap pembentukan nilai PDRB hanya 0,63% (2016) dan 0,65% (2020). Kondisi demikian berimplikasi pada rendahnya penciptaan nilai tambah, sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja sangat kecil.
- b. Upaya-upaya untuk mengembangkan sektor industri belum dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, karena belum disusun Rencana Pengembangan Industri.
- c. Pertumbuhan unit usaha industri mikro dan kecil sangat terbatas, karena masih terbatasnya cakupan pembinaan terhadap kelompok pengrajin.

d. Data industri kabupaten belum terpublikasi dengan baik, karena keterbatasan kegiatan publikasi. Kondisi demikian akan membatasi pelaku usaha untuk terlibat dalam pengembangan industri kabupaten.

## 6. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan transmigrasi belum optimal, disebabkan perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi belum memadai. Hal ini mengakibatkan pembinaan terhadap sejumlah keluarga yang mengikuti program transmigrasi swakarsa tidak berjalan dengan baik.

#### 4.1.2.1.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 1. Keuangan

- a. Pengelolaan keuangan daerah belum optimal, sehingga Opini BPK terhadap laporan keuangan baru mencapai WDP dan masih terdapat SILPA setelah perhitungan anggaran.
- b. Pengelolaan barang milik daerah belum optimal. Hal ini disebabkan masih terbatasnya cakupan aset daerah yang tercatat dalam KIB dan cakupan sertifikasi terhadap tanah milik Pemda yang masih terbatas.
- c. Pengelolaan pendapatan daerah belum optimal, menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

#### 2. Kepegawaian

- a. Keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan pelatihan formal meningkat setiap tahun. Peningkatan tersebut hendaknya didasarkan pada rencana pengembangan ASN yang terukur dan berkelanjutan, sehingga investasi SDM melalui pendidikan dan pelatihan formal tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kinerja ASN.
- b. Keikutsertaan ASN yang menduduki jabatan struktural dalam pendidikan dan pelatihan struktural masih terbatas. Cakupan pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural baru mencapai 38,56%. Faktor perencanaan dan penyediaan anggaran perlu mendapat perhatian, sehingga terjadi percepatan dalam pemenuhan cakupan pendidikan dan pelatihan struktural.

- c. Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional belum optimal. Kebutuhan pejabat fungsional berdasarkan analisis jabatan sebanyak 3.098, namun pengangkatannya sebanyak 2.598, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 500 (16,14%) pejabat fungsional.
- d. Pengisian jabatan pimpinan tinggi tahun 2020 sebesar 31%. Sementara itu pengisian jabatan pimpinan administrasi sebesar 81%.

## 3. Perencanaan Pembangunan

- a. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah telah berjalan dengan baik dilihat dari terdapatnya konsistensi penjabaran program-program RPJMD ke dalam RKPD, akan tetapi persentase cakupan pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi belum optimal.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, serta infrastruktur dan kewilayahan belum optimal.

## 4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan daerah belum dilakukan secara optimal, sehingga dukungannya terhadap perencanaan pembangunan belum optimal dan masih terbatasnya inovasi yang dihasilkan daerah.

#### 5. Pengawasan

- a. Cakupan perangkat daerah yang diaudit sudah optimal, tetapi tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan belum optimal.
- b. Dokumen laporan yang direviu dan evaluasi terhadap laporan kinerja perangkat daerah sudah berjalan, akan tetapi perbaikan kinerja perangkat daerah belum merata.
- c. Cakupan APBDes yang diaudit belum optimal, disebabkan terbatasnya jumlah APIP. Selain itu peningkatan kapasitas APIP juga belum optimal.

## 6. Unsur Kewilayahan Kecamatan

- a. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal ditandai dengan cakupan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang masih bervariasi antar kecamatan.
- b. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan belum optimal, ditandai dengan cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa yang masih bervariasi di antara desa-desa.
- c. Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum berjalan dengan baik. Frekuensi tindak pidana pada tingkat Kepolisian Sektor mengalami penurunan sepanjang 2016-2020, akan tetapi cakupan penyelesaiannya belum optimal (67,05%).
- d. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sudah dilaksanakan, tetapi hasil yang dicapai belum optimal, disebabkan cakupan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa belum optimal.

#### 7. Unsur Pemerintahan Umum

- a. Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sudah dilaksanakan, tetapi hasil yang dicapai berupa cakupan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, *Bhineka Tunggal Ika* dan sejarah kebangsaan belum optimal.
- b. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sudah berjalan, tetapi hasil yang dicapai berupa cakupan ormas di wilayah kabupaten yang terdaftar dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP belum optimal.

#### 4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah belum optimal, disebabkan beberapa indikator pembentuk daya saing daerah belum mengalami perbaikan atau peningkatan secara signifikan. Indikator pembentuk yang dimaksud adalah:

- a. Nilai tukar petani dan nelayan berfluktuasi dan belum melampaui 100 poin.
- b. Produktivitas total daerah relatif rendah. Pertambahan modal tetap bruto ratarata per tahun 3,76% hanya menghasilkan tambahan PDRB rata-rata 3,81% per tahun.

- c. Angka kriminalitas tertangani baru mencapai 67,05%, masih terdapat 32,95% tindakan kriminal yang belum tertangani.
- d. Angka Kelahiran Total (TFR) relatif tinggi, yaitu 2,4 (2019)

## 4.2 Analisis Isu - Isu Strategis

#### 4.2.1 Analisis Lingkungan Strategis

## 4.2.1.1 Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal

#### 4.2.1.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan terhadap seluruh aspek kehidupan, baik sektor kesehatan, ekonomi, dan budaya. Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan angka kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi.

Tekanan besar terutama di alami pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat menurun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing* dan *social distancing*). Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan

penyerapan tenaga kerja. Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem *online* memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari *baseline*, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik.

Pasca pandemi Covid-19, ekonomi dunia diperkirakan menuju keseimbangan baru (*new normal*), dimana proses transformasi akan terjadi di 4 (Empat) area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

Dengan vaksinasi yang dilakukan secara masif dan upaya percepatan vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat, diharapkan akan dapat membendung pandemi Covid-19, sekaligus akan dapat mempercepat pemulihan di segala aspek kehidupan, karena masyarakat dapat mulai hidup dan berusaha seperti sebelumnya.

#### 4.2.1.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

# 4.2.1.1.2.1 Isu Internasional dan Regional, Sustainable Development Goals (SDGs)

Sejak berakhirnya kesepakatan *Millenium Development Goals (MDGs)* akhir tahun 2015, maka negara - negara di dunia pun merumuskan suatu platform baru yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ditetapkan dan tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.* 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal yang diterbitkan sebagai wujud komitmen seluruh negara-negara untuk melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai pada 2030. Rumusan SDGs menetapkan 17 (Tujuh Belas) tujuan penting yaitu terciptanya dunia dengan:

## 1. Tanpa kemiskinan

- 2. Tanpa kelaparan
- 3. Kehidupan sehat dan sejahtera
- 4. Pendidikan berkualitas
- 5. Kesetaraan gender
- 6. Air bersih dan sanitasi layak
- 7. Energi bersih dan terjangkau
- 8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak
- 9. Industri, inovasi dan infrastruktur
- 10. Pengurangan kesenjangan
- 11. Kota dan permukiman yang keberlanjutan
- 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- 13. Penanganan perubahan iklim
- 14. Ekosistem lautan
- 15. Ekosistem daratan
- 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
- 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Target dan tujuan SDGs secara eksplisit dimaksudkan untuk mencapai hasil pembangunan yang menggambarkan adanya kemajuan dalam hal pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini tergambar dalam 4 (Empat) pilar SDGs yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum, pilar lingkungan. Secara umum, pilar, target dan tujuan SDGs juga relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan juga tujuan pembangunan di daerah.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan dukungan Pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

Indikator SDGs yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden dimaksud untuk dapat diaplikasikan dalam mengukur realitas pada berbagai tingkat pembangunan baik global, nasional maupun di tingkat daerah, secara global SDGs pada tingkat daerah akan memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan pada suatu daerah yang dapat dibandingkan dengan hasil - hasil pembangunan yang dilakukan secara global, dengan kata lain pengukuran indikator SDGs didaerah akan dapat menggambarkan hasil - hasil pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah yang dibandingkan dengan tujuan pembangunan global.

Tujuan SDGs menjadi salah satu isu strategi dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mempertegas komitmen pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan.

# 4.2.1.1.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan penting dari RPJPN 2005 – 2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara – negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Salah satu fungsi RPJMN adalah menjadi bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJMN.

Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020 – 2025. RPJMN 2020 – 2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin dengan visi "TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG

**ROYONG**". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
- i. Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan

RPJMN 2020 – 2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu **INDONESIA MAJU**. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Presiden menetapkan 5 (Lima) tahun arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

- 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global
- 2. Pembangunan infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
- 3. Penyederhanaan regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (Dua) Undang-undang (UU) yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM
- 4. Penyederhanaan birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselon

5. Transformasi ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Tabel 4. 1 Visi, Misi, Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan 2020 - 2024



Tema pembangunan nasional untuk tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN adalah: **INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH – TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN**. Terdapat 4 (Empat) pilar dari RPJMN 2020 - 2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005 - 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu:

- 1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
- 2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
- 3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
- 4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (Tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

- 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
- 2. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- 3. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- 4. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- 5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- 6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
- 7. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Kaidah pembangunan nasional 2020 – 2024 sebagai berikut:

- Membangun kemandirian: melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia
  - a. Memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni dalam pembangunan baik pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan
  - b. Memiliki kecukupan Sumber Daya Manusia yang memiliki *skill* dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan
  - c. Mampu mendorong tumbuhnya iptek berkualitas dan tidak lagi pada prinsip asimetris terhadap bangsa lain dan bernilai budaya bangsa
  - d. Memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada bangsa sendiri
  - e. Menjadi negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerja sama dalam memberikan pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia

- 2. Menjamin keadilan: pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur
  - a. Mengembangkan pola distribusi yang berimbang antara *input* dengan *output* dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara
  - b. Keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi pembangunan untuk sampai kepada masyarakat pada level minimum yang diharapkan
  - c. Memberikan *share* yang seimbang dalam pencapaian pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah secara bertanggung jawab
  - d. Bersikap *inclusive* atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan
  - e. Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkualitas
  - f. Kesetaraan akses dalam setiap perencanaan, program dan implementasi sehingga setiap orang paham tentang hak dan kemampuannya dalam berpartisipasi terhadap pembangunan
- 3. Menjaga keberlanjutan: memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti
  - a. Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan dasar bangsa atas kecukupan dan ketersediaan fondasi ekonomi
  - b. Menciptakan sebuah kerangka pembangunan untuk menumbuhkan sistem ekonomi pembangunan yang sehat antara *input*, proses dan *output* pembangunan sehingga tidak menyebabkan terjadinya defisiensi
  - c. Mempertimbangkan keberadaan dan pola sosial budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk menumbuhkan tatanan pengelolaan pembangunan inclusive dan interaksi sosial sebagai sebuah support system dalam koherensi pembangunan

- d. Terpatrinya orientasi sikap (*attitude*) yang bertanggung jawab sebagai basis nilai dan etika universal untuk mengikat keberagaman bangsa dalam menciptakan tata pembangunan yang maju
- e. Penguatan komitmen dalam menjamin terciptanya keseimbangan antara tujuan pembangunan manusia dengan kemampuan alam dan lingkungan
- f. Bersifat *inclusive* dalam mengadaptasikan berbagai dinamika pembangunan dengan pendekatan dan keilmuan yang mampu menumbuhkan sistem tata nilai yang bertanggung jawab secara *integrative*

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN 2020 - 2024 telah ditetapkan 6 (Enam) pengarustamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarustamaan (mainstreaming) memiliki peranan vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target - target dari fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Keenam mainstreaming tersebut adalah:

#### 1. Kesetaraan gender

Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik lakilaki maupun perempuan. Indikatornya sebagai berikut :

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

#### 2. Tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan. Indikatornya sebagai berikut :

- a. Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah, pengembangan kompetensi, dan pola karir
- b. Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun proses bisnis instansional

- c. Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansional
- d. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi
- e. Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi
- f. Penerapan zona integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel
- g. Persentase unit kerja pengadaan barang/jasa instansional dengan maturitas level III
- h. Jumlah unit pelayanan publik yang telah menerapkan standar pelayanan publik
- Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

#### 3. Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Indikator sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan PDB
- b. Indeks pembangunan manusia
- c. Indeks kualitas lingkungan hidup
- d. Indeks anti korupsi
- e. Indeks pelayanan publik (K/L)
- f. Indeks akuntabilitas
- g. Indeks resiko bencana Indonesia

#### 4. Kerentanan bencana dan perubahan iklim

Pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Indikatornya sebagai berikut:

- a. Persentase peningkatan indeks ketahanan bencana daerah
- b. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim
- c. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca

d. Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca

#### 5. Modal sosial dan budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Indikatornya sebagai berikut:

- a. Inklusi sosial masyarakat (toleransi, kesetaraan gender, inklusif)
- b. Kohesi sosial (kerja sama, jejaring, aksi kolektif, kepercayaan sosial)
- c. HAKI komunal berbasis ekosistem
- d. Persentase wilayah adat yang tersertifikasi
- e. Nilai ekspor ekonomi budaya terhadap total ekspor
- f. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan/rapat di lingkungan sekitar

#### 6. Transformasi digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional. Indikatornya sebagai berikut :

- a. Meningkatnya NRI (*Network Readiness Index*) untuk mengukur bagaimana teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dapat memberikan dampak terhadap suatu negara
- b. Memperkuat IDI (*ICT Development Index*) untuk melihat bagaimana pengembangan TIK suatu negara dari sisi infrastrukturnya

Dukungan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap pencapaian agenda prioritas RPJMN adalah dengan mengintegrasikan agenda pembangunan nasional sebagai isu strategi dalam perencanaan pembangunan daerah, antara lain: pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat, peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi lokal.

#### 4.2.1.1.2.3 Kebijakan Pembangunan Nasional di Wilayah NTT

Kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional yang dituangkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD Provinsi NTT. Dalam penyusunan RPJMD Provinsi NTT diperlukan adanya keselarasan dengan RPJMN. Keselarasan antara RPJMD dan RPJMN 2020-2024 dapat dilakukan dengan menyelaraskan antara dokumen RPJMN 2020-2024 dengan dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018-2023. Dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional antara lain dapat ditunjukkan dari capaian pembangunan daerah. Bab IV RPJMN 2020-2024 memuat agenda pembangunan wilayah Nusa Tenggara yang disampaikan dalam Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJMN untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,60	6,50	5,90	7,3	7,5
2	Tingkat Kemiskinan	18	17,35	16,15	14,56	12,35
3	Tingkat Pengganguran	2,70	2,70	2,60	2,20	2
4	Kebutuhan Investasi	57,35	63,91	71,47	80,94	91,78

Sumber: Bab IV RPJMN 2020-2024

Berdasarkan analisis atas indikator kinerja, secara umum pembangunan Nusa Tenggara Timur belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN. Indikator kinerja pertumbuhan ekonomi NTT sampai tahun 2019 bertumbuh 5,20%, masih perlu kerja keras untuk mencapai target pertumbuhan yang diamanatkan RPJMN pada tahun 2020 sebesar 5,60%; tingkat kemiskinan NTT tahun 2019 adalah 20,62% juga masih jauh dari target RPJMN tahun 2020 sebesar 18%, sedangkan tingkat pengganguran tahun 2019 sebesar 3.35% juga masih di bawah target RPJMN tahun 2020 yang sebesar 2,70%.

Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024 difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Koridor Pertumbuhan Nusa Tenggara Timur

Koridor Pertumbuhan		Koridor Pemerataan		
1.	Kab. Manggarai Barat	1.	Kab. Sumba Timur	
2.	Kab. Manggarai	2.	Kab. Sumba Tengah	
3.	Kab. Manggarai Timur	3.	Kab. Sumba Barat	
4.	Kab. Ngada	4.	Kab. Sumba Barat Daya	
5.	Kab. Nagekeo	5.	Kab. Timor Tengah Selatan	
6.	Kab. Ende	6.	Kab. Timor Tengah Utara	
7.	Kab. Sikka	7.	Kab. Malaka	
8.	Kota Kupang	8.	Kab. Belu	
9.	Kab. Kupang			

Sumber: Bab IV RPJMN 2020-2024

Dalam pencapaian target pembangunan nasional, pemerintah menetapkan beberapa kegiatan strategis pembangunan untuk Provinsi NTT. Kegiatan strategis tersebut termuat dalam Bab IV RPJMN 2020 - 2024, sebagai berikut:

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

#### 1. Pengembangan sektor unggulan

Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pengembangan komoditas unggulan wilayah Nusa Tenggara yaitu: kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan

- perikanan tangkap, dengan fokus komoditas yaitu: kopi, kelapa, lada, pala, cengkeh, tebu, garam, dan perikanan budidaya.
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- c. Pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT/WPP antara lain SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, WPP 573 (Samudera Hindia Selatan Jawa – Laut Timor Barat), WPP 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali), dan WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda).

#### 2. Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP Labuan Bajo;
- b. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, Jalan Akses DPP Labuan Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo;
- c. Penyediaan *outlet* untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Nusa Tenggara direncanakan berlokasi di pelabuhan *feeder* yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Pelabuhan Tenau Kupang;
- d. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- e. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, seperti:
  - Pengembangan SMK di wilayah Nusa Tenggara secara keseluruhan berjumlah 183 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan.
  - 2) Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 15 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri ekonomi kreatif (khususnya

- otomotif dan manufaktur di Nusa Tenggara Timur), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
- 3) Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 13 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh petani, buruh konstruksi gedung, dan manajer umum perdagangan.
- 4) Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Nusa Tenggara.

#### 3. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah pengembangan kawasan perkotaan di Kota Kupang.

## 4. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

- a. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 9 kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, yaitu: koridor pertumbuhan: Manggarai Timur dan Kupang; dan koridor pemerataan, antara lain: Belu, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan Sumba Tengah;
- Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yaitu Ende, Manggarai, Manggarai. Barat, Nagekeo, dan Timor Tengah Utara;
- c. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 38 kecamatan lokpri di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu;

- e. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- f. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antar kampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN Ngada, KPPN Manggarai Barat, KPPN Sumba Timur;
- g. Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka,, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur;
- h. Penanganan *stunting* dengan lokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 21 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
- i. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 15,69 persen di NTT; dan
- j. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, yang meliputi:
  - 1) Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara;
  - 2) Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
  - 3) Peningkatan konservasi hutan.
- k. Pengembangan Kawasan Perkotaan
  - Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut:
  - 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;

- 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;
- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi pemanfaataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerja sama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
- 9) Pengembangan kerja sama antardaerah, dan
- 10) Penguatan kerja sama, kemitraan dan kolaborasi multi pihak;
- 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu pada Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Malaka;
- 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Kabupaten Sikka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai, Kota Kupang, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sabu Raijua;
- 13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
  - i. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
  - ii. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
  - iii. Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
  - iv. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
  - v. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;

- vi. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
- vii. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral;
- viii. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
- ix. Pembentukan bank tanah;
- x. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
- xi. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.

#### 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:

- i. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
- ii. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
- iii. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana;

#### 15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:

- i. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi;
- ii. Optimalisasi potensi sumber energi terbarukan;
- iii. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
- iv. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan:
- v. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
- vi. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
- vii. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- viii. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
- ix. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi masal;

x. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;

#### Proyek Prioritas Strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2020 - 2024, proyek prioritas strategis (*Major Project*) adalah sebagai berikut:

- 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: Labuan Bajo;
- 2. Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional:
  - a. PKSN Atambua
  - b. PKSN Kefamenanu
- 3. Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: Pulau Sumba.

# 4.2.1.1.2.4 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Provinsi (P-RPJMD) 2018-2023

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 yaitu: "NTT BANGKIT, NTT SEJAHTERA", dengan misi meliputi:

- 1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
- 2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty).
- 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
- 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dilaksanakan akan diukur melalui indikator, baik indikator makro pembangunan maupun indikator

tujuan dan sasaran. Selain itu P-RPJMD 2018-2023 menetapkan pariwisata sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi NTT 2018-2023.

Tabel 4. 4 Indikator Makro Target RPJMD Provinsi NTT pada Tahun 2019-2023

Indikator	Baseline		Target 2023		
	2019	2021	2022	2023	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,87 – 6,50	6,33 – 6,90	6,7 – 7,3	
PDRB per Kapita (Rp juta)	19,5	20-23	23-25	25 - 27	
Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	65,23	65.54 – 67,00	67.35 – 69,00	70 - 71	
Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21-19,63	19,35-16,15	15-Dec	
Inflasi (%)	0,67	3-3,4	3-3,2	3 – 3,2	
Prevelensi Stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10 – 12%	
Indeks Gini (Poin)	0,355	0,35 - 0,34	0,34-0,33	0,34-0,32	
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	94	95	95	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	3,2 -2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5	
Rasio PAD (%)	23,9	25,31	30,12	39,74	
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq)	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829	
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)	44,93	63,91	71,47	80,94	
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (poin)	60,37	65	69	71	

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

Indikator makro pembangunan tersebut dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai tema/fokus arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana terlihat berikut:

Tabel 4. 5 Arah Kebijakan Provinsi NTT

Arah Kebijakan Provinsi NTT							
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			
Transformasi Struktur dan Kultur dalam Pembangunan	Pembangunan Berpusat pada Sumber Daya Manusia	Perubahan Struktur Ekonomi Menuju pada Industri dan Jasa Berbasis Pertanian	Pengembangan Mata Rantai Nilai Pariwisata	Kemandirian Lokal			
Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar	Pembangunan ekonomi pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan	Sinergitas tujuan pembangunan berkelanjutan lintas pemangku kepentingan	Kebangkitan pembangunan menuju masyarakat sejahtera	Kemandirian masyarakat dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan			
Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintahan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat	Pencapaian dan pemenuhan standar pelayanan minimal dan tujuan pembangunan	Peningkatan sumber daya air untuk kebutuhan pertanian dan air bersih	Kerjasama lintas daerah dalam pengembangan produk lokal	Peningkatan kualitas hidup masyarakat			
Sinergitas tujuan dan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya	Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan keluarga	Peningkatan industri pertanian, perikanan, peternakan	Pengembangan industri pariwisata dengan provinsi lain dan luar negeri	Pembangunan industri pariwisata sebagai penggerak multi sektor			
Reformasi birokrasi sistem pemerintahan	Pengembangan potensi garam sebagai industri nasional	Interkoneksi jaringan distribusi produk daerah dan jaringan pariwisata Ring of Beauty					
Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pengembangan badan usaha daerah pada sektor - sektor potensial dalam peningkatan pendapatan daerah, pembukaan lapangan usaha baru dan peningkatan produk lokal						
Keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah							

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

Dukungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap pencapaian agenda prioritas RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan mengintegrasikan misi pembangunan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

dukungan pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty) melalui pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

# 4.2.1.1.2.5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009-2025

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2009-2025 sesuai RPJPD adalah "MASYARAKAT SUMBA BARAT DAYA YANG AMAN, MAJU, DEMOKRATIS DAN BERDAYA SAING".

Untuk merealisasikan visi tersebut di atas, terdapat 8 (Delapan) misi pembangunan daerah yang perlu dilakukan. Kedelapan misi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- 1. **Membangun ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal** dalam artian mengembangkan agribisnis yang mencakup subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani, subsistem agribisnis hilir dan subsistem jasa penunjang agribisnis sebagai sektor utama ekonomi rakyat serta menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sekaligus mengembangkan lembaga keuangan mikro (LKM) untuk mendukung pengembangan ekonomi rakyat.
- 2. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam artian melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan musim kemarau yang panjang sebagai sumber energi alternatif, mengefisienkan dan mengefektifkan manajemen penggunaan tanah, manajemen pembakaran padang rumput, manajemen pemanfaatan hutan, manajemen pemanfaatan potensi air permukaan dan air tanah, manajemen pemanfaatan sumber daya laut dan manajemen limbah dan genangan air yang bersumber dari rumah tangga.
- 3. **Membangun sumber daya manusia bermutu dan beretos kerja** dalam artian mengefisienkan dan mengefektifkan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bermutu dan berkelanjutan serta berwawasan gender, mengupayakan peningkatan kesehatan sumber daya manusia agar selalu prima, serta mengupayakan cara-cara

- untuk meningkatkan semangat kerja, daya juang dan disiplin kerja di kalangan sumber daya manusia.
- 4. **Membangun infrastruktur sosial dan ekonomi yang bermutu dan merata** dalam artian meningkatkan sarana dan prasarana transportasi, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, jaringan irigasi dan pengendali sedimen, akses informasi, energi, yang bermutu dan merata di seluruh kabupaten Sumba Barat Daya.
- 5. **Meningkatkan penegakan supremasi hukum** dalam artian menyusun peraturanperaturan daerah (PERDA) yang jelas dan tidak bertentangan satu sama lain, melakukan penegakan hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, penerapan hukum yang tegas, pengadilan yang adil, jujur dan bersih, serta pelayanan yang tidak diskriminatif dari aparat penegak hukum.
- 6. **Menumbuhkembangkan tata kelola pemerintahan yang baik** dalam artian merevitalisasi kinerja birokrasi dengan cara mewirausahakan birokrasi, melakukan reformasi birokrasi yang mencakup pembangunan birokrasi yang fleksibel rasionalisasi dan efisiensi birokrasi, bekerja atas dasar prestasi-kemampuan-keahlian dan transparansi, bekerja dalam kerangka meritokrasi, bekerja dengan mengutamakan misi dan komitmen, dan bekerja atas dasar aturan hukum yang jelas serta penegakan hukum yang tegas.
- 7. Menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi partisipatif dalam artian memberi peluang kepada warga masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu publik dan membentuk opini, memberikan wawasan kepada para pemimpin demokratis tentang isu-isu publik yang realistik dan bermakna, dan memberi peluang kepada warga masyarakat untuk memberikan justifikasi pandangan mereka sehingga dapat diidentifikasi pilihan-pilihan yang baik dan buruk, dan memungkinkan warga masyarakat untuk memperkuat legitimasi demokrasi formal.
- 8. Menumbuhkembangkan kemampuan daya saing di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah dalam artian meningkatkan mutu warga masyarakat dan pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan, memperbaiki serta meningkatkan kesehatan masyarakat dan pemerintah daerah, memperluas wawasan warga masyarakat dan pemerintah daerah, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui berbagai penelitian murni maupun terapan di kalangan warga masyarakat dan pemerintah daerah, dan mendorong

warga masyarakat dan pemerintah daerah untuk berpikir global dan bertindak lokal.

Visi dan Misi daerah tersebut pencapaiannya dijabarkan ke dalam 4 (Empat) tahapan RPJMD. RPJMD 2018-2023 merupakan tahap ke-3 dalam RPJPD 2009-2023, dimana arahannya sebagaimana terlihat berikut:

#### **RPJMD III (2019-2023)**

Dalam RPJMD III (2019 – 2023) berbagai kegiatan pembangunan melanjutkan periode sebelumnya, dengan penekanan pada upaya peningkatan demokrasi dan penegakan supremasi hukum. Demokrasi dan penegakan supremasi hukum merupakan pilar yang penting dalam mewujudkan kemajuan dan keadilan di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial budaya, politik maupun bidang-bidang lainnya.

Untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum, maka peningkatan kualitas dan etos kerja sumber daya manusia masih perlu terus ditingkatkan. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial dan ekonomi serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka untuk mewujudkan kemajuan yang semakin merata dan berkelanjutan, juga perlu terus ditingkatkan. Dengan adanya kemajuan yang semakin merata dan berkelanjutan pada gilirannya akan lebih memudahkan bagi proses demokratisasi dan penegakan supremasi hukum itu sendiri. Dalam kaitan ini, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan mewirausahakan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang partisipatif, transparan, fleksibel, akuntabel, responsif, efektif, efisien dan taat hukum, perlu dilakukan. Demikian pula, upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan penegakan hak-hak asasi manusia perlu lebih ditingkatkan lagi.

Sasaran yang ingin dicapai pada akhir RPJMD III adalah sebagai berikut:

- 1. Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20% per tahun
- 2. PDRB Riil per kapita sebesar Rp 1.833.072
- 3. Tingkat kemiskinan sebesar 38, 80%
- 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,685

Berdasarkan substansi masalah-masalah di atas, diperoleh isu-isu strategis baru yang diprioritaskan dan diagendakan dalam rangka menyusun program baru untuk dicari solusinya sesuai dengan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah provinsi. Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang diuraikan sebagai berikut: Dukungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap pencapaian agenda prioritas RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan mengintegrasikan misi pembangunan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, antara lain: dukungan pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*) melalui pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

#### 4.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan uraian permasalahan dan isu - isu pada berbagai tingkatan di atas, maka rumusan isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

# 4.3.1 Membangun Masyarakat Sumba Barat Daya yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing Tinggi

Membangun masyarakat yang cerdas dan sehat agar memiliki daya saing tinggi merupakan isu pokok/utama dalam model pembangunan yang berorientasi pada manusia (people centered development). Cerdas berkaitan dengan kemampuan memahami dan memecahkan masalah berbasis ilmu pengetahuan. Sehat adalah keadaan fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan berbagai kegiatan dengan penuh energi secara berkelanjutan.

Dengan demikian cerdas dan sehat merupakan syarat untuk memiliki daya saing yang tinggi. Inilah yang menjadi salah satu ciri kemajuan masyarakat. Masyarakat telah beralih pada cara berpikir dan cara bertindak rasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemecahan masalah dan secara fisik mampu bertindak secara berlanjutan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mewujudkan masyarakat cerdas dan sehat tersebut, beberapa isu strategis berikut ini perlu mendapat perhatian.

- a. Perluasan akses anak usia sekolah terhadap layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar melalui perbaikan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Murni dan Angka Putus sekolah.
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PAUD dan pendidikan dasar melalui peningkatan jumlah dan kualifikasi guru, pemantapan pelaksanaan kurikulum berbasis Standar Pendidikan Nasional, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak serta derajat kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d. Pemantapan rasio tenaga dokter, bidan, perawat dan tenaga medis lainnya, serta sarana dan prasarana kesehatan.
- e. Perluasan cakupan rumah layak huni, sarana sanitasi yang memadai dan perluasan akses rumah tangga terhadap air bersih yang layak.

Masyarakat yang cerdas dan sehat harus tampak pada meningkatnya daya saing kelompok masyarakat pada lokus dan segmen tertentu. Masyarakat desa adalah kelompok masyarakat yang perlu memiliki daya saing tinggi melalui peningkatan kecerdasannya. Keberhasilan dalam meningkatkan daya saing masyarakat desa akan berimplikasi luas pada perkembangan atau tingkat kemajuannya.

Selain itu, angkatan kerja perempuan dan kelompok pemuda yang sebagian besar berada pada usia produktif, jika meningkat daya saingnya, dapat memberi pengaruh besar terhadap kemajuan masyarakat dan daerah pada umumnya. Data menunjukkan bahwa TPAK perempuan lebih tinggi dibanding TPAK laki-laki dan sebagian besar bekerja pada sektor ekonomi pencipta nilai tambah, tetapi mereka belum mendapat penanganan yang memadai. Demikian juga bonus demografi yang diperoleh melalui keberadaan kelompok pemuda pada usia produktif, belum bisa memberi kontribusi optimal, karena daya saing mereka rendah. Karena itu, untuk percepatan peningkatan daya saing masyarakat Sumba Barat Daya di waktu mendatang, beberapa isu strategis terkait masyarakat desa:

a. Penguatan kapasitas SDM aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan legislasi pada tingkat desa;

- b. Penguatan kapasitas Bumdes dalam pengembangan ekonomi dan perluasan kerja sama dengan pemerintah desa untuk pemanfaatan potensi ekonomi lokal;
- c. Perluasan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelompok usaha produktif di dalam desa.

Isu strategis terkait angkatan kerja perempuan:

- Perluasan akses angkatan kerja perempuan pada jenis pekerjaan yang memiliki upah tetap;
- b. Peningkatan kualifikasi tenaga kerja perempuan pada lapangan usaha pencipta nilai tambah (industri pengolahan skala mikro dan kecil).

Isu strategis terkait kelompok pemuda:

- a. Organisasi kepemudaan sebagai suatu kekuatan di dalam masyarakat perlu didorong mengambil peran aktif dalam kegiatan produktif untuk mendukung perekonomian daerah;
- b. Kemampuan SDM pemuda, baik kemampuan kewirausahaan maupun penguasaan teknologi perlu ditingkatkan untuk memperkuat daya saing dan memperbesar kontribusinya dalam perekonomian daerah.
- c. Kontribusi pemuda dalam olahraga prestasi perlu ditingkatkan melalui penyediaan pelatih bersertifikat dan pelaksanaan sistem penjaringan bakat perlu dimantapkan untuk mendapatkan atlit berprestasi.

#### 4.3.2 Pengembangan Infrastruktur Mendukung Kehidupan yang Layak

Masyarakat yang maju, sehat dan berdaya saing tinggi harus didukung dengan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat. Dalam kaitan ini beberapa isu strategis berikut ini perlu mendapat perhatian.

- a. Pembangunan rumah layak huni bagi penduduk miskin dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh
- b. Penyediaan fasilitas umum pada lingkungan permukiman penduduk
- c. Perluasan cakupan layanan air bersih layak bagi masyarakat
- d. Peningkatan rasio elektrifikasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap listrik sebagai sumber penerangan.

#### 4.3.3 Pemantapan Tata kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah syarat yang perlu dipenuhi agar pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik berkualitas. Dalam kaitan ini pemantapan menyeluruh pada aspek tata kelola pemerintahan yang menyangkut fungsi perangkat organisasi, SDM dan sistem penyelenggaraan pemerintahan perlu mendapat perhatian.

Pada tataran fungsi organisasi perangkat daerah, aspek perencanaan, pelaksanaan program serta monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang berbasis pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) perlu dimantapkan. Pada saat ini SIPD telah diterapkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah, akan tetapi berbagai aspek pendukungnya belum memadai. Dalam kaitan ini beberapa isu strategis berikut ini perlu mendapat perhatian.

- a. Ketersediaan dan akurasi data untuk kepentingan perencanaan pembangunan perlu ditingkatkan.
- b. Kemampuan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan tepat waktu perlu ditingkatkan.
- c. Konsistensi penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan dan kinerja pemerintahan serta pelaporannya perlu ditingkatkan.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung pula dengan keterbukaan informasi publik untuk menumbuhkan kepercayaan publik, inovasi pada tingkat pemerintahan terus dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, SDM aparatur yang profesional, pengawasan internal dan tata kelola keuangan yang baik. Terkait dengan hal-hal tersebut, beberapa isu strategis berikut ini perlu mendapat perhatian.

a. Pemantapan sistem, sarana dan prasarana serta SDM untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (penerapan *e-government*).

- b. Penguatan kapasitas perangkat daerah dibidang kelitbangan untuk menghasilkan inovasi yang diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Penguatan kapasitas SDM aparatur untuk jabatan struktural dan fungsional melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.
- d. Penguatan APIP dan pemantapan pelaksanaan pengawasan internal untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Perbaikan Opini BPK melalui pemantapan sistem dan SDM pengelolaan keuangan.
- f. Pemantapan sistem pengamanan aset dan pemanfaatannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

#### 4.3.4 Percepatan Pemulihan Perekonomian Daerah

Berbagai pembatasan yang diberlakukan untuk meredam dampak penyebaran Covid 19 berakibat pada terjadinya kontraksi atau pengecilan perekonomian daerah. Hampir semua lapangan usaha mengalami kontraksi, menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menurun tajam dari 5,06% (2019) menjadi 0,10% (2020). Penurunan pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada meningkatnya angka pengangguran dan banyak pekerja berbasis pendapatan harian mengalami kehilangan sumber pendapatan. Pada saat ini laju penyebaran Covid 19 telah terkendali dan pembatasan kegiatan masyarakat mulai dikurangi. Hal ini memberi ruang yang semakin luas bagi masyarakat dan pelaku ekonomi khususnya untuk menata dan melanjutkan aktivitas ekonominya.

Lapangan usaha pertanian sebagai sektor ekonomi basis dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, perlu mendapat prioritas, mengingat serapan angkatan kerjanya yang relatif besar. Produksi sektor pertanian walaupun tumbuh positif, tetapi besarannya menurun dari 2,65% (2019) menjadi 1,35% (2020). Karena itu produksi dan produktivitas sektor pertanian perlu ditingkatkan. Ketersediaan irigasi teknis untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas masih terbatas. Dari luasan sawah 8.469 ha, hanya 42,78% yang memiliki irigasi; 57,22% belum didukung irigasi. Faktor produksi lainnya yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan produktivitas juga perlu mendapat perhatian.

Lapangan usaha lainnya yang berperan signifikan terhadap perekonomian daerah adalah perdagangan. Kontribusinya relatif besar, dan hanya sedikit mengalami penurunan, dari 14,15% (2019) menjadi 13,72% (2020). meskipun demikian, sebagian besar pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting masih berasal dari luar daerah. Pada sisi lain, sarana distribusi perdagangan untuk menjamin kelancaran tata niaga barang kebutuhan pokok dan barang penting belum optimal, disebabkan masih terbatasnya cakupan revitalisasi pasar. Hal ini mengakibatkan distribusi barang menjadi tidak lancar dan berdampak pada tidak stabilnya harga.

Dari sisi ekspor, perdagangan berperan dalam meningkatkan transaksi pengiriman barang keluar daerah, tetapi barang/komoditas yang diekspor adalah bahan mentah (tanpa olahan). Hal ini disebabkan aktivitas usaha industri pengolahan belum berkembang, peranannya dalam pembentukan nilai PDRB hanya 0,77%. Hal ini menjadi tantangan ke depan, bagaimana mendorong percepatan pengembangan industri pengolahan, sehingga ekspor barang keluar daerah minimal dalam bentuk barang setengah jadi.

Jumlah koperasi aktif relatif besar, yaitu 85,11% dan jumlah UMKM tercatat sebanyak 1.311 unit, akan tetapi informasi tentang kinerjanya tidak diketahui. Penyebab utamanya adalah pendataan tentang keberadaan dan perkembangan koperasi aktif dan unit UMKM belum memadai. Hal ini berimplikasi pada kesulitan dalam pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan peranannya dalam perekonomian daerah.

Di bidang ketenagakerjaan, sebagian besar angkatan kerja yang berada pada usia produktif, hanya memiliki tingkat pendidikan setara SD (62,58%). Dengan demikian keuntungan bonus demografi tidak didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai mengakibatkan peningkatan produktivitas menjadi terhambat. Demikian juga angkatan kerja yang bekerja dengan status pekerja tanpa upah relatif besar (38,75%). Kondisi demikian memberi kontribusi besar terhadap jumlah penduduk miskin.

Di bidang perhubungan, yang diharapkan mampu menciptakan keamanan, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas (darat, laut dan udara), serta diharapkan pula mendukung perkembangan ekonomi dan sosial, sejatinya belum berperan optimal, karena belum didukung layanan angkutan umum perdesaan, penanganan aspek keselamatan, kelancaran dan kenyamanan moda transportasi darat yang memadai.

Pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, menunjukkan perkembangan yang baik. Setelah penyebaran Covid 19 terkendali, aktivitas kepariwisataan di daerah ini diharapkan pulih dan bertumbuh cepat. Modal utama yang dimiliki dalam bentuk obyek dan daya tarik wisata cukup bervariasi dan menarik. Meskipun lama tinggal wisatawan hanya 2 (Dua) hari, tetapi persoalannya adalah bagaimana memanfaatkan waktu tinggal tersebut dengan menyediakan berbagai barang dan jasa yang menarik bagi wisatawan.

Beberapa kendala yang masih dihadapi adalah industri pariwisata berbasis ekonomi kreatif belum berkembang secara optimal. Demikian pula penyediaan amenitas dan atraksi belum terintegrasi dengan baik. Kemampuan masyarakat menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan pada lokasi wisata masih terbatas dan pengorganisasian dan penyelenggaraan layanan pada lokasi wisata belum diimbangi dengan *hospitality* yang memadai. Hal-hal ini perlu mendapat perhatian agar pariwisata dapat berperan optimal menunjang perekonomian daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan percepatan pemulihan perekonomian daerah adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan upaya penyuluhan pertanian memalui perluasan cakupan kelompok tani dan peternak yang mendapat penyuluhan.
- b. Meningkatkan sarana distribusi perdagangan melalui perluasan cakupan revitalisasi pasar dan memantapkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui perluasan cakupan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- c. Menyelaraskan arah pembangunan industri kabupaten dengan fokus pada pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan kerajinan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan ekspor.

- d. Mendorong peningkatan kelas koperasi serta Usaha Mikro dan Kecil melalui perluasan cakupan koperasi yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan, serta meningkatkan jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha.
- e. Meningkatkan kualitas angkatan kerja pada usia produktif melalui kegiatan magang dan pelatihan.
- f. Pemantapan layanan angkutan umum perdesaan untuk meningkatkan mobilitas orang dan barang serta pemantapan penanganan aspek keselamatan, kelancaran dan kenyamanan moda transportasi darat yang memadai.
- g. Mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi dan penataan obyek wisata, serta percepatan pengembangan usaha-usaha kreatif dan layanan jasa kepariwisataan melalui peningkatan cakupan usaha ekonomi kreatif berbasis kompetensi, pengembangan desa wisata dan perbaikan kualitas amenitas dan atraksi kepariwisataan.

#### 4.3.5 Percepatan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan penurunan yang kurang signifikan dalam 3 (Tiga) tahun terakhir, yaitu dari 28,88% (2018), 28,06% (2019) menjadi 28,00% (2020). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya penurunan jumlah penduduk miskin belum efektif. Karena itu di waktu mendatang upaya penurunan jumlah penduduk miskin perlu lebih fokuskan lagi.

BPS menggunakan pengukuran kemiskinan absolut dengan memakai garis kemiskinan sebagai patokan. Seseorang dikatakan miskin bila belanja per kapita per bulan untuk kebutuhan makanan dan non makanan di bawah garis kemiskinan. Untuk Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2020, BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp. 383.674 per kapita per bulan. Dengan demikian bila suatu keluarga terdiri dari 5 (Lima) orang, maka pendapatan minimum yang diperlukan keluarga tersebut untuk bisa melampaui garis kemiskinan sebesar Rp. 1.918.730.-

Dengan demikian intervensi harus fokus pada penduduk atau keluarga yang belanja per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dikaitkan dengan angkatan kerja menurut status pekerjaan utama, pada tahun 2020 terdapat 65.962 atau 38,75%

dari total angkatan kerja, yang bekerja dengan status pekerja bebas dan pekerja tanpa upah. Bila dilihat dari proporsinya terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2020 sebanyak 97.810 orang, maka proporsi angkatan kerja tanpa upah tersebut sebesar 67,44%.

Karena mereka tidak memiliki upah, maka diduga belanja per kapita mereka per bulan di bawah garis kemiskinan. Per definisi, mereka adalah penduduk miskin. Untuk itu yang menjadi persoalan adalah bagaimana menemukan keberadaan angkatan kerja tanpa upah tersebut. Bila sebagian dari mereka berhasil dibina untuk bekerja pada pekerjaan dengan upah tetap, maka angka kemiskinan akan menurun secara signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka 2 (Dua) isu strategis berkaitan dengan percepatan penurunan jumlah penduduk miskin adalah sebagai berikut.

- a. Pendataan lengkap untuk mengetahui keberadaan dan profil angkatan kerja dengan status pekerja bebas dan pekerja tanpa upah perlu dilakukan, agar dapat ditemukan sasaran yang tepat dan rumuskan bentuk intervensi yang tepat.
- b. Penanganan lintas sektor untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan upah tetap sehingga dapat menampung pekerja bebas dan pekerja tanpa upah tersebut.

#### 4.3.6 Pemantapan Konektivitas dan Lingkungan Hidup

Koneksitas antar wilayah yang baik akan menciptakan mobilitas orang dan barang yang lancar, cepat dan berbiaya murah. Hal ini sangat diperlukan agar aktivitas ekonomi yang dikelola masyarakat efisien dan tidak berbiaya tinggi. Prasarana yang diperlukan untuk mendukung koneksitas antar wilayah adalah jalan dan jembatan dalam kondisi baik.

Data menunjukkan bahwa konektivitas antar wilayah di dalam daerah sudah memadai, tetapi tingkat kemantapannya belum memadai. Panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik masing-masing sebesar 61% dan 60,85%. Kondisi demikian menyebabkan waktu tempuh relatif lama dan berkonsekuensi pada biaya transportasi yang relatif mahal.

Terkait lingkungan hidup, terdapat 2 (Dua) indikator yang perlu diperhatikan yaitu cakupan penanganan sampah dan indikator kualitas air. Penanganan sampah belum

memadai, disebabkan belum tersedianya infrastruktur penanganan sampah secara memadai. Infrastruktur yang dimaksud mencakup keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, belum terbentuknya kelembagaan (UPTD) yang mengoperasionalisasi TPA Ramadana, dan ketersediaan SDM terlatih. Selain itu, hasil pengukuran indeks kualitas air diperoleh nilai 3,17 (cemar ringan); sementara hasil pengukuran indeks tutupan lahan diperoleh nilai 38,37 (kategori waspada). Penanganan yang tidak optimal di waktu mendatang dapat mengakibatkan indeks kualitas air semakin memburuk.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu strategis berikut ini perlu mendapat perhatian.

- a. Pemantapan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik, sehingga mendukung kelancaran arus barang dan orang antar wilayah dan terciptanya aktivitas ekonomi yang efisien.
- b. Peningkatan kapasitas penanganan dan pengolahan sampah melalui perluasan area penanganan sampah, penggunaan teknologi 3R (*reduce*, *recycle*, *reuse*) untuk pengolahan sampah dan penguatan kelembagaan pengawasan lingkungan.

#### 4.3.7 Pemantapan Sistem Perlindungan Sosial

Salah satu aspek keadilan distributif yang harus diwujudkan adalah adanya perlindungan yang memadai terhadap kelompok masyarakat mengalami permasalahan kesejahteraan sosial. Kelompok masyarakat ini umumnya terdiri dari kelompok masyarakat yang memiliki berbagai keterbatasan fisik, mental dan sosial, lanjut usia, serta kelompok masyarakat yang menjadi korban bencana.

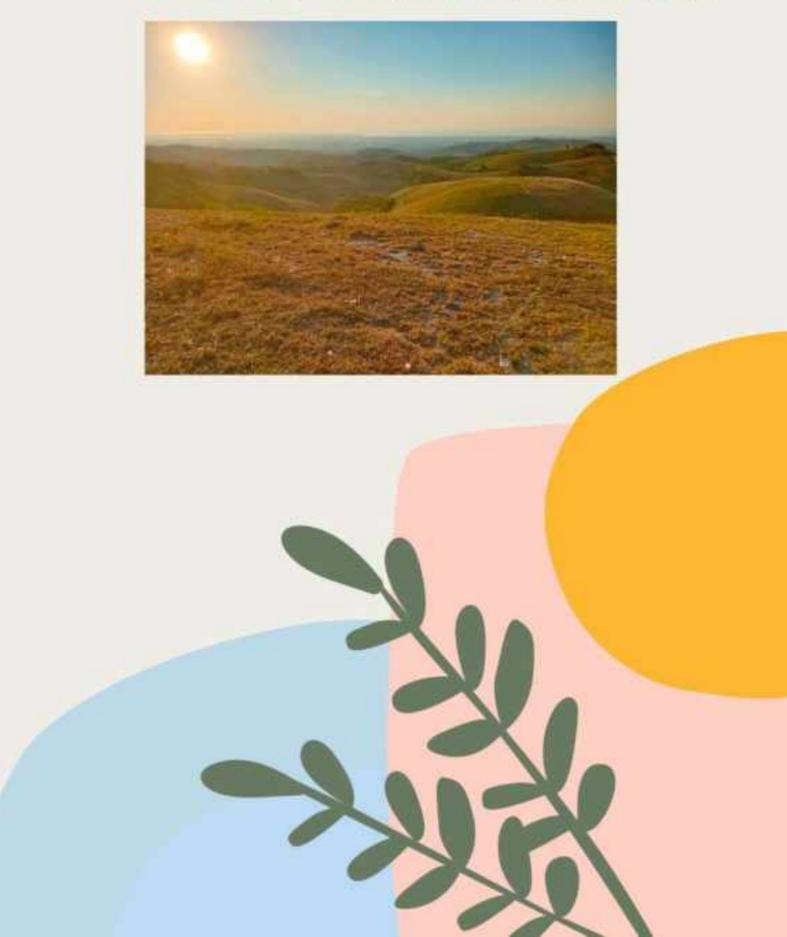
Perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada mereka meliputi pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi/material dan spiritual, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan layak. Selain itu, tindakan perlindungan yang diberikan pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian mereka.

Beberapa fakta yang dikemukakan pada bagian permasalahan menunjukkan bahwa penanganan terhadap PMKS, panti sosial dan korban bencana belum optimal. Demikian pula penanganan terhadap penyandang disabilitas serta lanjut usia tidak potensial. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mendapatkan perlindungan sosial.

Karena itu isu strategis berikut ini perlu mendapat perhatian untuk pemantapan sistem perlindungan bagi mereka.

- a. Penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan persentase PMKS, korban bencana dan penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang memperoleh perlindungan dan bantuan sosial.
- b. Peningkatan kapasitas PMKS melalui pelatihan dan bantuan sarana agar mereka dapat melakukan kegiatan produktif untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam kaitan ini pemantapan fungsi Panti Sosial dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian.

# BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN



#### BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

#### 5.1 Visi

Visi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (Lima) tahun ke depan, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

## "TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA BARAT DAYA YANG MAJU, BERKUALITAS, BERDAYA SAING, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA"

Visi ini mengandung pengertian bahwa kondisi masyarakat Sumba Barat Daya pada masa 5 (Lima) tahun ke depan akan mengalami peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sebagai dampak dari kemajuan tata kelola pemerintahan dan proses pembangunan yang demokratis dan akuntabel serta pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih berkualitas.

Makna visi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 adalah:

- ✓ Maju, mengandung pengertian bahwa masyarakat Sumba Barat Daya menjadi pintar, cerdas, sehat dan mandiri karena terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar.
- ✓ Berkualitas, mengandung pengertian bahwa suatu kondisi kehidupan yang unggul dalam aspek kualitas Sumber Daya Manusia, sarana prasarana (infrastruktur) pelayanan dasar, dan sosial budaya.
- ✓ Berdaya saing, mengandung pengertian bahwa masyarakat dapat menumbuh-kembangkan kemampuannya secara optimal dan konstruktif dalam berbagai aspek kehidupan untuk berpartisipasi bersama sama pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih baik.
- ✓ Demokratis, mengandung pengertian bahwa masyarakat mendapatkan hak haknya dan menjalankan kewajiban kewajibannya sesuai dengan asas kepatutan dan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai warga negara dan masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejahtera, mengandung pengertian bahwa dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik jasmani maupun rohani. Sejahtera jasmani dimaksud berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan yang layak, termasuk pengelolaan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan, sedangkan sejahtera rohani berkaitan dengan terpenuhinya rasa aman, tenteram dan damai dalam tatanan kehidupan yang demokratis dan toleran atau saling menghargai.

#### 5.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 diuraikan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang maju dan berkualitas, didukung sarana dan prasarana kehidupan yang layak dan memadai dilihat dari pemenuhan pendidikan, kesehatan, pembinaan terhadap seni dan budaya, pemberdayaan terhadap pemuda serta keolahragaan, pemenuhan infrastruktur terkait pelayanan dasar seperti rumah layak huni, akses terhadap air minum dan air bersih serta sanitasi.
- 2. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, bersih, efektif dan terpercaya.
- 3. Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang sejahtera, ditunjukkan oleh peningkatan ekonomi masyarakat, yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan, menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, tersedianya infrastuktur yang mendukung konektivitas seperti jalan dan jembatan, terpenuhinya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan, dan anak, serta menjamin mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan memastikan kelestarian lingkungan, selain itu juga mengusahakan ketahanan terhadap bencana.

Penjelasan Misi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024, diuraikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Penjelasan Misi Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024

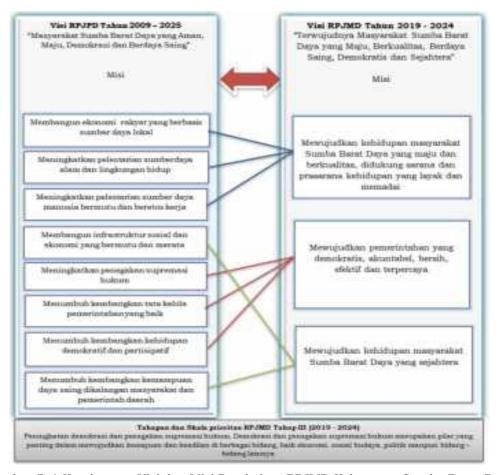
Misi	Penjelasan Misi
Kesatu, Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang maju dan berkualitas, didukung sarana dan prasarana kehidupan yang layak dan memadai	<ul> <li>Kualitas kehidupan masyarakat meningkat, yang ditunjukkan oleh:</li> <li>Tingginya indeks pendidikan masyarakat</li> <li>Pelayanan pendidikan yang berkualitas</li> <li>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</li> <li>Terwujudnya keluarga berencana</li> <li>Pembinaan terhadap generasi muda, baik memalui organisasi pemuda maupun kelompok kepemudaan</li> <li>Meningkatnya prestasi olahraga</li> <li>Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar, seperti: <ul> <li>a. meningkatnya rumah layak huni yang memiliki akses air bersih</li> <li>b. meningkatnya rumah layak huni yang memiliki sanitasi layak</li> <li>c. meningkatnya desa yang memiliki akses terhadap listrik, dll</li> </ul> </li> </ul>
<b>Kedua</b> , Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, bersih, efektif dan terpercaya	Penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip  Good Governance, yang ditunjukkan oleh:  Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.  Pelayanan publik yang berkualitas  Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah  ASN daerah yang professional dan berkompetensi
Ketiga, Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang sejahtera	<ul> <li>Meningkatnya kesejahteraan seluruh masyarakat Sumba Barat Daya yang ditandai dengan:</li> <li>Meningkatnya perekonomian daerah, melalui: <ul> <li>a. meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan</li> <li>b. Luasan daerah pertanian dan perkebunan bertambah</li> <li>c. Irigasi kabupaten dalam kondisi baik,</li> <li>d. Meningkatnya kunjungan wisatawan,</li> <li>e. Meningkatnya penanaman modal dan perdagangan dalam daerah</li> <li>f. Bertumbuhnya UMK serta Industri kecil</li> <li>g. Tersedianya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik, dan</li> <li>h. adanya akses transportasi bagi masyarakat</li> </ul> </li> <li>Menurunnya jumlah penduduk miskin, melalui: <ul> <li>a. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memiliki keterampilan</li> <li>b. Terwujudnya perluasan lapangan kerja</li> </ul> </li> <li>Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak</li> <li>Hal-hal di atas membutuhkan suatu kondisi perlu sebagai prasyarat, yaitu:</li> <li>Kerukunan hidup antar umat beragama</li> <li>Terjaminnya ketertiban dan keamanan umum</li> </ul>

## 5.3 Keselarasan Visi Misi Perubahan RPJMD dengan RPJPD, RTRW dan RPJMN

Sesuai amanat Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 juga mengacu pada dokumen RPJPD, RTRW dan RPJMN.

#### 5.3.1 Keselarasan Visi Misi Perubahan RPJMD dengan RPJPD

Keselarasan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 - 2025 digambarkan pada Gambar 5.1.



Gambar 5. 1 Keselarasan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 dengan RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 – 2025

#### 5.3.2 Keselarasan Perubahan RPJMD dengan RTRW

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 memperhatikan struktur dan pola penataan ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya. Perubahan RPJMD ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan penataan ruang wilayah dalam RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

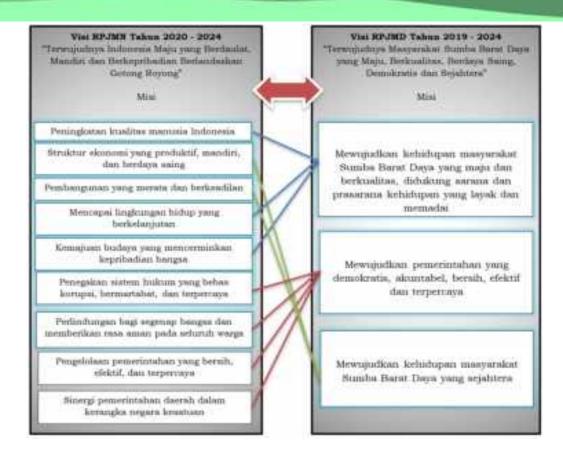
#### 5.3.3 Keselarasan Visi Misi Perubahan RPJMD dengan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2020 - 2024 adalah:

## "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dengan misi sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
- 9. Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan

Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 dengan RPJMN Tahun 2020 - 2024 disajikan pada Gambar 5.2.



Gambar 5. 2 Keselarasan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 dengan RPJMN Tahun 2020 - 2024

#### 5.4 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 dijabarkan pada Tabel 5.2.

Pencapaian visi dan misi diukur dari indikator kinerja tujuan dan sasaran, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam indikator kinerja program.

Tabel 5. 2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Indikator dan Target Kinerja

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Sumba Barat Daya yang Maju, Berkualitas, Berdaya Saing, Demokratis dan Sejahtera" Misi I : Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang maju dan berkualitas, didukung sarana dan prasarana kehidupan yang layak dan memadai

J J		,	<u> </u>	•				Kondisi pada
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Capaian (2020)	Target Tahun			akhir tahun Rencana
					2022	2023	2024	
Meningkatkan taraf hidup	Meningkatnya derajat pendidikan	Rata-rata lama sekolah,	Tahun	6,34	7,67	8,18	8,70	8,70
Masyarakat SBD menuju masyarakat SBD yang maju	masyarakat	Angka Melek Huruf	%					
dan berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,53	69,57	70,08	70,60	70,60
	masyarakat	Prevelensi Stunting	%	33,2	19,74	11,70	3,28	3,28
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%		100	100	100	100
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	TFR	NA					
	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan pembinaan pemuda dalam rangka meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri meningkat	%	20	30	40	50	50
		Peningkatan Prestasi Olahraga	%	0,4	1,00	1,50	2,00	2,00
	Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Poin		54,96	55,23	55,65	55,65
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi	Rumah Layak Huni (%)	%		80,80	81,70	82,80	82,80
		Rumah tangga berakses air minum	%		68,00	72,00	76,00	76,00
		Rumah tangga menurut Sanitasi Layak	%	18,75	78,15	89,45	100	100
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penerangan/listrik  Meningkat ketangguhan bencana daerah	Cakupan desa berlistrik/bercahaya	%		78,85	87,75	100	100
		Rasio Elektrifikasi	%	62,80	78,85	87,75	100	100
		Indeks Resiko Bencana	Poin	138 (sedang)	138 (sedang)	138 (sedang)	138 (sedang)	138 (sedang)

Misi II: Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, bersih, efektif dan terpercaya										
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Capaian			Kondisi pada akhir tahun Rencana			
				(2020)	2022	2023	2024			
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin							
aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka	penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sistem	Skor Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin		77,35	79,88	81,65	81,65		
meningkatkan kepercayaan publik	informasi daerah	Indeks SPBE	Poin	1,7	2,3	2,7	3	3		
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan publik		perdikat	Belum Informasif	Menuju informatif	Menuju informatif	Menuju informatif	Menuju informatif		
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Opini BPK (Opini)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin		80	95	100	100		
		Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang disetujui	%		75	80	85	85		
	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan nilai patriotisme	Cakupan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika	%	60	90	100	100	100		

Misi III: Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang sejahtera									
				Baseline	Ta	arget Tahu	Kondisi pada		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian (2020)	2022	2023	2024	akhir tahun Rencana	
Meningkatnya peran semua penduduk dalam	Hadirnya keadilan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	65,34	66,43	67,75	68,00	68,00	
pembangunan daerah	pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Poin	97,62	97,90	98,04	98,18	98,18	
	Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani (%)	%		100	100	100	100	
		Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani (%)	%		4,66	5,75	6,17	6,17	
Mewujudkan masyarakat SBD yang sejahtera	Tumbuhnya perekonomian daerah secara stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	%	0,10	4,28	5,01	5,68	5,68	
		PDRB per kapita	Juta		12,24	12,87	13,49	13.49	
	Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)							
	pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Ribu		52,2	52.4	52.6	52.6	
	Terciptanya lapangan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,36	1,86	1,61	1,36	1,36	
	Berkurangnya kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	%	28,00	24,00	22,00	20,00	20,00	
	Terjaminnya perlindungan bagi penduduk miskin dan PMKS	Persentase penduduk miskin dan PMKS lainnya yang terakses perlindungan sosial	%	50	80,00	81,00	83,00	83,00	
	Meningkatnya produksi ternak	Tingkat produktivitas ternak	%	1	4,96	9,93	14,91	14,91	
	Meningkatnya produksi perikanan (Laut dan darat)	Jumlah produksi perikanan	ton	800,8	921	1.021	1.113	1.113	

Misi III: Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang sejahtera											
		Indikator		Baseline	Ta	arget Tahu	Kondisi pada				
Tujuan	Tujuan Sasaran		Satuan	Capaian (2020)	2022	2023	2024	akhir tahun Rencana			
Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah  Je ba	Persentase panjang jalan kabupaten dalam dalam kondisi baik	%	40	70,00	74,00	78,00	78,00			
masyarakat		Jembatan dalam kondisi baik	%	30	81,01	91,01	100	100			
		cakupan pemenuhan trayek angkutan umum ke seluruh kecamatan	%	50	80	90	100	100			
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur irigasi dan pengairan dalam mendukung perekonomian daerah	Cakupan daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50	71,74	75,11	78,45	78,45			
	Berkembangnya pariwisata daerah dan pelestarian budaya untuk mendukung pertumbuhnya	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	7.662	11.137	13.364	16.037	16.037			
	perekonomian	Lama tinggal wisatawan	hari	2	3	4	4	4			



# BABU



STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### BAB VI

# STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### 6.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah - langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi disusun untuk menunjukkan kemantapan komitmen pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya - upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi pembangunan daerah yang baik harus memiliki arah yang jelas, pasti dan dapat diandalkan.

Kebijakan Umum Pembangunan Daerah diarahkan untuk menjadi dasar yang memperkuat program prioritas pembangunan daerah sebagai program unggulan untuk mempercepat pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019 - 2024. Oleh karena itu, arah kebijakan umum pembangunan daerah harus relevan, terukur, dan realistis sesuai karakteristik daerah dan sesuai konteks kehidupan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dengan mengacu pada kajian permasalahan umum pembangunan, rumusan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan, maka dapat dirumuskan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019 - 2024 yang disebut sebagai Kebijakan Membangun 3 (Tiga) Batu Tungku, yakni membangun 3 (Tiga) wilayah strategis yakni wilayah Loura, Wewewa dan Kodi dengan Kebijakan 3 (Tiga) Batu Tungku, yakni:

# 1. Batu Tungku Pertama: Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk

Pada Batu Tungku Pertama ini, kebijakan pembangunan diarahkan kepada:

- a. Pengurangan jumlah dan proporsi penduduk miskin
- b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan derajat kesejahteraan penduduk
- c. Peningkatan pemerataan ekonomi, lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
- d. Peningkatan Angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

#### 2. Batu Tungku Kedua: Meningkatkan Pelayanan Publik

Pada Batu Tungku Kedua, kebijakan pembangunan diarahkan kepada:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan
- b. Peningkatan akses dan layanan kesehatan
- c. Peningkatan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana transportasi
- d. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi
- e. Peningkatan pelayanan infrastruktur listrik dan energi
- f. Penataan sistem pelayanan publik dan Aparatur Sipil Negara
- g. Peningkatan pengelolaan keuangan dan fiskal daerah
- h. Peningkatan sistem kelembagaan ekonomi petani
- i. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan
- j. Peningkatan pelayanan sanitasi, persampahan, drainase dan RTH
- k. Peningkatan fungsi dan peran lembaga sosial politik dan kemasyarakatan penataan dan perbaikan sistem pelayanan dan penegakan hukum dan HAM serta lembaga penyelenggara negara

#### 3. Batu Tungku Ketiga: Meningkatkan Daya Saing Daerah

Pada Batu Tungku Ketiga, kebijakan pembangunan diarahkan kepada:

- a. Peningkatan kesejahteraan dan daya saing petani
- b. Peningkatan produksi pertanian yang bermutu dan berdaya saing
- c. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
- d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- e. Peningkatan aksesibilitas daerah
- f. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
- g. Peningkatan sumber penerangan dan energi
- h. Peningkatan sarana perdagangan dan investasi di daerah
- Peningkatan kualitas tenaga kerja, angkatan kerja dan keterampilan kerja

# Pendekatan Pelaksanaan Stategi Pembangunan

Strategi pelaksanaan 3 (Tiga) Batu Tungku dilakukan dengan 2 (Dua) pendekatan yaitu pendekatan pelayanan dasar pada batu tungku pertama dan kedua serta pendekatan pertumbuhan ekonomi pada batu tungku ketiga. Pendekatan pelayanan dasar dititikberatkan pada pemenuhan akses dan kualitas pelayanan pada desa - desa dengan prioritas angka kemiskinan dan stunting terbesar. Pendekatan pertumbuhan ekonomi diprioritaskan pada pengembangan komoditas unggulan secara kooperatif dan kompetitif pada desa - desa sumber produksi, penyediaan kelembagaan BUMdes dan BUMDes bersama serta pemanfaatan perusahaan daerah yang bergerak pada penanganan rantai pasar komoditas unggulan.

Strategi penyelesaian masalah juga dilakukan dengan percepatan pemenuhan hak administrasi kewarganegaraan berupa akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berperan penting atas akses masyarakat terhadap pelayanan program pemerintah baik dalam dukungan kesejahteraan sosial maupun akses dukungan pengembangan ekonomi dalam pemberian modal usaha dan pembentukan kelembagaan kelompok usaha produktif. Langkah mitigasi juga dilakukan dengan upaya pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana terutama pada masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas terutama pada kelompok masyarakat yang bekerja pada sektor primer.

Pengembangan industri berbasis produk pertanian dan perikanan perlu dibentuk untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah dengan membentuk iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan dan transparansi perijinan, persiapan kawasan industri yang sesuai dengan RTRW dan kesiapan lahan dengan mekanisme kerja sama pemilik lahan perorangan dan adat untuk dapat disertakan sebagai pemilik saham pengembangan investasi yang dapat diwujudkan dalam dokumen perjanjian dan kesepakatan yang memiliki dasar hukum.

Persiapan rancangan teknis berupa peta rencana masing - masing strategi batu tungku sehingga mampu diterjemahkan dalam pelaksanaan dokumen teknis pada perangkat daerah yang terlibat.

Strategi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Tahun 2019 – 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi				
		Sekolah unggul SD - SMP				
		Memastikan di setiap kecamatan, ada sekolah unggul SD dan SMP yang didukung penuh dengan sarana – prasarana dan guru yang berkualitas				
		Bedah sekolah: ruang kelas rusak diperbaiki				
		Memastikan setiap peserta didik belajar di ruang kelas yang layak. Semua ruang kelas rusak total diperbaiki. Mebel dilengkapi				
		Bantuan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dibiayai oleh pemerintah daerah				
		Kesejahteraan guru - guru diperbaiki melalui PPG dan peningkatan kualitas kompetensi guru				
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Beasiswa untuk SBD cerdas				
Meningkatkan taraf hidup masyarakat SBD menuju		Meningkatkan angka partisipasi sekolah melalui bantuan beasiswa anak desa (anak dari keluarga kurang mampu) agar semakin cerdas dan berprestasi sehingga bisa tetap bersekolah dan bisa melanjutkan kuliah hingga ke perguruan tinggi				
masyarakat SBD inenuju masyarakat SBD yang maju dan berkualitas		Persiapan TOEFL/IELTS bagi calon sarjana S2 - S3				
maju dan berkuantas		Merekrut semua sarjana pengangguran agar siap kerja				
		Sarjana siap kerja untuk Desa Bercahaya, Desa Berair, Desa Berkecukupan Pangan, Desa Cerdas, Desa Sehat, Desa Tentram dan Desa Wisata. Merekrut semua sarjana pengangguran di desa untuk menggerakkan program Desa Membangun, mendayagunakan sarjana di desa desa untuk memperbaiki pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, perumahan, kebersihan lingkungan, pelayanan adminduk, data dan profil desa) dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa agar semakin cerdas dan berdaya guna				
		Merekrut semua tamatan SMA/SMK penganggur agar siap latih dan siap kerja				
		Merekrut semua tamatan SMA/SMK yang menganggur untuk diberikan pelatihan dan bantuan alat kerja dan fasilitas multimedia melalui pendidikan non formal untuk meningkatkan keterampilan kerja (tenaga terampil) dan cerdas mengembangkan industri rumah tangga di desa				
		Pengembangan muatan lokal pada pendidikan dasar				

Tujuan	Sasaran	Strategi					
		Pemberian insentif dari APBD bagi semua tenaga honor BOS dan komite sekolah					
		Meningkatkan budaya baca masyarakat lewat gerakan membaca					
		Peningkatan akses pendidikan bagi siswa berprestasi dan tidak mampu melalui penyediaan beasiswa.					
		Pengembangan muatan lokal obat tradisional, bebas malaria, TB, HIV/AIDS					
		Membangun komitmen mulai dari level desa: Sumba Bebas Malaria, Bebas TB, Bebas HIV/AIDS					
		Meningkatkan upaya layanan kesehatan melalui fasilitasi layanan rujukan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) sampai ke Rumah Sakit Daerah					
		Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang memadai dalam jenis, jumlah, kualitas dan distribusi.					
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Perbaikan sistem dan peningkatan kualitas layanan kesehatan					
		Memastikan layanan kesehatan dan koordinasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam rangka mengurangi angka kelahiran total					
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).					
		Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan <i>stakeholder</i> terkait untuk pengarahan sumberdaya dalam pencegahan stunting secara berkelanjutan					
		Pencegahan dini melalui peningkatan derajat kesehatan kelompok ibu hamil					
		Penyediaan subsidi untuk peningkatan asupan gizi kelompok keluarga miskin					
		Memastikan setiap keluarga cukup pangan dan gizi. Kesehatan Ibu-Anak diperhatikan agar bebas dari kurang gizi (mal-nutrisi) dan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)					
		Perbaikan perilaku hidup sehat					
		Pemantapan sistem informasi dan pengendalian stunting secara terpadu					
		Memastikan setiap warga kurang mampu mendapat Kartu SBD Sehat sebagai pengganti SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan memastikan setiap warga mudah dan cepat mendapat layanan KIS, JAMKESMAS dan JAMKESDA					

Tujuan	Sasaran	Strategi					
		Memastikan layanan kesehatan yang komperhensif bagi Pasangan Usia Subur, ibu hamil dan remaja putri dalam rangka pencegahan dan penanganan Stunting, Gizi Kurang dan Gizi Buruk.					
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Memastikan advokasi dan pemberian pemahaman kepada pasangan usia subur terkait penggunaan alat kotrasepsi, dan pengaturan kehamilan					
		Peningkatan cakupan keluarga berencana					
		Pembinaan Organisasi Kepemudaan dalam rangka meningkatkan keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah					
	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Meningkatkan pemberdayaan pemuda melalui dukungan, kesempatan, pelatihan, pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berjiwa wirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggung jawab					
		Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga untuk peningkatan prestasi					
		Pembinaan cabang olahraga potensial, tradisional dan rekreasi untuk mendukung prestasi dan pengembangan pariwisata daerah					
	Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
	(sustainability) lingkungan hidup dalam	Gerakan Sumba Barat Daya Hijau ( Satu Jiwa Satu Pohon )					
	pembangunan	Pengelolaan sampah melalui TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle)					
		Gerakan Rumah Sehat					
		Gerakan Rumah Sehat didukung oleh sanitasi lingkungan bersih dan sehat					
		Satu desa, ada satu sarjana kesehatan lingkungan (Kesling)					
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi	Sarjana Kesling membantu warga desa untuk menjaga kebersihan rumah dan sanitasi dan drainase lingkungan (kandang, jamban, saluran air, dll)					
		Gerakan 1000 jamban					
		Memastikan semua keluarga mempunyai Jamban yang layak agar warga terbebas dari penularan berbagai penyakit					
		173 desa akan nada satu unit alat penyulingan air siap minum					

Tujuan	Sasaran	Strategi					
		173 desa (plus pasar, rumah sakit, puskesmas, pelabuhan laut, bandara), ada satu unit alat penyulingan air siap minum, yang dikelola oleh desa dengan metode SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)					
		PDAM/BLUD/UPTD Pengelola SPAM Wee Maringi dibentuk					
		Semua aktor yang aktif pengelola air minum desa diangkat menjadi pengelola BLUD/UPTD Pengelola SPAM/PDAM Wee Maringi SBD					
		Setiap desa memiliki Badan Pengelola SPAM Desa (SPAM-Des)					
		SPAM Desa dikelola berbasis masyarakat-desa (metode Pro-Air dan PAMSIMAS), agar warga mendapat akses lebih luas menikmati air bersih					
		Peta Air Desa, 1 Desa: 1 Peta Sumber Daya Air Desa (PSDAD)					
		Memastikan semua desa memiliki PSDAD sehingga SBD akan memiliki 1 Peta Utama Sumber Daya Air. Mapping/Pemetaan: 1 peta Sumber Daya Air Desa (PSDAD) berisi potensi sumber mata air, jaringan, ketersediaan air, debit, total kebutuhan air untuk mendukung pemerataan akses air bersih di desa hingga ke dusun-dusun pinggiran					
		Gerakan Desa Tolong Desa: optimalisasi 101 mata air dan 98 mata air baru					
		Membangun kerja sama antar desa-antar kecamatan berbagi air, interkoneksi distribusi air, subsidi silang, optimalisasi 101 mata air yang ada ditambah dengan 98 mata air baru yang akan diukur debitnya dan akan dimanfaatkan					
		Listrik masuk kampung					
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap	Memastikan setiap kampung bercahaya. Rumah-rumah sekeliling kampung bercahaya karena lebih mudah mendapat layanan listrik PLN. Kampung-kampung Adat/Kampung Situs, Wisata Kuliner dan Kampung Wisata Khusus (seni ukir, kampung tenun, kampung seni besi tempa parang, kampung anyaman bambu, dsb.) bisa bercahaya dan tercukupi kebutuhan listriknya					
	penerangan/listrik	Kampung Bercahaya dengan ET					
		Memanfaatkan ET (Energi Terbarukan) yakni (energi matahari/kaca sinar, energi air, angin) - dan sesedikit mungkin diesel untuk Kampung Bercahaya					
		Memastikan setiap rumah tangga yang jauh dari jaringan PLN mendapat kaca sinar					

Tujuan	Sasaran	Strategi					
		Pemerintah desa dan kabupaten akan bekerja sama untuk mencukupi pemenuhan kaca sinar/solar cell terutama bagi kampung dan rumah tangga yang sangat jauh dari jaringan listrik PLN					
		Biogas rumah dipromosikan luas untuk memasak dan penerangan					
		Biogas rumah dipromosikan agar dimanfaatkan untuk pemenuhan energi keluarga untuk memasak dan penerangan. Memanfaatkan kotoran hewan ternak untuk kompor gas dan penerangan. Selain itu kotoran ternak hasil biogas ( <i>Bio Slurry</i> ) bisa menjadi pupuk organik cair dan padat berkualitas tinggi, sehingga semakin banyak keluarga terbebas dari ketergantungan pupuk kimia dari pemerintah					
		Membangun budaya sadar terhadap pengurangan resiko bencana melalui pelatihan, pendidikan, simulasi serta gladi secara berkala dan berkesinambungan					
	Meningkat ketangguhan bencana daerah	Peningkatan pengetahuan tentang penanganan dan pengurangan resiko bencana seperti peta dan informasi spasial, teknologi terapan dan tepat guna yang berbasis kearifan lokal					
		Peningkatan informasi dari seluruh situs Perangkat Daerah (PD) tentang kegiatan yang terkait dengan rencana pembangunan yang terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Bencana (BPB)					
		Peningkatan penggunaan teknologi seluler yang telah diintegrasikan pada Sistem Peringatan Tsunami, Banjir dan Gempa Bumi untuk meningkatkan kecepatan penyampaian pesan kepada masyarakat					
		Penetapan jumlah Desa Tangguh Bencana					
		Penerapan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara terpadu.					
		Penerapan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja secara terpadu					
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		Pemantapan protokol akses informasi dan pemasukan data secara terkendali					
dengan aparatur berintegritas tinggi,	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan	Penyiapan SDM dengan kapasitas dan kapabilitas yang sesuai kebutuhan sistem					
produktif, dan melayani secara prima dalam rangka	pemerintahan dan pengelolaan sistem informasi daerah	Penyiapan infrastruktur penunjang untuk mendukung implementasi sistem secara berkelanjutan.					
meningkatkan kepercayaan publik.		Memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan sesuai regulasi melalui aplikasi berbasis web					
		Penyusunan standar pelayanan dan operasional prosedur untuk setiap alur kerja layanan pemerintahan					

Tujuan	Sasaran	Strategi					
		Penetapan indikator kinerja dan target kinerja yang realistik dan terukur					
		Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi					
		Rekrutmen pejabat melalui mekanisme <i>assessment centre</i> , seleksi terbuka dan manajemen <i>talent pool</i>					
		Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi Aparatur Sipil Negara, Penerapan <i>role model</i> , agen perubahan dan budaya kerja					
		Rekruitmen PNS berdasarkan analisa kebutuhan dan penempatan PNS pada jabatan sesuai hasil pemetaan kompetensi					
		Mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi					
		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan melalui ketersediaan dan penguatan kapasitas SDM yang handal serta sarana prasarana yang memadai					
		Peningkatan PNS yang bersertifikat kompetensi.					
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan publik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD.					
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan	Penerapan e-government, e-planning, e-budgeting secara terpadu.					
	daerah	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.					
		Peningkatan kualitas pelayanan publik.					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan aparatur.					
		Melaksanakan survey kepuasan masyarakat.					
		Meningkatkan keselarasan, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah.					
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.					
		Penyelenggaraan Musrenbang yang berkualitas dengan melibatkan semua <i>stakeholders</i> , termasuk kaum perempuan, difabel, anak, dan pihak lainnya.					

Tujuan	Sasaran	Strategi					
	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan nilai patriotisme	Mengaktifkan kembali kebijakan dan pengenalan nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari termasuk melalui pengembangan modul di sekolah.					
Meningkatnya peran	Hadirnya keadilan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta meningkatkan kesetaraan gender di kalangan masyarakat.					
semua penduduk dalam pembangunan daerah	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan kepada perempuan dan anak, menangani kasus kekerasan yang ada					

#### 6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (Lima) tahun periode Kepala Daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya ditetapkan untuk menjamin adanya kesinambungan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024, yang disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6. 2 Arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019 – 2024

Г	Arah Kebijakan										
Tahun 2020			Tahun 2021	Tahun 2022			Tahun 2023	Tahun 2024			
•	Meningkatkan akses dan	•	Meningkatkan akuntabilitas	•	Meningkatkan kualitas	•	Meningkatkan kualitas	•	Meningkatkan partisipasi		
	kualitas layanan pendidikan		penyelenggaraan		kehidupan beragama,		infrastruktur penunjang usaha		angkatan kerja, kualitas		
	dan kesehatan masyarakat		pemerintahan dan pengelolaan		kerukunan antar kelompok		perekonomian masyarakat		penyandang masalah		
•	Meningkatkan jumlah dan		sistem informasi daerah		masyarakat serta terwujudnya	•	Meningkatkan produksi		kesejahteraan sosial, dan		
	kualitas perumahan/	•	Meningkatkan partisipasi		ketertiban dan keamanan di		pertanian, peternakan,		keluarga berencana		
	permukiman dan lingkungan		masyarakat dalam proses		masyarakat		perikanan dan perkebunan	•	Meningkatkan pariwisata		
	hidup		pembangunan dan perumusan	•	Meningkatkan pemberdayaan		dalam menopang ketersediaan		dan mewujudkan		
•	Meningkatkan ketersediaan		kebijakan publik		perempuan dan perlindungan		bahan pangan		pelestarian budaya dan		
	fasilitas publik, pelayanan	•	Meningkatkan profesionalisme		anak serta meningkatkan				adat-istiadat		
	transportasi dan komunikasi		aparatur pemerintah		kesadaran gender di kalangan						
					masyarakat						

### 6.3 Program Pembangunan Daerah

Perumusan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Sebagai pemicu dan pemacu untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019 - 2024 tersebut di atas, maka diperlukan program unggulan yang berisikan terobosan-terobosan penting dan kiat-kiat cerdas mendaratkan Visi, Misi Kabupaten hingga ke level desa. Dengan demikian, Program Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya 5 (Lima) tahun ke depan diprioritaskan untuk melaksanakan 7 (Tujuh) Program Unggulan: Tujuh Jembatan Emas (*Pitu Lede Mopira, Pitu Lende Mopir*) yaitu Desa Bercahaya, Desa Berair, Desa Berkecukupan Pangan, Desa Sehat, Desa Cerdas, Desa Tenteram, dan Desa Wisata, diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Desa Bercahaya

Desa cukup energi untuk penerangan dan energi alternatif untuk memasak, dengan kegiatan meliputi:

a. Listrik masuk kampung

Memastikan setiap kampung bercahaya. Rumah - rumah sekeliling kampung bercahaya karena lebih mudah mendapat layanan listrik PLN. Kampung - kampung Adat/Kampung Situs, Wisata Kuliner dan Kampung wisata khusus (seni ukir, kampung tenun, kampung seni besi tempa parang, kampung anyaman bambu, dll.) bisa bercahaya dan tercukupi kebutuhan listriknya.

- b. Kampung Bercahaya dengan ET
  - Memanfaatkan ET (Energi Terbarukan) yakni energi matahari/kaca sinar, energi air, angin dan sesedikit mungkin diesel untuk Kampung Bercahaya.
- c. Memastikan setiap rumah tangga yang jauh dari jaringan PLN mendapat kaca sinar.
  - Pemerintah desa dan kabupaten akan bekerjasama untuk mencukupi pemenuhan kaca sinar/solar cell terutama bagi kampung dan rumah tangga yang sangat jauh dari jaringan listrik PLN.
- d. Biogas Rumah dipromosikan luas untuk memasak dan penerangan.
   Biogas Rumah dipromosikan agar dimanfaatkan untuk pemenuhan energi keluarga untuk memasak dan penerangan. Memanfaatkan kotoran

hewan ternak untuk kompor gas dan penerangan. Selain itu kotoran ternak hasil biogas (*Bio Slurry*) bisa menjadi pupuk organik cair dan padat berkualitas tinggi, sehingga semakin banyak keluarga terbebas dari ketergantungan pupuk kimia dari pemerintah.

#### 2. Desa Berair

Setiap warga SBD berhak atas air bersih, air minum yang layak, dengan kegiatan meliputi:

a. 173 desa akan ada satu unit alat penyulingan air siap minum.

173 desa (plus pasar, rumah sakit, puskesmas, pelabuhan laut, bandara), ada satu unit alat penyulingan air siap minum, yang dikelola oleh desa dengan metode SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum).

- b. PDAM/BLUD/UPTD Pengelola SPAM Wee Maringi dibentuk.
  Semua aktor yang aktif pengelola air minum desa diangkat menjadi pengelola BLUD/UPTD Pengelola SPAM/PDAM Wee Maringi SBD.
- Setiap desa memiliki Badan Pengelola SPAM Desa (SPAM Des).
   SPAM Des dikelola berbasis masyarakat-desa (metode Pro Air dan PAMSIMAS), agar warga mendapat akses lebih luas menikmati air bersih.
- d. Peta Air Desa, 1 Desa: 1 Peta Sumber Daya Air Desa (PSDAD). Memastikan semua desa memiliki PSDAD sehingga SBD akan memiliki 1 Peta Utama Sumber Daya Air. *Mapping*/Pemetaan: 1 peta Sumber Daya Air Desa (PSDAD) berisi potensi sumber mata air, jaringan, ketersediaan air, debit, total kebutuhan air untuk mendukung pemerataan akses air bersih di desa hingga ke dusun-dusun pinggiran.
- e. Gerakan Desa Tolong Desa: optimalisasi 101 mata air dan 98 mata air baru.

Membangun kerjasama antar desa-antar kecamatan berbagi air, interkoneksi distribusi air, subsidi silang, optimalisasi 101 mata air yang ada ditambah dengan 98 mata air baru yang akan diukur debitnya dan akan dimanfaatkan.

# 3. Desa Berkecukupan Pangan

- a. Mengembangkan pertanian organik dengan sistem pertanian konservasi/pertanian berkelanjutan dan menerapkan teknologi pertanian terpadu untuk pangan bermutu.
- b. Membenahi Sistem Irigasi Pertanian, dengan mengoptimalkan potensi irigasi DAS, air tanah, mata air, embung untuk pertanian.
- c. Memastikan bibit dan pupuk tersedia, terdistribusi tepat waktu, tepat sasaran agar mengurangi risiko gagal panen.
- d. Memastikan semua Alsintan, Saprodi dikelola optimal agar luas panen meningkat, produksi meningkat, desa bebas rawan pangan.
- e. Sekurang kurangnya setiap desa ada 1 orang penyuluh, dengan penambahan 96 penyuluh baru untuk desa (telah ada 78 Orang meliputi 43 orang ASN dan 35 orang tenaga bantu penyuluh THLTBPP).
- f. Sekolah lapang untuk meningkatkan agribisnis pertanian.
- g. Kelembagaan penyuluh dan kelompok tani dikuatkan dengan pendampingan intensif sekolah lapang agar agribisnis pertanian meningkat dan ekonomi petani meningkat.

- h. Gerakan Isi Kandang (*Ihi Gollu/Ihi Gallu*). Untuk memastikan Setiap keluarga memiliki usaha ternak kecil (babi, kambing) dan unggas (ayam, bebek dan itik) untuk memenuhi gizi protein hewani keluarga dan meningkatkan ekonomi keluarga.
- i. Gerakan Lepas Dayung (Geleda) Gerakan Masuk Laut (Gemala).

  Desa-desa pesisir pantai dan para nelayan diperkuat dengan Gerakan Lepas Dayung (Geleda-bantuan ketinting), dan Gerakan Masuk Laut (Gemala) agar hasil tangkapan ikan meningkat, pasokan ikan bertambah, budidaya rumput laut meningkat, gizi keluarga tercukupi dan ekonomi nelayan membaik.

#### 4. Desa Sehat

Desa sehat ditandai oleh rumah dan lingkungan sehat, dan warganya sehat oleh kecukupan pangan dan gizi keluarga dan didukung oleh layanan kesehatan memadai. Kiat cerdas akan dilakukan, meliputi:

- a. Gerakan Rumah Sehat
   Gerakan Rumah Sehat didukung oleh sanitasi lingkungan bersih dan sehat.
- Satu desa, ada satu sarjana kesehatan lingkungan (Kesling)
   Sarjana Kesling membantu warga desa untuk menjaga kebersihan rumah dan sanitasi dan drainase lingkungan (kandang, jamban, saluran air, dll).
- c. Gerakan 1000 Jamban Memastikan semua keluarga mempunyai jamban yang layak agar warga terbebas dari penularan berbagai penyakit.
- d. Rumah Tangga Cukup Pangan dan Gizi (1 desa akan ada 1 ahli gizi).

  Memastikan setiap keluarga cukup pangan dan gizi. Kesehatan Ibu-Anak diperhatikan agar bebas dari kurang gizi (mal-nutrisi) dan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah).
- e. Kartu SBD Sehat
  - Memastikan setiap warga kurang mampu mendapat Kartu SBD Sehat sebagai pengganti SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan memastikan setiap warga mudah dan cepat mendapat layanan KIS, JAMKESMAS dan JAMKESDA.
- f. Pengembangan muatan lokal obat tradisional, Bebas Malaria, TB, HIV/AIDS.

Membangun komitmen mulai dari level desa: Sumba Bebas Malaria, Bebas TB, Bebas HIV/AIDS.

#### 5. Desa Cerdas

Desa cerdas ditandai oleh warga desa yang cerdas, mampu menyelesaikan persoalan desa secara cepat, bijaksana sesuai kearifan budaya Sumba, dan warga cerdas pula memanfaatkan lingkungannya untuk peningkatan pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Kiat Cerdas yang akan dilakukan, diantaranya:

- a. Sekolah Unggul SD SMP.
  - Memastikan di setiap kecamatan, ada sekolah unggul SD dan SMP yang didukung penuh dengan sarana prasarana dan guru yang berkualitas.
- b. Bedah Sekolah: ruang kelas rusak total diperbaiki.
   Memastikan setiap peserta didik belajar di ruang kelas yang layak. Semua ruang kelas rusak total diperbaiki. Mebel dilengkapi.
- c. Pendidikan Profesi Guru (PPG).
   Kesejahteraan guru-guru diperbaiki melalui PPG dan peningkatan kualitas kompetensi guru.
- d. Beasiswa untuk SBD Cerdas.
  - Meningkatkan angka partisipasi sekolah melalui bantuan beasiswa anak desa agar semakin cerdas dan berprestasi sehingga bisa tetap bersekolah dan bisa melanjutkan kuliah hingga ke perguruan tinggi.
  - Persiapan TOEFL/IELTS bagi calon sarjana S2-S3.
- e. Merekrut semua sarjana penganggur agar siap kerja
  - Sarjana siap kerja untuk Desa Bercahaya, Desa Berair, Desa Berkecukupan Pangan, Desa Cerdas, Desa Sehat, Desa Tentram dan Desa Wisata. Merekrut semua sarjana pengangguran di desa untuk menggerakkan program Desa Membangun, mendayagunakan sarjana di desa desa untuk memperbaiki pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, perumahan, kebersihan lingkungan, pelayanan adminduk, data dan profil desa) dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa agar semakin cerdas dan berdaya guna.
- f. Merekrut semua tamatan SMA/SMK penganggur agar siap latih dan siap kerja
  - Merekrut semua tamatan SMA/SMK yang menganggur untuk diberikan pelatihan dan bantuan alat kerja dan fasilitas multimedia melalui

- pendidikan non formal untuk meningkatkan keterampilan kerja (tenaga terampil) dan cerdas mengembangkan industri rumah tangga di desa.
- g. Pengelolaan Dana Desa dan ADD lebih cerdas, adil dan merata Memastikan kebijakan Juknis/PTO Pengelolaan DD-ADD harus lebih cerdas, terinci, sistematis dan jelas peruntukannya untuk memperkuat desa.
- h. Peningkatan insentif bagi semua aparat desa, operator desa dan kader desa.
  - Memastikan semua aparat desa, operator desa meningkat insentifnya dan semua kader yang bekerja aktif di desa yakni Kader Posyandu, Kader Gizi, Kader Malaria, Kader STBM, dan lain-lain menerima peningkatan insentif.
- i. Tenaga honor BOS dan Komite Sekolah menjadi kontrak daerah.

#### 6. Desa Tenteram

Menghadirkan kembali pemerintahan desa yang dipercaya, memberikan ketentraman, rasa aman, memperkuat jati diri, berbasis potensi dan aset desa, nilai - nilai sosial - budaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

- a. Meningkatkan peran tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai pelopor untuk memelihara ketenteraman masyarakat.
- b. Pembentukan Laskar Teman (Laskar Tentram Aman).
- c. Menaikkan honor Linmas.
- d. Peran Linmas dioptimalkan sebagai garda depan, untuk memberantas, pencurian, perampokan, keonaran, judi dan miras dan mengamankan aset pemerintah. Linmas di bawah koordinasi desa dan kecamatan dan mendapat penguatan konsep dan pendekatan Trantibmas dari Pol PP dan aparat keamanan.

#### 7. Desa Wisata

Desa Wisata sebagai jembatan emas ketujuh yang bisa menggenjot peningkatan ekonomi desa, maka diperlukan dukungan utama dari segenap aktor untuk membangun Desa Wisata, membangun *icon* baru yang memperkaya wajah pariwisata SBD.

 a. Gerakan Darwis - Darling
 Mendorong warga desa berperilaku dan bertindak Sadar Wisata dan Sadar Lingkungan (Darwis - Darling).

- Satu desa, satu sarjana pariwisata.
   Mengembangkan pariwisata sesuai aset dan potensi desa.
- c. Program Perbaikan Kampung Adat (Pro PEKA)

  Sekurang-kurangnya ada 30 kampung adat/situs sejarah bernilai tinggi ditata atau dibangun kembali dengan mengoptimalkan kembali peran tokoh adat, *Rato*, dan sistem manajemen rumah adat *Umma Kalada*, *Umma Bokol*, yang bertumpu pada basis aset dan potensi lokal. Pro Peka didukung oleh kerjasama dengan Balai Besar Konservasi Budaya di Denpasar Bali dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
- d. Mengembangkan Wisata Alternatif Khas SBD

  Mengembangkan Wisata Alternatif/Wisata Minat Khusus (wisata berkuda, desa kreatif ukir, anyaman bambu, anyaman pandan, seni besi tempa dan ukir parang, tenun dan cinderamata), Wisata Kuliner khas SBD seperti rowe kabatta, rowe pakoda, rowe pa'kandondo, luwa pa'okula, sambal karakapa dan sebagainya), dan Wisata Alam Eksotis seperti pantai, gunung, air terjun, danau dan padang sabana (Lendo Ngara Loura, dll) yang didukung oleh homestay (rumah inap rakyat khas Sumba) yang tertata asri, aman dan tenteram.
- e. Memperkuat informasi pariwisata SBD yang lengkap dan akurat. Tersedia di bandara dan pelabuhan laut informasi lengkap tentang pariwisata berupa peta, petunjuk arah dan jarak, moda transportasi, akomodasi, tarif, pelayanan kesehatan darurat terdekat, telekomunikasi dan polisi serta adanya petunjuk arah (rambu lalu lintas) menuju setiap destinasi wisata
- f. Memperkuat aktor/pelaku pariwisata lokal untuk meningkatkan geliat Desa Wisata, *icon* baru pariwisata SBD.
- g. Membangun infrastruktur pariwisata desa berupa jalan setapak, sarana MCK, air bersih dan memperluas akses jalan lintas pantura untuk mendorong para investor membangun hotel hotel.
- h. Mewajibkan setiap wisatawan memakai pakaian adat Sumba saat berkunjung ke kampung adat/kampung situs.
- i. Pengembangan muatan lokal adat istiadat dan budaya Sumba yang berisikan tentang pembelajaran kearifan lokal di sekolah - sekolah yang melibatkan para *Rato* adat untuk pewarisan budaya Sumba pada generasi muda.

# Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024, yang disajikan pada Tabel 6.3

Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Tahun 2019 – 2024

				Kondisi		Capaian l	Kinerja Pro <sub>š</sub>	gram dan Kerangka P	endanaan		Kondisi Kinerja	
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
Misi I	: Mewujudkan kehidupan masyarakat	Sumba Barat Daya yang maju dan berkualita	as, didukung s	sarana dan p	rasarana ke	ehidupan yang layak	dan mema	dai				
		arakat SBD menuju masyarakat SBD yang n	naju dan berk	ualitas								
Sasara	an 1.1.1 : Meningkatnya derajat Pendid	ikan masyarakat										
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	%	60,0	100,0	55.102.485.000	100,0	55.377.997.425	100,0	55.654.887.412	100,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	50,0	100,0		100,0		100,0		100,0	
		Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	90,0	100,0		100,0		100,0		100,0	
		Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	80,0	100,0		100,0		100,0		100,0	
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,0	9,0		9,0		9,0		9,0	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	80,0	100,0		100,0		100,0		100,0	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	%	80,0	100,0	99.050.000	100,0	99.545.250	100,0	100.042.976	100,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan pemenuhan kurikulum muatan lokal PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar	%	0,0	30,0	111.748.000	45,0	112.306.740	60,0	112.868.274	60,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	66,0	76,0	812.029.000	81,0	816.089.145	84,0	820.169.591	84,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	%	95,0	98,0	0	99,0	0	100,0	66.550.000	100,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

				Kondisi		Capaian l	Kinerja Prog	gram dan Kerangka P	endanaan		Kondisi Kinerja	D 1.D
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan penerapan bahasa dan sastra daerah dalam pembelajaran	%			67.500.000		67.837.500		68.176.688		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional perpustakaan	%	35,0	55,0	10.469.616.000	60,0	10.521.964.080	65,0	10.574.573.900	65,0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	N/A	1.000,0		1.000,0		1.000,0		3.000,0	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis yang dikelola dan dilestarikan	%	N/A	25,0	23.500.000	30,0	23.617.500	35,0	23.735.588	35,0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasara	ın 1.1.2 : Meningkatnya derajat Keseha	tan masyarakat										
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP Rujukan tingkat Kabupaten/Kota	%	50,0	70,0	8.806.324.000	80,0	8.850.355.620	90,0	12.895.057.398	90,0	Dinas Kesehatan
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 1.000	1,0	1,0		2,0		2,0		2,0	
		Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
		Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	0,5	0,3		0,2		0,1		0,1	
		Prevalensi HIV/AIDS	%	0,1	0,0		0,0		0,0		0,0	
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
		Persentase rumah sakit terakreditasi	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
							L					

				Kondisi		Capaian I	Kinerja Pro	gram dan Kerangka P	endanaan		Kondisi Kinerja	
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
		Cakupan penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	%	0,5	0,3		0,2		0,1		0,1	
	badan/tinggi badan) kurang dari 5 (Lima)  PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  Persentase ibu hamil pelayanan kesehatan	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (Lima) tahun	%	0,5	0,3		0,2		0,1		0,1	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	<80	100,0	37.174.637.270	100,0	38.110.205.523	100,0	46.917.634.926	100,0	Puskesmas & FKTP
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	<80	100,0		100,0		100,0		100,0	
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	<80	100,0		100,0		100,0		100,0	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	<80	100,0		100,0		100,0		100,0	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	<80	100,0		100,0		100,0		100,0	
	kesehatan sesuai standar  Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	<80	100,0		100,0		100,0		100,0		
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	<80	100,0		100,0		100,0		100,0	
	Persentase penderita Hipertensi ya	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	<80	100,0		100,0		100,0		100,0	

				Kondisi		Capaian l	Kinerja Prog	gram dan Kerangka P	endanaan		Kondisi Kinerja	
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	<80	100,0		100,0		100,0		100,0	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	<80	100,0		100,0		100,0		100,0	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	<80	100,0		100,0		100,0		100,0	
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	<80	100,0		100,0		100,0		100,0	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan rujukan	%	85,0	93,0	12.213.727.419	95,0	12.274.796.056	100,0	12.336.170.036	100,0	RSUD
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang sudah memiliki Surat Ijin Praktek	%	60,0	80,0	170.652.000	90,0	171.505.260	100,0	172.362.786	100,0	Dinas Kesehatan
		Persentase dokter/tenaga medis penerima bantuan biaya pendidikan lanjutan tenaga kedokteran/kesehatan	%	50,0	70,0		85,0		100,0		100,0	
		Rasio dokter (tenaga medis) per 100.000 penduduk	rasio	20	22		24		26		26	
		Rasio bidan per 100.000 penduduk	rasio	46	55		65		75		75	
		Rasio perawat per 100.000 penduduk	rasio	126	138		148		158		158	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang sudah memiliki Surat Ijin Praktek	Orang	50,0	80,0	292.676.000	90,0	294.139.380	100,0	295.610.077	100,0	RSUD
	PROGRAM SEDIATAN  PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	%	40,0	60,0	242.036.000	80,0	243.246.180	100,0	244.462.411	100,0	Dinas Kesehatan	
		Cakupan perijinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) berizin	%	60,0	75,0		85,0		100,0		100,0	

				Kondisi		Capaian 1	Kinerja Prog	gram dan Kerangka F	endanaan		Kondisi Kinerja	
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat sehat	%	30,0	50,0	376.725.000	60,0	378.608.625	70,0	380.501.668	70,0	Dinas Kesehatan
		Cakupan desa siaga aktif	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
		Cakupan promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	%	40,0	60,0		70,0		80,0		80,0	
Sasara	an 1.1.3 : Terkendalinya Laju Pertumbu	ıhan Penduduk										
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penyusunan & pemanfaatan dokumen <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK)	%	60,0	80,0	335.000.000	90,0	336.675.000	100,0	338.358.375	100,0	DP3AP2KB
		Profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Cakupan Peserta Akseptor KB	DOK	0,0	0,0		0,0		1,0		1,0	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta Akseptor KB	%	50,0	70,0	7.170.283.000	80,0	7.206.134.415	90,0	7.242.165.087	90,0	DP3AP2KB
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	%	50,0	70,0		80,0		90,0		90,0	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	%	50,0	70,0		80,0		90,0		90,0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	50,0	70,0	84.499.000	80,0	84.921.495	90,0	85.346.102	90,0	DP3AP2KB
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	50,0	70,0		80,0		90,0		90,0	
		(BKL) ber-KB	%	50,0	70,0		80,0		90,0		90,0	
			Unit	50,0	70,0		80,0		90,0		90,0	
		Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Unit	50,0	70,0		80,0		90,0		90,0	

				Kondisi		Capaian 1	Kinerja Prog	gram dan Kerangka F	endanaan		Kondisi Kinerja	D 1 (D 1
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran	%	60,0	80,0	57.750.000	90,0	58.038.750	100,0	58.328.944	100,0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
		Persentase cakupan kepemilikan NIK	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah	%	60,0	80,0	285.200.000	90,0	286.626.000	100,0	288.059.130	100,0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan data kependudukan	%	60,0	80,0	2.295.739.000	90,0	2.307.217.695	100,0	2.318.753.783	100,0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	%	40,0	50,0	85.336.000	70,0	85.762.680	100,0	86.191.493	100,0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sasara	an 1.1.4 : Meningkatnya kualitas pemud	la dan prestasi keolahragaan										
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	20,0	30,0	536.421.000	40,0	539.103.105	50,0	541.798.621	50,0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	20,0	30,0		40,0		50,0		50,0	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi olahraga	%	0,4	1,0	1.810.626.000	1,5	1.819.679.130	2,0	1.828.777.526	2,0	
		Presentase jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan - satuan pendidikan	%	30,0	50,0		60,0		70,0		70,0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Perangkat Daerah/sekolah yang membentuk organisasi kepramukaaan	%	10,0	40,0	71.203.000	50,0	71.559.015	60,0	71.916.810	60,0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sasara	n 1.1.5 : Menjamin terpenuhinya dimer	nsi keberlanjutan (s <i>ustainability)</i> lingkungar	ı hidup dalam	pembangun	an		1	l	l	l	ı	

				Kondisi		Capaian I	Kinerja Prog	gram dan Kerangka F	endanaan		Kondisi Kinerja	D 1 (D 1
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (IKLH, IKPLHD, DDDTLH, KLHS)	%	60,0	80,0	32.212.000	90,0	32.373.060	100,0	32.534.925	100,0	DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	40,0	60,0	1.859.403.000	70,0	1.868.700.015	80,0	1.878.043.515	80,0	DLH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	%	40,0	60,0	1.250.260.000	70,0	1.256.511.300	80,0	1.262.793.857	80,0	DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase cakupan pengendalian B3 dan LB3	%	40,0	60,0	16.545.000	70,0	16.627.725	80,0	16.710.864	80,0	DLH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengendalian persetujuan lingkungan	%	40,0	60,0	45.257.000	70,0	45.483.285	80,0	45.710.701	80,0	DLH
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase sinkronisasi MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA dengan PPLH	%	40,0	60,0	0	70,0	0	80,0	0	80,0	DLH
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan	%	40,0	60,0	13.250.000	70,0	13.316.250	80,0	13.382.831	80,0	DLH
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya pemberian penghargaan Lingkungan Hidup	%	40,0	60,0	23.350.000	70,0	23.466.750	80,0	23.584.084	80,0	DLH
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	%	40,0	60,0	36.808.000	70,0	36.992.040	80,0	37.177.000	80,0	DLH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	%	40,0	60,0	182.610.000	70,0	183.523.050	80,0	184.440.665	80,0	DLH
Sasara	n 1.1.6 : Meningkatnya akses masyaral	kat terhadap perumahan layak, air minum o	lan sanitasi				1	L	1	ı	1	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan penduduk berakses air minum	%	40,0	80,0	3.518.542.000	90,0	3.536.134.710	100,0	3.553.815.384	100,0	Dinas PUPR

				Kondisi		Capaian I	Kinerja Pro	gram dan Kerangka P	endanaan		Kondisi Kinerja	D 1 (D
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase air limbah domestik tertangani	%	30,0	50,0	1.846.512.000	70,0	1.855.744.560	100,0	1.865.023.283	100,0	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	30,0	50,0	3.765.675.000	70,0	3.784.503.375	100,0	3.803.425.892	100,0	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	%	40,0	70,0	10.000.000.000	80,0	10.050.000.000	100,0	10.100.250.000	100,0	Dinas PUPR
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah pembangunan rumah layak huni	%	25,0	50,0	5.393.750.000	60,0	5.420.718.750	70,0	5.447.822.344	70,0	Dinas PUPR
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni di luar kawasan kumuh	%	25,0	50,0	2.656.249.000	60,0	2.669.530.245	70,0	2.682.877.896	70,0	Dinas PUPR
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Paket	25,0	50,0	1.125.000.000	60,0	1.130.625.000	70,0	1.136.278.125	70,0	Dinas PUPR
Sasara	n 1.1.7 : Meningkatnya akses masyrak	at terhadap penerangan/listrik	•	•	•	•		•	•	•	•	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	terfasilitasinya pelaksanaan kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan, Lingkungan Hidup, energi dan air	%	60,0	80,0	468.640.375	90,0	470.983.577	100,0	473.338.495	100,0	Bagian Perekonomian
Sasara	in 1.1.8 : Meningkat ketangguhan benc				II.		ı		II.			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	%	60,0	80,0	3.732.921.000	85,0	3.751.585.605	90,0	3.770.343.533	90,0	BPBD
	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	60,0	80,0	49.850.000	85,0	50.099.250	90,0	50.349.746	90,0	Satpol PP
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	50,0	80,0	108.120.000	90,0	108.660.600	100,0	109.203.903	100,0	Dinas Sosial
		Okratis, akuntabel, bersih, efektif dan terper		tas tinggi, n	roduktif.	dan melayani secar	ra prima d	alam rangka menir	ngkatkan	kepercayaan publi	k.	

				Kondisi		Capaian	Kinerja Prog	gram dan Kerangka F	Pendanaan		Kondisi Kinerja	
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
Sasara	un 2.1.1 L Meningkatkan akuntabilitas	penyelenggaraan pemerintahan dan pengelo	laan sistem in	formasi daera	ah							
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	20,0	50,0	613.925.000	60,0	616.994.625	80,0	620.079.598	80,0	Dinas Kominfo
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	20,0	50,0		60,0		80,0		80,0	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	50,0	80,0	282.350.000	90,0	283.761.750	100,0	285.180.559	100,0	Dinas Kominfo
		Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Perbub	0,0	0,0		0,0		1,0		1,0	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	orang	25,0	50,0		60,0		70,0		70,0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	50,0	80,0	132.914.000	90,0	133.578.570	100,0	134.246.463	100,0	Dinas Kominfo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	50,0	80,0	43.400.000	90,0	43.617.000	100,0	43.835.085	100,0	Dinas Kominfo
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	50,0	80,0	33.000.000	90,0	33.165.000	100,0	33.330.825	100,0	Dinas Arsip
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	50,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip	%	50,0	80,0	35.000.000	90,0	35.175.000	100,0	35.350.875	100,0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skor Hasil EKPPD	%	2,3	2,6	468.640.375	2,8	470.983.577	3,0	473.338.495	3,0	Bagian Pemerintahan

				Kondisi		Capaian	Kinerja Prog	gram dan Kerangka F	endanaan		Kondisi Kinerja	
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan ASN	Keg	5,0	8,0	468.640.375	9,0	470.983.577	10,0	473.338.495	27,0	Bagian Pemerintahan
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Ketaatan terhadap Propemperda	%	40,0	80,0	468.640.375	90,0	470.983.577	100,0	473.338.495	100,0	Bagian Hukum
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi kerjasama Pemda	%	60,0	80,0	468.640.375	90,0	470.983.577	100,0	473.338.495	100,0	Bagian Pemerintahan
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas tata kelola perekonomian dan pembangunan	%	50,0	80,0	468.640.375	90,0	470.983.577	100,0	473.338.495	100,0	Bagian Ekonomi
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	%	50,0	80,0	468.640.375	90,0	470.983.577	100,0	473.338.495	100,0	Bagian Ekonomi
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE	%	60,0	80,0	468.640.375	90,0	470.983.577	100,0	473.338.495	100,0	Bagian Ekonomi
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemutakhiran data kepegawaian%)	%	60,0	80,0	3.848.795.000	90,0	3.868.038.975	100,0	3.887.379.170	100,0	BKPSDM
		Persentase jumlah pengadaan Pejabat PT/PA/PP yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti Diklat	%	40,0	55,0	2.435.452.000	60,0	2.447.629.260	70,0	2.459.867.406	70,0	BKPSDM
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan PD yang diaudit	%	70,0	80,0	1.358.450.000	90,0	1.365.242.250	100,0	1.372.068.461	100,0	Inspektorat
		Dokumen/Laporan yang direviu	%	70,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
		Laporan Kinerja PD yang dievaluasi	%	70,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
		Cakupan APBDes yang diaudit	%	70,0	80,0		90,0		100,0		100,0	

				Kondisi		Capaian 1	Kinerja Prog	gram dan Kerangka P	endanaan		Kondisi Kinerja	D 1 (D 1
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
		Peningkatan Kapabilitas APIP	Orang	N/A	3		4		6		13	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pengaduan masyarakat yang ditangani	%	60,0	90,0	287.860.000	100,0	289.299.300	100,0	290.745.797	100,0	Inspektorat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	50,0	80,0	8.945.652.000	90,0	8.990.380.260	100,0	9.035.332.161	100,0	Kecamatan
Sasara	nn 2.1.1.2 : Meningkatkan partisipasi m	asyarakat dalam proses pembangunan dan	perumusan k	ebijakan pub	lik		•		•			
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi peran dan fungsi dewan	%	70,0	85,0	7.240.961.000	90,0	7.277.165.805	100,0	7.313.551.634	100,0	Setwan DPRD
		Persentase Perda yang dibahas dan ditetapkan	%	70,0	85,0		90,0		100,0		100,0	
Sasara	nn 2.1.1.3 : Meningkatnya kinerja penge	elolaan keuangan daerah										
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas Audit LKPD	Opini	WDP	WTP	7.141.648.614	WTP	7.177.356.857	WTP	7.213.243.641	WTP	Badan Keuangan & Aset Daerah
		Persentase SILPA terhadap APBD	%	9,0	6,0		5,0		4,0		4,0	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan aset daerah yang tercatat dalam KIB	%	60,0	80,0	1.056.878.000	90,0	1.062.162.390	100,0	1.067.473.202	100,0	Badan Keuangan & Aset Daerah
		Jumlah Bidang Tanah milik Pemda yang bersertifikat	%	40,0	50,0		60,0		70,0		70,0	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase piutang pajak yang tertagih	%	60,0	80,0	719.460.000	90,0	723.057.300	100,0	726.672.587	100,0	Badan Pendapatan Daerah
		T .	1	1		l	1	1	1	1	1	i .

						Capaian I	Kineria Pros	gram dan Kerangka P	endanaan		Kondisi	
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Baseline		2022		2023		2024	Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
Sasara	n 2.1.1.4 : Meningkatnya kualitas pela	yanan publik									_	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ijin dan non ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	60	80	290.068.000	100	291.518.340	100	292.975.932	100	DPMPTSPTKT
		Prosentase Peningkatan ketersediaan Data/Informasi Perijinan dan Penanaman Modal Berbasis Elektronik	%	80	90	35.422.000	100	35.599.110	100	35.777.106	100	DPMPTSPTKT
												Bagian Organisasi
Sasara	n 2.1.1.5 : Meningkatnya partisipasi m	asyarakat dalam perencanaan pembanguna	n daerah									
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat penyelesaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu	%	60,0	80,0	1.267.990.000	90,0	1.274.329.950	100,0	1.280.701.600	100,0	Bapelitbangda
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	%	75,0	85,0	996.814.000	90,0	1.001.798.070	100,0	1.006.807.060	100,0	Bapelitbangda
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Jumlah	0,0	10,0	976.255.000	10,0	981.136.275	10,0	986.041.956	30,0	Bapelitbangda
		Persentase fasilitasi Perangkat Daerah yang melakukan inovasi	%	5,0	20,0		25,0		30,0		30,0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	%	40,0	60,0	4.509.008.000	70,0	4.531.553.040	80,0	4.554.210.805	80,0	Kecamatan
Sasara	n 2.1.1.6 : Meningkatnya Wawasan Ke	bangsaan dan Nilai Patriotisme										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dan pembinaan kerukunan beragama	Keg	4,0	8,0	333.300.000	8,0	334.966.500	8,0	336.641.333	24,0	Kecamatan
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (%)	%	60,0	90,0	104.575.000	100,0	105.097.875	100,0	105.623.364	100,0	Badan Kesbangpol

				Kondisi		Capaian	Kinerja Prog	gram dan Kerangka I	Pendanaan		Kondisi Kinerja	5 1.5
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kegiatan pembinaan politik di daerah (Kegiatan)	%	60,0	90,0	124.100.000	100,0	124.720.500	100,0	125.344.103	100,0	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	%	60,0	90,0	0	100,0	0	100,0	0	100,0	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara	%	60,0	90,0	159.549.000	100,0	160.346.745	100,0	161.148.479	100,0	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan pemeliharaan TMP	%	40,0	60,0	37.954.000	70,0	38.143.770	90,0	38.334.489	90,0	Dinas Sosial
	I: Mewujudkan kehidupan masyarakat n 3.1 : Meningkatnya peran semua pend											
Sasara	nn 3.1.1 : Hadirnya keadilan bagi perem	npuan untuk berpartisipasi dalam pembangt	ınan									
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	30,0	32,0	197.343.000	33,0	198.329.715	35,0	199.321.364	35,0	DP3AP2KB
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	8,0	10,0		18,0		20,0		20,0	
		Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	% 30,0	30,0	32,0		33,0		35,0		35,0	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase sumbangan perempuan terhadap pendapatan keluarga	%	15,0	20,0	363.269.000	25,0	365.085.345	30,0	366.910.772	30,0	DP3AP2KB
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan dokumen Data Gender dan Anak	%	60,0	80,0	32.045.000	90,0	32.205.225	100,0	32.366.251	100,0	DP3AP2KB

				Kondisi		Capaian I	Kinerja Pro	gram dan Kerangka P	endanaan		Kondisi Kinerja	
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
Sasara	an 3.1.2 : Meningkatnya Perlindungan t	terhadap Perempuan dan Anak										
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya persentase KDRT termasuk TPPO	%	2,0	1,2	119.999.000	1,0	120.598.995	0,5	121.201.990	0,5	DP3AP2KB
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	60,0	80,0	515.000.000	90,0	517.575.000	100,0	520.162.875	100,0	DP3AP2KB
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa layak anak	%	40,0	60,0	277.800.000	70,0	279.189.000	80,0	280.584.945	210,0	DP3AP2KB
	I n 3.2 : Mewujudkan masyarakat SBD y an 3.2.1 :Tumbuhnya perekonomian da		l	I.							l	
Sasara	an 3.2.1 .1umbumiya perekonomian da	eran secara stabii dan berkelanjutan										
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	%	N/A	2,0	4.659.895.000	2,5	4.683.194.475	3,0	4.706.610.447	3,0	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Presentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	%	N/A	2,1	2.876.989.000	2,3	2.891.373.945	2,5	2.905.830.815	2,5	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani mendapat Bantuan Benih	%	60,0	80,0	11.425.879.000	90,0	11.483.008.395	100,0	11.540.423.437	100,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	%	2,5	4,0		4,5		5,0		5,0	
		Produktivitas padi per hektar	Ton/HA	3,2	3,5		3,8		4,0		4,0	
		Produktivitas jagung per hektar	Ton/HA	3,5	3,7		4,0		4,5		4,8	
		Cakupan ketersediaan Benih Unggul Pertanian bersertifikat (Padi dan Jagung)	%	50,0	70,0		80,0		100,0		100,0	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani penerima Sarana Pendukung Pertanian	%	40,0	50,0	2.215.895.000	60,0	2.226.974.475	70,0	2.238.109.347	70,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

				Kondisi		Capaian	Kinerja Pros	gram dan Kerangka P	endanaan		Kondisi Kinerja	D 1.D 1
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan persentase luas lahan pertanian fungsional produktif	%	N/A	8,0	8.189.427.000	9,0	8.230.374.135	12,0	8.271.526.006	12,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan persentase perluasan dan pengembangan tanaman perkebunan unggulan	%	N/A	12,8	0	13,5		15,0		15,0	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan persentase Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	%	N/A	7,5	345.158.000	8,5	346.883.790	10,0	348.618.209	10,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	%	N/A	80,0	2.057.856.000	90,0	2.068.145.280	100,0	2.078.486.006	100,0	Dinas Peternakan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	%	N/A	80,0	279.722.000	90,0	281.120.610	100,0	282.526.213	100,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah	%	N/A	80,0	55.430.000	90,0	55.707.150	100,0	55.985.686	100,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani yang mendapat Penyuluhan Pertanian	%	50,0	80,0	2.995.596.000	90,0	3.010.573.980	100,0	3.025.626.850	100,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelas kemampuan Kelompok Tani Lanjut menuju BUMP	Kelompok Tani	N/A	500,0	842.324.000	500,0	846.535.620	500,0	850.768.298	1.500,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Sumber Daya Manusia di bidang Peternakan	%	30,0	60,0	112.231.000	70,0	112.792.155	80,0	113.356.116	80,0	Dinas Peternakan
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki ijin	%	50,0	80,0	25.900.000	90,0	26.029.500	100,0	26.159.648	100,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Cakupan koperasi yang mendapat pembinaan	%	50,0	80,0	28.490.000	90,0	28.632.450	100,0	28.775.612	100,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Cakupan koperasi aktif	%	50,0	80,0	31.339.000	90,0	31.495.695	100,0	31.653.173	100,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan koperasi aktif	%	50,0	80,0	148.912.000	90,0	149.656.560	100,0	150.404.843	100,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian

				Kondisi		Capaian 1	Kinerja Prog	gram dan Kerangka P	endanaan		Kondisi Kinerja	D 1 (D 1
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang mendapat bantuan modal usaha	%	10,0	40,0	2.500.000.000	50,0	2.512.500.000	60,0	2.525.062.500	60,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	10,0	40,0	1.456.572.000	50,0	1.463.854.860	60,0	1.471.174.134	60,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	10,0	30,0	31.339.000	35,0	31.495.695	40,0	31.653.173	40,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten	%	10,0	20,0	95.163.000	30,0	95.638.815	40,0	96.117.009	40,0	DPMPTSPTKT
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	%	10,0	20,0	63.497.000	35,0	63.814.485	45,0	64.133.557	45,0	DPMPTSPTKT
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	50,0	80,0	290.068.000	90,0	291.518.340	100,0	292.975.932	100,0	DPMPTSPTKT
•	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Ketersediaan Laporan/Dokumen Investasi Penanaman Modal sesuai ketentuan yang berlaku	%	50,0	80,0	392.223.000	90,0	394.184.115	100,0	396.155.036	100,0	DPMPTSPTKT
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan ketersediaan Data/Informasi Perijinan dan Penanaman Modal Berbasis Elektronik	%	50,0	70,0	35.422.000	80,0	35.599.110	90,0	35.777.106	90,0	DPMPTSPTKT
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang beroleh ijin	%	30,0	60,0	18.599.000	70,0	18.691.995	80,0	18.785.455	80,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan revitalisasi pasar	%	50,0	70,0	12.929.000	80,0	12.993.645	90,0	13.058.613	90,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	60,0	80,0	35.089.000	90,0	35.264.445	100,0	35.440.767	100,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten	%	40,0	50,0	90.100.000	60,0	90.550.500	70,0	91.003.253	70,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan produk unggulan lokal yang mendapat pengakuan	%	4,0	12,0	250.000.000	15,0	251.250.000	20,0	252.506.250	20,0	Dinas Koperasi dan UKM,

				Kondisi		Capaian I	Kinerja Pro	gram dan Kerangka P	'endanaan		Kondisi Kinerja	
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
												Perdagangan dan Perindustrian
		Peta potensi dan peluang usaha yang dimanfaatkan	%	20,0	30,0		40,0		50,0		50,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Ketersediaan dokumen Rencana Pembangunan Industri	%	0,0	80,0	1.394.681.000	90,0	1.401.654.405	100,0	1.408.662.677	100,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Cakupan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten	%	20,0	40,0	10.915.000	50,0	10.969.575	60,0	11.024.423	60,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten	%	20,0	80,0	12.470.000	90,0	12.532.350	100,0	12.595.012	100,0	Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikat	%	5,0	25,0	395.665.000	40,0	397.643.325	60,0	399.631.542	60,0	Dinas PUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Ketaatan terhadap RTRW	%	20,0	40,0	1.143.945.000	50,0	1.149.664.725	60,0	1.155.413.049	60,0	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penyelesaian izin lokasi	%	60,0	80,0	100.000.000	90,0	100.500.000	100,0	101.002.500	100,0	Pertanahan
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Cakupan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	40,0	60,0	250.000.000	70,0	251.250.000	80,0	252.506.250	80,0	Pertanahan
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Cakupan Tanah Ulayat Lintas Daerah yang ditetapkan statusnya	%	60,0	80,0	950.000.000	90,0	954.750.000	100,0	959.523.750	100,0	Pertanahan
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tanah Kosong dimanfatkan	%	30,0	50,0	850.000.000	60,0	854.250.000	70,0	858.521.250	70,0	Pertanahan
	Sasaran 3.2.2 : Meningkatnya keters	ediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keaman	an pangan									
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Unit	0,0	1,0	2.999.940.000	1,0	3.014.939.700	1,0	3.030.014.399	3,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

				Kondisi		Capaian I	Kinerja Prog	gram dan Kerangka F	endanaan		Kondisi Kinerja	D 1 (D 1
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase Ketersediaan pangan utama	%	60,0	85,0	1.525.640.000	90,0	1.533.268.200	100,0	1.540.934.541	100,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase pengadaan & penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	%	60,0	80,0	197.466.000	90,0	198.453.330	100,0	199.445.597	100,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	60,0	80,0	90.595.000	90,0	91.047.975	100,0	91.503.215	100,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	60,0	75,0	383.670.000	85,0	385.588.350	100,0	387.516.292	100,0	Satpol PP
		Cakupan Penegakan PERDA	%	60,0	80,0		85,0		90,0		90,0	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODIKTIVITAS TENAGA	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja  Cakupan tenaga kerja yang mendanatkan pelatihan berbasis	Dokumen %	4,0	3,0	75.000.000 1.169.713.000	9,0	75.375.000 1.175.561.565	5,0	75.751.875 1.181.439.373	5,0	DPMPTSPTKT DPMPTSPTKT
	DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi										
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Mendorong teriptanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat penganggur dan tersedianya layanan IPK bagi masyarakat	Orang	50,0	70,0	262.425.000	80,0	263.737.125	100,0	265.055.811	250,0	DPMPTSPTKT
		Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	40,0	70,0		80,0		90,0		90,0	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis	%	40,0	60,0	175.991.000	80,0	176.870.955	100,0	177.755.310	100,0	DPMPTSPTKT
	<u> </u>	D ( 1 1 1	%	40,0	60,0		80,0		100,0		100,0	1
		Persentase penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan										

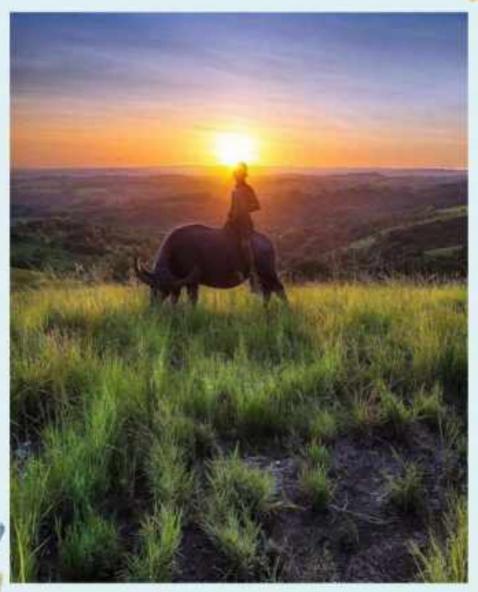
				Kondisi		Capaian I	Kinerja Prog	gram dan Kerangka P	endanaan		Kondisi Kinerja	D 1 (D 1
Kod	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Pemberdayaan Sosial KAT	KK	40,0	200,0	1.231.790.000	350,0	1.237.948.950	500,0	1.244.138.695	1.050,0	Dinas Sosial
		Cakupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	%	40,0	60,0		70,0		80,0		80,0	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	fasilitasi korban tindak kekerasan dan pekerja migran	%	50,0	80,0	62.850.000	90,0	63.164.250	100,0	63.480.071	100,0	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	%	50,0	80,0	1.793.953.000	90,0	1.802.922.765	100,0	1.811.937.379	100,0	Dinas Sosial
		Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat pelayanan Rehabilitasi sosial	%	50,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	%	60,0	80,0	1.006.727.000	90,0	1.011.760.635	100,0	1.016.819.438	100,0	Dinas PMD
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang menetapkan Produk Hukum Desa	%	60,0	80,0	2.037.326.000	90,0	2.047.512.630	100,0	2.057.750.193	100,0	Dinas PMD
		Cakupan Desa yang memiliki Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase karang taruna aktif	%	60,0	80,0	1.526.059.000	90,0	1.533.689.295	100,0	1.541.357.741	100,0	Dinas PMD
		Persentase peningkatan status desa mandiri	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
		persentase LPM aktif	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
		Persentase PKK aktif	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
				1							1	

				Kondisi		Capaian	Kinerja Prog	gram dan Kerangka F	endanaan		Kondisi Kinerja	
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
		Persentase Posyandu	%	60,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan potensi sumber daya kawasan transmigrasi yang bertumbuh dan strategis	Kawasan			240.073.000		241.273.365		242.479.732	0,0	DPMPTSPTKT
		Optimalisasi lahan yang dicadangkan (Ha)	На								0,0	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan di Kawasan Transmigrasi	%			122.900.000		123.514.500		124.132.073	0,0	DPMPTSPTKT
		Jumlah KK Penduduk Setempat dan Transmigran yang diikutsertakan dalam Program Transmigrasi	KK								0,0	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan Trans binaan yang berkembang	Kimtrans	0,0	1,0	245.119.000	1,0	246.344.595	2,0	247.576.318	4,0	DPMPTSPTKT
		Jumlah peserta program transmigrasi yang mendapat pembinaan Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	KK	0,0	50,0		50,0		100,0		200,0	
Sasara	n 3.2.5 : Terjaminnya perlindungan ba	gi penduduk miskin dan PMKS										
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS	%	50,0	80,0	297.506.000	90,0	298.993.530	100,0	300.488.498	100,0	Dinas Sosial
		Cakupan Anak-Anak Terlantar mendapat pemeliharaan	%	50,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
		Cakupan Fakir Miskin mendapat fasilitasi Bantuan Sosial	%	50,0	80,0		90,0		100,0		100,0	
Tujuan	3.3 : Mempercepat pembangunan infi	I astruktur yang berkualitas dalam pengemb	angan ekonom	i masyaraka	t	L	1	L	1	L	ı	
Sasara	n 3.3.1 : Meningkatnya kualitas dan a	ksesibilitas infrastruktur dalam mendukung	konektivitas o	daerah								

				Kondisi		Capaian I	Kinerja Pro	gram dan Kerangka P	endanaan		Kondisi Kinerja	
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	40,0	60,0	106.454.277.963	70,0	113.514.301.743	80,0	112.585.054.046	80,0	Dinas PUPR
		Cakupan jembatan dalam kondisi baik	%	30,0	50,0		60,0		70,0		70,0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	cakupan pemenuhan trayek angkutan umum ke seluruh kecamatan	%	50,0	80,0	2.284.525.000	90,0	2.295.947.625	100,0	2.307.427.363		Dinas Perhubungan
		cakupan jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	%	60,0	70,0		80,0		90,0			
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Intensitas pelayanan pelabuhan feri	kali	1,0	1,0	8.209.525.000	1,0	8.250.572.625	2,0	8.291.825.488		Dinas Perhubungan
Sasara	un 3.3.2 : Meningkatnya kualitas Infras	truktur Irigasi dan pengairan dalam mendu	kung perekono	omian daerah	<u>l</u>							
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,0	75,0	14.238.757.000	80,0	14.309.950.785	85,0	25.458.999.049	85,0	Dinas PUPR
Sasara	an 3.3.3 : Berkembangnya pariwisata da	aerah dan pelestarian budaya untuk mendu	kung pertumb	uhnya perek	onomian						•	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase Jumlah Pengembangan Lokasi Pariwisata	%	40,0	70,0	2.608.901.000	80,0	2.621.945.505	90,0	2.635.055.233	90,0	Dinas Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase peningkatan arus kunjungan wisatawan dan pengetahuan wisatawan	%	2,0	4,3	182.956.000	4,7	183.870.780	5,0	184.790.134	5,0	Dinas Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Prosentase Cakupan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Produk yang Mendapatkan Perlindunginya Hak Kekayaan Inteletual	%	30,0	60,0	26.883.000	80,0	27.017.415	100,0	27.152.502	100,0	Dinas Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase Cakupan Ketersediaan Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	%	25,0	40,0	26.883.000	50,0	27.017.415	60,0	27.152.502	60,0	Dinas Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	30,0	50,0	160.415.000	60,0	161.217.075	70,0	162.023.160	70,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	l		1	<u> </u>	l			<u> </u>	l	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

				Kondisi		Capaian I	Kinerja Prog	gram dan Kerangka P	endanaan		Kondisi Kinerja	D 1 (D 1
Ko	de Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Baseline 2020		2022		2023		2024	pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(Tahun 2024)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali		1,0	50.000.000	1,0	50.250.000	1,0	50.501.250	3,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		persentase sanggar seni yang di bina	%	20,0	40,0		50,0		60,0		60,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	1,0	3,0	125.000.000	3,0	125.625.000	3,0	126.253.125	9,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	%	30,0	80,0	100.000.000	90,0	100.500.000	100,0	101.002.500	100,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH



## BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

## 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Program-program tersebut merupakan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program-program yang mendapatkan alokasi anggaran terbagi menjadi 3 (Tiga) kategori berdasarkan tingkat prioritasnya. Pertama adalah dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat, kedua program perangkat daerah yang terkait dengan perwujudan visi dan misi serta memenuhi program yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib pelayanan dasar serta yang ketiga program - program penyelenggaraan urusan lainnya sebagai penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

Program – program untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang pemerintah daerah, yang terdiri dari program urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, disajikan berdasarkan urusan dan fungsi penunjang serta program yang bersifat rutin (generik) dan dilaksanakan pada setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan kinerja para aparatur dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengeluaran per perangkat daerah harus disesuaikan dengan proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang sudah di perhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 (Lima) tahun, baik untuk Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

Uraian		Proyeksi (Rp)	
Oralan	2022	2023	2024
Kapasitas riil kemampuan keuangan	424.037.989.784	434.695.734.287	445.532.832.589
Belanja barang dan jasa	270.528.861.855	243.475.975.670	219.128.378.103
Belanja hibah	19.382.538.932	18.219.586.596	17.126.411.400
Belanja bantuan sosial	22.068.718.310	21.722.046.594	20.052.573.759
Belanja modal	112.057.870.687	151.278.125.428	204.225.469.327
Belanja tidak terduga	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021

## 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Τε	ahun 2022	Τε	ahun 2023	Ta	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
	j				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Non Urusan											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%	80	100	304.452.480.781	100	306.187.242.484	100	307.918.178.697	100	Semua Perangkat Daerah
		Persentase penyampaian LPPD dan LKPJ dilengkapi dokumen pendukung	%	50	100		100		100		100	
		Rata-rata skor hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	Skor	<70	>70		>80		>90		>90	

	Kod	e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tε	ıhun 2022	Тг	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah	%	<70	100		100		100		100	
				Cakupan peningkatan disiplin aparatur	%	50	100		100		100		100	
1			Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	1		Pendidikan											
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase pemenuhan SPM pendidikan dasar	%	60	100	55.201.535.000	100	55.477.542.675	100	55.754.930.388	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD)	%	50	100		100		100		100	
				Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	90	100		100		100		100	
				Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	80	100		100		100		100	
				Rata-rata lama sekolah	Tahun	8	9		9		9		9	
				Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	80	100		100		100		100	
1	1	3	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan pemenuhan kurikulum muatan lokal PAUD, PNF dan pendidikan dasar	%	0	30	111.748.000	45	112.306.740	60	112.868.274	60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	66	76	812.029.000	81	816.089.145	84	820.169.591	84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Kode	,	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Та	ahun 2022	Та	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan PAUD, PNF dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	%	95	98	0	99	0	100	66.550.000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Cakupan penerapan bahasa dan sastra daerah dalam pembelajaran	%			67.500.000		67.837.500		68.176.688		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	2		Kesehatan											
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	%	50	70	8.806.324.000	80	8.850.355.620	90	12.895.057.398	90	Dinas Kesehatan
				Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 1.000	1	1		2		2		2	
				Cakupan pengelolaan sistem informasi kesehatan	%	60	80		90		100		100	
				Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	0,5	0,3		0,2		0,1		0,1	
				Prevalensi HIV/AIDS	%	0,1	0		0		0		0	
				Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12- 23 bulan	%	60	80		90		100		100	
				Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	%	60	80		90		100		100	
				Persentase rumah sakit terakreditasi	%	60	80		90		100		100	

	Kode	ę.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Τε	ahun 2022	Та	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	60	80		90		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	60	80		90		100		100	
				Cakupan penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat	%	60	80		90		100		100	
				Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	60	80		90		100		100	
				Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita	%	0,5	0,3		0,2		0,1		0,1	
				Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun	%	0,5	0,3		0,2		0,1		0,1	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	<80	100	37.174.637.270	100	38.110.205.523	100	46.917.634.926	100	Puskesmas & FKTP
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	<80	100		100		100		100	
				Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	<80	100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	<80	100		100		100		100	

	Kode	e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Τε	hun 2022	Tε	ahun 2023	Tε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	<80	100		100		100		100	
				Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	<80	100		100		100		100	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	<80	100		100		100		100	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	<80	100		100		100		100	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	<80	100		100		100		100	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	<80	100		100		100		100	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	<80	100		100		100		100	
				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	<80	100		100		100		100	

	Kode	:	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Та	ahun 2022	Tε	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan rujukan	%	85	93	12.213.727.419	95	12.274.796.056	100	12.336.170.036	100	RSUD
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang sudah memiliki surat ijin praktek	%	60	80	170.652.000	90	171.505.260	100	172.362.786	100	Dinas Kesehatan
				Persentase dokter/tenaga medis penerima bantuan biaya pendidikan lanjutan tenaga kedokteran/ kesehatan	%	50	70		85		100		100	
				Rasio dokter (tenaga medis) per 100.000 penduduk	%	2	5		7		10		10	
				Rasio bidan per 100.000 penduduk	Rasio	80	1.000		2.000		2.500		2.500	
				Rasio perawat per 100.000 penduduk	Rasio	3.000,00	4.000		4.500		5.000		5.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang sudah memiliki surat ijin praktek	Orang	50	80	292.676.000	90	294.139.380	100	295.610.077	100	RSUD
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	%	40	60	242.036.000	80	243.246.180	100	244.462.411	100	Dinas Kesehatan
				Cakupan perijinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) berizin	%	60	75		85		100		100	

	Kode	;	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Тг	ıhun 2022	Тғ	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
L							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat sehat	%	30	50	376.725.000	60	378.608.625	70	380.501.668	70	Dinas Kesehatan
				Cakupan desa siaga aktif	%	60	80		90		100		100	
				Cakupan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	%	40	60		70		80		80	
1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50	75	14.238.757.000	80	14.309.950.785	85	25.458.999.049	85	Dinas PUPR
1	3	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan penduduk berakses air minum	%	40	80	3.518.542.000	90	3.536.134.710	100	3.553.815.384	100	Dinas PUPR
1	3	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase air limbah domestik tertangani	%	30	50	1.846.512.000	70	1.855.744.560	100	1.865.023.283	100	Dinas PUPR
1	3	6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	30	50	3.765.675.000	70	3.784.503.375	100	3.803.425.892	100	Dinas PUPR
1	3	7	Program Pengembangan Permukiman	Cakupan infrastruktur permukiman kondisi baik	%	30	38	104.427.881	44	246.945.589	50	294.214.707	50	Dinas PUPR
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	15	40	0	50	0	70	0	70	Dinas PUPR

	Kode	<b>)</b>	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Та	ahun 2022	Тг	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Cakupan jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	40	60	106.454.277.963	70	113.514.301.743	80	112.585.054.046	80	Dinas PUPR
				Cakupan jembatan dalam kondisi baik	%	30	50		60		70		70	
1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan tenaga terampil konstruksi bersertifikat	%	5	25	395.665.000	40	397.643.325	60	399.631.542	60	Dinas PUPR
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan ketaatan terhadap RTRW	%	20	40	1.143.945.000	50	1.149.664.725	60	1.155.413.049	60	Dinas PUPR
1	4		Perumahan dan Kawasan Permukiman											
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	%	40	70	10.000.000.000	80	10.050.000.000	100	10.100.250.000	100	
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Jumlah pembangunan rumah layak huni	%	25	50	5.393.750.000	60	5.420.718.750	70	5.447.822.344	70	
1	4	4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni di luar kawasan kumuh	%	25	50	2.656.249.000	60	2.669.530.245	70	2.682.877.896	70	
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Paket	25	50	1.125.000.000	60	1.130.625.000	70	1.136.278.125	70	
1	5		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											

	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Тε	ıhun 2022	Та	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	60	75	383.670.000	85	385.588.350	100	387.516.292	100	Satpol PP
				Cakupan penegakan PERDA	%	60	80		85		90		90	
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	%	60	80	3.732.921.000	85	3.751.585.605	90	3.770.343.533	90	BPBD
1	5	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	60	80	49.850.000	85	50.099.250	90	50.349.746	90	Satpol PP
1	6		Sosial											
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah pemberdayaan sosial KAT	KK	40	200	1.231.790.000	350	1.237.948.950	500	1.244.138.695	1.050,00	Dinas Sosial
				Cakupan komunitas adat terpencil (KAT) yang diberdayakan	%	40	60		70		80		80	
1	6	3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Fasilitasi korban tindak kekerasan dan pekerja migran	%	50	80	62.850.000	90	63.164.250	100	63.480.071	100	Dinas Sosial
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar	%	50	80	1.793.953.000	90	1.802.922.765	100	1.811.937.379	100	Dinas Sosial

	Kode	:	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Та	hun 2022	Тг	ahun 2023	Тг	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Cakupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	%	50	80		90		100		100	
1	6	5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan cakupan jaminan sosial bagi PMKS	%	50	80	297.506.000	90	298.993.530	100	300.488.498	100	Dinas Sosial
				Cakupan anak-anak terlantar mendapat pemeliharaan	%	50	80		90		100		100	
				Cakupan fakir miskin mendapat fasilitasi bantuan sosial	%	50	80		90		100		100	
1	6	6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	50	80	108.120.000	90	108.660.600	100	109.203.903	100	Dinas Sosial
1	6	7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan pemeliharaan TMP	%	40	60	37.954.000	70	38.143.770	90	38.334.489	90	Dinas Sosial
2			Urusan Wajib Yang Tidak I Dasar	Berkaitan Dengan Pelayanan										
2	7		Tenaga Kerja											
2	7	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja	Dokumen	1	3	75.000.000	4	75.375.000	5	75.751.875	5	DPMPTSPTKT
2	7	3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	4	8	1.169.713.000	9	1.175.561.565	10	1.181.439.373	10	DPMPTSPTKT
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	40	70	262.425.000	80	263.737.125	90	265.055.811	90	DPMPTSPTKT

	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tε	hun 2022	Τε	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Meningkatnya PMI prosedural	%	55	70		75		85		85	DPMPTSPTKT
2	7	5	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	%	40	60	175.991.000	80	176.870.955	100	177.755.310	100	DPMPTSPTKT
				Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan	%	40	60		80		100		100	
2	8		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2	8	2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	30	32	197.343.000	33	198.329.715	35	199.321.364	35	DP3AP2KB
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	8	10		18		20		20	
				Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	30	32		33		35		35	
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Menurunya persentase KDRT termasuk TPPO	%	2	1,2	119.999.000	1	120.598.995	0,5	121.201.990	0,5	DP3AP2KB
2	8	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase sumbangan perempuan terhadap pendapatan keluarga	%	15	20	363.269.000	25	365.085.345	30	366.910.772	30	DP3AP2KB
2	8	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan dokumen data gender dan anak	%	60	80	32.045.000	90	32.205.225	100	32.366.251	100	DP3AP2KB

	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Тг	thun 2022	Тє	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase desa layak anak	%	40	60	277.800.000	70	279.189.000	80	280.584.945	210	DP3AP2KB
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	60	80	515.000.000	90	517.575.000	100	520.162.875	100	DP3AP2KB
2	9		Pangan											
2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Unit	0	1	2.999.940.000	1	3.014.939.700	1	3.030.014.399	3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan utama	%	60	85	1.525.640.000	90	1.533.268.200	100	1.540.934.541	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase pengadaan & penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan	%	60	80	197.466.000	90	198.453.330	100	199.445.597	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	60	80	90.595.000	90	91.047.975	100	91.503.215	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	10		Pertanahan			_					_			
2	10	2	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase penyelesaian izin lokasi	%	60	80	100.000.000	90	100.500.000	100	101.002.500	100	
2	10	4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Cakupan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan	%	40	60	250.000.000	70	251.250.000	80	252.506.250	80	

	Kode	e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Ta	hun 2022	Тғ	ahun 2023	Тғ	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	10	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pemenuhan ganti rugi dan santunan untuk pembangunan	%	0	50	3.000.000.000	12,5	750.000.000	12,5	750.000.000	75	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	10	7	Program Penetapan Tanah Ulayat	Cakupan tanah ulayat lintas daerah yang ditetapkan statusnya	%	60	80	950.000.000	90	954.750.000	100	959.523.750	100	
2	10	8	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Tanah kosong dimanfatkan	%	30	50	850.000.000	60	854.250.000	70	858.521.250	70	
2	11		Lingkungan Hidup											
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup (IKLH, IKPLHD, DDDTLH, KLHS)	%	60	80	32.212.000	90	32.373.060	100	32.534.925	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	40	60	1.859.403.000	70	1.868.700.015	80	1.878.043.515	80	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	%	40	60	1.250.260.000	70	1.256.511.300	80	1.262.793.857	80	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase cakupan pengendalian B3 dan LB3	%	40	60	16.545.000	70	16.627.725	80	16.710.864	80	Dinas Lingkungan Hidup

	Kode	:	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Тг	hun 2022	Тє	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pengendalian persetujuan lingkungan	%	40	60	45.257.000	70	45.483.285	80	45.710.701	80	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPPLH	Persentase sinkronisasi MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA dengan PPLH	%	40	60	0	70	0	80	0	80	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	%	40	60	13.250.000	70	13.316.250	80	13.382.831	80	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	%	40	60	23.350.000	70	23.466.750	80	23.584.084	80	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	%	40	60	36.808.000	70	36.992.040	80	37.177.000	80	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	%	40	60	182.610.000	70	183.523.050	80	184.440.665	80	
2	12		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											

	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Та	uhun 2022	Та	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai akta kelahiran	%	60	80	57.750.000	90	58.038.750	100	58.328.944	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP elektronik	%	60	80		90		100		100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase cakupan kepemilikan NIK	%	60	80		90		100		100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	3	Program Pencatatan Sipil	Rasio pasangan berakta nikah	%	60	80	285.200.000	90	286.626.000	100	288.059.130	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	%	60	80	2.295.739.000	90	2.307.217.695	100	2.318.753.783	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	%	40	50	85.336.000	70	85.762.680	100	86.191.493	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2	13	2	Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	60	80	28.490.000	90	28.632.450	100	28.775.612	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Kod	e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Тг	ıhun 2022	Тг	ahun 2023	Тг	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2 13	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kerjasama desa dengan pihak ketiga	%	60	80	1.006.727.000	90	1.011.760.635	100	1.016.819.438	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	2 13	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang menetapkan produk hukum desa	%	60	80	2.037.326.000	90	2.047.512.630	100	2.057.750.193	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Cakupan desa yang memiliki profil desa dan evaluasi perkembangan desa	%	60	80		90		100		100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	2 13	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase karang taruna aktif	%	60	80	1.526.059.000	90	1.533.689.295	100	1.541.357.741	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase peningkatan status desa mandiri	%	60	80		90		100		100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase LPM aktif	%	60	80		90		100		100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase PKK aktif	%	60	80		90		100		100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase posyandu	%	60	80		90		100		100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Kode	÷	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tε	ıhun 2022	Тг	ahun 2023	Тг	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14		Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana											
2	14	2	Program Pengendalian Penduduk	Persentase penyusunan dan pemanfaatan dokumen grand design pembangunan kependudukan (GDPK)	%	60	80	335.000.000	90	336.675.000	100	338.358.375	100	DP3AP2KB
				Profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	DOK	0	0		0		1		1	DP3AP2KB
2	14	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta akseptor KB	%	50	70	7.170.283.000	80	7.206.134.415	90	7.242.165.087	90	DP3AP2KB
				Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive prevalence rate (mCPR)	%	50	70		80		90		90	DP3AP2KB
				Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	%	50	70		80		90		90	DP3AP2KB
2	14	4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB	%	50	70	84.499.000	80	84.921.495	90	85.346.102	90	DP3AP2KB
				Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber- KB	%	50	70		80		90		90	DP3AP2KB
				Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber- KB	%	50	70		80		90		90	DP3AP2KB

	Kode	;	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Тε	ıhun 2022	Тє	ahun 2023	Tε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Beroperasinya pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R)	Unit	50	70		80		90		90	DP3AP2KB
				Unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	Unit	50	70		80		90		90	DP3AP2KB
2	15		Perhubungan											
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan pemenuhan trayek angkutan umum ke seluruh kecamatan	%	50	80	2.284.525.000	90	2.295.947.625	100	2.307.427.363		Dinas Perhubungan
				Cakupan jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	%	60	70		80		90			
2	15	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Intensitas pelayanan pelabuhan feri	kali	1	1	8.209.525.000	1	8.250.572.625	2	8.291.825.488		Dinas Perhubungan
2	16		Komunikasi dan Informatika											
2	16	2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	20	50	613.925.000	60	616.994.625	80	620.079.598	80	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	20	50		60		80		80	

	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Тг	nhun 2022	Tε	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	3	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	50	80	282.350.000	90	283.761.750	100	285.180.559	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi <i>e-</i> <i>government</i>	perbub	0	0		0		1		1	
				Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika	orang	25	50		60		70		70	
2	17		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah											
2	17	2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan koperasi simpan pinjam yang memiliki ijin	%	50	80	25.900.000	90	26.029.500	100	26.159.648	100	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Cakupan koperasi yang mendapat pembinaan	%	50	80	28.490.000	90	28.632.450	100	28.775.612	100	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Cakupan koperasi aktif	%	50	80	31.339.000	90	31.495.695	100	31.653.173	100	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Та	ıhun 2022	Тε	ahun 2023	Т	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17	5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Cakupan koperasi aktif	%	50	80	148.912.000	90	149.656.560	100	150.404.843	100	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan koperasi yang mendapat bantuan modal usaha	%	10	40	2.500.000.000	50	2.512.500.000	60	2.525.062.500	60	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	10	40	1.456.572.000	50	1.463.854.860	60	1.471.174.134	60	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	8	Program Pengembangan UMKM	Cakupan usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	10	30	31.339.000	35	31.495.695	40	31.653.173	40	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2	18		Penanaman Modal											
2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan nilai investasi di kabupaten	%	10	20	95.163.000	30	95.638.815	40	96.117.009	40	DPMPTSPTKT
2	18	3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	%	10	20	63.497.000	35	63.814.485	45	64.133.557	45	DPMPTSPTKT
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	50	80	290.068.000	90	291.518.340	100	292.975.932	100	DPMPTSPTKT

	Kode	:	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Та	uhun 2022	Та	ahun 2023	Ta	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan ketersediaan laporan/dokumen investasi penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku	%	50	80	392.223.000	90	394.184.115	100	396.155.036	100	DPMPTSPTKT
2	18	6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan ketersediaan data/informasi perijinan dan penanaman modal berbasis elektronik	%	50	70	35.422.000	80	35.599.110	90	35.777.106	90	DPMPTSPTKT
2	19		Kepemudaan dan Olahraga											
2	19	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	20	30	536.421.000	40	539.103.105	50	541.798.621	50	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	20	30		40		50		50	
2	19	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	%	0,4	1	1.810.626.000	1,5	1.819.679.130	2	1.828.777.526	2	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan- satuan pendidikan	%	30	50		60		70		70	
2	19	4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan perangkat daerah/sekolah yang membentuk organisasi kepramukaan	%	10	40	71.203.000	50	71.559.015	60	71.916.810	60	Dinas Pemuda dan Olahraga

	Kode	:	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Та	thun 2022	Та	ahun 2023	Ta	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	20		Statistik											
2	20	2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	50	80	132.914.000	90	133.578.570	100	134.246.463	100	
2	21		Persandian											
2	21	2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	50	80	43.400.000	90	43.617.000	100	43.835.085	100	
2	22		Kebudayaan											
2	22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	30	50	160.415.000	60	161.217.075	70	162.023.160	70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali		1	50.000.000	1	50.250.000	1	50.501.250	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase sanggar seni yang di bina	%	20	40		50		60		60	
2	22	4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	1	3	125.000.000	3	125.625.000	3	126.253.125	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	6	Program Pengelolaan Permuseuman	Cakupan revitalisasi sarana dan prasarana museum	%	30	80	100.000.000	90	100.500.000	100	101.002.500	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Тε	hun 2022	Tε	ahun 2023	Тε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	23		Perpustakaan											
2	23	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional perpustakaan	%	35	55	10.469.616.000	60	10.521.964.080	65	10.574.573.900	65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	N/A	1.000,00		1.000,00		1.000,00		3.000,00	
2	23	3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis yang dikelola dan dilestarikan	%	N/A	25	23.500.000	30	23.617.500	35	23.735.588	35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24		Kearsipan											
2	24	2	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	50	80	33.000.000	90	33.165.000	100	33.330.825	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	50	80		90		100		100	
2	24	3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Cakupan pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip	%	50	80	35.000.000	90	35.175.000	100	35.350.875	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3			Urusan Pemerintahan Pilihan											

	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Тг	ahun 2022	Τε	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25		Kelautan dan Perikanan											
3	25	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	N/A	2	4.659.895.000	2,5	4.683.194.475	3	4.706.610.447	3	Dinas Perikanan
3	25	3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	N/A	2,1	2.876.989.000	2,3	2.891.373.945	2,5	2.905.830.815	2,5	Dinas Perikanan
3	25	4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan pengawasan sumber daya perikanan	%	0	30	150.000.000	45	200.000.000	60	250.000.000	60	Dinas Perikanan
3	25	5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi ikan	Kg	1,30	3,50	250.000.000	4,00	280.000.000	4,50	300.000.000	4,50	Dinas Perikanan
3	26		Pariwisata											
3	26	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase jumlah pengembangan lokasi pariwisata	%	40	70	2.608.901.000	80	2.621.945.505	90	2.635.055.233	90	Dinas Pariwisata
3	26	3	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan arus kunjungan wisatawan dan pengetahuan wisatawan	%	2	4,3	182.956.000	4,7	183.870.780	5	184.790.134	5	Dinas Pariwisata
3	26	4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase cakupan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif dan produk yang mendapatkan perlindunginya hak kekayaan inteletual	%	30	60	26.883.000	80	27.017.415	100	27.152.502	100	Dinas Pariwisata

	Kode	:	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Тг	nhun 2022	Тг	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	26	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase cakupan ketersediaan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%	25	40	26.883.000	50	27.017.415	60	27.152.502	60	Dinas Pariwisata
3	27		Pertanian											
3	27	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani mendapat bantuan benih	%	60	80	11.425.879.000	90	11.483.008.395	100	11.540.423.437	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	2,5	4		4,5		5		5	
				Produktivitas padi per hektar	Ton/Ha	N/A	42,3		46,5		51,1		51,1	
				Produktivitas jagung per hektar	Ton/Ha	33,5	40,2		44,2		48,6		48,6	
				Cakupan ketersediaan benih unggul pertanian bersertifikat (padi dan jagung)	%	50	70		80		100		100	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan kelompok tani penerima sarana pendukung pertanian	%	40	50	2.215.895.000	60	2.226.974.475	70	2.238.109.347	70	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan persentase luas lahan pertanian fungsional produktif	%	N/A	8	8.189.427.000	9	8.230.374.135	12	8.271.526.006	12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Тғ	uhun 2022	Тғ	ahun 2023	Тғ	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan persentase perluasan dan pengembangan tanaman perkebunan unggulan	%	N/A	12,8	0	13,5		15		15	
3	27	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan persentase fasilitas wilayah/infrastruktur	%	N/A	7,5	345.158.000	8,5	346.883.790	10	348.618.209	10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan
3	27	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	%	N/A	80	2.057.856.000	90	2.068.145.280	100	2.078.486.006	100	Dinas Peternakan
3	27	5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)	%	N/A	80	279.722.000	90	281.120.610	100	282.526.213	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah	%	N/A	80	55.430.000	90	55.707.150	100	55.985.686	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	7	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan kelompok tani yang mendapat penyuluhan pertanian	%	50	80	2.995.596.000	90	3.010.573.980	100	3.025.626.850	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

	Kode	2	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Тє	ıhun 2022	Тг	ahun 2023	Tε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani lanjut menuju BUMP, (pada tahun 2024 mencapai 1500 kelompok tani)	%	N/A	33,33	842.324.000	66,67	846.535.620	100	850.768.298	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia di bidang peternakan	%	30	60	112.231.000	70	112.792.155	80	113.356.116	80	Dinas Peternakan
3	30		Perdagangan											
3	30	2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang beroleh ijin	%	30	60	18.599.000	70	18.691.995	80	18.785.455	80	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	30	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan revitalisasi pasar	%	50	70	12.929.000	80	12.993.645	90	13.058.613	90	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	30	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	60	80	35.089.000	90	35.264.445	100	35.440.767	100	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	30	6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	%	40	50	90.100.000	60	90.550.500	70	91.003.253	70	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

	Kode	:	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		ahun 2022 _		ahun 2023		ahun 2024 _	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
_	ı						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan produk unggulan lokal yang mendapat pengakuan	%	4	12	250.000.000	15	251.250.000	20	252.506.250	20	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
				Peta potensi dan peluang usaha yang dimanfaatkan	%	20	30		40		50		50	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	31		Perindustrian											
3	31	2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Presentase Ketersediaan dokumen Rencana Pembangunan Industri	%	0	80	1.394.681.000	90	1.401.654.405	100	1.408.662.677	100	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	31	3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten	%	20	40	10.915.000	50	10.969.575	60	11.024.423	60	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	31	4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten	%	20	80	12.470.000	90	12.532.350	100	12.595.012	100	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	32		Transmigrasi											
3	32	2	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan potensi sumber daya kawasan transmigrasi yang bertumbuh dan strategis	Kawasan			240.073.000		241.273.365		242.479.732	0	DPMPTSPTKT

	Kode	;	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Тг	thun 2022	Тє	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Optimalisasi lahan yang dicadangkan (Ha)	На								0	
3	32	3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	%			122.900.000		123.514.500		124.132.073	0	DPMPTSPTKT
3	32	4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kawasan trans binaan yang berkembang	Kimtrans	0	1	245.119.000	1	246.344.595	2	247.576.318	4	DPMPTSPTKT
				Jumlah peserta program transmigrasi yang mendapat pembinaan sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	КК	0	50		50		100		200	
4			Pendukung Urusan Pemer	intahan										
4	1		Sekretariat Daerah											
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor hasil EKPPD	%	2,3	2,6	468.640.375	2,8	470.983.577	3	473.338.495	3	Bagian Pemerintahan
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pengelolaan bina mental spiritual dan ASN	Keg	5	8	468.640.375	9	470.983.577	10	473.338.495	27	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketaatan terhadap propemperda	%	40	80	468.640.375	90	470.983.577	100	473.338.495	100	Bagian Hukum
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi kerjasama pemerintah daerah	%	60	80	468.640.375	90	470.983.577	100	473.338.495	100	Bagian Pemerintahan

	Kode	÷	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Ta	hun 2022	Тε	ahun 2023	Та	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas tata kelola perekonomian dan pembangunan	%	50	80	468.640.375	90	470.983.577	100	473.338.495	100	Bagian Perekonomian dan SDA
4	1	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	%	50	80	468.640.375	90	470.983.577	100	473.338.495	100	Bagian Perekonomian dan SDA
4	1	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE	%	60	80	468.640.375	90	470.983.577	100	473.338.495	100	Bagian Layanan Pengadaan
4	1	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terfasilitasinya pelaksanaan kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan, lingkungan hidup energi dan air	%	60	80	468.640.375	90	470.983.577	100	473.338.495	100	Bagian Perekonomian dan SDA
4	2		Sekretariat DPRD											
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi peran dan fungsi dewan	%	70	85	7.240.961.000	90	7.277.165.805	100	7.313.551.634	100	Sekretariat DPRD
				Persentase perda yang dibahas dan ditetapkan	%	70	85		90		100		100	
5			Penunjang Urusan Pemerintahan											
5	1		Perencanaan											
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat penyelesaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu	%	60	80	1.267.990.000	90	1.274.329.950	100	1.280.701.600	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		ahun 2022	Тғ	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	%	75	85	996.814.000	90	1.001.798.070	100	1.006.807.060	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2		Keuangan											
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas audit LKPD	Opini	WDP	WTP	7.141.648.614	WTP	7.177.356.857	WTP	7.213.243.641	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase SILPA terhadap APBD	%	9	6		5		4		4	
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang tercatat dalam KIB	%	60	80	1.056.878.000	90	1.062.162.390	100	1.067.473.202	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Cakupan bidang tanah milik pemda yang bersertifikat	%	40	50		60		74		74	
5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase piutang pajak yang tertagih	%	60	80	719.460.000	90	723.057.300	100	726.672.587	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase cakupan obyek pajak dan retribusi daerah	%	60	80		90		100		100	
5	3		Kepegawaian											
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemutakhiran data kepegawaian	%	60	80	3.848.795.000	90	3.868.038.975	100	3.887.379.170	100	BKPSDM
				Persentase jumlah pengadaan pejabat PT/PA/PP yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	60	80		90		100		100	
5	4		Pendidikan Dan Pelatihan											

	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tε	hun 2022	Тғ	ahun 2023	Ta	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	4	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti Diklat	%	40	55	2.435.452.000	60	2.447.629.260	70	2.459.867.406	70	BKPSDM
5	5		Penelitian Dan Pengembangan											
5	5	2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%	0	10	976.255.000	10	981.136.275	10	986.041.956	30	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase fasilitasi perangkat daerah yang melakukan inovasi	%	5	20		25		30		30	
6			Pengawasan Urusan Pemerintahan											
6	1		Inspektorat Daerah											
6	1	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan perangkat daerah yang diaudit	%	70	80	1.358.450.000	90	1.365.242.250	100	1.372.068.461	100	Inspektorat
				Dokumen/laporan yang direviu	%	70	80		90		100		100	
				Laporan kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	%	70	80		90		100		100	
				Cakupan APBDes yang diaudit	%	70	80		90	_	100		100	
				Peningkatan kapabilitas APIP	Orang	N/A	3		4		6		13	
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan pengaduan masyarakat yang ditangani	%	60	90	287.860.000	100	289.299.300	100	290.745.797	100	Inspektorat

	Kode	2	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Тг	hun 2022	Тє	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7			Kewilayahan											
7	1		Kecamatan											
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	50	80	8.945.652.000	90	8.990.380.260	100	9.035.332.161	100	Kecamatan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	%	40	60	4.509.008.000	70	4.531.553.040	80	4.554.210.805	80	Kecamatan
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	100	333.300.000	100	334.966.500	100	336.641.333	100	Kecamatan
8			Pemerintahan Umum											
8	1		Kesatuan Bangsa Dan Politik											
8	1	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	%	60	90	104.575.000	100	105.097.875	100	105.623.364	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kegiatan pembinaan politik di daerah	kegiatan	60	90	124.100.000	100	124.720.500	100	125.344.103	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tε	ahun 2022	Та	ahun 2023	Τε	ahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1	5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	%	60	90	0	100	0	100	0	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara	%	60	90	159.549.000	100	160.346.745	100	161.148.479	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



#### **BAB VIII**

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 8.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 – 2024, disajikan pada Tabel 8.1.

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 – 2024

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Sumba Barat Daya yang Maju, Berkualitas, Berdaya Saing, Demokratis dan Sejahtera"

Misi I : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sumba Barat Daya yang Maju dan Berkualitas, didukung Sarana dan Prasarana Kehidupan yang Layak dan Memadai

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Capaian		Target Tahu:	n	Kondisi pada akhir tahun Rencana
				(2020)	2022	2023	2024	
	Meningkatnya derajat pendidikan	Rata-rata lama sekolah,	Tahun	6,34	7,67	8,18	8,70	8,70
	masyarakat	Angka melek huruf	%					
		Usia harapan hidup	Tahun	68,53	69,57	70,08	70,60	70,60
	Meningkatnya derajat kesehatan	Prevelensi stunting	%	33,2	19,74	11,70	3,28	3,28
	masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%		100	100	100	100
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	TFR						
Meningkatkan taraf hidup Masyarakat	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan pembinaan pemuda dalam rangka meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri meningkat	%	20	30	40	50	50
SBD menuju masyarakat SBD yang		Peningkatan prestasi olahraga	%	0,4	1,00	1,50	2,00	2,00
maju dan berkualitas	Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin		54,96	55,23	55,65	55,65
		Rumah layak huni (%)	%		80,80	81,70	82,80	82,80
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air	Rumah tangga berakses air minum	%		68,00	72,00	76,00	76,00
	minum dan sanitasi	Rumah tangga menurut sanitasi layak	%	18,75	78,15	89,45	100	100
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penerangan/listrik	Cakupan desa berlistrik/bercahaya	%		78,85	87,75	100	100
	ternadap penerangan/ nsutk	Rasio elektrifikasi	%	62,80	78,85	87,75	100	100
	Meningkat ketangguhan bencana daerah	Indeks resiko bencana	Poin	138 (sedang)	138 (sedang)	138 (sedang)	138 (sedang)	138 (sedang)

	Misi II: Mew	ujudkan Pemerintahan yan	g Demokratis	, Akuntabel,	Bersih, Efektif	dan Terpercaya		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Capaian		Target Tahur	1	Kondisi pada akhir tahun Rencana
				(2020)	2022	2023	2024	
	Meningkatkan akuntabilitas	Indeks reformasi birokrasi	Poin					
	penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sistem informasi daerah	Skor nilai akuntabilitas kinerja	Poin		77,35	79,88	81,65	81,65
	dacran	Indeks SPBE	Poin	1,7	2,3	2,7	3	3
Meningkatkan tata	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan publik	Tingkat keterbukaan informasi publik	Predikat	Belum Informasif	Menuju informatif	Menuju informatif	Menuju informatif	Menuju informatif
kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan pelayanan publik	Poin		80	95	100	100
Repercayaan publik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang disetujui	%		75	80	85	85
	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan nilai patriotisme	Cakupan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika	%	60	90	100	100	100

	1	Misi III: Mewujudkan kehidupan n	nasyarakat S	umba Barat D	aya yang sejah	tera		
			_	Baseline		Target Tahuı	n	Kondisi pada
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian (2020)	2022	2023	2024	akhir tahun Rencana
	Hadirnya keadilan bagi perempuan untuk	Indeks pemberdayaan gender	Poin	65,34	66,43	67,75	68,00	68,00
Meningkatnya peran semua	berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender	Poin	97,62	97,90	98,04	98,18	98,18
penduduk dalam pembangunan daerah	Meningkatnya perlindungan	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	%		100	100	100	100
	terhadap perempuan dan anak	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%		4,66	5,75	6,17	6,17
	Tumbuhnya perekonomian daerah secara stabil dan	Pertumbuhan ekonomi	%	0,10	4,28	5,01	5,68	5,68
	berkelanjutan	PDRB per kapita	Juta		12,24	12,87	13,49	13.49
	Meningkatnya ketersediaan,	Skor pola pangan harapan (SPPH)						
Mewujudkan masyarakat	aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan	Nilai tukar petani (NTP)	Ribu		52,2	52.4	52.6	52.6
Sumba Barat Daya yang sejahtera	Terciptanya lapangan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,36	1,86	1,61	1,36	1,36
	Berkurangnya kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	%	28,00	24,00	22,00	20,00	20,00
	Terjaminnya perlindungan bagi penduduk miskin dan PMKS	Persentase penduduk miskin dan PMKS lainnya yang terakses perlindungan sosial	%		80,00	81,00	83,00	83,00

	Meningkatnya kualitas dan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam dalam kondisi mantap	%		70,00	74,00	78,00	78,00
	aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung	Jembatan dalam kondisi baik	%		81,01	91,01	100	100
Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas	konektivitas daerah	Cakupan pemenuhan trayek angkutan umum ke seluruh kecamatan	%	50	80	90	100	100
dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi dan pengairan dalam mendukung perekonomian daerah	Cakupan daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%		71,74	75,11	78,45	78,45
	Berkembangnya pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	7.662	11.137	13.364	16.037	16.037
	daerah dan pelestarian budaya untuk mendukung pertumbuhnya perekonomian	Lama tinggal wisatawan	hari	2	3	4	4	4

#### 8.2 Indikator Kinerja Kunci

Penetapan Indikator Kinerja Daerah/Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024, disajikan pada Tabel 8.2

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah/Kunci terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 – 2024

No	mor	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Tarş	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja
NO	11101	Pembangunan Daerah	pada Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	pada Akhir Periode RPJMD
	1	2	3	4	5	6	7
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Cakupan penyusunan renstra dan renja perangkat daerah (%)	50	100	100	100	100
		Cakupan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100
		Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan pelayanan administrasi umum (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan peningkatan disiplin aparatur (%)	100	100	100	100	100
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1	1	<u>Pendidikan</u>					
		Cakupan Pendidikan anak usia dini (PAUD) (%)	55,56	68,06	72,83	77,93	77,93
		Angka Partisipasi sekolah (APS) SD/MI/paket a (%)	95	97,01	97,69	98,37	98,37
		Angka Partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/paket b (%)	63,85	66,77	67,77	68,78	68,78
		Angka Partisipasi murni (APM) SD/MI/paket a (%)	95	97,01	97,69	98,37	98,37

N	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Tar	get Capaian Setiap Ta	ıhun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Nomor	Pembangunan Daerah	RPJMD	2022	2023	2024	RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
	Angka Partisipasi murni (APM) SMP/MTs/paket b (%)	63,85	66,77	67,77	68,78	68,78
	Nilai rata-rata hasil ujian akhir nasional SD/MI	61,67	71,39	74,96	78,71	78,71
	Nilai rata-rata hasil ujian akhir nasional SMP /MTs	55,53	64,28	67,5	70,87	70,87
	Angka putus sekolah (APTs) SD/MI (%)	1,73	1,06	0,9	0,77	0,77
	Angka putus sekolah (APTs) SMP/MTs (%)	3,74	2,3	1,95	1,66	1,66
	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	93,79	96,63	97,6	98,57	98,57
	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA (%)	93,8	97,22	98,38	99,56	99,56
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs)	45	38	37	37	37
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs) / 10.000 penduduk	429	362	333	306	306
	Persentase sekolah berakreditasi a (%)	2,77	6,87	8,2	9,51	9,51
	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	64,17	77,82	97,28	100	100
	Cakupan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar (%)	0	45	60	75	75
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	65,84	76,22		84,03	84,03
	Cakupan PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin (%)	95	98	99	100	100
1 2	<u>Kesehatan</u>					
	Cakupan kunjungan ibu hamil k4 (%)	70	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan nifas (%)	70	100	100	100	100
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	70	100	100	100	100

N	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Tar	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
Nomor	Pembangunan Daerah	pada Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	70	100	100	100	100
	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	48	0	0	0	0
	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6	0	0	0	0
	Cakupan pelayanan anak balita (%)	70	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	70	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin (%)	70	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	70	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)	50	100	100	100	100
	Cakupan pengembangan lingkungan sehat (%)	50	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (%)	80	100	100	100	100
	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah (%)	65	100	100	100	100
	Cakupan pelaksanaan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	60	100	100	100	100
	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kab/kota	80	100	100	100	100
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	100	100	100	100	100
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	80	100	100	100	100
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	50	100	100	100	100
	Cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	100	100
	Rasio posyandu per satuan balita	17	22	24	27	27

D.T.		Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Targ	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja
IN	omor	Pembangunan Daerah	pada Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	pada Akhir Periode RPJMD
	1	2	3	4	5	6	7
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,1	0,09	0,1	0,11	0,11
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,006	0,0079	0,0087	0,0095	0,0095
		Cakupan tenaga kesehatan bersetifikat kompetensi (%)	90	100	100	100	100
		Rasio dokter per satuan penduduk	0,068	0,091	0,1	0,11	0,11
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,098	0,13	0,143	0,157	0,157
		Cakupan promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat (%)	50	100	100	100	100
		Cakupan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat (%)	50	100	100	100	100
1	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
		Persentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	49,42	50,72	52,02	53,32	53,32
		Terbangunnya bangunan pengaman pantai (lokasi)	0	1	2	3	3
		Terbangunnya sarana untuk penyediaan air baku (unit)	10	10	15	20	20
		Terbangunnya sarana untuk pengendali banjir (unit)	0	10	0	1	2
		Presentase penduduk berakses air minum (%)	19,66	100	100	100	100
		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS terbangun (unit)	1	0	0	2	2
		Panjang saluran drainase terbangun dalam kondisi baik (m)	14.422	14.422	15.422	16.422	16.422
		Panjang trotoar dalam kondisi baik (m)	0	0	1.000	2.000	2.000
		Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik (km)	1	0	2	2	2
		Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang direkomendasikan (dokumen)	284	404	524	644	644

No	mor	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Tarş	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
INO	11101	Pembangunan Daerah	RPJMD	2022	2023	2024	RPJMD
	1	2	3	4	5	6	7
		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	62,2	63,5	64,8	66,1	66,1
		Persentase jalan desa strategis dalam kondisi baik (%)	5,17	8,07	10,97	13,87	13,87
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik (%)	79,5	80,5	81	81,5	81,5
		Jumlah tenaga terampil konstruksi bersertifikat	20	20	25	30	30
		Jumlah KKPR yang diterbitkan (dokumen)	284	404	524	644	644
1	4	Perumahan dan Kawasan Permukiman					
		Jumlah warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	100	100	100	100
		Jumlah warga yang terkena relokasi akibat program pemda yang mendapat fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	100	100	100	100
		Cakupan rumah layak huni (%)	79,1	100	100	100	100
		Persentase rumah tangga pengguna listrik (%)	62,16	68	72	76	76
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	85,14	85,2	85,22	85,24	85,24
1	5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
		Tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan penegakan perda (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	51,67	60	80	100	100
1	6	Sosial					

NI -		Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Targ	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
INC	mor	Pembangunan Daerah	RPJMD	2022	2023	2024	RPJMD
	1	2	3	4	5	6	7
		Cakupan komunitas adat terpencil (KAT) yang diberdayakan (%)	16,67	97	16,67	33,33	33,33
		PMKS yang tertangani (%)	76,39	80	80	83	83
		KK miskin yang terdata dan terverifikasi (%)	0	12,77	12,77	15,97	15,97
		Korban bencana yang menerima bantuan sosial (%)	100	100	100	100	100
		Jumlah warga korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	0	100	100	100	100
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2	7	Tenaga Kerja					
		Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	10	30	40	50	50
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	76,69	80,35	81,4	82,5	82,5
		Tingkat pengangguran terbuka	1,01	0,9	0,85	0,8	0,8
		Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	20	35	40	45	45
		Pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (%)	20	35	40	45	45
2	8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
		Cakupan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG (%)	5	60	79	100	100
		Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	3,19	3,71	3,88	4,05	4,05
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43
		Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	99,43	99,43	99,43	99,43	99,43
		Cakupan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak (%)	0,65	1,24	1,52	1,8	1,8

No	mor	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Targ	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
INC	omor	Pembangunan Daerah	RPJMD	2022	2023	2024	RPJMD
	1	2	3	4	5	6	7
2	9	<u>Pangan</u>					
		Ketersediaan pangan utama:					
		Padi (ton)	41,693	44,245	45,13	46,033	221,313
		Jagung (ton)	95,361	98,251	99,233	100,226	491,303
		Ubi kayu (ton)	16,999	17,514	17,689	17,866	87,578
		Cakupan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan (%)	0	84,62	92,31	100	100
2	10	<u>Pertanahan</u>					
		Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	0	2	2	2	10
		Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah (%)	0	50	0	0	100
		Tersedianya pemetaan zona nilai tanah (%)		20	20	20	100
2	11	<u>Lingkungan Hidup</u>					
		Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD dan RPJMD (dokumen)	1	0	0	0	1
		Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR, RPJPD dan RPJMD	2	0	1	2	5
		Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTR (dokumen)	1	0	0	0	0
		Indeks kualitas lingkungan hidup	54,5	54,96	55,23	55,65	55,65
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut (lokasi)	0	20	25	30	30

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Tarş	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Nomor	Pembangunan Daerah	RPJMD	2022	2023	2024	RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat (dokumen)	2	2	2	2	2
	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) (%)	0	70	80	85	85
	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 (ijin)	0	1	1	1	3
	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan (ijin)	0	0	0	0	0
	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH (dokumen)	129	190	210	230	230
	Pengawasan usaha dan kegiatan dan atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin (PPLH) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota	129	15	15	15	15
	Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH (MHA)	0	0	1	1	
	Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA terkait dengan PPLH (MHA)		0	1	1	2
	Cakupan pendampingan gerakan peduli lingkugan hidup (pelatihan)		0	1	1	2
	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (kegiatan)	1	1	1	1	1

NT.		Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Targ	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja
No	mor	Pembangunan Daerah	pada Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	pada Akhir Periode RPJMD
	1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah pengaduan masyarakat terhadap (PPLH) kabupaten kota yang diselesaikan	2	0	2	2	6
		Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	1 Perbubjakstrada pengelolaan sampah	0	0	0	0
		Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali (ton)	0	100	150	200	450
		Cakupan pelaksanaan 3R					
		Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota (ton)	0	32.868	33.066	33.259	33.259
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan (kelompok)	0	0	0	0	0
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (TPS 3R)	0	0	0	0	0
		Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan (perusahaan)	0	1	1	2	4
2	12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
		Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	87,71	93,71	95,72	97,74	97,74
		Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (%)	0	12,4	16,54	20,68	20,68
		Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	14,42	19,23	20,83	22,43	22,43
		Rasio pasangan berakte nikah (%)	34,89	43,64	46,09	48,33	48,33
		Cakupan penerbitan akta kematian (%)	51,85	57,83	59,63	61,27	61,27
		Database kependudukan skala kabupaten (%)	50,21	65	70	75	75

NI -	omor	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Targ	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
INC	omor	Pembangunan Daerah	pada Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	RPJMD
	1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah lembaga pengguna data kependudukan	34	79	94	109	109
		Persentase pertumbuhan jumlah penduduk (%)	0,2	0,4	0,45	0,5	0,5
2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	87	95	98	100	100
		Cakupan bumdes aktif					
		Persentase desa yang berkinerja baik terhadap penangan <i>stunting</i>	0	50	75	100	100
		Cakupan desa yang menetapkan produk hukum desa (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan desa yang memiliki profil desa dan evaluasi perkembangan desa (%)	22	25	31	39	45
		Rata - rata jumlah kelompok binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	0	15	15	15	15
		Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	30	60	70	75	75
		Cakupan peningkatan jumlah industri rumah tangga perdesaan yang menggunakan teknologi tepat guna	30	10	10	10	60
		Cakupan desa yang memiliki kelompok usaha ekonomi yang produktif	29	81	90	100	100
2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	2,24%	1,68	1,63	1,58	1,58
		Ratio akseptor KB (%)	51,28	81	91	100	100
	_	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	60,71	75	80	100	100

NI -	mor	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Targ	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja
INO	mor	Pembangunan Daerah	pada Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	pada Akhir Periode RPJMD
	1	2	3	4	5	6	7
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	25,06	17	14	10	10
		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	5,5	30	40	50	50
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	51	81	91	100	100
		Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB (%)	25	60	80	100	100
		Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB (%)	25	60	80	100	100
		Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB (%)	25	60	80	100	100
		Cakupan desa yang membentuk kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bina keluarga balita) (BKB), bina keluarga remaja (BKR), pusat informasi dan koseling remaja (PIK-R) bina keluarga lansia (BKL), unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	25	70	80	100	100
2	15	<u>Perhubungan</u>					
		Cakupan jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan (%)	45	75	85	100	100
		Jumlah terminal penumpang tipe c yang dibangun	0	0	0	0	1
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	0	584.454	587.454	591.454	2.346.816
		Rasio ijin trayek	73	100	110	120	120
		Jumlah uji KIR angkutan umum	543	703	759	814	814
		Jumlah angkutan darat yang melaksanakan aktivitas bongkar muat di pelabuhan (unit)	0	8.400	9.600	10.800	10.800
		Cakupan kepemilikan KIR angkutan umum (%)	30%	40%	20%	0	0

NI -		Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Targ	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
INO	mor	Pembangunan Daerah	RPJMD	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7
		Cakupan pelayanan jasa kebandarudaraan (%)	0	95	95	95	95
2	16	Komunikasi dan Informatika					
		Tersedianya website pemda (%)	100	100	100	100	100
		Indeks SPBE					
		Penerapan <i>e-goverment</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (%)	0	100	100	100	100
2	17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					
		Cakupan koperasi simpan pinjam yang memiliki ijin (%)	60	79	89	100	100
		Cakupan koperasi yang mendapat pembinaan (%)	15	100	100	100	100
		Cakupan koperasi aktif (%)	46	56	61	66	66
		Cakupan pengurus koperasi yang mendapat pelatihan (%)	8	65	65	65	65
		Cakupan koperasi yang mendapat akses pembiayaan (%)	0	40	45	60	60
		Cakupan usaha mikro dan kecil (%)	27	40	46	52	52
		Cakupan usaha mikro dan kecil yang diberdayakan (%)	28	46	54	63	63
2	18	Penanaman Modal					
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	13	16	17	18	93
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)	18.000.000.000	24.000.000.000	27.000.000.000	28.000.000.000	121.000.000.000
		Kenaikan / penurunan nilai realisasi pmdn (milyar rupiah)	139.000.000.000	250.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	1.220.000.000.000
		Cakupan promosi penanaman modal (%)	40	70	75	80	80
		Cakupan perijinan yang dilimpahkan ke PTSP (%)	80	95	100	100	100

D.T.		Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Tarş	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
INC	omor	Pembangunan Daerah	pada Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7
		Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah (%)	40	70	80	90	90
		Cakupan perizinan dan non perizinan yang dilakukan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (%)	60	100	100	100	100
2	19	Kepemudaan dan Olahraga					
		Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	4	4	7	11	11
		Cakupan wirausaha muda (%)	8	0	8	10	10
		Cakupan pembinaan olahraga (%)	50	50	57	60	60
		Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	7	7	13	20	47
		Jumlah atlet berprestasi	30	15	15	15	75
		Jumlah prestasi olahraga	30	15	15	15	75
		Jumlah cabang olahraga pelajar yang dilaksanakan	30	60	64	68	68
		Cakupan perangkat daerah/sekolah yang membentuk organisasi kepramukaaan (%)	0	20	20	25	90
		Persentase sarana dan prasarana olahraga		10	15	20	20
2	20	<u>Statistik</u>					
		Cakupan penerbitan buku "Kabupaten Dalam Angka" (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan penerbitan buku "PDRB" (%)	100	100	100	100	100
2	21	<u>Persandian</u>					
		Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (%)	0	100	100	100	100

NI.		Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Targ	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
INC	omor	Pembangunan Daerah	RPJMD	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7
		Tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	0	100	100	100	100
2	22	Kebudayaan					
		Cakupan kampung adat yang direvitalisasi (%)	0	7,49	18,18	34,22	34,22
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	1	1	1
		Cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	11	25	30	30	30
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (%)	0	25	30	45	45
		Cakupan revitalisasi sarana dan prasarana museum (%)	0	38	45	50	50
2	23	<u>Perpustakaan</u>					
		Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	200	400	500	600	2.160
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1.326	1.909	2.291	2.749	10.131
		Cakupan naskah kuno yang dilestarikan dan didayagunakan (%)	0	35	45	60	60
2	24	<u>Kearsipan</u>					
		Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	0	30	50	70	70
		Cakupan kegiatan peningkatan sdm pengelola kearsipan (%)	0	35	45	60	60
		Cakupan pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip (%)	0	30	50	70	70
		Cakupan perangkat daerah menetapkan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup (%)	0	35	45	60	60
3		Urusan pemerintahan pilihan					
3	25	Kelautan dan Perikanan					

D.T.		Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Tar	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja
ING	omor	Pembangunan Daerah	pada Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	pada Akhir Periode RPJMD
	1	2	3	4	5	6	7
		Produksi perikanan tangkap (ton)	556,47	631,91	663,51	696,68	696,68
		Cakupan bina kelompok nelayan (%)	0	30	45	60	60
		Nilai tukar nelayan (Rp)	0	1.092.000	1.125.000	1.159.000	1.159.000
		Produksi perikanan budidaya (ton)	12	27	32	37	37
		Cakupan bina kelompok budidaya perikanan (%)	0	30	45	60	60
		Cakupan pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	0	30	45	60	60
		Konsumsi ikan (kg)	1,3	3,5	4	4,5	4,5
3	26	<u>Pariwisata</u>					
		Cakupan lokasi wisata yang dikembangkan (%)	25	42	50	58	58
		Jumlah kunjungan wisatawan	8.679	11.137	13.364	16.037	16.037
		Lama tinggal	2	3	4	4	4
		Cakupan Desa Wisata aktif					
		Cakupan prasarana kota kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi (%)	13	78	100	100	100
		Cakupan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelatihan pengembangan kompetensi (%)	11	48	62	75	75
3	27	<u>Pertanian</u>					
		Cakupan kelompok tani penerima sarana pendukung pertanian (%)	43,05	77	89	100	100
		Cakupan kelompok usaha peternakan yang di bina (%)	100	100	100	100	100
		Jumlah bantuan benih yang diberikan kepada kelompok tani (kg)	31.500	62.500	75.000	87.500	344.000

NI -		Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Targ	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
NO	mor	Pembangunan Daerah	pada Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah kelompok ternak penerima bantuan sarana prasarana peternakan dan ternak (kelompok)	16	22	22	22	22
		Produktivitas padi per hektar (%)	2,84	3,5	3,8	4	4
		Produktivitas jagung per hektar (%)	3,1	3,7	4	4	4
		Produktivitas produksi ternak (%)	2,5	3	3	3	3
		Jumlah populasi ternak	399.069	457.202	478.511	500.868	500.868
		Produksi tanaman perkebunan	16.359	16.868	16.868	16.868	16.868
		Pertumbuhan PDRB	5,05	6	6,31	6,62	6,62
		PDRB per kapita	10.294.463	12.244.400	12.867.500	13.490.600	13.490.600
		Nilai tukar petani	51.012	52.200	52.400	52.600	52.600
		Luasan daerah pertanian (Ha)	51.012	52.200	52.400	52.600	52.600
		Luasan daerah perkebunan utama (Ha)	16.359	16.868	16.868	16.868	16.868
		Cakupan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan (%)	79,01	80	80	80	80
		Cakupan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (%)	60	80	100	100	100
		Jumlah penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah	100	100	100	100	100
		Cakupan kelompok tani yang mendapat penyuluhan pertanian (%)	100	100	100	100	100
3	30	Perdagangan					
		Cakupan fasilitasi perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan (%)	38	50	100	100	100

NI -		Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Targ	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
INC	mor	Pembangunan Daerah	pada Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7
		Cakupan revitalisasi pasar (%)	0	31,25	62,5	100	100
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	90	40	60	80	80
		Cakupan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten (%)	0	100	100	100	100
		Cakupan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang (%)	52,3	65	70	75	75
		Persentase kegiatan promosi penggunaan produk dalam negeri (%)	3	5	6	7	7
3	31	<u>Perindustrian</u>					
		Penyusunan dokumen rencana pembangunan industri (%)	0	100	100	100	100
		Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	30	70	80	90	90
		Jumlah kegiatan publikasi data informasi industri kabupaten	0	100	100	100	100
3	32	<u>Transmigrasi</u>					
		Jumlah lahan yang dicadangkan untuk pengembangan kawasan transmigrasi (Ha)	250	200	100	200	970
		Jumlah KK penduduk setempat dan transmigran yang diikutsertakan dalam program transmigrasi $\%$	100	100	100	100	400
		Jumlah peserta program transmigrasi yang mendapat pembinaan sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman %	100	100	100	100	500
4		Unsur pendukung urusan pemerintahan					
4	1	Sekretariat Daerah					

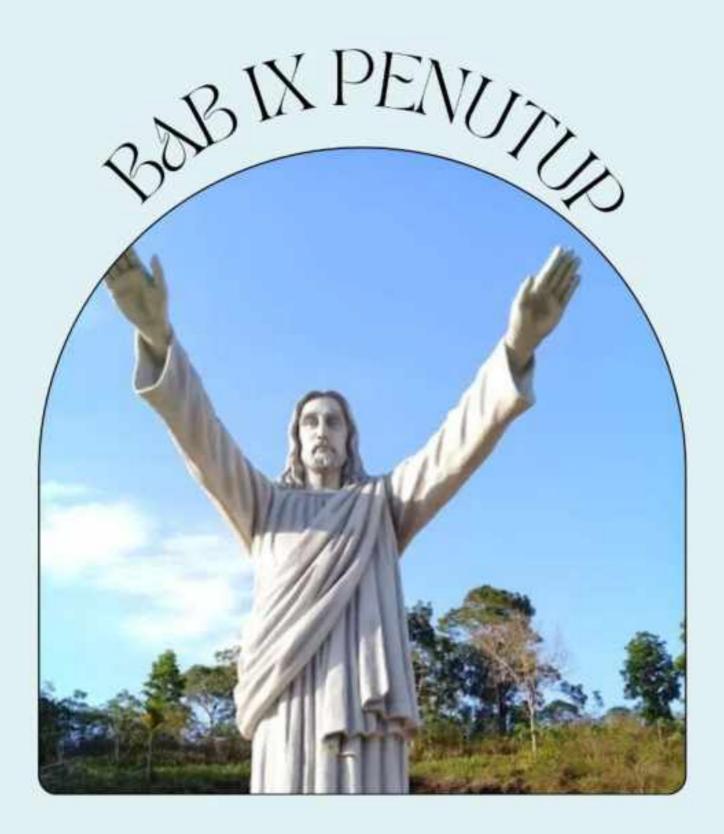
NI	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Tarş	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Nomor	Pembangunan Daerah	pada Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
	Cakupan kegiatan penataan administrasi pemerintahan (%)	70	85	90	95	95
	Jumlah kegiatan penataan wilayah (kecamatan)	0	3	3	4	10
	Peringkat hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	19	10	8	5	3
	Cakupan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual (%)	100	100	100	100	100
	Jumlah fasilitasi penyusunan produk hukum daerah (Ranperda)	100	25	30	35	35
	Jumlah fasilitasi bantuan hukum (kasus)	100	25	30	35	35
	Cakupan fasilitasi kerja sama dalam/luar negeri (%)	0	98	99	99	99
	Jumlah anak desa yang mendapat bantuan beasiswa pendidikan sarjana (orang)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Terlaksananya penataan wilayah kecamatan	11	3	0	0	14
	Terlaksananya penataan wilayah kelurahan	2	3	3	0	10
	Cakupan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah (%)	0	98	99	99	99
	Cakupan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan (%)	0	100	100	100	100
	Cakupan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui LPSE (%)	20	100	100	100	100
	Cakupan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup serta kebijakan energi dan air (%)	0	90	95	100	100
	Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%)	100	100	100	100	100
	Skor hasil evaluasi SAKIP (LAKIP) pemerintahan daerah	37,66	77,35	79,88	81,65	81,65

NI -	mor	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Targ	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
NC	omor	Pembangunan Daerah	RPJMD	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7
		Cakupan pelaksanaan tugas komunikasi pimpinan (%)	30	60	80	95	95
		Cakupan pelaksanan keprotokoleran (%)	30	60	80	95	95
		Indeks kepuasan masyarakat	0,95	80	95	100	100
		Cakupan pendokumentasian tugas pimpinan (%)	30	60	80	95	95
		Cakupan fasilitasi pengelolaan keuangan setda (%)	95	100	100	100	100
4	2	Sekretariat DPRD					
		Cakupan penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan dprd (%)	98,31	100	100	100	100
		Adanya dokumen propemperda (%)	80	100	100	100	100
		Jumlah perda yang dibahas dan ditetapkan	32	6	6	6	62
		Cakupan anggota DPRD yang mendapat bimbingan teknis (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan pokok-pokok pikiran DPRD yang diintegrasikan dalam RKPD (%)	65	65	65	65	65
		Cakupan kunjungan kerja dalam daerah (%)	100	100	100	100	100
5		Unsur penunjang urusan pemerintahan					
5	1	Perencanaan					
		Cakupan kegiatan pemenuhan standar pelayanan minimal (%)	0	100	100	100	100
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	2	2	2	2	2
		Cakupan program usulan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	60	75	80	85	85

NI -		Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Targ	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
INC	omor	Pembangunan Daerah	pada Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7
		Cakupan penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan (%)	100	100	100	100	100
5	2	<u>Keuangan</u>					
		Jumlah dokumen penganggaran daerah yang ditetapkan	4	6	6	6	6
		Opini BPK atas audit LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase SILPA terhadap APBD (%)	9,55	7,93	7,46	7,01	7,01
		Cakupan aset daerah yang tercatat dalam KIB (%)	100	100	100	100	100
		Jumlah bidang tanah milik pemda yang bersertifikat	489	50	50	74	274
		Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	4,01	5,27	5,28	5,4	5,4
5	3	Kepegawaian					

NI -		Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Targ	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
NC	omor	Pembangunan Daerah	pada Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7
		Penyusunan dokumen analisis kebutuhan, formasi (jumlah dokumen)	25	3	3	3	3
		Pelaksanaan pengadaan ASN (%)		100	100	100	100
		Jumlah ASN yang berprestasi	26	60	65	70	70
5	4	Pendidikan dan Pelatihan					
		Persentase PNS yang bersertifikat kompetensi (%)	40	70	79	90	90
5	5	Penelitian dan Pengembangan					
		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	3	3	3	3	15
6		Unsur pengawasan urusan pemerintahan					
6	1	Inspektorat Daerah					
		Cakupan perangkat daerah yang diaudit (%)	30	45	65	78	78
		Cakupan pemenuhan program kerja pengawasan tahunan (%)	87	100	100	100	100
		Jumlah dokumen/laporan yang direviu	100	100	100	100	100
		Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	100	100	100	100	100
		Cakupan APBDes yang diaudit (%)	20	80	90	100	100
		Cakupan pengaduan masyarakat yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
7		Unsur kewilayahan					
7	1	Kecamatan					
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa (%)	100	100	100	100	100

N	omor	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Targ	get Capaian Setiap Ta	hun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
IN	OIIIOI	Pembangunan Daerah	RPJMD	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7
		Angka kriminalitas yang tertangani (%)	42,75	75	85	100	100
		Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI (%)	100	100	100	100	100
		Cakupan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (%)	100	100	100	100	100
8		Unsur pemerintahan umum					
8	1	Kesatuan Bangsa dan Politik					
		Cakupan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan (%)	75	90	95	100	100
		Cakupan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah (%)	75	90	95	100	100
		Cakupan Ormas di wilayah kabupaten yang terdaftar (%)	37,5	75	87,5	100	100
		Cakupan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah (%)	75	90	95	100	100
		Cakupan kegiatan pembinaan kehidupan dan kerukunan beragama (%)	75	90	95	100	100
		Cakupan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah (%)	75	90	95	100	100



### **BAB IX**

#### **PENUTUP**

#### 9.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024, merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dan sebagai dokumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan 5 (Lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut maka akan ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- Bupati dan Wakil Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2019 – 2024 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah
- Bupati dan Wakil Bupati, berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2019 - 2024 kepada masyarakat
- Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berkewajiban untuk melaksanakan program - program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD tahun 2019 – 2024 bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha serta masyarakat
- 4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2020 2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2019 2024 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
- 5. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2019 2024 berpedoman pada RPJMN tahun 2020 2024, Perubahan RPJMD Provinsi NTT tahun 2018 2023 dan RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 2025 sehingga terwujud sinergisitas, keterpaduan, kolaborasi dan sinkronisasi pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya

- 6. Penyusunan RKPD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2019 2024, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2022 sampai tahun 2024
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2019 – 2024

#### 9.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini menjadi penting dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta mengantisipasi agar tidak terjadi kevakuman perencanaan pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD tahun 2025 pada saat belum adanya RPJMD baru, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2009 - 2025, RPJPD Propinsi NTT tahun 2005 - 2025, RKP tahun 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

RKPD tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya akan melaksanakan penyusunan RKPD tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang - undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud suatu perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD tahun 2025 yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum tertangani sampai dengan tahun 2024, selain menjawab isu - isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan lain-lain.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024, sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, dan seluruh lapisan masyarakat.







"Loda Wee Maringi Pada Wee Malala"

## PERUBAHAN RPJMD 2019 - 2024

### KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Badan Perencansan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

> Jl. Ir. Soekarno No. 1, Kadula Tambolaka, Sumba Barat Daya Email: bapelitbangdasbd@gmail.com

Dokumen Perencanaan SBD: https://bit.ly/3D1msQm

HTTPS://SBDKAB.GO.ID/